



Perspektif Lanskap Kelola Sendang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Exsiting, Potensi SDA dan Arah Kebijakan



Penulis:
Yetty Hastiana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku merupakan program konsorsium yang dikoordinasi oleh *Zoological Society of London* (ZSL). Proyek ini dimulai sejak 2016 untuk fase awal, kemudian di awal 2017 mulai melakukan intervensi di level Provinsi Sumatera Selatan dan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tujuan akhir dari kemitraan ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara pengurangan *deforestasi* dan *restorasi* lahan gambut, dan mendukung upaya ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan ini berlandaskan atas kerangka kerja kolaboratif mulai dari proses perencanaan dan aksi diantara pengelola lanskap, terutama dalam mengatasi permasalahan terkait dengan: keanekaragaman hayati, konservasi, pencegahan kebakaran hutan, restorasi lahan gambut, *livelihood* yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas. Kompleksitas isu sosial, ekonomi dan ekologi seperti *illegal logging*, penyusutan luas lahan gambut, kebakaran hutan, banjir, manajemen konflik terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengurangan tingkat kemiskinan. Proyek Kelola Sendang ini akan menunjukkan transformasi praktik pelaksanaan bisnis secara umum dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan menuju pengelolaan lanskap berkelanjutan, misalnya dalam hal: urun saran kebijakan pemerintah terkait perencanaan pertumbuhan hijau dalam perencanaan program dan anggarannya, mengajak perusahaan untuk berkomitmen menerapkan transparansi dan praktik baik dalam produksi dan rantai pasok produksinya melalui program *traceability*, penguatan petani, dan lainnya.

Dokumen Perspektif Lanskap Kelola Sendang berbasis baseline dan kondisi eksisting kawasan ini disusun setelah melalui proses pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari: komponen pelaksana proyek di internal ZSL, mitra Kelola Sendang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pengelola kawasan/lahan, sektor swasta, masyarakat dan komunitas yang relevan. Kajian dokumen merujuk dan merujuk pada hasil temuan selanjutnya dianalisis diarahkan pada 4 (empat) dimensi yang menjadi fokus assesmen, yaitu: **(1) Dimensi Livelihood; (2) Dimensi Produksi; (3) Dimensi Konservasi; (4) Dimensi Institusi dan Tata Kelola**. Selain 4 dimensi yang menjadi fokus assesmen, terdapat bagian *knowledge management* yang memiliki output penyusunan data informasi dan sistem pembelajaran bersama untuk pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Tujuan penyusunan **Perseptif Lanskap Kelola Sembilang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan** untuk menghasilkan suatu *frame up* kawasan dan mendapat gambaran utuh kondisi terkini di wilayah kerja Kelola Sendang-ZSL, gambaran tersebut nantinya dijadikan rujukan sebagai referensi awal untuk merancang implementasi program kegiatan sekaligus sebagai informasi pembanding pasca selesainya intervensi proyek. Lebih jauh lagi Baseline ini akan menjadi salah satu parameter dalam proses pemantauan terhadap indikator yang telah ditetapkan dan mendapat pengaruh dari intervensi program kegiatan. Sasaran dari penyusunan dokumen ini adalah:

1. Tersusunnya suatu *frame up* lanskap Kelola Sendang untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi terkini, potensi sumberdaya alam, isu strategis serta sejauh mana arah kebijakan menjadi rujukan dalam pengelolaan kawasan Kelola Sendang.
2. Arahan awal dalam merancang instrumen tata kelola dan instrumen pemantauan implementasi project Kelola Sendang.
3. Referensi dalam merancang pola implementasi program kegiatan.
4. Parameter alternatif untuk memantau dan mengukur indikator capaian.
5. Rujukan dalam menyusun mekanisme dan sistem manajemen kawasan: *Planning, Organizing, Directing (human, money, material, mechanism, method, market), dan Controlling*.

Ruang lingkup kajian dalam dokumen ini secara umum meliputi kajian terhadap: analisis kondisi eksisting kawasan, analisis potensi SDA kawasan, analisis kendala, ancaman, tantangan dan peluang, analisis arahan dan kebijakan, analisis baseline kawasan dan analisis isu strategis kawasan. Kajian dalam dokumen ini diarahkan untuk memberikan gambaran kondisi capaian dari kondisi batas awal sampai menghasilkan suatu *out put* dan *out come* berdasarkan 4 dimensi utama Project Kelola Sendang dengan indikator penyusunnya, yaitu: a) *livelihood*/mata pencaharian; b) produksi; c) konservasi; d) institusi dan tata kelola.

Pada saat baseline asesmen dilakukan, beberapa outcome indikator capaian yang dapat terpantau, seperti:

- a. Institusi yang berinteraksi dengan proyek ini adalah pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang mendukung untuk penyusunan struktur dan kebijakan sebagai payung hukum proyek ini. Di level kabupaten, proyek ini memberikan pengaruhnya yang signifikan untuk isu SLM dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2017-2022.
- b. Bagi KPH, KPH Lalan Mendis dan Lalan Sembilang terbantu untuk penyusunan rencana bisnis di areanya. Bagi KPH Meranti, proyek ini membantu untuk penyusunan RPHJpd tahun 2017. KPH Meranti berharap mendapatkan bantuan untuk penyusunan rencana bisnis untuk kawasannya

Berdasarkan data wawancara, diperoleh informasi yang berharga untuk dimanfaatkan sebagai langkah ke depan yang dapat dipertimbangkan oleh proyek ini, meliputi rencana untuk internal terkait konten program dan bagaimana proyek ini dilaksanakan dengan lebih baik, komunikasi dan strategi dengan pihak eksternal, dan potensi kerjasama yang dapat dilakukan dalam kerangka **Proyek Kelola Sendang**. Secara umum, capaian output proyek akan memberikan manfaat dan dampak bagi stakeholders jika dibangun sinergisitas kerjasama antar komponen dengan mitra pelaksana melalui komunikasi efektif dengan stakeholders.

PRAKATA

Dokumen ***Perspektif Lanskap Kelola Sendang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan*** merupakan suatu bentuk analisis kajian awal dalam mendesign Project Program Kelola Sendang di Kawasan Administratif Provinsi Sum-Sel terkhusus bagi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Dokumen ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengukur dan memantau target capaian, baik dari tataran teknis, tataran design konseptual maupun dalam mengkaji isu strategis terkait pengelolaan kawasan konservasi pada ekosistem lahan basah tropis di Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah tersedianya arahan dasar yang realistis, logis dan komprehensif dalam memahami potret “Lanskap Kelola Sendang”. Proses pemahaman ini idealnya merujuk pada hasil kajian dan studi analisis, sehingga dalam praktiknya dapat memenuhi prinsip dan standar pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan kawasan. Dokumen ini memberikan data, informasi dan arahan dalam mengimplementasikan program intervensi pengelolaan kawasan hutan pada ekosistem lahan basah dengan keragaman kondisi yang menyertainya. Keragaman kondisi ini terintegrasi dalam bentuk potensi kawasan, kendala dan permasalahan, peluang dan tantangan, intervensi kebutuhan, maupun konflik kepentingan. Dokumen ini menjadi arahan terselenggaranya pengelolaan kawasan lanskap yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi keberlangsungan pola penghidupan (*livelihood*), produksi (*production*), konservasi (*conservation*) dan tata kelola kelembagaan (*institution*).

Ruang Lingkup dokumen ini meliputi aspek sosial ekonomi budaya, ekologi, kehutanan, dan produksi. Semua data baik untuk data primer maupun sekunder diperoleh melalui pendekatan metode ilmiah berdasarkan hasil studi, research maupun kajian referensi ilmiah.

Terimakasih atas fasilitasi dan kontribusi para pihak: internal ZSL, Dinas terkait (BPKH Wilayah II Palembang, Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, KPHP Meranti, KPHP Lalan Mangsang Mendis, KPH Lalan Sembilang, Dinas Kehutanan Provinsi SumSel, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Muba dan Banyuasin, Dinas LHK Kabupaten Muba dan Banyuasin), *Project Supervisory Unit Project Implementing Unit KELOLA Sendang*, team Survei dan Observasi Baseline, Tenaga Ahli, Tim Pakar dan semua pihak yang secara langsung maupun tak langsung telah membantu. Semoga dokumen ***Perspektif Lanskap Kelola Sendang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan*** ini bermanfaat dalam membangun sistem tata kelola kawasan ekosistem lahan basah yang berkelanjutan.

Mengetahui,

Prof. Damayanti Buchori, Ph.D, M.Sc

Palembang, Februari 2019
Researcher Team

Dr. Yetty Hastiana, M.Si.
Dr. Sukanto, SE.

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODELOGI.....	3
A. Ruang Lingkup.....	3
1. Ruang Lingkup Kajian.....	3
2. Ruang Lingkup Wilayah	3
3. Ruang Lingkup Waktu Penyusunan Dokumen.....	4
B. Metodologi dan Pendekatan.....	4
1. Pola Pendekatan	4
2. Kebutuhan dan Jenis Data.....	5
3. Tahapan Kegiatan	5
4. Komposisi Tim Penyusun	6
BAB III. DESKRIPSI LANSKAP, KONDISI EKSISTING DAN POTENSI SDA-LINGKUNGAN KAWASAN KELOLA SENDANG	7
A. Deskripsi Lanskap	7
1. Deskripsi Lanskap Kawasan Kelola Sendang Secara Umum.....	7
2. Deskripsi Lanskap Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Wilayah Kelola Hutan	12
B. Kondisi Umum Aspek BioGeofisik dan Karakteristik Kawasan Kelola Sendang	15
1. Kondisi Fisik	15
a. Topografi	16
b. Daerah Aliran Sungai	17
c. Ekoregion	18
d. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG).....	21
e. Tutupan Lahan	22
2. Keanekaragaman Hayati pada Kawasan Kelola Sendang	27
a. Tipe-tipe Ekosistem Alami.....	27
b. Beberapa Spesies Penting	29
3. Peruntukan Lahan Kawasan Hutan dan Perkebunan.....	32
a. Kawasan Hutan	32
1) Kawasan Hutan Produksi.....	32
2) Kawasan Hutan Lindung.....	33
3) Kawasan Konservasi.....	33
a) Balai Taman Nasional Berbak Sembilang.....	33
b) Suaka Margasatwa Bentayan	36
c) Suaka Margasatwa Dangku	37
b. Kawasan Perkebunan.....	39
C. Kondisi dan Karakteristik Spesifik Kawasan Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)	40
1. Flora dan Fauna	40
2. Jenis Tanah dan Karakteristik Geologi	40
a. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu dan Tengah, Meliputi Kawasan Hutan Meranti dan Lalan MangsangMendis (LMM) dan Sekitarnya.....	40
b. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir Meliputi Kawasan Kelola Hutan Lalan	

Sembilang (LS) dan Sekitarnya	42
3. Topografi	44
4. Iklim	45
5. Hidrologi dan Karakteristik DAS	47
6. Aksesibilitas Kawasan Hutan	48
D. Potensi Kawasan Kelola Sendang Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)	52
1. Potensi Wilayah Kelola Sendang (Hulu), Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya.....	52
a. Penutup Vegetasi.....	53
b. Potensi Kayu.....	54
1) Potensi Kayu di Hutan Alam.....	54
2) Potensi Kayu di Hutan Tanaman.....	55
3) Potensi Kayu di Wilayah Tertentu.....	56
c. Potensi Hutan Non Kayu	58
d. Keberadaan Flora dan Fauna Langka.....	58
1) Keberadaan Flora Langka	58
2) Keberadaan Fauna Langka	58
e. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	60
2. Potensi Wilayah Kawasan Kelola Sendang (Bagian Tengah), Wilayah Kawasan Hutan Lalan Mendis Mangsang dan Sekitarnya	60
a. Informasi Penutupan Vegetasi	61
b. Potensi Hasil Hutan Kayu	62
c. Hasil Hutan Bukan Kayu.....	63
d. Keberadaan Flora dan Fauna Langka.....	63
e. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	66
3. Potensi Wilayah Kawasan Kelola Sendang (Hilir), Wilayah Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya.....	67
a. Potensi Penutupan Vegetasi.....	68
b. Potensi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.....	69
1) Hasil Hutan Kayu	69
2) Hutan Rawa	69
3) Hutan Mangrove	74
4) Hasil Hutan Bukan Kayu.....	76
c. Keberadaan Flora dan Fauna Langka.....	76
E. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Kawasan Kelola Sendang Secara Umum.....	77
1. Kondisi Dinamika Kependudukan	77
2. Kondisi Tingkat Pendidikan.....	78
3. Kondisi Aset dan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan	80
4. Mata Pencarian.....	81
5. Komoditi Utama Pertanian	83
1) Karet.....	83
2) Kelapa Sawit	85
3) Kopi	87
4) Kelapa	89
5) Padi	90
6) Perikanan Lebak Lebung.....	91
7) Peternakan	93
6. Perekonomian Wilayah	94
1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	94
2) Pertumbuhan Ekonomi	96
3) Infastruktur	97
4) Kemiskinan.....	99
5) Angka Kerja dan Tingkat Pengangguran.....	99
F. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Kawasan Sembilang Dangku (Kelola Sendang) Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)	101

1. Masyarakat Kawasan Kelola Sendang Hulu, Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti Sako Suban Lubuk Bintialo dan Sekitarnya	101
a. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	101
1) Aspek Ketenagakerjaan	101
2) Aspek Sarana Prasarana Perekonomian	101
3) Aspek Tingkat Kesejahteraan.....	102
b. Kondisi Sosial Masyarakat.....	103
1) Aspek Kependudukan	103
2) Aspek Pendidikan.....	103
3) Aspek Kesehatan	104
4) Aspek Keagamaan	105
c. Kondisi Budaya Masyarakat.....	106
1) Kondisi Masyarakat Adat.....	106
2) Kondisi Budaya dan Tata Nilai Hutan.....	107
2. Masyarakat Kawasan Sendang Kelola Bagian Tengah, Wilayah Kawasan Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya.....	108
a. Kondisi Sosial Kependudukan.....	108
b. Kondisi Sosial Budaya.....	111
c. Pendidikan.....	112
d. Kesehatan	113
e. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.....	114
3. Masyarakat Kawasan Sendang Kelola Hilir, Wilayah Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya.....	115
a. Kondisi Sosial Kependudukan	115
b. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian).....	115
c. Pendidikan	116
d. Sarana dan Prasarana Perekonomian Masyarakat	117
e. Kesehatan	119
f. Sosial Budaya Masyarakat	120
g. Agama Masyarakat.....	121
h. Bahasa Mayoritas	122
i. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	123
j. Aksesibilitas	123
G. Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan	123
1. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti, Sako Suban Lubuk Bintialo dan Sekitarnya.....	123
a. Izin dan Pencadangan Pemanfaatan Hutan	124
b. Izin dan Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan	124
2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Kelola Sendang Bagian Tengah, Wilayah Kelola Hutan Lalan Mendis Mangsang dan Sekitarnya	126
a. Izin-izin Pencadangan pemanfaatan hutan.....	126
1) Hutan Taman Industri (HTI)	127
2) IUPHHK Hutan Alam dan Jasa Lingkungan.....	128
3) Hutan Desa.....	129
4) Hutan Tanaman Rakyat (HTI).....	129
b. Izin-izin dan Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan.....	129
3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Kelola Sendang Bagian Hilir, Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya.....	131
a. Izin Pencadangan Pemanfaatan Kawasan Hutan	131
b. Izin Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan	131
BAB IV. ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN KENDALA KAWASAN KELOLA SENDANG	132
A. Isu Strategis dan Permasalahan Umum Kawasan Kelola Sendang	132
1. Konflik Pemanfaatan Lahan	133
2. Pembalakan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin	135

3. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan.....	136
4. Degradasi Ekosistem Sungai dan Rawa	137
5. Konflik Antara Manusia dan Satwa.....	139
6. Produktivitas Pertanian Rendah	140
7. Nilai Tambah Komoditi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	142
Rendah.....	142
8. Fliktuasi Harga Komoditi Utama	142
9. Rendahnya Variasi Produk Pertanian	142
10. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi	143
11. Tingkat Pendidikan Masih Rendah.....	144
12. Akses Sumber Daya Lahan Masyarakat	144
13. Pemenuhan Infrastruktur Dasar	145
B. Isu Strategis dan Permasalahan Kawasan Kelola Sendang Berdasarkan Batas Wilayah (Hulu, Tengah dan Hilir).....	146
1. Wilayah Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo, dan Sekitarnya.....	146
a. Deforestasi dan Degradasi Lahan	146
b. Lahan Kritis	148
c. Kerawanan Kebakaran Lahan dan Hutan.....	149
d. Perambahan Hutan dan Lahan	150
e. Pembalakan Liar	152
2. Pada Kawasann Kelola Sendang Bagian Tengah Wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis (LMM) dan Sekitarnya	153
a. Tingkat Kekritisn Lahan Kawasan Hutan	153
b. Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	154
c. Tingkat Kerawanan Penebangan Liar.....	155
d. Tingkat Kerawanan Perambahan Lahan.....	156
e. Keberadann dan Komitmen Pemegang Izin	156
3. Pada Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir, Meliputi: Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya.....	157
C. Tantangan, Peluang, Kendala dan Permasalahan Kawasan Kelola Sendang.....	158
1. Tantangan.....	158
a. Pembentukan Hutan Normal.....	158
b. Realisasi Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan.....	158
c. Kontribusi Kawasan Kelola Hutan Terhadap Daerah	158
d. Peran Kawasan Kelola Hutan Terhadap Kesejahteraan Rakyat.....	159
2. Peluang	159
a. Kerjasama Pendanaan dengan Pihak Ketiga.....	159
b. Kerjasama Pengelolaan dengan Pihak Ketiga.....	160
3. Kendala.....	160
a. Kepastian Batas Kawasan	160
b. Inergisitas Para Pihak antara Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	160
c. Komitmen Pemegang Izin	160
4. Permasalahan.....	161
BAB V. ARAHAN KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF PENGELOLAAN BERKELANJUTAN KAWASAN KELOLA SENDANG	164
A. Arahan Kebijakan Terkait Tata Kelola Lanskap Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	164
1. Pendekatan Lanskap dalam Rencana Pembangunan	165
2. Pendekatan Lanskap dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.....	166
3. Pendekatan Lanskap dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati.....	167
4. Pendekatan Lanskap dalam Tata Kelola Pemerintah	167
5. Inovasi Kebijakan Daerah Pendukung Pendekatan Lanskap.....	168

6. Kebijakan dan Agenda Strategis.....	170
a. Pemulihan Ekosistem dan Pengurangan Emisi	170
b. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	170
c. Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	171
d. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Kolaborasi Antar Pihak	172
B. Perspektif Pengelolaan Kawasan Kelola Sendang dari Aspek Peran Strategi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah	172
1. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kelola Hutan Meranti, Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya.....	172
a. Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	172
b. Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah Provinsi.....	174
c. Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang dalam Perspektif Tata Ruang Kabupaten dan Pembangunan Daerah Kabupaten yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	174
2. Kawasan Kelola Sendang Bagian Tengah Wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya	176
a. Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah	176
b. Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang dalam Perspektif Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	176
3. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir Meliputi Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya.....	177
a. Posisi dan Peran Strategis Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah (Nasional) dan Perspektif Rencana Kehutanan Nasional (RKTN)	177
b. Posisi dan Peran Strategis Kawasan dalam Perspektif Pembangunan Daerah.....	178
c. Dukungan Regulasi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan di Kawasan Kelola Sendang.....	179
BAB VI. ANALISIS AWAL KAWASAN SENDANG KELOLA	
A. Analisis Baseline Kawasan	181
1. <i>Aspek Pola Penghidupan (livelihood) Sosial Ekonomi Budaya.....</i>	<i>181</i>
a. Kondisi Umum SosekBud Kawasan Kelola Sendang.....	181
1) Gambaran Umum Lanskap Sembilang Dangku	181
2) Demografi.....	181
3) Infrastruktur Fisik.....	182
a) Jalan.....	182
b) Pendidikan dan Kesehatan.....	184
4) Mata Pencaharian	185
a) Karet	185
b) Kelapa Sawit.....	186
c) Padi.....	187
d) Perikanan Lebak Lebung.....	187
e) Peternakan	189
5) Kemiskinan	189
6) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran	190
b. Kondisi Eksisting Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat di Kawasan Kelola Sendang berdasarkan Unit Analisis Daerah Aliran Das (DAS) Kawasan	191
1) Etnisitas	191
2) Jumlah Anggota Rumah Tangga	191
3) Struktur Nafkah	192
4) Aset.....	193
a) Aset Fisik.....	194
b) Aset Finansial.....	195
5) Pendapatan dan Pengeluaran	195

6) Akses ke Kredit	197
7) Akses Informasi.....	198
8) Kelembagaan, Kerjasama dan Konflik	198
a) Kelembagaan Pemerintah Desa	198
b) Organisasi/kelompok	193
c) Kerjasama dengan pihak lain	198
d) Konflik	199
9) Akses Sumberdaya Lahan Masyarakat.....	200
10) Peran Gender.....	201
c. Permasalahan Lanskap Sembilang Dangku	202

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Desa dan Kecamatan di Wilayah Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin sebagai Area Intervensi Kelola Sendang	12
Tabel 3.2 Jenis Primata dan Status Konservasinya di Sumatera Selatan	30
Tabel 3.3 Jenis Tanah di Wilayah Kawasan Kelola Hutan Lalan Sembilang	42
Tabel 3.4 Geologi di Wilayah Kawasan Lala Sembilang Kabupaten Banyuasin	44
Tabel 3.5 Data Curah Hujan bulanan dan Hari Hujan Perbulan di Banyuasin	47
Tabel 3.6 Kondisi Akses Jalan Antar Desa di Kawasan Kelola Sendang	51
Tabel 3.7 Rencana Pembagian Blok di Kawasan Kelola Hutan Produksi Meranti	52
Tabel 3.8 Luas Penutupan Vegetasi di Kawasa Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti	53
Tabel 3.9 Potensi Pohon Diameter 20 cm ke Atas di Bagian Hulu Kelola Sendang	55
Tabel 3.10 Realisasi Tanaman IUPHHK-HT Bagian Hulu Kelola Sendang Wilayah Meranti	55
Tabel 3.11 Kondisi Tutupan Lahan Bagian Hulu Kelola Sendang Wilayah Meranti	56
Tabel 3.12 Potensi Kayu di Wilayah Tertent Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti	57
Tabel 3.13 Potensi Non Kayu di Areal Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti	58
Tabel 3.14 Potensi Fauna di Kawasan Sembilang Dangku Bagian Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	59
Tabel 3.15 Potensi Flora di Kawasan Sembilang Dangku Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	59
Tabel 3.16 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di Kawasan Kelola Sendang Hulu Kawasan Hutan Meranti	60
Tabel 3.17 Luas Presentasi Pembagian Blok pada Kawasan Sembilang Dangku Bagian Tengah Wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis (LMM)	61
Tabel 3.18 Luas dan Presentasi Tutupan Lahan Tahun 2011	61
Tabel 3.19 Potensi Kayu yang Berasal dari IUPHHK-HT Kawasan Kelola Sendang Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti	62
Tabel 3.20 Daftar Jenis Vegetasi Penting dan Dilindungi yang Ditemukan	64
Tabel 3.21 Spesies Mamalia Penting di HRG Merang-Kepayang	65
Tabel 3.22 Daftar Spesies Burung yang Ditemukan di Kawasan Kelola Sendang Tengah	65
Tabel 3.23 Luasan dan Presentasi Kalsifikasi Tata Hutan	68
Tabel 3.24 Korelasi Tata Hutan, Kelas Hutan dan Kelas Perusahaan	68
Tabel 3.25 Luas Penutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Sembilang Dangku	69
Tabel 3.26 Potensi Kayu Strata Pohon Hutan Rawa Wilayah Lalan Sembilang	69
Tabel 3.27 Potensi Kayu Strata Pohon Hutan Rawa Wilayah Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Lalan Sembilang	72
Tabel 3.28 Rekapitulasi Jumlah Anakan, Sapihan dan Tiang (Ha) di Hutan Rawa Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Lalan Sembilang	74
Tabel 3.29 Potensi Kayu Pada Strata Pohon di Areal Hutan Mangrove Wilayah Lalan Sembilang	75
Tabel 3.30 Rekapitulasi Jumlah Anakan, Sapihan dan Tiang (Ha) di Hutan Mangrove Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang	75
Tabel 3.31 Daftar Jenis Tumbuhan dan Status Perlindungan di Kawasan Kelola Sendang bagian Hilir Wilayah Lalan Sembilang	76
Tabel 3.32 Daftar Jenis Satwa dan Status Perlindungan di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang	77
Tabel 3.33 Jumlah Rumah Tangga di Sekitar kawasan Hutan Menurut Jenis Perizinan	81
Tabel 3.34 Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Sumber Penghasilan Utamanya dan Status Pekerjaan	82
Tabel 3.35 Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin	92
Tabel 3.36 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Sektor Usaha Kabupaten Banyuasin	95
Tabel 3.37 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Sektor Usaha Kab. MUBA	96

Tabel 3.38 Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kegiatan	100
Tabel 3.39 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten.....	100
Tabel 3.40 Kondisi Tenaga kerja di kabupaten Musi Banyuasin	101
Tabel 3.41 Jumlah Sarana Perdagangan di Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	102
Tabel 3.42 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.....	102
Tabel 3.43 Kondisi Indeks Pembangunan manusia di kabupaten MUBA	102
Tabel 3.44 Jumlah Penduduk di kecamatan Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hulu wilayah Kelola Hutan Meranti	104
Tabel 3.45 Jumlah fasilitas Pendidikan di Kecamatan Sekitar Kawasan Hutan Meranti.....	104
Tabel 3.46 Jumlah Penderita Penyakit di Kecamatan Sekitar Kawasan Meranti.....	105
Tabel 3.47 Jumlah Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga di Kecamatan Sekitar Meranti ...	105
Tabel 3.48 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	106
Tabel 3.49 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di dalam dan Sekitar KPHP.....	108
Tabel 3.50 Sumber Penghasilan Setiap Desa Pada Wilayah Lalan Mendis Angsang.....	109
Tabel 3.51 Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan Kelola Sendang Wilayah LMM ...	110
Tabel 3.52 Status Lahan Pemukiman Penduduk Setiap Desa	111
Tabel 3.53 Luas Penggunaan Lahan dari Setiap Desa Pada Wilayah LMM	112
Tabel 3.54 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Setiap Desa Pada Wilayah LMM	113
Tabel 3.55 Sarana Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan dari Setiap Desa	114
Tabel 5.56 Jumlah dan kepadatan Penduduk di Sekitar lalan Sembilang	115
Tabel 3.57 Sarana Pendidikan di Sekitar Desa Sekitar Kawasan Hutan Lalan Sembilang.....	117
Tabel 3.58 Banyaknya Akomodasi Warung makan, dan Toko Kelontong di Desa Sekitar Hutan KPHP Unit II Lalan Sembilang	118
Tabel 3.59 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Banyuasin II	119
Tabel 3.60 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Banyuasin II	119
Tabel 3.61 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang di Anut dari Desa Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah kelola Hutan Lalan Sembilang	121
Tabel 3.62 Jumlah saranan Ibadah Dari Desa Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang Kabupaten Banyuasin.....	122
Tabel 3.63 Pemanfaatan Kawasan Untuk IUPHHK di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Hutan Meranti	125
Tabel 3.64 IPPKH dalam Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Hutan Meranti	126
Tabel 3.65 Daftar Pemegang IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan LLM	128
Tabel 3.66 Daftar Jenis Pemanfaatan Hutan Pada Blok Pemberdayaan	129
Tabel 3.67 Pemegang KP/IUP di Kawasan Kelola Hutan LMM.....	130
Tabel 3.68 Izin Pemanfaatan Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang.....	131
Tabel 4.1 Deforestasi dan Degradasi Lahan yang Terjadi di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti (Tahun 200-2011).....	147
Tabel 4.2 Tingkat Kekritisn Lahan di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti dan Sekitarnya	148
Tabel 4.3 Khusus Perambahan Hutan oleh Masyarakat di Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	150
Tabel 4.4 Lokasi Tumpang Tindih Areal Perkebunan di dalam Wilayah Meranti	152
Tabel 4.5 Tingkat dan Luas Lahan Kritis di Wilayah Lalan Mangsang Mendis tahun 2007	153
Tabel 4.6 Tingkat dan Luas Lahan Kritis di Wilayah LMM tahun 2010	153
Tabel 4.7 Kelas Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lalan di Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Mangsang Mendis.....	154
Tabel 4.8 Laju Peningkatan Lahan Kritis	162
Tabel 5.1 Arahan Penggunaan Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Meranti Dan sekitarnya Berdasarkan RKTN.....	173
Tabel 5.2 Arahan Peruntukan Lahan Sesuai RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang.....	177
Tabel 5.3 Beberapa Regulasi Merujuk pada Pengelolaan Kawasan Kelola Sendang	

Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	179
Tabel 6.1 Sarana Pendidikan dan Kesehatan di Lanskap Sembilang Dangku	184
Tabel 6.2 Profil Lanskap Sembilang Dangku Berdasarkan DAS	192

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Posisi Lanskap Sembilang Dangku dalam Provinsi Sumatera Selatan	7
Gambar 3.2 Rasio Luas Wilayah Kecamatan pada Lanskap Sembilang-Dangku	8
Gambar 3.3 Peta Penggunaan Lahan pada Lanskap Sendang	9
Gambar 3.4 Rasio Penggunaan Lahan di Lanskap Sembilang Dangku.....	9
Gambar 3.5 Penggunaan Lahan berdasarkan Peruntukan dan Status Hutan.....	10
Gambar 3.6 Peta Area Kerja dan Intervensi Desa Proyek Kelola Sendang di Wilayah Kabupaten Banyuasin dan MUBA Provinsi Sumatera Selatan	11
Gambar 3.7 Pola Landscape Kawasan Kelola Sendang, di Bagian Hulu dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Meranti.....	13
Gambar 3.8 Pola Landscape Kawasan Kelola Sendang di Bagian Tengah, dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Lalan Mangsang Mendis.....	14
Gambar 3.9 Beberapa Landscape Kawasan Kelola Sendang di Bagian Hilir dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Lalan Sembilang	15
Gambar 3.10 Peta Kemiringan Lereng Lanskap Sembilang Dangku	16
Gambar 3.11 Peta Sudut Kemiringan Lahan pada Kawasan Lanskap Sembilang Dangku.....	16
Gambar 3.12 Peta Ketinggian Kawasan Lanskap Sembilang Dangku	17
Gambar 3.13 Peta Kawasan Hutan pada Paparan DAS Musi.....	17
Gambar 3.14 Peta DAS pada Lanskap Sembilang Dangku	18
Gambar 3.15 Peta Ekoregion Sumatera.....	19
Gambar 3.16 Peta Indikatif Prioritas Restorasi Provinsi Sumatera Selatan	21
Gambar 3.17 Peta Perubahan Tutupan Lahan Lanskap Sembilang Dangku (2000-2015).....	22
Gambar 3.18 Peta Tutupan Lahan Area Kelola Sendang 2014.....	23
Gambar 3.19 Peta Perubahan Tutupan Lahan Lanskap Sembilang Dangku (1990-2016).....	23
Gambar 3.20 Pola Kecenderungan Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan Kelola Sendang dari 1990 Sampai 2016	24
Gambar 3.21 Peta Pola DAS dan Lahan Kritis pada Kawasan Kelola Sendang	25
Gambar 3.22 Lahan Kritis di Dalam Konsesi di Area Lanskap Sendang	25
Gambar 3.23 Lahan Kritis di Luar Konsesi Area Lanskap Sendang.....	26
Gambar 3.24 Prioritas Restorasi Gambut BRG di Area Lanskap Sendang.....	26
Gambar 3.25 Batas Area Konsesi Hutan dan Perusahaan Konsesi di Kawasan Sembilang Dangku	26
Gambar 3.26 Peta Kawasan Hutan di Lanskap Sembilang Dangku.....	32
Gambar 3.27 Peta Zonasi Taman Nasional Berbak Sembilang	35
Gambar 3.28 Kondisi Kehidupan Warga Masyarakat di Susun Sei Sembilang	36
Gambar 3.29 Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis.....	37
Gambar 3.30 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan	37
Gambar 3.31 Peta Kawasan Kelola Sendang Hulu dengan Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti	38
Gambar 3.32 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Dangku.....	38
Gambar 3.33 Peta Kondisi Geologis di Kawasan Kelola Sendang Hulu dan Tengah, Wilayah Kawasan Hutan Meranti, Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya	42
Gambar 3.34 Peta Tanah di Kawasan Kelola Sendang Hulu dan Tengah, Wilayah Kawasan Hutan Meranti, Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya.....	42
Gambar 3.35 Kondisi Kelerengan pada Area Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu, Kawasan Kelola Hutan Meranti dan Sekitarnya.....	45
Gambar 3.36 Peta Kelerengan Kawasan Kelola Sendang Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin	45
Gambar 3.37 Kondisi Iklim di Kawasan Kelola Sendang	46
Gambar 3.38 Peta DAS Kelola Sendang.....	47
Gambar 3.39 Peta Akses Pada Beberapa Wilayah di Kawasan Kelola Sendang	49
Gambar 3.40 Peta Akses pada Beberapa Wilayah di Kawasan Kelola Sendang.....	50
Gambar 3.41 Peta Jaringan Jalan di Kawasan Sembilang Dangku	51

Gambar 3.42 Peta Tata Hutan di Wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti Wilayah Kelola Sendang	52
Gambar 3.43 Proporsi Luas Blok di Kawasan Hutan Produksi Meranti	53
Gambar 3.44 Peta Pola Umum Penutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang	54
Gambar 3.45 Peta Tutupan Lahan untuk Menggambarkan Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Kelola Sendang	54
Gambar 3.46 Peta Izin Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan Kelola Sendang	56
Gambar 3.47 Potensi Kayu pada Wilayah Tertentu di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	57
Gambar 3.48 Peta Pemegang Konsesi Potensi Kayu pada Wilayah Tertentu di Kawasan Kelola Sendang	57
Gambar 3.49 Perkembangan Jumlah Penduduk pada Lanskap Sembilang Dangku	77
Gambar 3.50 Laju Pertumbuhan Penduduk Lanskap Sembilang Dangku	78
Gambar 3.51 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyuasin	79
Gambar 3.52 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Musi Banyuasin	79
Gambar 3.53 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Menguasai Lahan Kawasan Hutan Menurut Golongan Luas Lahan (Ha) di Sumsel	80
Gambar 3.54 Karakteristik Mata Pencaharian Penduduk 3 Desa Lanskap Sendang	82
Gambar 3.55 Kondisi Tanaman Karet pada Lanskap Sembilang Dangku	83
Gambar 3.56 Perkembangan Produksi Getah Karet di Lanskap Sendang	84
Gambar 3.57 Sebaran Luas Tanaman Karet pada Lanskap Sendang	84
Gambar 3.58 Kecenderungan Perubahan Harga Karet Dunia (USD/kilogram)	85
Gambar 3.59 Kondisi Tanaman Sawit Rakyat pada Lanskap Sembilang Dangku	85
Gambar 3.60 Dinamika Produksi TBS Rakyat pada Lanskap Sendang	86
Gambar 3.61 Dinamika Produktivitas TBS Rakyat pada Lanskap Sendang	86
Gambar 3.62 Sebaran Kebun Sawit Rakyat pada Lanskap Sendang 2012-2016	86
Gambar 3.63 Kecenderungan Perubahan Harga Sawit (USD/Metric Ton)	87
Gambar 3.64 Luas Kopi Rakyat Berdasarkan Kondisi Tanaman pada Lanskap Sendang	87
Gambar 3.65 Produksi Kopi Rakyat pada Lanskap Sendang	88
Gambar 3.66 Produktivitas Kopi Rakyat	88
Gambar 3.67 Dinamika Harga Kopi Dunia	88
Gambar 3.68 Kondisi Tanaman Kelapa di Lanskap Sendang	89
Gambar 3.69 Potensi Kelapa di Lanskap Sendang	89
Gambar 3.70 Produksi Kopra di Lanskap Sendang	90
Gambar 3.71 Luas dan Produksi Padi di Lanskap Sendang	90
Gambar 3.72 Sebaran Luas Area Padi Sawah/Lebak di Lanskap Sendang	91
Gambar 3.73 Produktivitas Padi di Lanskap ending	91
Gambar 3.74 Produksi Perikanan Lanskap Sendang	93
Gambar 3.75 Jumlah Ternak Besar di Area Lanskap Sembilang Dangku	93
Gambar 3.76 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin	94
Gambar 3.77 Distribusi PDRB Setiap Sektor Kab. Musi Banyuasin dan Banyuasin	94
Gambar 3.78 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin	97
Gambar 3.79 Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan Kab. Banyuasin Tahun 2016	98
Gambar 3.80 Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan Kab. Musi Banyuasin	98
Gambar 3.81 Persentase Penduduk Miskin di Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin	99
Gambar 3.82 Lahan Penghidupan Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Hutan dan di Wilayah Perairan Kawasan Hilir Kelola Sendang Wilayah Lalan Sembilang	116
Gambar 3.83 Sarana Pendidikan di Desa Sekitar Wilayah Lalan Sembilang	117
Gambar 3.84 Warung di Desa Sekitar Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang	118
Gambar 3.85 Fasilitas dan Sarana Layanan Publik di Desa Sekitar Wilayah Lalan Sembilang	119
Gambar 3.86 Sarana Kesehatan di Desa sekitar Wilayah Lalan Sembilang	120
Gambar 3.87 Sarana Peribadatan di Desa Sekitar Wilayah Lalan Sembilang	122
Gambar 3.88 Sarana Perhubungan antar Desa di Kawasan Hilir Kelola Sendang	123
Gambar 3.89 Peta Tata Hutan di Kawasa Kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Mangsang Mendis	127
Gambar 3.90 Peta Pemegang KP/IUP Pertambangan di Wilayah LMM	130

Gambar 4.1	Peta Peruntukan dan Status Hutan dalam Kawasan Kelola Sendang	132
Gambar 4.2	Peta Batasan Wilayah Berdasarkan Areal Konsesi dalam Kawasan Kelola Sendang	133
Gambar 4.3	Peta Konflik Lahan di Taman Nasional Sembilang	134
Gambar 4.4	Perambahan di Kawasan Suaka Marga Satwa Dangku	134
Gambar 4.5	Alur Jaringan <i>Illegal Logging</i> di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin	135
Gambar 4.6	Rakit Log dan Tumpukan Kayu di Kawasan TN Sembilang	135
Gambar 4.7	Pertambangan Minyak Oleh Masyarakat di Desa Muara Mendak	136
Gambar 4.8	Sebaran Area Kebakaran tahun 2015 pada Lanskap Sembilang Dangku	137
Gambar 4.9	Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tahun 2017	137
Gambar 4.10	Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tahun 2018	137
Gambar 4.11	Peta Kawasan Perikanan Kelola Sendang	138
Gambar 4.12	Peta Layanan Ekosistem Supply Air pada Kawasan Kelola Sendang	139
Gambar 4.13	Peta Layanan Ekosistem Pengaturan Dataran Banjir pada Kawasan Kelola Sendang	139
Gambar 4.14	Peta Layanan Ekosistem Area Pendidikan dan Ecotourism pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Pendidikan	140
Gambar 4.15	Peta Layanan Ekosistem Intensifikasi Pertanian Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Intensifikasi Pertanian	141
Gambar 4.16	Peta Layanan Ekosistem Area Pertanian Tradisional pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Pertanian Tradisional	141
Gambar 4.17	Peta Layanan Ekosistem Area Hasil Hutan pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Kawasan Hasil Hutan	143
Gambar 4.18	Lokasai PIAPS di Area Lanskap Sembilang Dangku	145
Gambar 4.19	Peta Layanan Ekosistem Transportasi di Kawasan Kelola Sendang Fungsinya dalam Mengidentifikasi Akses Transportasi	146
Gambar 4.20	Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	147
Gambar 4.21	Peta Tutupan Lahan pada Wilayah Tertentu Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	147
Gambar 4.22	Peta Lahan Kritis Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti	149
Gambar 4.23	Peta Lahan Kritis Kawasan Sendang Wilayah Hulu, Tengah, dan Hilir Wilayah DAS Musi	149
Gambar 4.24	Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Lahan dan Hutan Kawasan Kelola Sendang Hulu, Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo Dan Sekitarnya	151
Gambar 4.25	Peta Moratorium Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi	152
Gambar 4.26	Peta Kekritisian Lahan di Kawasan Kelola Sendang	154
Gambar 4.27	Kelas Kerawanan Karhutla dalam Luas (a) dan dalam Presentase (b) di Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Kesatuan Hutan Lalan Mangsang Mendis	155
Gambar 4.28	Peta Layanan Ekosistem Pengaturan Iklim (Makro dan Mikro) pada Kawasan Kelola Sendang	158
Gambar 4.29	Laju Peningkatan Lahan kritis di Kawasan Kelola Sendang Dalam Luas Dan Persentase di Tahun 2007 (a) dan 2010 (b)	162
Gambar 5.1	Posisi Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu Wilayah Hutan Meranti dan Sekitarnya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	175
Gambar 5.2	Alokasi Peruntukan Lahan Berdasarkan Luas dan Persentase Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang Sesuai Arah RKTN	178
Gambar 6.1	Kategori Desa Menurut Indeks Desa Membangun di Lanskap Sembilang Dangku, 2015	182
Gambar 6.2	Sebaran Penduduk Pada Kawasan Sembilang Dangku Menurut Desa Tahun 2016	182
Gambar 6.3	Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin	188

Gambar 6.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten Banyuasin Dan Kabupaten Muba.....	190
Gambar 6.5 Pekerjaan Utama Responden.....	193
Gambar 6.6 Sebaran Pendapatan Masyarakat di Lanskap Sembilang Dangku, 2016 (persentase)	196
Gambar 6.7 Persentase Alokasi Pengeluaran Masyarakat (terpilih) di Lanskap Sembilang Dangku, 2016	197
Gambar 6.8 Aktivitas yang dilakukan Suami/Istri di Lanskap Sembilang Dangku	202

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lanskap Kelola Sendang merupakan salah satu bentang alam ekosistem di Sumatera Selatan. Lanskap ini mencakup wilayah dengan luasan sekitar 1,6 juta hektar yang secara administratif berada di 19 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, meliputi 21 Desa. Di dalam lanskap ini terdapat sekitar 816.748 jiwa penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Sumberdaya alam di Lanskap Sembilang Dangku memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Selain nilai penting lanskap bagi penghidupan masyarakat dan produksi, Lanskap Sembilang Dangku juga memiliki nilai penting bagi konservasi. Di dalam lanskap ini terdapat berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut adalah hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, lahan gambut dan ekosistem lain yang menjadi habitat bagi hidupan liar baik flora maupun fauna. Nilai penting lanskap ini bagi pelestarian keanekaragaman hayati tercermin dengan ditetapkannya tiga kawasan konservasi di dalamnya, yaitu: Taman Nasional Berbak Sembilang serta Suaka Margasatwa Dangku dan Suaka Margasatwa Bentayan.

Berbagai kepentingan di Lanskap Sembilang Dangku yaitu kepentingan penghidupan masyarakat, produksi dan konservasi seringkali berbenturan. Para pihak memiliki tujuan dan target pengelolaan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga mengorbankan keberlanjutan lanskap. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat memfasilitasi kepentingan para pihak tanpa harus mengorbankan kepentingan pihak lain. Pendekatan lanskap diyakini mampu menyediakan alat dan konsep untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah yang memiliki fungsi beragam. Pendekatan lanskap ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu 1) inklusivitas, 2) integrasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, serta 3) data, informasi dan pemodelan yang sah. Untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan kemitraan para pihak dalam pengelolaan lanskap.

Terkait dengan statemen ke tiga bahwa diperlukan kekuatan data dan informasi terkait kondisi eksisting, potensi SDA, dan hal-hal terkait dengan isu strategis yang berkembang di ngkap tapak. Maka diperlukan suatu upaya untuk memotret kondisi real dan fakta di lapangan. Potret kondisi real ini selanjutnya dianalisis dengan tetap merujuk pada regulasi dan kebijakan terkait. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melakukan penyusunan dokumen ini yang diberi judul **Perseptif Lanskap Kelola Sembilang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan**. Layaknya dokumen ini merupakan suatu bentuk analisis kajian awal dalam mendesign Project Program

Kelola Sendang di Kawasan Administratif Provinsi Sum Sel terkhusus Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Lebih lanjut dokumen ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengukur dan memantau target capaian, baik dari faktor teknis, faktor kuantitatif kualitatif, maupun dari faktor design strategi konseptual.

Sebagai suatu bentuk instrumen, dokumen ini disusun berdasarkan dari masukan banyak pihak, dengan variasi metode pendekatan dan tahapan kegiatan studi yang panjang, serta dukungan para pihak. Kedepannya dokumen instrumen ini akan menjadi salah satu indikator dalam memantau dan mengelola Intervensi Program Kelola Sendang.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan **Perspektif Lanskap Kelola Sembilang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan** adalah untuk menghasilkan suatu *frame up* kawasan dan mendapat gambaran utuh kondisi terkini di wilayah kerja Kelola Sendang-ZSL, gambaran tersebut nantinya dijadikan rujukan sebagai referensi awal untuk merancang implementasi program kegiatan sekaligus sebagai informasi pembandingan pasca selesainya intervensi proyek. Lebih jauh lagi Baseline ini akan menjadi salah satu parameter dalam proses pemantauan terhadap indikator yang telah ditetapkan dan mendapat pengaruh dari intervensi program kegiatan.

Sasaran dari penyusunan dokumen ini adalah:

1. Tersusunnya suatu *frame up* lanskap Kelola Sendang untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi terkini, potensi sumberdaya alam, isu strategis serta sejauh arah kebijakan menjadi rujukan dalam pengelolaan kawasan Kelola Sendang.
2. Arahan awal dalam merancang instrumen tata kelola project Kelola Sendang.
3. Rujukan dan referensi dalam merancang pola implementasi program kegiatan
4. Rujukan dalam merancang instrumen pemantauan implementasi program.
5. menjadi parameter alternatif untuk memantau dan mengukur indikator capaian
6. Rujukan dalam menyusun mekanisme dan sistem manajemen kawasan: *Planning, Organizing, Directing (human, money, material, mechanism, method, market), dan Controlling*.

Semua yang dikaji dalam dokumen ini diarahkan untuk memberikan gambaran kondisi capaian berdasarkan 4 dimensi utama yaitu: a) livelihoods/mata pencaharian; b) produksi; c) konservasi; d) institusi dan tata kelola.

BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODELOGI

A. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup kajian dalam penyusunan dokumen *Perseptif Lanskap Kelola Sembilang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Eksisting, Potensi Sumberdaya Alam dan Arah Kebijakan* meliputi:

- a. Kajian deskripsi lanskap, kondisi eksisting dan rona lingkungan kawasan Kelola Sendang. Kajian kondisi rona lingkungan dan kondisi eksisting ini disusun secara hirarki, dimulai dari pembahasan potret lanskap Kelola Sendang secara umum, dilanjutkan dengan kajian pembahasan deskripsi kondisi eksisting berdasarkan unit analisis Daerah Aliran Sungai (cluster Hulu, Tengah dan Hilir) yang terintegrasi dalam kawasan satuan kelola hutan (Meranti, Lalan Mangsang Mendis, dan Lalan Sembilang).
- b. Kajian isue strategis, permasalahan, tantangan dan kendala Kawasan Kelola Sendang baik secara umum maupun berdasarkan batasan wilayah unit analisis (hulu, tengah dan hilir).
- c. Kajian arah kebijakan lanskap berkelanjutan, ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, kajian isu terkait penghidupan masyarakat, produksi, dan konservasi, dan pemetaan para pihak dan inisiatif terkait pengelolaan sumberdaya alam di Lanskap Kelola Sendang. Dilakukan juga kajian dari aspek perspektif pengelolaan kawasan Kelola Sendang ditinjau dari aspek peran strategi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan/RP (nasional, provinsi dan Kabupaten)
- d. Kajian analisis awal kawasan, meliputi: analisis baseline, analisis SWOT dan analisis prioritas dan strategi pengelolaan program Kelola Sendang.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kajian dokumen ini adalah Lanskap Sembilang Dangku yang meliputi: tiga zona DAS (**Hulu, Tengah dan Hilir**) yang terintegrasi dalam 3 kawasan kesatuan kelola hutan (KPH), meliputi: kawasan kelola hutan **Meranti, Lalan Mangsang Mendis dan Lalan Sembilang**, serta meliputi area 5 sub DAS di **Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin**. Lanskap ini memiliki luasan sekitar 1,6 juta hektar yang di dalamnya terdapat 223 desa dalam 19 kecamatan, satu area taman nasional, dua area suaka margasatwa, dan puluhan perusahaan pemegang hak konsesi kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Untuk kajian aspek sosial ekonomi budaya dan pola penghidupan masyarakat, ditentukan berdasarkan unit desa yang mendapat intervensi program Project Kelola Sendang, yaitu: sebanyak 21 Desa yang terdapat pada 6 wilayah Kecamatan, yaitu: Batanghari Leko,

Tungkal Jaya, Bayung Lincir, Lalan, Pulau Rimau dan Banyusain II. Lebih jelasnya data wilayah desa tersaji pada Tabel 3.1, Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.

3. Ruang Lingkup Waktu Penyusunan Baseline

Proses penyusunan dokumen Perspektif Lanskap Kelola Sendang berbasis Baseline ini dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) bulan, terhitung dari Bulan Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019, meliputi beberapa tahap dan proses kegiatan kerja: perencanaan, perancangan, operasional lapangan sampai pada finalisasi draft dan laporan akhir.

B. Metodologi dan Pendekatan

1. Pola Pendekatan

a. Metode *Scientific Based*

Dokumen ini disusun berdasarkan pertimbangan kerangka berfikir yang rasional dan sistematis. Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada pertimbangan tataran logika berfikir dan konsep dasar yang berkembang di bidang **Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup** dan bidang **Pengelolaan Ekosistem Kawasan**. Semua unit Informasi, Data dan hasil-hasil penelitian dari lembaga dan institusi terkait juga dirujuk dalam penyusunan dokumen ini.

b. Metode Pendekatan Survei

Metode yang digunakan dalam kegiatan survei *Baseline* Kelola Sendang adalah metode kualitatif, kuantitatif dan deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan informasi valid dari semua unit penelitian. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Sedangkan metode kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi secara real dan valid terhadap suatu fenomena dan hubungan antar fenomena tersebut. Pendekatan metode deskriptif kuantitatif akan melengkapi analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran holistik dari setiap unit penelitian.

Tujuan metode ini dikombinasi dalam kegiatan survey *Baseline* Kelola Sendang, yaitu: 1) Data kuantitatif akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan, berapa banyak, siapa saja, dan sejauh mana; 2) Data kualitatif akan memberikan jawaban atas penyebab yang mendasari dan memberikan penjelasan untuk pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan, proses dan sebab-akibat yang berkembang.

Proses pengumpulan data akan menggunakan wawancara mendalam, *Focus group discussion* (FGD), observasi, dan pengumpulan data sekunder. Dalam memilih informan, penilaian ini menggunakan *purposive sampling*. Para informan yang akan diwawancarai memiliki jenis informasi dan kualifikasi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan Proyek

Kelola Sendang. Data yang dikumpulkan diproses dan dianalisis berdasarkan kategori dimensi data yang menjadi fokus dalam penilaian ini.

Survei *Baseline* Kelola Sendang akan dibuat dalam bentuk Dokumen Laporan yang menekankan pada dasar *assessment*, yang akan menjadi dasar untuk implementasi program selanjutnya. Rekomendasi dalam bentuk strategi kelola akan disajikan secara detail sehingga intervensi terhadap implementasi proyek ZSL yang akan datang dapat memperoleh manfaat. Evaluasi akan mencakup problematika wawasan tentang tantangan, hambatan, gangguan dan manajemen masalah.

c. Pendektan *Legal formal*

Penyusunan dokumen ini mengacu dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada kebijakan-kebijakan terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Data dan informasi yang digunakan dalam dokumen rencana induk ini juga data resmi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

2. Kebutuhan dan Jenis Data

Data yang disajikan berdasarkan kategori dimensi yang menjadi fokus dalam asesmen ini, yaitu:

- a. *Livelihood*: memberdayakan masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian yang kuat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam lokal yang berkelanjutan.
- b. Produksi: perbaikan praktik manajemen, transparansi dan produksi berkelanjutan di perusahaan swasta dan perusahaan publik.
- c. Konservasi: peningkatan luasan hutan tropis dan pemulihan lahan gambut serta mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
- d. Kelembagaan/Institusi dan Tatakelola: peningkatan kapasitas kelembagaan, dukungan kebijakan dan mobilisasi sumber daya untuk pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Penggunaan strategi 4 dimensi dalam proyek ini memungkinkan terjadinya sinergi antar komponen dan antar stakeholders. Lebih lanjut, dalam tiap dimensi dimungkinkan irisan kerja antar komponen, mitra dan stakeholders untuk mencapai tujuan proyek ini.

Data akan diinterpretasi secara naratif berdasarkan kondisi eksisting, potensi sumberdaya alam, kendala dan permasalahan real serta arahan dan kebijakan yang dirujuk. Tim asesmen melakukan diskusi dengan internal ZSL terkait: proses interpretasi dan analisis data, konsekuensi dan impact, serta finalisasi laporan.

3. Tahapan Kegiatan

Implementasi proses penyusunan dokumen Perspektif Lanskap Kelola Sendang berbasis Analisis Baseline ini terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan, perancangan, operasional lapangan, sampai pada finalisasi laporan, yang meliputi:

- 1) Konsultasi dan diskusi para pihak: analisis dan review kebijakan dan regulasi.
- 2) Pengumpulan data sekunder : akses sumber data ke para pihak/stakeholder terkait.
- 3) Pengumpulan data *primer* : research, observasi dan survei lapangan
- 4) *Verifikasi* dan *entry* data
- 5) *Processing dan Analisis data*
- 6) Penyusunan dan penulisan *Draft dan Final Report*.

4. Komposisi Tim Penyusun (Konsultan Baseline)

Komposisi tim Konsultan yang akan melakukan survei Baseline adalah ahli sains sesuai dengan kebutuhan Baseline Kelola Sedang. Tim Konsultan terdiri dari 1 leader dan 2 anggota, dengan komposisi keahlian yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan informasi yang disajikan dalam laporan akhir. Komposisi tim konsultan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dr. Yetty Hastiana Hasyim, M.Sc (Environmental Science Expert /Leader)
- b. Dr. Sokanto, M.Si (Region Social Economic Science Expert)
- c. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut. M.Si., IPM (Forestry Science Expert)

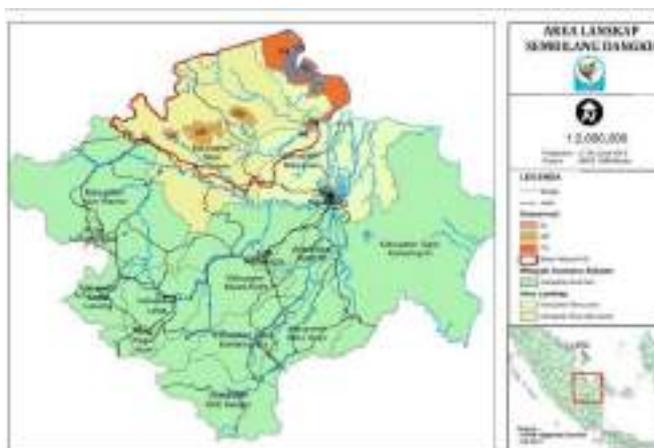
BAB III. DESKRIPSI LANSKAP, KONDISI EKSISTING DAN POTENSI SDA- LINGKUNGAN KAWASAN KELOLA SENDANG

A. Deskripsi Lanskap

1. Deskripsi Lanskap Kawasan Kelola Sendang Secara Umum

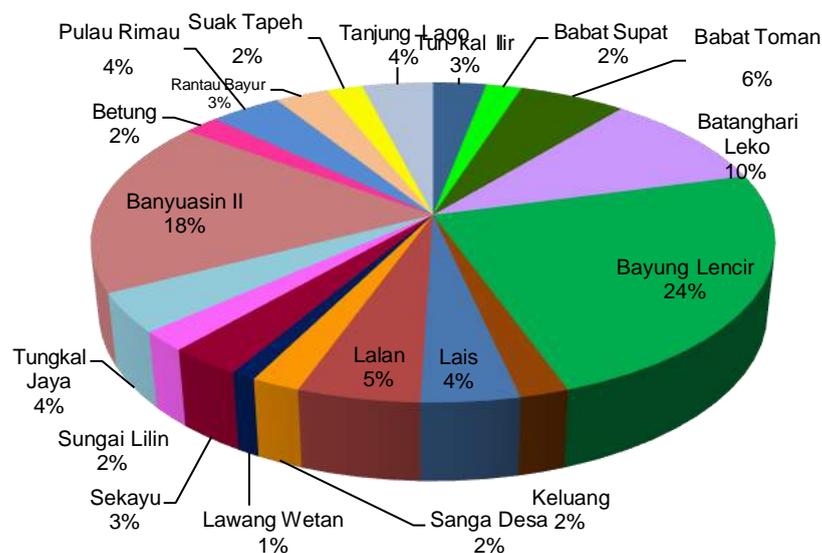
Kajian dan Pembahasan dalam dokumen “**Perspektif Lanskap Kelola Sendang Berbasis Analisis Baseline, Kondisi Exsisting, Potensi SDA dan Arah Kebijakan**”, ini akan merujuk pada dua kelompok unit analisis, yaitu: 1) berdasarkan batasan Pola DAS (Daerah Aliran Sungai) dan, 2) Pola Kelola Kawasan Hutan. Hal ini menjadi pembatas agar pembahasan menjadi lebih sistematis dan terarah. Pola dan karakteristik DAS terintegrasi dalam kajian kawasan hutan ekosistem lahan basah sebagai penciri ekosistem Sumatera Selatan dan pola implementasi tata kelola Kelola Sendang. Kedua batasan unit analisis ini secara faktual sangat relevan, terintegrasi dalam kajian ekosistem lanskap Kawasan Sembilang Dangku. Adapun unit analisis yang didasarkan batasan DAS dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu mengikuti **Pola Aliran DAS Bagian Hulu, Tengah dan Hilir**. Unit analisis pola DAS relevan dengan pola kelola kawasan hutan yang terdiri dari tiga wilayah kelola, yaitu: kawasan kelola hutan **Wilayah Meranti** diasumsikan meliputi zona DAS Hulu, Kawasan Kelola Hutan **Wilayah Lalan Mendis Mangsang** pada zona DAS Tengah, dan Kawasan kelola hutan **Wilayah Lalan Sembilang** pada zona DAS Hilir.

Kawasan Kelola Sendang terintegrasi kedalam tiga wilayah unit analisis berdasarkan batasan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi: wilayah Hulu, Tengah dan Hilir maupun berdasarkan pembagian Kawasan kelola hutan, meliputi: 1) Meranti, 2) Lalan Mangsang Mendis dan 3) Lalan Sembilang, seperti yang tersaji pada peta. Pada Gambar 3.1 terlihat pola *landscape* pada Areal Kerja Project Kelola Sendang pada dua wilayah administrasi, Batasan Wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dalam Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.1. Posisi Lanskap Sembilang Dangku Dalam Provinsi Sumatera Selatan
(Sumber: Data Spasial ZSL, 2016)

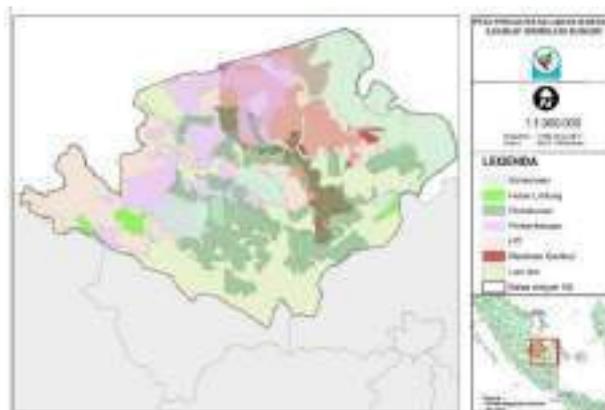
Lanskap Sembilang Dangku berada di bagian Timur Laut Provinsi Sumatera Selatan dimana sisi utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Disebut dengan Lanskap Sembilang Dangku, karena lanskap ini membentang dari Taman Nasional Sembilang hingga Suaka Margasatwa Dangku. Lanskap Sembilang Dangku meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dengan cakupan luasan sekitar 1,6 juta ha, dimana secara administratif berada di 19 kecamatan di 2 Kabupaten tersebut. Dari 19 Kecamatan yang ada di Lanskap Sembilang Dangku, 12 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 1.339.006 ha sedangkan 7 Kecamatan lainnya dengan luas 719.562 ha masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Luas kecamatan - kecamatan tersebut sangat bervariasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Rasio luas wilayah Kecamatan pada Lanskap Sembilang-Dangku
 Sumber: Data olahan dari BPS (Banyuasin Dalam Angka 2017 dan Musi Banyuasin Dalam Angka 2017)

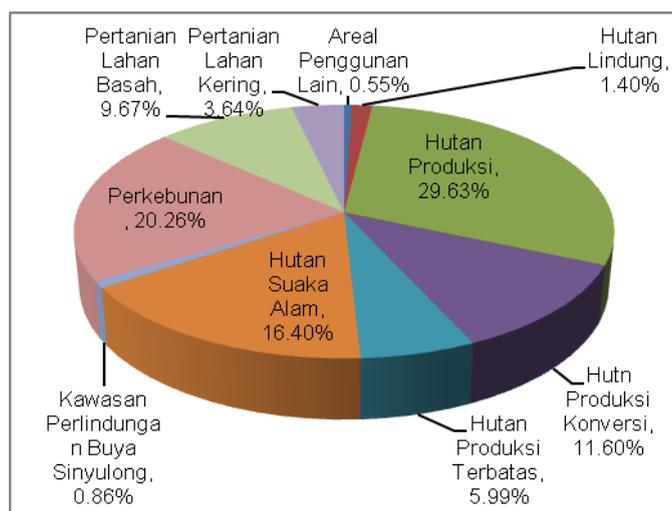
Kecamatan Banyung lencir memiliki rasio luasan terbesar dalam lanskap Sembilang Dangku (24%) dengan luas wilayah sekitar 484.700 Ha. Di dalam kecamatan ini terdapat kawasan hutan produksi yang berada dalam wilayah Kelola Hutan Meranti dan Lalan Mendis. Kecamatan dengan luasan terbesar kedua adalah Kecamatan Banyuasin II yang di dalamnya terdapat kawasan hutan konservasi yang masuk wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Jumlah penduduk di 19 kecamatan tersebut adalah 816.748 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 39,7 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Betung yaitu sekitar 158 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Batanghari Leko (11,1 jiwa/km²) dan di Kecamatan Banyuasin II (12,1 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan penduduk di kedua kecamatan ini disebabkan karena sebagian besar wilayah kecamatan tersebut merupakan kawasan hutan. Gambaran pola penggunaan lahan di kawasan Sembilang Dangku seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Peta Penggunaan Lahan Pada Lanskap Sendang
(Sumber: Data Spasial ZSL, 2016)

Menurut analisa berdasarkan Peta Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, kawasan hutan di Lanskap Sembilang Dangku menempati persentase luasan 65,02% dari total luasan lanskap 1,6 juta hektar. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Produksi menempati (29,63%), Hutan Suaka Alam (16,40%), Hutan Produksi Konversi (11,60%), Hutan Produksi Terbatas (5,99%) dan Hutan Lindung (1,40%). Kawasan hutan tersebut berada di dalam wilayah kelola KPHP Meranti, KPHP Lalan Mendis, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Suaka Margasatwa Dangku, dan Suaka Margasatwa Bentayan. Wilayah di luar kawasan hutan terdiri dari kawasan perkebunan (20,26%), pertanian lahan basah (9,67%), pertanian lahan kering (3,64%), kawasan perlindungan Buaya Sinyulong (0,86%) dan Area Penggunaan lain (0,55%). Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan sawit dan karet, baik yang dikelola perusahaan maupun masyarakat.



Gambar3.4. Rasio Penggunaan Lahan di Lanskap Sembilang Dangku
(Sumber:PSU-PIU KS, 2018)

Berdasarkan Gambar 3.4, peruntukan lahan di lanskap Sembilang Dangku didominasi oleh perkebunan dan hutan produksi yang secara bersama-sama mengambil porsi 49,89% dari

total penggunaan lahan. Hal tersebut secara sepintas menggambarkan profil perekonomian kawasan lanskap Sembilang Dangku yang didominasi oleh perusahaan lahan melalui pengembangan konsesi perkebunan dan kehutanan serta industri turunannya. Komoditi perkebunan yang menjadi andalan pada areal lanskap Sembilang Dangku yaitu Karet dan Kelapa Sawit. Paling tidak tercatat 20 perusahaan perkebunan besar swasta dan negara dan 16 perusahaan HTI yang terdapat diareal lanskap Sembilang Dangku. Hal tersebut tercermin pada tingginya PDRB sektor pertanian, perikanan dan kelautan pada Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar 36,11% (*BPS Kabupaten Banyuasin 2012-2016*) dan 12,5% pada Kabupaten Musi Banyuasin (*BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2016*).

Selain itu, sektor pertambangan juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian kawasan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sektor pertambangan dan Penggalian menyumbang 57,6% PDRB Kabupaten tersebut (*BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2016*). Sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan minyak bumi dan batubara. Tercatat sekitar 24 perusahaan yang bergerak dalam sektor tambang yang beroperasi didalam kawasan lanskap Sembilang Dangku.

Selain nilai penting lanskap bagi penghidupan masyarakat dan produksi, Lanskap Sembilang Dangku juga memiliki nilai penting bagi konservasi. Di dalam lanskap ini terdapat berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut adalah hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, lahan gambut dan ekosistem lain yang menjadi habitat bagi hidupan liar baik flora maupun fauna. Nilai penting Lanskap Sembilang Dangku bagi konservasi terbukti dengan keberadaan 3 kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Sembilang, Suaka Margasatwa Dangku, dan Suaka Margasatwa Bentayan yang secara total mengambil porsi 16,40% dari total luas areal. Gambaran secara detail penggunaan lahan berdasarkan status hutan ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Penggunaan Lahan berdasarkan Peruntukan dan Status Hutan
(Sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Project Kelola Sendang (KS) menetapkan desa sebagai sebuah area tapak untuk implementasi dan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lanskap berkelanjutan. Desa dipandang sebagai sebuah tapak yang mampu menghubungkan

rantai konektivitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam pengelolaan lanskap. Jika desa mampu mengelola sumberdaya alam secara lestari maka akan berkontribusi besar bagi keberlanjutan Lanskap Sembilang Dangku. Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada penguatan akses terhadap sumber-sumber penghidupan, serta mendorong praktik pengelolaan sumberdaya yang selaras antara kepentingan produksi dan konservasi.

Kelola Sendang telah melakukan seleksi terhadap desa sasaran proyek merujuk pada sejumlah kriteria yang mengakomodasi aspek ekologi, sosial dan ekonomi. **Aspek ekologi** menyangkut sejumlah kriteria biofisik dan keberadaan desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan dan areal lain yang berhutan seperti kawasan HCV, sehingga desa terpilih akan terangkai menjadi tapak ekologi yang menghubungkan berbagai tutupan hutan yang ada dalam lanskap Sembilang-Dangku. Kriteria **aspek sosial ekonomi** dipertimbangkan untuk mengakomodasi karakteristik sumberdaya alam desa, keragaman pemanfaatan lahan dan akses terhadap sumber penghidupan. Dari survei lapangan dan analisis geo-spasial ditentukan beberapa desa sebagai desa sasaran proyek, yang kemudian ditetapkan menjadi 21 desa prioritas berdasarkan survei lapangan. Secara umum desa yang menjadi sasaran proyek ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Peta Area Kerja dan Intervensi Desa Proyek Kelola Sendang Di Wilayah Kabupaten Banyuasin dan MUBA Provinsi Sumatera Selatan
(Sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Desa terpilih mewakili keragaman karakteristik desa dalam konteks ekologi, seperti desa yang bersinggungan dengan berbagai kawasan hutan negara (Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan KPH), desa dengan lahan gambut dan tanah mineral, serta keberadaan desa yang berdekatan dengan areal konsesi HTI, perkebunan kelapa sawit dan kawasan restorasi ekosistem. Secara sosial ekonomi mewakili keragaman karakteristik penghidupan seperti desa pesisir/nelayan, desa hutan, pertanian dan perkebunan. Dua puluh satu desa tersebut merupakan wilayah demonstrasi untuk percontohan kemitraan publik-swasta-masyarakat dalam pengelolaan lanskap secara berkelanjutan dalam proyek ini. Berikut pada Tabel 1 disajikan daftar desa yang terpilih sebagai area intervensi Kelola Sendang.

Tabel 3.1. Desa dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin sebagai Area Intervensi Kelola Sendang.

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Sako Suban	Batanghari Leko	Musi Banyuasin
2	Lubuk Bintialo	Batanghari Leko	Musi Banyuasin
3	Pangkalan Bulian	Batanghari Leko	Musi Banyuasin
4	Berlian Jaya	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin
5	Simpang Tungkal	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin
6	Peninggalan	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin
7	Mendis	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
8	Muara Medak	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
9	Pulai Gading	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
10	Mangsang	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
11	Muara Merang	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
12	Kepayang	Bayung Lincir	Musi Banyuasin
13	Karang Agung	Lalan	Musi Banyuasin
14	Gali Sari	Lalan	Musi Banyuasin
15	Penuguan	Pulau Rimau	Banyuasin
16	Purwodadi	Pulau Rimau	Banyuasin
17	Banjar Sari	Banyuasin II	Banyuasin
18	Sumber Rezeki	Banyuasin II	Banyuasin
19	Tabala Jaya	Banyuasin II	Banyuasin
20	Sungsang IV/Dusun Sembilang	Banyuasin II	Banyuasin
21	Tanah Pilih	Banyuasin II	Banyuasin

Sumber: ZSL, 2018.

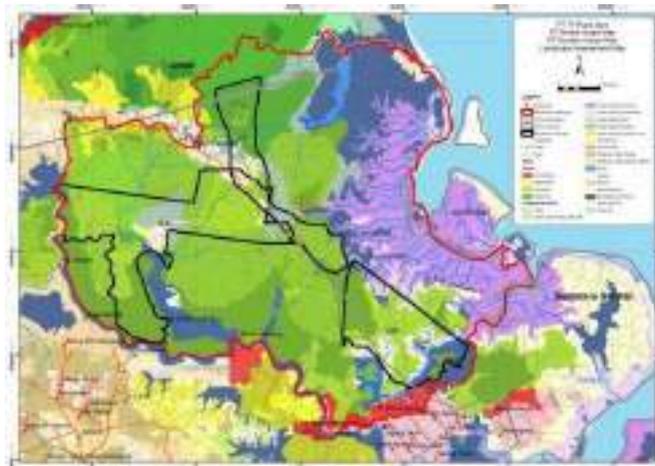
2. Deskripsi Lanskap Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan Wilayah Kelola Hutan

Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Musi Banyuasin memiliki kawasan hutan seluas 50,3% (Dishut Muba, 2013) yang dikelola dalam dua Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti menggambarkan kondisi hutan alam dataran yang luas dan Lalan Mangsang Mendis (LLM) mewakili kondisi hutan Rawa Gambut. Sepertiga kawasan hutan Musi Banyuasin berada dalam kawasan Meranti (33,11%) difungsikan untuk tujuan produksi dan lindung. Dengan kelerengan cenderung datar dan landai sangat potensial memberikan manfaat ekonomi melalui kelola produksi dan saat ini dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pengelolaan (hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem pertambangan gas dan batubara). Didalam kawasan Meranti terdapat pemanfaatan hutan di hutan alam untuk tujuan perbaikan/pemulihan ekosistem yang dikenal dengan IUPHHK-RE. Ijin konsesi ini cukup signifikan karena mencapai luasan seperlima dari kawasan KPHP (20,54%). Sedangkan Kawasan Kelola hutan produksi yang terletak di Wilayah administratif Kabupaten Banyuasin adalah kawasan pengelolaan hutan produksi Lalan Sembilang yang ditetapkan luas ± 60.856,65 Ha (Perbup. No.420 Tahun 2013).

Kawasan Kelola Hutan **Meranti berada di bagian hulu DAS Musi**, terletak dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan letak geografis, terletak antara 1°55'37" sampai 2°50'05" Lintang Selatan dan 103°0'54" sampai 104°10'15" Bujur Timur. Luas areal kawasan Meranti adalah 244.162,33 Ha (SK. 822/Menhut-II/2013), dengan pembagian areal terdiri dari HL

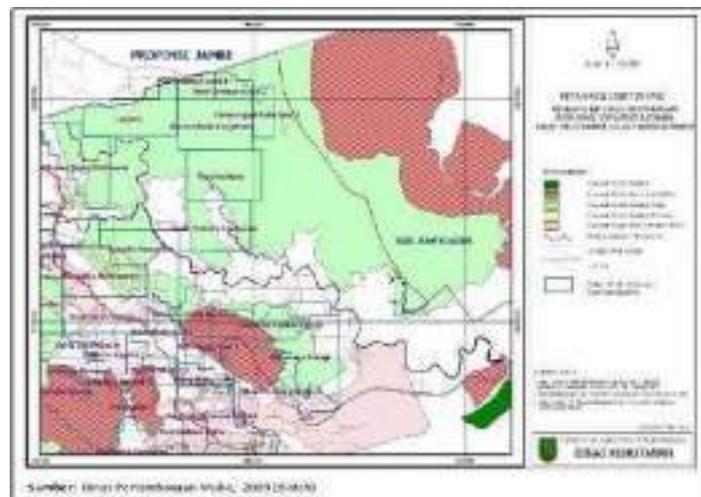
seluas 20.081 Ha (7,96%); Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas sekitar 97.587 Ha (38,68%); dan Hutan Produksi (HP) dengan luas sekitar 134.599 Ha (53,36%). Berdasarkan batas administrasi pemerintahan, batas-batas wilayah kelola hutan Meranti meliputi: 1) Sebelah utara: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dalam wilayah Provinsi Jambi; 2) Sebelah timur: Kecamatan Bayung Lencir; dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; Kecamatan Bayung Lencir; dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; 3) Sebelah Selatan: Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan; 4) Sebelah barat: Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Berdasarkan kelompok hutan, wilayah Kawasan hutan Meranti termasuk dalam kelompok hutan: Meranti Sungai Merah, Meranti Hulu Sungai Kapas, Meranti Lubuk Buah dan sebagainya. Berdasarkan hasil analisis spasial, kawasan hutan Meranti mencakup kedalam 7 wilayah kecamatan yaitu: Babat Supat, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, dan Tungkal Jaya. Gambaran umum pola *landscape* Kelola Sendang di area Hulu yang meliputi kawasan kelola hutan Meranti, tersaji pada Gambar 3.7.

Kawasan hutan **Lalan Mangsang Mendis (LLM) berada di bagian tengah DAS** Musi merupakan kawasan kelola hutan produksi yang terdiri dari 2 (dua) kelompok hutan yaitu: Hutan Produksi (HP) Lalan dan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Letak HP Lalan secara geografis berada pada 01°42' - 02°25' LS dan 103°40' - 104°28' BT, sedangkan HP Mangsang Mendis berada pada 02°09' - 02°25' LS 103°51' - 104°20' BT. Berdasarkan rancang bangun dan hasil tata batas yang dilakukan oleh BPKH Wilayah II Palembang tahun 2002 serta arahan pencadangan KPHP/KPHL Propinsi Sumatera Selatan dari Badan Planologi Departemen Kehutanan, luas LMM ± 279.094 Ha, merupakan gabungan dari 2 kawasan hutan produksi, yaitu HP Lalan seluas ± 210.434 Ha dan HP Mangsang Mendis seluas ± 68.660 ha. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, luas kawasan LMM seluas 259.940,00 Ha.



Gambar 3.7. Pola *Landscape* Kawasan Kelola Sendang, di Bagian Hulu dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Meranti (Sumber: BPKH Wil. II Plg, 2015)

Secara Administrasi kehutanan LMM berada di bawah Dinas Kehutanan MUBA. Secara administrasi pemerintahan, keseluruhan wilayah LMM masuk dalam wilayah PemKab Musi Banyuasin, yang meliputi 2 Kecamatan: Bayung Lincir dan Lalan. Pada bagian Utara, berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi yang merupakan kawasan hutan produksi di lahan rawa gambut. Di bagian Timur, berbatasan dengan kawasan HP. Lalan Kabupaten Banyuasin yang telah dialokasikan untuk IUPHHK-HTI PT. Wahana Lestari Makmur Sukses. Di bagian Selatan berbatasan dengan suaka Margasatwa Bentayan, HPK.S.Lilin dan APL serta di bagian Barat berbatasan dengan APL yang sudah menjadi kawasan pemukiman dan perkebunan. Di bagian tengah antara HP Lalan dan Mangsang Mendis, terdapat areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani ijin perkebunan dan lokasi pemukiman. Gambaran umum pola *landscape* Kelola Sendang di area Tengah wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis, tersaji pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Pola *Landscape* Kawasan Kelola Sendang di Bagian Tengah, dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Lalan Mangsang Mendis
(Sumber: BPKH Wil. II Plg, 2015)

Sementara kawasan kelola hutan **Lalan Sembilang berada di bagian hilir DAS Musi** yang merujuk pada penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan, Lalan Sembilang yang secara geografis terletak di $02^{\circ}16'15''$ LS sampai dengan $02^{\circ}58'14''$ LS dan garis bujur antara $104^{\circ}21'13''$ BT sampai dengan $104^{\circ}37'53''$ BT . Berdasarkan wilayah administrasi, kawasan kelola hutan Lalan Sembilang berada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan yang termasuk di 1 Kecamatan Banyuasin II dan 9 desa yaitu Karang Sari, Maju Ria, Sumber Rejeki, Tabala Jaya, Sri Agung, Tanah Pilih, Sungsang IV, Jati Sari, dan Mekar Sari. Berdasarkan fungsi hutan, kawasan Lalan Sembilang merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) Lalan. Berdasarkan data administrasi Kehutanan kawasan Unit II Lalan Sembilang berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan SK 866/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat perubahan luas kawasan $\pm 60.999,33$ Ha.

Secara geografis dan administrasi, Kawasan kelola hutan Lalan Sembilang bagian Utara berbatasan dengan Taman Nasional Sembilang, bagian Barat Berbatasan dengan PT. Tripupa Jaya, PT RHM (Rimba Hutani Mas) dan Kawasan Kelola Hutan Lalan Mangsa Mendis, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan bagian Selatan Berbatasan dengan PT. WLMS (Wahana Lestari Makmur Sukses). Gambaran umum pola *landscape* Kelola Sendang di area Hilir yang meliputi Kawasan Kelola Hutan Lalan Sembilang, tersaji pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Beberapa *Landscape* Kawasan Kelola Sendang di Bagian Hilir dalam Wilayah Kawasan Kelola Hutan Produksi Lalan Sembilang
(Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

B. Kondisi Umum Aspek BioGeoFisik dan Karakteristik Kawasan Kelola Sendang

1. Kondisi Fisik

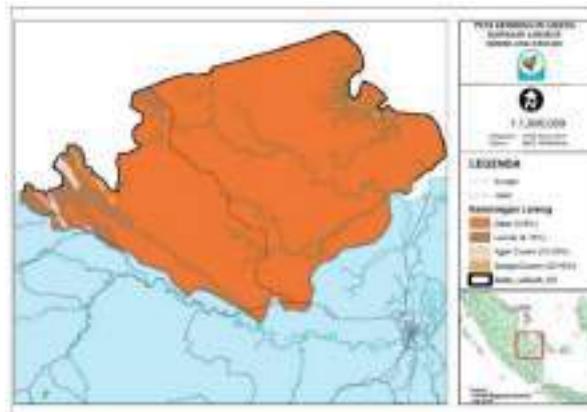
Sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki iklim tropis basah. Intensitas curah hujan tahunan rata-rata sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 4.000 mm di daerah pegunungan di bagian barat dan intensitas rendah di pantai timur hingga lebih rendah dari 2.000 mm. Suhu berkisar antara 24,40°C-33,40°C, dengan suhu rata-rata sebesar 27,7°C. Kelembaban udara berkisar antara 60–92% dengan rata-rata penyinaran matahari 51%. Kecepatan angin berkisar 3,50 knot atau 6,48 km/jam (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2016).

Pada Kabupaten Musi Banyuasin di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu : Organosol dan Klei Humus di dataran rendah atau rawa-rawa, Alluvial di sepanjang sungai Musi dan Padzolik di daerah berbukit – bukit. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada di bagian Timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau kecil.

Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata-rata 26,100°C – 27,400°C dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4% - 85,5% dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu organosol: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa, Klei Humus: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa, Alluvial: terdapat di sepanjang sungai, dan Polzoik: terdapat di daerah berbukit-bukit.

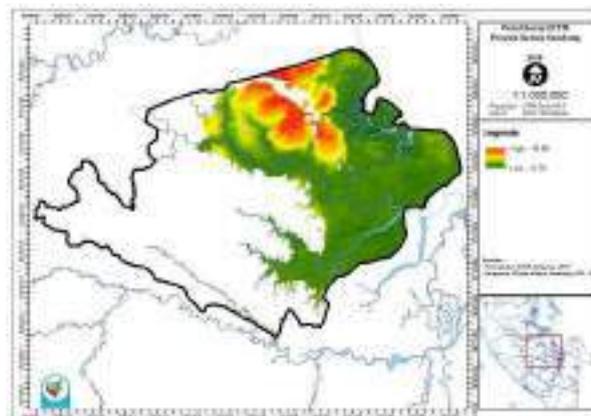
a. Topografi

Secara topografis hampir keseluruhan lanskap ini merupakan daratan yang datar. Kondisi daratan yang landai hingga curam hanya terdapat di bagian barat Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Gambar 3.10 ditunjukkan Peta Kemiringan Lahan di Kawasan Sembilang Dangku.



Gambar 3.10. Peta Kemiringan Lereng Lanskap Sembilang Dangku
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

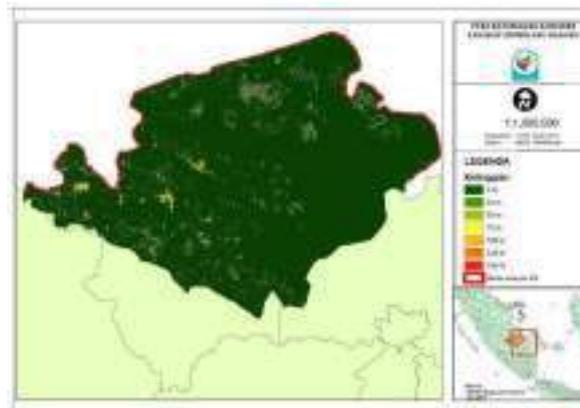
Untuk memperkuat penjelasan sebelumnya maka akan ditunjukkan mengenai pola sudut kemiringan lahan disajikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11. Peta Sudut Kemiringan Lahan pada Kawasan Lanskap Sembilang Dangku (sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Sebagian besar daratan di Lanskap Sembilang Dangku berada pada ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan besarnya luas lahan yang terpengaruh pasang

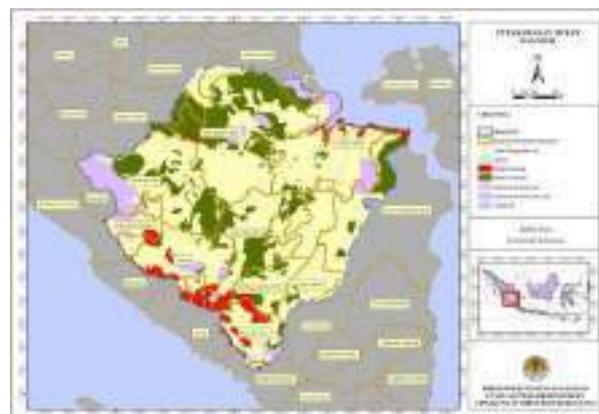
surut dan pembentukan rawa-rawa. Kondisi Ketinggian kawasan lanskap Sembilang Danguku ditunjukkan pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12. Peta Ketinggian Kawasan Lanskap Sembilang Danguku
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

b. Daerah Aliran Sungai

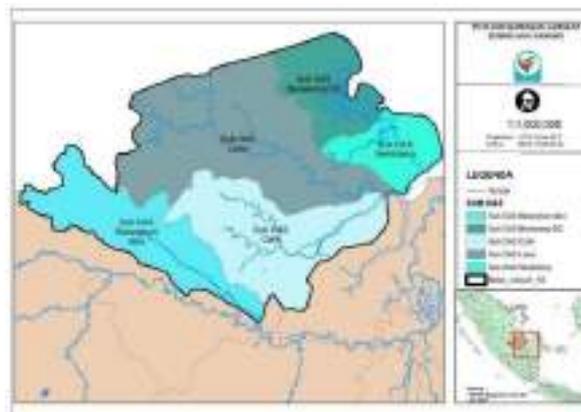
Lanskap Sembilang Danguku berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi. DAS Musi merupakan wilayah kerja BPDASHL Musi dan termasuk 15 DAS prioritas yang menjadi target RPJMN Tahun 2015 - 2019 berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 tahun 2015. Sungai Musi merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia. Daerah aliran Sungai (DAS) Musi terletak diantara 1°40' - 5° Lintang Selatan (LS) dan 102°7' - 108° Bujur Timur (BT). DAS Musi dapat dibagi menjadi 14 sub DAS yang membentang pada 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung dengan total luas wilayahnya sebesar 5.348.641 Ha. Cakupan wilayah dominan DAS Musi berada di Provinsi Sumatera Selatan (95%). Sedangkan Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Lampung masing-masing adalah 4%; 0,6%; dan 0,4%. Pola Kawasan Hutan yang melingkupi DAS MUSI di kawasan lanskap Sembilang Danguku tersaji pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Peta Kawasan Hutan pada Paparan DAS Musi
(Sumber: PSU-PIU KS, 2018)

Sungai ini memiliki panjang sekitar 750 km dengan fluktuasi air mencapai 6-7 meter setiap tahunnya. Potensi sumber daya perikanan di Sungai Musi tergolong besar, terutama di

daerah rawa banjirannya yang terletak di daerah tengah DAS Musi. Proses banjir di DAS Musi disebabkan oleh 2 variabel yaitu berupa daerah rawan banjir dan daerah rawan pasokan air banjir maka penanganan bencana banjir dilakukan secara integratif hulu dan hilir. Di daerah hulu dilakukan dengan konservasi tanah dan air, penggunaan vegetasi permanen pada sistem lahan dengan kelereng $>25\%$ (perbukitan dan pegunungan), melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Di daerah hilir dilakukan kegiatan mitigasi berupa peningkatan kapasitas saluran drainase, pembuatan tanggul dengan tidak melakukan pengurugan terhadap daerah alamiah tampungan air. Lanskap Sembilang Dangku terletak pada 5 Sub DAS. Kelima Sub DAS tersebut adalah: **1) Sub DAS Benawang; 2) Sub DAS Sembilang; 3) Sub DAS Lalan; 4) Sub DAS Calik.dan 5) Sub DAS Batanghari Leko.** Pada Gambar 3.14 tersaji Pola DAS yang mempengaruhi Ekosistem Kawasan Lanskap Sembilang Dangku.



Gambar 3.14. Peta DAS pada Lanskap Sembilang Dangku
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

c. Ekoregion

Menurut Peta Ekoregion Sumatera yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013, di dalam Lanskap Sembilang Dangku terdapat lima jenis satuan ekoregion bentang lahan. Satuan ekoregion tersebut berupa: 1) dataran fluviomarin, 2) dataran aluvial, 3) lahan gambut, 4) lembah antar perbukitan, dan 5) pesisir (estuari, laut dan sekitarnya). Pada Gambar 3.15 ditunjukkan Peta Ekoregion dalam bentang alam Sumatera yang secara ekologis mempengaruhi karakteristik ekologi Kawasan Kelola Sendang.

Satuan ekoregion bentang lahan dataran gambut menempati area di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sungai Gelang dan Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin serta Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Pulau Rimau. Karakteristik bentang lahan ini ditandai dengan topografi berupa dataran, morfologi atau relief datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, hingga berombak (3-8%). Asal proses utama bentang lahan dataran gambut adalah aktivitas organik, yaitu hasil pembusukan sisa aktivitas vegetasi lahan basah,

seperti rawa-rawa pada dataran rendah (*low land*), yang kemudian membentuk lapisan gambut yang relatif tebal dengan penyebaran luas di dataran rendah bagian timur Sumatera.



Gambar 3.15. Peta Ekoregion Sumatera
(Sumber: KLHK, 2013)

Ekoregion Dataran Gambut rentan atau berpotensi terhadap kerawanan lingkungan berupa bahaya kebakaran dan kualitas sumberdaya air dan tanah yang rendah, karena sifat kemasaman yang sangat tinggi (pH sangat rendah, mencapai <4), atau kandungan sulfat (SO_4) yang tinggi akibat proses reduksi bahan-bahan organik yang menghasilkan lapisan pirit.

Cakupan satuan ekoregion bentang lahan dataran aluvial menempati area di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Karakteristik bentang lahan pada satuan Ekoregion Dataran Aluvial, dicirikan dengan morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter. Dataran ini terbentuk dari proses utama aliran sungai (*fluvial*) yang membawa material bahan-bahan aluvium dari berbagai sumber di daerah hulu (*hinterland*) dan diendapkan di bagian bawah (*low land*) dengan struktur berlapis. Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai.

Permasalahan sumberdaya alam non-hayati dan kerawanan lingkungan secara umum pada satuan ekoregion dataran aluvial adalah adanya potensi menciptakan angin puting beliung apabila kondisi tekanan udara tidak stabil dan tidak merata. Hal ini disebabkan kondisi morfologi yang berupa dataran yang sangat luas. Perkembangan wilayah dapat memicu masalah pemanfaatan lahan dan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan permukiman, pengembangan wilayah perkotaan, konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara, yang bergantung kepada tingkat perkembangan wilayahnya.

Satuan ekoregion bentang lahan dataran fluvio-marine menempati area di sebagian wilayah Banyuasin II. Morfologi dataran pada bentang lahan ini memiliki relief datar dan terkadang agak cekung, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter.

Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (*marine*) pada masa lalu yang membentuk endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai (*fluvial*) yang membentuk lapisan aluvial di bagian atas. Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa campuran lempung dan pasir fluvial, dan endapan lempung marin (biasanya berwarna keabu-abuan) yang membentuk lapisan di bagian bawah.

Permasalahan Sumberdaya Alam Non-hayati dan Kerawanan Lingkungan secara umum pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-marin adalah meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, yang berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir. Kondisi morfologinya yang berupa dataran relatif agak cekung dan berada pada bagian hilir aliran sungai dan merupakan daerah transisi dari fluvial ke wilayah pesisir, maka kecepatan aliran sungai sedikit terhambat. Material penyusun yang didominasi oleh endapan lempung yang mempunyai sifat kembang kerut tanah yang tinggi, yang menyebabkan bangunan infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser. Air tanah di bentang lahan ini berasa payau hingga asin, dengan nilai daya hantar listrik tinggi.

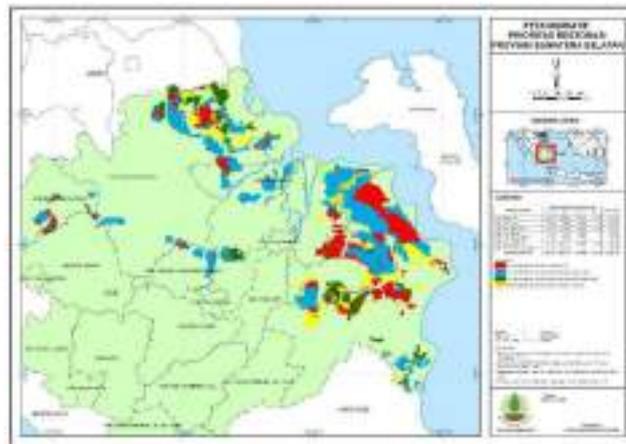
Satuan ekoregion bentang lahan dataran pesisir dengan pantai berlumpur memiliki morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <15 meter. Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (*marine*) yang berasosiasi dengan aliran sungai (*fluvial*) yang membawa material sedimen terlarut tinggi, diendapkan di sepanjang kanan-kiri muara membentuk rataaan lumpur (*mudflat*) atau rawa-rawa payau (*salt marsh*) dan delta. Material atau batuan utama penyusunnya berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa lumpur (*mud*), yaitu campuran antara lempung dan pasir halus.

Permasalahan Sumberdaya Alam Non-hayati dan Kerawanan Lingkungan secara umum pada satuan ekoregion ini adalah meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, yang berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir, drainase buruk, lingkungan kumuh, pencemaran, dan kesehatan masyarakat buruk. Permasalahan lain adalah infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser, berpotensi untuk dijumpainya jebakan air laut, yang berpengaruh terhadap air tanah berasa payau hingga asin, dengan nilai daya hantar listrik tinggi pula. Permasalahan sosial ekonomi yang sering timbul di bentang lahan ini adalah konflik sosial berupa status kepemilikan lahan, tata ruang wilayah, dan tumpang-tindih kebijakan di antara instansi terkait akibat perkembangan rataaan pasang surut dan delta yang membentuk lahan-lahan baru yang berpotensi terhadap intensitas perubahan garis pantai. Terkait pendapatan masyarakat, pengendapan material sedimen yang intensif menyebabkan pendangkalan muara (*estuari*), laguna, dan perairan laut dangkal, yang berpotensi menurunnya produktivitas penangkapan perikanan laut. Masalah lainnya

adalah konversi hutan mangrove untuk lahan tambak (*illegal logging*), pertumbuhan permukiman yang tidak teratur, dan meningkatnya biaya konservasi lingkungan.

d. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017, terdapat 32 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Sumsel. Target restorasi gambut di Provinsi Sumsel dalam kurun waktu 2016-2020 diharapkan mencapai angka 848.325 Ha yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, sebagian besar target restorasi tersebut berada dalam kawasan budidaya berizin, selebihnya berada dikawasan hutan lindung dan kawasan budidaya tidak berizin. Badan Restorasi Gambut (BRG) memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 8 KHG yang terletak di 3 Kabupaten yakni Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Gambar 3.16 ditunjukkan peta indikatif prioritas restorasi Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.16. Peta Indikatif Prioritas Restorasi Provinsi Sumatera Selatan
(Sumber:PSU-PIU KS, 2018)

Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) prioritas di Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan kriteria perlindungan gambut. Kriteria tersebut *Pertama* berdasarkan ketebalan tiga meter atau lebih. *Kedua*, kawasan plasma nutfah spesifik atau endemik. *Ketiga*, adanya spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, perlindungan cagar budaya. *Kelima*, ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.

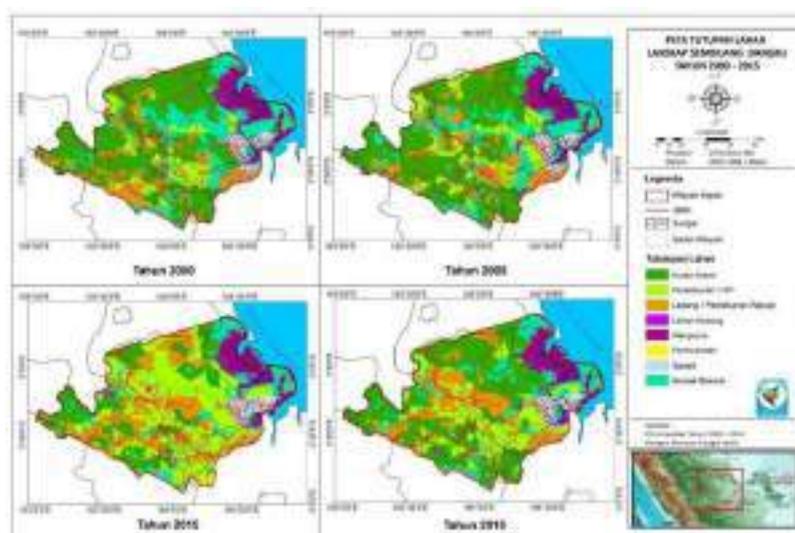
Delapan KHG prioritas di Sumsel adalah: *Pertama*, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin. Tepatnya berada di Kecamatan Bayunglincir dan Banyuasin II. *Kedua*, KHG Sungai Sugihan-Sungai Saleh yang berada di Kabupaten Banyuasin. Tepatnya di Kecamatan Banyuasin I. *Ketiga*, KHG Sungai Cawang-Sungai Air Lanang di Muba. Tepatnya Kecamatan

Bayunglincir. *Keempat*, KHG Sungai Medak-Sungai Cawang di Kecamatan Bayunglincir Kabupaten Muba.

Prioritas KHG berikutnya atau *Kelima*, adalah KHG Sungai Sembilang-Sungai Cawang di Kecamatan Bayunglincir dan Muaratelang di Kabupaten Muba dan Banyuasin. *Keenam*, KHG Sungai Sibumbang-Sungai Batok di Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI) OKI, yang meliputi Kecamatan Rantau Alai, Air Sugihan, Cengal, Kayuagung, Lempuing, Pampangan, Pedamaran, dan Tulungselapan. *Ketujuh*, KHG Sungai Lumpur-Sungai Jeruju di Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sedangkan yang *Kedelapan*, KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur di Kecamatan Pampangan di Kabupaten OKI.

e. Tutupan Lahan

Lanskap Sembilang Dangku mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir luasan hutan alam mengalami penurunan yang sangat drastis. Dilain pihak tutupan lahan berupa perkebunan dan hutan tanaman mengalami peningkatan. Tutupan lahan lainnya seperti ladang dan juga sawah mengalami peningkatan meskipun dalam laju yang jauh lebih lambat. Secara umum perubahan tutupan lahan di Lanskap Sembilang Dangku menggambarkan kebutuhan yang tinggi akan areal perkebunan/hutan tanaman dan juga kebutuhan lahan budidaya masyarakat.

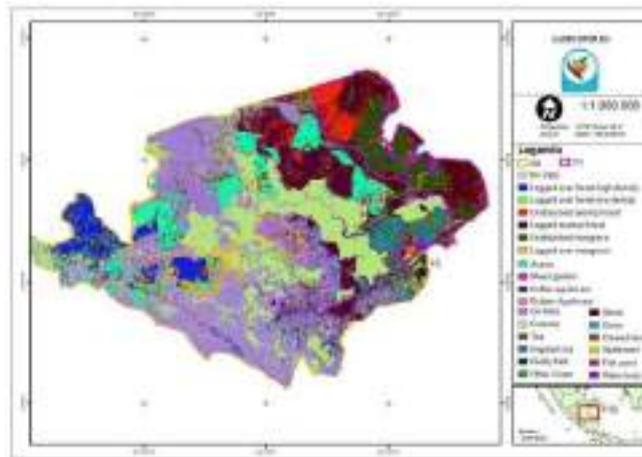


Gambar 3.17. Peta perubahan tutupan lahan Lanskap Sembilang Dangku (2000-2015)
(Sumber: Hasil analisis citra lansat, PSU-PIU, 2018)

Kondisi tutupan lahan tahun 2015 telah mengalami banyak perubahan dibandingkan 15 tahun yang lalu. Perubahan pola *land cover* Sembilang Dangku sejak tahun 2000 sampai 2015 ditunjukkan pada Gambar 3.17. Paling tidak beberapa kecenderungan yang terjadi pada tutupan lahan pada lanskap Sembilang Dangku yaitu:

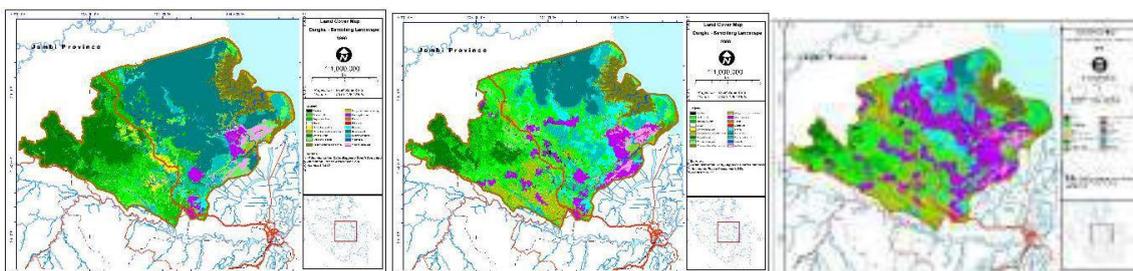
1. Berkurangnya ekosistem hutan alam tropis
2. Berkurangnya ekosistem rawa gambut
3. Berkembangnya areal perkebunan dan hutan tanaman
4. Berkembangnya areal persawahan meskipun dalam laju yang rendah

Terkait tutupan lahan, sumber referensi lain dokumen GGP Sumsel menyajikan Peta Tutupan Lahan Tahun 2014 juga mengungkap hal yang sama bahwa terdapat komposisi perubahan pola tutupan lahan hampir sama dengan peta Tahun 2015 di atas, ditunjukkan pada Gambar 3.18. Pada kedua peta tersebut areal lanskap didominasi perkebunan. Peta dari dokumen GGP Sumsel memperlihatkan bahwa 48,63% areal lanskap pada Tahun 2014 adalah perkebunan, baik perkebunan kelapa maupun kelapa sawit.



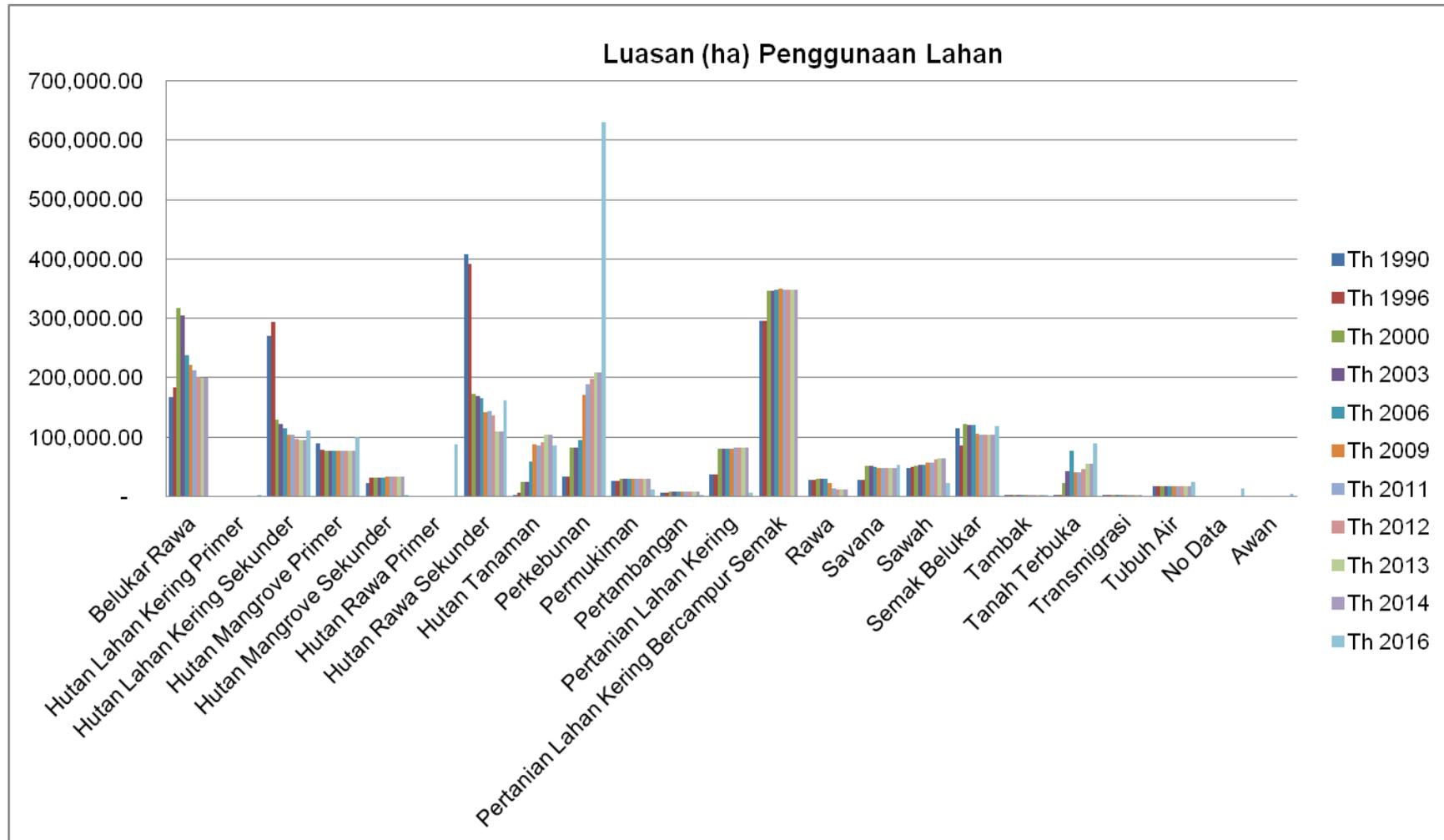
Gambar 3.18. Peta Tutupan Lahan Area Kelola Sendang 2014
(Sumber Peta: Dokumen GGP Sumsel)

Terkait dengan data-data sebelumnya dan pernyataan tentang pola perubahan tutupan lahan, data berikut memperkuat argumentasi tersebut bahwa adanya pola penurunan tutupan lahan secara simultan dalam satu dasawarsa atau tepatnya selama 26 tahun sejak 1990 sampai 2016. Pada Gambar 3.19 tergambar pola perubahan tutupan lahan yang berlangsung sejak tahun 1990 sampai tahun 2016.



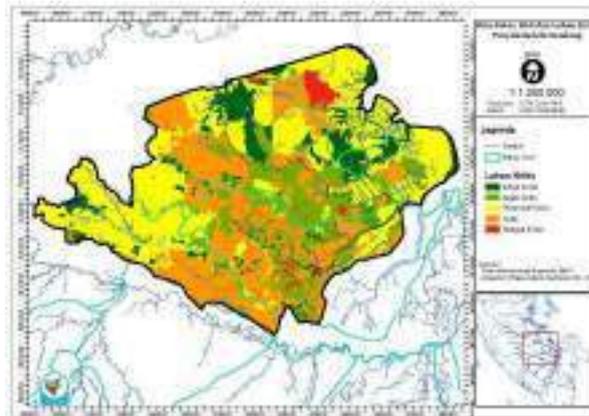
Gambar 3.19. Peta perubahan tutupan lahan Lanskap Sembilang Dangu (1990-2016)
(Sumber: Hasil analisis citra lansat, ZSL, 20018)

Adapun data perubahan pola penggunaan lahan mulai dari tahun 1990 sampai tahun 2016 dideskripsi dalam bentuk grafik seperti yang tersaji pada Gambar 3.20.



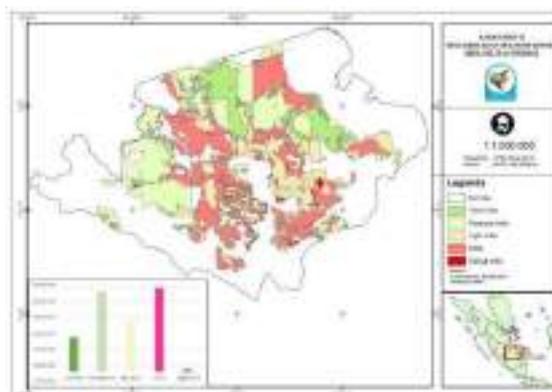
Gambar 3.20. Pola Kecenderungan Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan Kelola Sendang dari 1990 sampai 2016
(sumber: hasil analisis spasial, ZSL, 2018)

Perubahan dan menurunnya tutupan lahan di kawasan Kelola Sendang yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin maupun Musi Banyuasin, sangat dipengaruhi dengan kondisi kekritisan lahan di wilayah tersebut. Pada Gambar 3.21 ditunjukkan Peta Lahan Kritis di Kawasan Kelola Sendang. Sedangkan pada Gambar 3.22 dan Gambar 3.23 tersaji peta lahan kritis di dalam area konsesi dan dan di luar area konsesi pada kawasan lanskap Sendang.

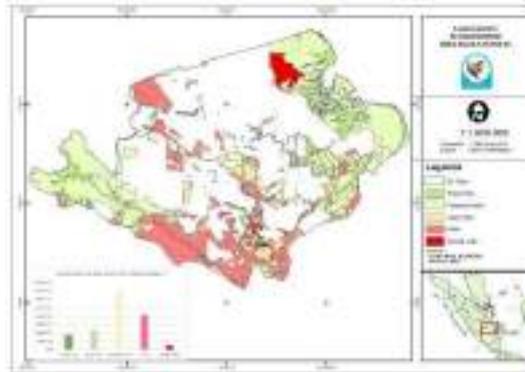


Gambar 3.21 Peta Pola DAS dan Lahan Kritis pada Kawasan Kelola Sendang
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Kondisi tutupan lahan di kawasan hutan berdasarkan Peta Lahan Kritis KLHK Tahun 2013 dan Peta Konsesi Hutan dari KPH menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di area konsesi berstatus kritis dan potensial kritis. Sedangkan untuk di luar konsesi, lahan yang sangat kritis sebagian besar berada di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang. Kondisi kekritisan lahan ini kemungkinan besar terjadi koreksi yang signifikan akibat peristiwa kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 2015. Pembahasan mengenai identifikasi kendala, tantangan dan permasalahan di kawasan Sembilang Danguku disajikan secara rinci pada BAB V.

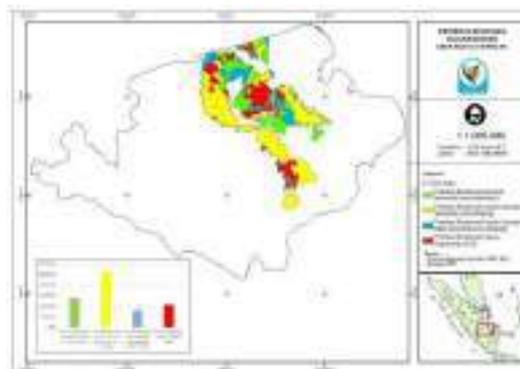


Gambar 3.22. Lahan Kritis di Dalam Konsesi di Area Lanskap Sendang
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)



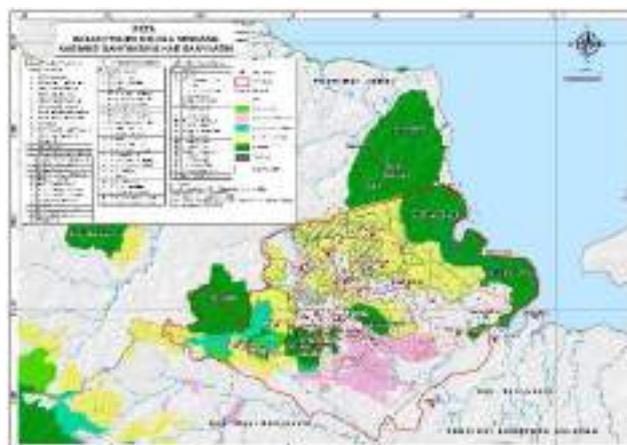
Gambar 3.23. Lahan Kritis di Luar Konsesi di Area Lanskap Sendang
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Peristiwa kebakaran hutan Tahun 2015 menimbulkan keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Badang Restorasi Gambut (BRG) yang menetapkan sebagian area Lanskap Sembilang Dangku sebagai prioritas kegiatan restorasi gambut BRG, seperti teradji pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24. Prioritas Restorasi Gambut BRG di Area Lanskap Sendang
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Pada Gambar 3.25 disajikan Peta batas area konsesi (konsesi tanaman kehutanan, konsesi tanaman industri dan konsesi pada wilayah tertentu) dan Perusahaan Konsesi yang terlibat.



Gambar 3.25. Batas Area Konsesi Hutan dan Perusahaan Konsesi di Kawasan Sembilang Dangku (sumber: Hasil Olah data spasial ZSL, 2018)

2. Keanekaragaman Hayati pada Kawasan Kelola Sendang

a. Tipe-tipe ekosistem alami

Berdasarkan tipe ekosistem alami di Sumatera Selatan, Lanskap Sembilang Dangku memiliki berbagai tipe ekosistem alami. Tipe ekosistem alami tersebut terdiri dari ekosistem marine, ekosistem perairan tawar, ekosistem semi teresterial dan ekosistem terestrial. Ekosistem marine terdiri dari ekosistem laut dan terumbu karang. Sedangkan ekosistem perairan terdiri dari ekosistem sungai dan riparian. Ekosistem semi teresterial yang terdapat di lanskap Sembilang Dangku adalah ekosistem mangrove. Untuk ekosistem teresterial, terdapat ekosistem dataran rendah berupa hutan pantai, hutan dipterokarpa, rawa lebak, rawa padang surut dan rawa gambut.

Ekosistem sungai di lanskap Sembilang Dangku termasuk dalam zona tengah dan zona hilir dari Sungai Musi. Zona tengah (*middle stream*) mempunyai kecepatan arus lambat. Arus yang lambat menyebabkan pada daerah ini air tidak banyak berganti, sehingga menyebabkan kualitas air di zona tengah sungai lebih jelek daripada zona hulu. Zona tengah umumnya banyak terdapat anak-anak sungai yang bermuara di sungai utama, sehingga sifat ekologiannya juga sangat kompleks. Perairan zona hilir sungai sangat dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut, sehingga sifat fisika, biologi dan kimianya sedikit agak berbeda dengan perairan sungai di zona hulu dan zona tengah. Zona hilir sungai biasanya subur karena di daerah ini terdapat banyak jebaran nutrisi akibat pertemuan antara air laut dengan air tawar. Selain berbagai karakteristik itu, zona hilir Sungai Musi, merupakan kawasan industri.

Ekosistem riparian adalah ekosistem yang terbentuk di kanan kiri sungai. Ekosistem ini sangat penting, karena mempunyai berbagai fungsi ekologis, diantaranya : (a) sebagai habitat dan koridor flora fauna fungsinya akan sangat terlihat pada saat musim kemarau, (b) mencegah aliran permukaan masuk ke dalam sungai sehingga mengurangi total suspended solid (TSS) yang masuk ke perairan.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak diantara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Mangrove sendiri merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan yang menyediakan berbagai jenis produk dan pelayanan lingkungan seperti proteksi terhadap abrasi, pengendali intrusi air laut, mengurangi tiupan angin kencang, mengurangi tinggi dan kecepatan arus gelombang, rekreasi, dan pembersih air dari polutan. Hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di sepanjang pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Ekosistem mangrove di Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan ekosistem mangrove terluas di pantai timur Sumatera dan di kawasan Bagian Barat Indonesia.

Ekosistem hutan mangrove di kawasan Sembilang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat sekitar 17 spesies mangrove sejati atau sekitar 43% dari seluruh spesies mangrove di Indonesia, 6 spesies mangrove ikutan, 8 spesies tumbuhan hutan rawa, 5 spesies tumbuhan air dan 6 spesies tumbuhan paku. Spesies mangrove sejati yang ditemukan antara lain *Sonneratia alba*, *Avicennia marina*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera gymnorhiza*, dan *Xylocarpus granatum*.

Di daerah pesisir biasanya berkembang hutan mangrove dan hutan pantai. Hutan mangrove tumbuh pada habitat berlumpur sedangkan hutan pantai tumbuh pada habitat berpasir, kerikil dan berbatu. Ekosistem hutan pantai dijumpai pada daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu dan berada pada garis pasang tertinggi. Pada ekosistem hutan ini tumbuh beberapa spesies pohon seperti *Barringtonia speciosa*, *Terminalia catappa*, *Calophyllum inophyllum*, *Hibiscus tiliaceus*, *Thespesia populnea*, *Casuarina equisetifolia*, dan *Pisonia grandis*. Hutan pantai di lanskap Sembilang Dangku ini ditemukan di kawasan di Taman Nasional Sembilang.

Ekosistem hutan dataran rendah yang masih berupa tutupan hutan alam sebagian besar berada di kawasan hutan produksi Sungai Kapas-Meranti dan kawasan Suaka Margasatwa Dangku. Sebagian kecil dari kawasan hutan produksi S. Kapas dan kawasan hutan produksi Rawas Lakitan termasuk dalam kategori berbukit elevasi rendah. Eksistensi ekosistem hutan dataran rendah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sebagai ekosistem hutan alam yang tersisa (*remnant forest*). Berdasarkan hasil kajian risiko kehilangan biodiversitas, maka ekosistem hutan alam yang tersisa di kawasan hutan produksi S. Kapas, S. Meranti, S. Rawas Lakitan, dan kawasan Suaka Margasatwa Dangku ini sudah termasuk dalam kategori “*critically endangered eco-floristic sectors*” (Laumonier, et al., 2010 dalam Dokumen Sehati Sumsel 2017-2021).

Tipologi lahan ekosistem rawa terbesar di Sumatera Selatan, yaitu lahan rawa yang meliputi rawa lebak dan rawa pasang surut. Sedangkan tipologi lahan rawa berdasarkan jenis dan kondisi tanah, terdapat dua jenis tanah yaitu tanah mineral (terdiri atas tanah *aluvial* dan *gleihumus*) dan tanah gambut (*peat soils*). Pada saat ini jasa ekosistem rawa lebak telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, sumber air baku, peternakan, pertanian, transportasi. Rawa lebak dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu rawa lebak banjir, rawa lebak tadah hujan dan rawa lebak campuran. Rawa lebak banjir merupakan salah satu tipe ekosistem yang produktif bagi perikanan air tawar. Airnya bersumber dari limpahan anak Sungai Komering (Batanghari Air Padang), air bersifat agak masam (pH 5,5 – 6). Fluktuasi volume airnya tinggi (sangat bervariasi sepanjang tahun) karena dipengaruhi oleh musim. Ciri khas yang lain dari rawa lebak banjir adalah, hamparannya luas, perairannya dangkal, sinar matahari dapat menembus sampai lapisan dasar perairan, banyak terdapat vegetasi air, daun-daun yang jatuh ke perairan merupakan sumber nutrisi dan pakan alami. Tipe rawa lebak banjir yang ditemui termasuk rawa lebak kumpai, rawa banjir hutan rawang, sungai mati (*oxbow lake*) dan lebung-lebung (cekungan atau alur-alur air di daerah rawa). Untuk DAS Musi, tipe rawa lebak kumpai dan lebung banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan tipe rawa banjir hutan rawang dan sungai mati (*Oxbow lake*) banyak terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Rawa lebak tadah hujan merupakan cekungan, sumber air utama dari air hujan, air berwarna coklat hitam, air bersifat masam (pH 4,5), jenis ikan didominasi oleh ikan hitam (ikan rawa), vegetasi rumputan dan tanaman bawah, hanya terdapat pemanfaatan perikanan tangkap,

musim kemarau bagian rawa yang kering ditanami semangka dan padang gembala kerbau, di sekitar rawa terdapat pemukiman, kebun karet dan hutan rawa sekunder (hutan gelam). Dari ekosistem rawa, pada kelompok tanaman pangan ditemukan spesies tanaman padi lokal spesifik lahan rawa lebak.

Di Sumatera Selatan Lahan rawa pasang surut lebih banyak tersebar di sisi timur wilayah provinsi Sumatera Selatan (wilayahnya mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin), umumnya merupakan daerah payau yang dipengaruhi pasang surut air laut. Vegetasinya kebanyakan berupa tumbuhan *Palmae* dan hutan kayu rawa (bakau). Selain vegetasi tersebut, saat ini sebagian besar kawasan rawa pasang surut tersebut sudah dibuka menjadi lokasi persawahan untuk pertanaman padi dan jagung serta tanaman sayur-sayuran oleh masyarakat setempat.

Ekosistem perairan rawa Sumatera Selatan termasuk di Lanskap Sembilang Dangku, umumnya bertipe gambut. Hal ini dicirikan dengan perairan yang berarus lambat atau tidak berarus, warna air kehitaman, pH dan oksigen rendah dan banyak mengandung logam alkali. Rawa gambut di Sumatera Selatan ditandai dengan tingkat keasaman yang ekstrem rendah, anaerobik dan kondisi miskin unsur hara. Asal nama rawa gambut karena substrat mereka adalah gambut terdiri dari tanaman detritus yang secara bertahap melepaskan tanin dan asam organik dalam air, kondisi kurang buffer menghasilkan nilai pH-nya rendah. Selain itu, perairan di rawa gambut memiliki kandungan ambient oksigen rendah, konsekuensi lain dari pembusukan tanaman.

Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik yang terdapat di lantai hutan lahan basah. Secara alami, tanah gambut terdapat pada lapisan tanah paling atas. Di bawahnya terdapat lapisan tanah aluvial pada kedalaman yang bervariasi. Disebut sebagai lahan gambut apabila ketebalan gambut lebih dari 50 cm.

Rawa gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan memainkan peranan penting dalam perekonomian negara, diantaranya berupa ketersediaan berbagai produk hutan berupa kayu maupun non-kayu. Disamping itu, lahan gambut juga memberikan berbagai jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diantaranya berupa pasokan air, pengendalian banjir serta berbagai manfaat lainnya. Hutan rawa gambut juga berperan sangat penting sebagai penyimpan dan penyerap karbon, penyimpan sumberdaya genetik (*plasma nutfah*), serta keanekaragaman hayati lainnya.

b. Beberapa Species Penting

Dalam penyusunan Dokumen Sehati Sumsel 2017-2021 keanekaragaman hayati satwa yang telah berhasil dikumpulkan terdiri dari 65 spesies amfibi, 71 spesies reptilia, 81 spesies mamalia (11 spesies primata; 70 spesies non-primata), 334 spesies burung/aves, dan 133 spesies *arthropoda* (Lampiran 11), dan biota perairan yang terdiri dari 270 spesies ikan, 75

spesies *zooplankton*, 66 spesies *perifiton*, 79 spesies *zoobenthos*. Jumlah keanekaragaman satwa liar Provinsi Sumatera Selatan dalam daftar tersebut hanya sebagian dari seluruh populasi satwaliar di Provinsi Sumatera Selatan yang sampai saat ini masih belum dapat diidentifikasi jumlahnya. Pada Tabel 2 tersaji data jenis Primata dan status konservasinya di wilayah Sumatera Selatan. Di kawasan Lanskap Sembilang Dangku terdapat beberapa spesies mamalia non primata yang diidentifikasi terdapat di beberapa lokasi. Diantaranya adalah di Hutan Harapan yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi untuk tujuan restorasi ekosistem. Lokasi ini merupakan habitat bagi dua spesies prioritas konservasi Sumatera Selatan, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) serta 58 spesies mamalia non-primata lainnya.

Tabel 3.2. Jenis Primata dan Status Konservasinya di Sumatera Selatan

No.	Nama Jenis	Nama Lokal	Status Konservasi IUCN
1	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	Vulnerable
2	<i>Cephalopachus bancanus</i>	Tarsius, Tangkasi, Krabuku, Mentilin, Pelilean	Vulnerable (sebagai <i>Tarsius bancanus</i>)
3	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	Vulnerable
4	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet ekor panjang	Least Concern
5	<i>Presbytis melalophos</i>	Simpai, Surili	Near Threatened (sebagai <i>P. melalophos melalophos</i>)
6	<i>Presbytis sumatrana</i>	Simpai. Cingkuk	Endangered (sebagai <i>P. melalophos sumatranus</i>)
7	<i>Presbytis mitrata</i>	Simpai	Endangered (sebagai <i>P. melalophos mitrata</i>)
8	<i>Presbytis femoralis</i>	Cingkuk, Simpai	Near Threatened
9	<i>Trachypithecus cristatus</i>	Lutung kelabu	Near Threatened
10	<i>Hylobates agilis</i>	Owa, Ungko	Endangered
11	<i>Symphalangus syndactylus</i>	Siamang	Endangered

Sumber: Dokumen Sehati Sumsel (2017 – 2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, 2017 dalam PSU-PIUKS, 2018.

Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera juga ditemukan di kawasan TN Sembilang, bersama dengan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa Sambar (*Rusa unicolor*), dan 16 spesies mamalia non-primata lainnya. Di SM Dangku, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) menjadi prioritas utama konservasi (*key species*), karena termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang dan *red list* IUCN dengan status *critically endangered*. Selain itu terdapat beberapa satwa lainnya seperti gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus scrofa*) dan 15 spesies mamalia non-primata lainnya.

Burung Indonesia telah mengidentifikasi 40 Daerah Penting bagi Burung dan Keanekaragaman Hayati (DPB) di Wilayah Sumatera dan 7 DPB di wilayah Sumatera Selatan.

Wilayah DPB tersebut adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang, Tanjung Selokan, Tanjung Koyan, Dataran Banjir Ogan Komering, Gunung Dempo dan Meranti.

Kawasan Sembilang, merupakan habitat burung air dan termasuk salah satu tujuan dari jalur terbang burung migran. Hutan mangrove yang lebat, sungai-sungai yang berkeluk-luk dan dataran lumpur yang luas tempat persinggahan dan mencari makan bagi burung-burung migran maupun burung penetap. Kunjungan ke hutan mangrove dan pengamatan satwa dapat dilakukan dengan menyusuri sungai-sungai di TN. Sembilang. Kawasan ini menjadi tempat berbiak Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), Bangau storm (*Ciconia stormi*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Elang wallace (*Spizaetus nanus*), Mentok rimba (*Cairina scutulata*), Gajahan timur (*Numenius madagascariensis*), Trinil nordmann (*Tringa guttifer*), Trinil-lumpur Asia (*Limnodromus semipalmatus*) (Gambar 4.42), Merpati-hutan perak (*Columba argentina*), Punai besar (*Treron capellei*), dan Raja-udang kalung-biru (*Alcedo euryzona*).

Kawasan Meranti, khususnya Hutan Harapan, merupakan rumah bagi 307 jenis burung dengan 9 jenis burung terancam punah, 2 jenis endemik, 66 jenis dilindungi peraturan perundangan RI dan 29 jenis migran. Salah satu jenis genting adalah Bangau storm (*Ciconia stormi*) dan rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) yang termasuk dalam apendiks I (CITES). Keanekaragaman jenis lainnya adalah 64 jenis mamalia, 71 jenis reptil dan 123 jenis ikan.

Jenis burung pemigran yang melintasi dan singgah ke Sumatera sangat tinggi termasuk salah satu tujuan adalah Taman Nasional Sembilang. Termasuk jenis burung pemangsa seperti elang-alap shikra (*Accipiter badius*), jenis burung pantai seperti gajahan besar (*Numenius arquata*), biru laut ekor hitam (*Limosa limosa*), trinil bedaran (*Xenus cinereus*), jenis burung teresterial seperti sikatan pantat kuning (*Ficedula zanthopygia*) serta banyak berbagai jenis burung lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan tercatat 114.000 burung migran singgah di Taman Nasional Berbak Sembilang.

Sumatera Selatan adalah region dengan biodiversitas ikan yang tinggi, paling tidak terdapat 233 spesies ikan terkelompok dalam 38 familia hanya dari Sungai Musi beserta anak-anak sungainya. Jenis ikan pada ekosistem rawa/rawa banjiran terdiri atau dua kelompok, yaitu kelompok ikan hitam (*black fish*) dan kelompok ikan putih (*white fish*). Contoh kelompok ikan hitam, yaitu betok (*Anabas testudineus*), gabus (*Channa striata*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*) dan tembakang (*Helostoma temmenckii*). Contoh kelompok ikan putih, yaitu lais (*Cryptopterus spp.*), baung (*Mystus nemurus*), patin (*Pangasius spp.*), jelawat (*Leprobarbus hoeveni*) dan lampam (*Barbodes schwanefeldii*). Ikan yang hidup di perairan rawa terutama dari kelompok ikan hitam pada umumnya mempunyai alat pernapasan tambahan sehingga dapat hidup di perairan yang oksigennya rendah dan asam.

Ekosistem perairan tawar di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi dan Sungai Lematang, juga menjadi habitat bagi salah satu jenis ikan pari air tawar raksasa (*Urogymnus polylepis*). Jenis ikan pari air tawar yang terkategori Endangered (IUCN 2013) ini memiliki karakteristik ukuran tubuh yang sangat besar, bisa mencapai 600 kg dan diameter badan

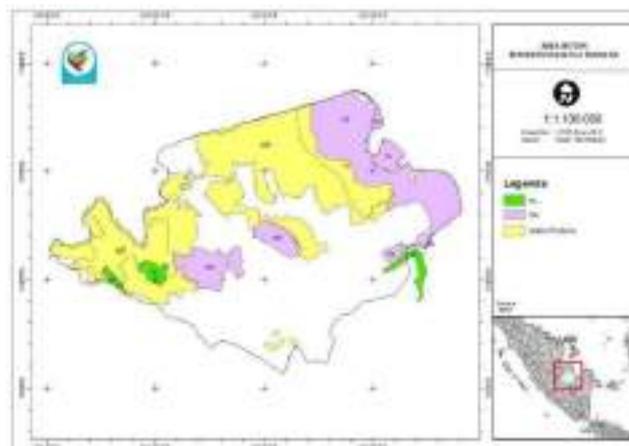
mencapai 2 m. Sebanyak delapan laporan tertangkapnya ikan pari air tawar ini di perairan Sumatera Selatan antara 2011-2016, empat di Sungai Musi, tiga di Sungai Lematang dan satu di Sungai Bungin.

3. Peruntukan Lahan Kawasan Hutan dan Perkebunan

Lanskap Sembilang Dangku didominasi oleh kawasan hutan dan perkebunan. Kawasan hutan melingkupi 63,62% dari total luas area lanskap, terdiri dari hutan produksi (29,63%), Hutan Produksi Konversi (11,60%), Hutan Produksi Terbatas (5,99%), Hutan Suaka Alam (16,40%). Kawasan Perkebunan mencakup luasan 20,26% dari total area.

a Kawasan Hutan

Kawasan hutan di lanskap Sembilang Dangku terbagi menjadi beberapa fungsi kawasan, yaitu hutan lindung, hutan produksi dan juga kawasan konservasi. Kawasan hutan ini berada dalam 2 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yaitu: KPHP Meranti dan KPHP Lalan Mangsang Mendis, 1 taman nasional, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, dan 2 Suaka Marga Satwa, yaitu SM Dangku dan SM Bentayan. Gambaran Kawasan Hutan di kawasan Lanskap Sembilang Dangku tersaji pada Gambar 3.26.



Gambar 3.26. Peta Kawasan Hutan di Lanskap Sembilang Dangku
(sumber: Hasil Olah Data Spasial ZSL, 2018)

Kawasan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang berada di Lanskap Sembilang adalah Seksi Pengelolaan Wilayah (SPW) II Sembilang dengan luas 202.896 Ha. Sedangkan untuk KPH Produksi, KPHP Lalan Mendis memiliki luasan 265.953 Ha dan KPHP Meranti luasannya 244.162 Ha. Untuk kawasan berupa suaka marga satwa, SM Dangku memiliki luasan 47.996,45 Ha (SK Menteri KLHK Np. 866/2014) dan SM Bentayan dengan luas 23.220 Ha.

1) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi di Lanskap Sembilang Dangku saat ini berada dalam wilayah KPHP Meranti dan KPHP Lalan Mendis. KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (LMM) terdiri dari 2 (dua) kelompok hutan yaitu Hutan Produksi (HP) Lalan dan Hutan

Produksi Mangsang Mendis. Letak HP Lalan secara geografis berada pada 01°42' - 02°25' LS dan 103°40' - 104°28' BT, sedangkan HP Mangsang Mendis berada pada 02°09' - 02°25' LS 103°51' - 104°20' BT. Berdasarkan rancang bangun dan hasil tata batas yang dilakukan oleh BPKH Wilayah II Palembang tahun 2002 serta arahan pencadangan KPHP/KPHL Propinsi Sumatera Selatan dari Badan Planologi Departemen Kehutanan, luas KPHP Unit III LMM ± 279.094 ha, yang merupakan gabungan dari 2 kawasan hutan produksi, yaitu HP Lalan seluas ± 210.434 ha dan HP Mangsang Mendis seluas ± 68.660 ha. Menurut data yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009, bahwa luas HP Lalan Mangsang Mendis adalah 377.340 ha yang terdiri dari HP Lalan 206.734 ha dan luas HP Mangsang Mendis adalah 170.570 ha.

2). Kawasan Hutan Lindung

Terdapat 3 unit hutan lindung di Lanskap Sembilang Dangku. Dua diantaranya berada di wilayah KPHP Meranti di Kabupaten Musi Banyuasin dan satu hutan lindung berada di KPHL Unit I Banyuasin.

3). Kawasan Konservasi

Terdapat 3 kawasan konservasi dalam lanskap Sembilang Dangku, yaitu: Taman Nasional Sembilang, Suaka Margasatwa Bentayan dan Suaka Margasatwa Dangku. Taman Nasional Sembilang berada pada wilayah Kabupaten Banyuasin yang didominasi oleh ekosistem mangrove dan hutan rawa dataran rendah. Suaka Margasatwa Dangku berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Suaka Margasatwa Bentayan berada di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

a) Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang

Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang merupakan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan penggabungan dari UPT Taman Nasional Berbak di Provinsi Jambi dan UPT Taman Nasional Sembilang di Provinsi Sumatera Selatan. Penggabungan ini berdasarkan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 menjadi UPT Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Dalam UPT ini kawasan Taman Nasional Sembilang menjadi SPTN Wilayah II/ Sunsang/ Sungai Sembilang yang merupakan bagian dari Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Pada Tahun 1994, Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan Hutan Suaka Alam Sembilang dengan luas 205.750 Ha. Tahun 1996/1997, dilakukan penilaian dengan hasil bahwa kawasan Hutan Suaka Alam Sembilang memenuhi kriteria sebagai kawasan pelestarian dalam bentuk taman nasional. Selanjutnya pada Tanggal 19 Maret 2003, ditetapkan sebagai Taman Nasional Sembilang dengan luas 202.896,31 Ha melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 95/Kpts-II/2003.

Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan mangrove terluas di Indonesia bagian barat yang relatif utuh dengan keragaman jenis mangrove yang tinggi.

Kawasan Sembilang juga merupakan perwakilan hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Propinsi Sumatera Selatan. Tumbuhan yang ada di daratandan perairan dicirikan dengan adanya paku gajah (*Acrostichum aureum*), nipah (*Nypa fruticans*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus tectorius*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), nibung (*Oncosperma tigillaria*), jelutung (*Dyera costulata*), menggeris (*Koompassia excelsa*), gelam tikus (*Syzygium inophylla*), *Rhizophora sp.*, *Sonneratia alba*, dan *Bruguiera gimnorrhiza*.

Kawasan Sembilang merupakan habitat harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), tapir (*Tapirus indicus*), kucing mas (*Catopuma temminckii temminckii*), rusa sambar (*Cervus unicolor equinus*), lumba-lumba air tawar (*Orcaella brevirostris*), siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*), buaya (*Crocodylus porosus*), biawak (*Varanus salvator*), labi-labi besar/penyu air tawar (*Chitra indica*), ikan sembilang (*Plotusus canius*), blekok asia (*Limnodromus semipalmatus*), trinil tutul (*Pseudototanus guttifer*), undan putih (*Pelecanus onocrotalus*), bluwok putih (*Mycteria cinerea*), bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), dara laut sayap putih (*Chlidonias leucoptera*), dan lain-lain.

Kawasan Sembilang terletak di pesisir timur provinsi Sumatera Selatan yang secara astronomi berada antara 104°11' - 104°57' BT dan 01°38' - 02°28' LS sedangkan secara geografis berbatasan dengan: di sebelah Utara dengan Sungai Benu dan batas Provinsi Jambi - di sebelah Timur dengan Selat Bangka, Sungai Banyuasin – di sebelah Selatan dengan Sungai Banyuasin, Sungai Air Calik, dan pemukiman transmigrasi Karang Agung Ilir - di sebelah Barat dengan Hutan Produksi, HTI PT. Sumber Hijau Permai, Perkebunan Sawit (PT. Raja Palma, PT. Citra Indo Niaga) dan APL Kab. Banyuasin. Secara administratif pemerintahan Kawasan Sembilang terletak di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Tujuan pengelolaan Taman Nasional Sembilang yang dirumuskan dalam RPJPTN Sembilang 2015-2028 adalah “Mengukuhkan model pengelolaan lahan basah yang mampu menyelenggarakan fungsi konservasi, sedemikian rupa, sehingga berpengaruh nyata terhadap fungsi sistem penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial, ekonomi dan budaya pada tingkat komunitas dan wilayah”. Pengelolaan dilakukan dengan membagi kawasan menjadi beberapa zona. Zona tersebut adalah Zona Inti (\pm 83.361,69 Ha), Zona Rimba (\pm 94.956,59 Ha), Zona Pemanfaatan (\pm 4.117,83 Ha), Zona Tradisional (\pm 5.272,61 Ha), Zona Rehabilitasi (\pm 12.285,67 Ha), dan Zona Khusus (\pm 2.900,92 Ha). Pada Gambar 3.27 ditunjukkan peta zonasi Taman Nasional Sembilang dengan proporsi kuasan masing-masing zonasi.



Gambar 3.27. Peta Zonasi Taman Nasional Berbak Sembilang
(Sumber: RPJP TN Sembilang Periode 2015-2024 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Sembilang. Permasalahan tersebut adalah perambahan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah, pengambilan biota perairan dengan pukat harimau (*trawl*), ncaman punahnya material genetik spesies flora (misalnya jenis nibung) akibat pengambilan secara terus menerus di dalam kawasan tanpa adanya upaya konservasi jenis (budidaya), kebakaran hutan yang diindikasikan akibat aktifitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Sembilang serta adanya pemegang IUPHHK-HT di sekitar kawasan Sembilang yang belum memiliki ikatan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Terdapat dua kawasan pemukiman yang berada di dalam wilayah pengelolaan SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, yaitu Desa Tanah Pilih dan Dusun Sei Sembilang Desa Sungsang IV. Kedua pemukiman ini berada di lokasi yang minim akses. Baik terkait akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik maupun transportasi.

Fasilitas pendidikan formal yang ada di Dusun Sembilang adalah satu unit Sekolah Dasar dan 1 unit PAUD. Pembangunan sekolah tingkat SMP tidak dimungkinkan karena batasan-batasan dari pengelola taman nasional. Angka putus sekolah di dusun ini cukup tinggi. Sekolah tingkat SMP terdekat terletak di Desa Sungsang IV yang berjarak 1,5 jam dari Dusun Sembilang. Air bersih di Dusun Sei Sembilang didapat dari pengumpulan air hujan, sumur bor dan air galon. Air dari sumur bor masih bersifat payau sehingga tidak dipergunakan untuk air minum.

Gambaran dan potret kehidupan masyarakat di kawasan Sembilang, sanitasi, selain fasilitas MCK yang sangat terbatas, terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah padat. Sampah menumpuk diberbagai tempat baik di sekitar tempat tinggal maupun di tempat terbuka, disajikan pada Gambar 3.28.



Gambar 3.28. Kondisi Pola Penghidupan Warga Masyarakat di Dusun Sei Sembilang
(Sumber: Dokumentasi observasi dan studi research team, 2015)

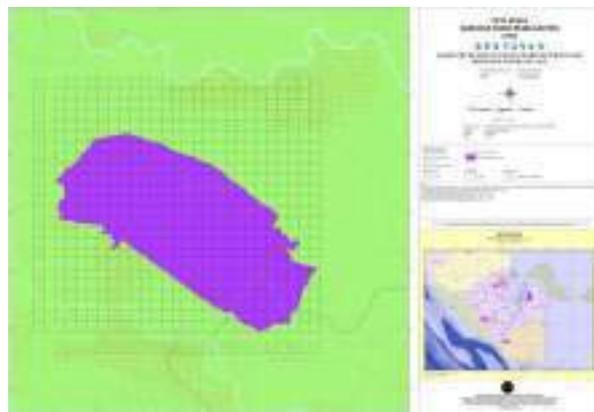
b) Suaka Margasatwa Bentayan

Suaka Margasatwa (SM) Bentayan adalah sebuah kawasan konservasi yang terletak berdekatan dengan SM Dangku, yang secara geografis berada pada posisi 103°38 - 104°4 Bujur Timur dan 2°04 - 2°30 Lintang Selatan. SM Bentayan ditunjuk sebagai suaka margasatwa sejak tahun 2001 berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan 76/Kpts-II/2001 dengan luas wilayah ± 23.220 Ha. Secara administratif pemerintahan, SM Bentayan terletak di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. SM Bentayan termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang didominasi flora jenis famili Dipterocarpaceae antara lain meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung, durian, dan terentang.

Selain itu terdapat beberapa jenis lainnya seperti laban (*Vitex pubescens*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*), manggeris (*Kompasea sp.*), merbau (*Instia binua*), tembesu (*Fagrarea fragrans*), dan beberapa jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*). Beberapa satwa dilindungi yang ada di SM Bentayan antara lain beruang madu (*Helarctos malayanus*), rusa (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), buaya (*Crocodylus spp.*), trenggiling (*Manis javanicus*), landak (*Proacidhra biujri*), serta berbagai jenis burung seperti raja udang dan bubut. Pada Gambar 3.29 dan 3.30 ditunjukkan area posisi SM Bentayan di Kawasan Kelola Sendang Tengah yang terintergrasi dengan wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis.



Gambar 3.29. Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis (Sumber: BPKH Wilayah II, 2015)



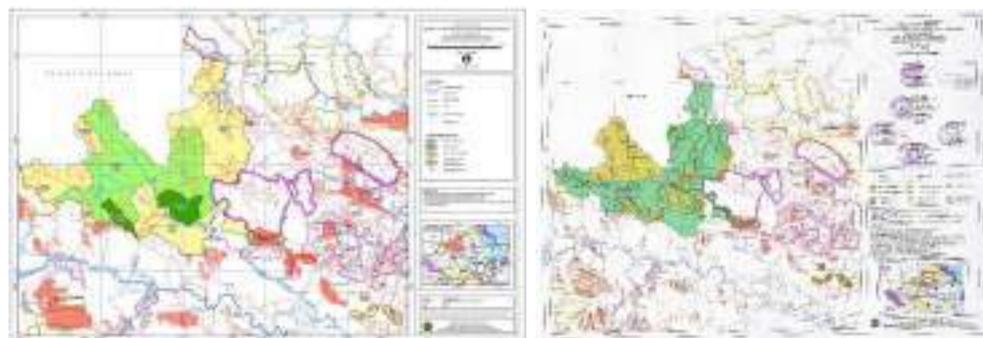
Gambar 3.30. Peta Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan (Sumber: PSU-PIU KS, 2018)

Suaka Margasatwa Bentayan hampir keseluruhannya telah mengalami perambahan. Kondisi didalam SM Bentayan sekarang suah berupa semak belukar, kebun kelapa sawit dan kebun karet masyarakat. Didalam kawasan ini terdapat 3 dusun (Belido 1, Belido 2, Belido 3) lengkap dengan sarana prasarana, seperti Sekolah Dasar, SMP, masjid, pura, tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan kantor kepala dusun serta balai pertemuan. Dusun Belido 1 dan Belido 2 masuk wilayah Desa Simpang Tungkal, sedangkan Dusun Belido 3 masuk wilayah Desa Suka Damai. Terdapat sekitar 1643 jiwa dan 382 KK yang bermukim di 3 dusun ini.

c) Suaka Margasatwa Dangku

Suaka Margasatwa (SM) Dangku adalah kawasan konservasi yang terletak di bagian tengah selatan Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak pada posisi 103°38' - 104°4' Bujur Timur dan 2°04' - 2°30' Lintang Selatan. SM Dangku ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan SK. 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Jo. SK 454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 dengan luas 47.996,45 ha. Secara administratif, SM Dangku terletak di

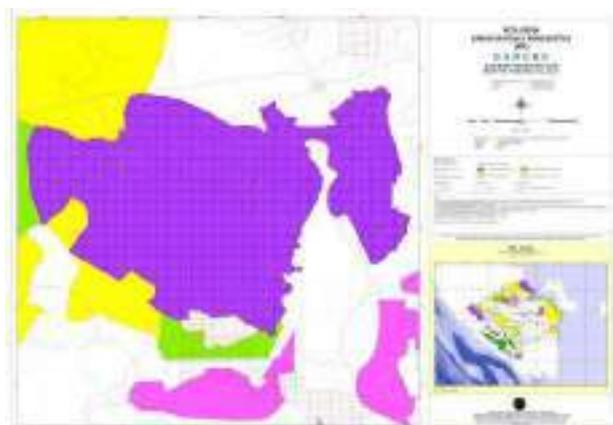
Kabupaten Musi Banyuasin. SM Dangku memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis flora yang didominasi Famili Dipterocarpaceae antara lain meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung (*Dyera spp.*), durian (*Durio sp.*), dan terentang. Selain itu terdapat flora jenis-jenis lainnya seperti manggaris (*Kompasea sp.*), tembesu (*Fagrarea fragrans*), merbau (*Instia binua*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*), balam, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*), resak, pandan, dan semak belukar. Gambaran spasial lokasi SM Bentayan dalam Kawasan Kelola Sendang Hulu dengan Kesatuan Kelola Hutan Meranti ditunjukkan pada Gambar 3.31 dan 3.32.



(a)

(b)

Gambar 3. 31 Peta Kawasan Kelola Sendang Hulu dengan Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti (a) Peta Wilayah; (b) Peta Tata Hutan (sumber: BPKH Wilayah II, 2015)



Gambar 3.32. Peta Kawasan Suaka Margasatwa Dangku (Sumber: PSU-PIU KS, 2018)

Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) menjadi sasaran utama konservasi (key spesies) SM Dangku karena termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang dan red list IUCN dengan status critically endangered. Selain itu terdapat beberapa satwa lainnya seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus scrofa*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*),

buaya (*Crocodylus spp.*), dan beberapa satwa burung dilindungi seperti rangkong (*Buceros sp.*), raja udang, dan elang.

Seperti juga pada SM Bentayan, SM Dangku juga mengalami berbagai permasalahan pengelolaan berupa tumpang tindih kawasan, perambahan oleh masyarakat, penambangan minyak tradisional (*illegal tapping*) dan *illegal logging*.

b. Kawasan Perkebunan

Luas kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kab. Musi Banyuasin, luas total 103.970 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 31.579 ha, tanaman produktif 68, 634 ha dan tanaman 3.757 ha. Total produksi TBS 279.459 ton dengan produktivitas rata-rata 4.072 kg/ha/tahun. Jumlah petani total 54.502 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat 54.296 ha, terdiri dari tanaman muda 27.385 ha, tanaman dewasa/produktif 26.911 ha, tanaman tua tidak ada. Total produksi 43.479 ton. Produktivitas lahan 1616 kg/ha/tahun. Jumlah petani 32.686 orang.

Untuk luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan negara, di Kabupaten Musi Banyuasin luas total 7.685 ha. Terdiri 2.187 ha tanaman muda, 5.498 ha tanaman produktif. Produksi total 18.516 ton/th dengan produktivitas 3368 kg/ha/th, dengan jumlah tenaga kerja 3843 orang. Sedangkan untuk kabupaten Banyuasin, luas total perkebunan sawit negara 22315 ha. Terdiri dari 2.141 ha tanaman tua, 20.052 ha tanaman produktif, 122 ha tanaman tua. Jumlah produksi 66.652 ton/th. Produktivitas 3.324 kg/ha/th dan jumlah tenaganya 11.158 orang.

Luas total perkebunan sawit besar swasta nasional di kabupaten Musi Banyuasin adalah 145.180 ha. Terdiri dari 26.555 ha tanaman muda, 118.625 tanaman produktif. Jumlah produksi total 453.225 ton/th, dengan produktivitas 3821 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 72.590 orang. Untuk kabupaten banyuasin, luas totalnya 57.813 ha dengan 10.422 ha tanaman muda, 47.391 tanaman produktif. Produksi total 171.436 ton/th dengan produktivitas 3617 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 28.907 orang.

Luas kawasan perkebunan kelapa karet rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, luas total 132.524 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 15.228 ha, tanaman produktif 114.604 ha dan tanaman tua 2.692 ha. Total produksi 105.078 ton dengan produktivitas rata-rata 917 kg/ha/ tahun. Jumlah petani total 69.586 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan karet rakyat 56.655 ha, terdiri dari tanaman muda 6.821 ha, tanaman dewasa/produktif 48.581 ha, tanaman tua 1.253 ha. Total produksi 77.992 ton. Produktivitas lahan 1605 kg/ha/tahun. Jumlah petani 31.494 orang.

Di Kabupaten Musi Banyuasin tidak terdapat perkebunan karet negara. Sedangkan di Kabupaten Banyuasin, luas total perkebunan karet negara 4.937 ha. Terdiri dari 1.797 ha tanaman muda, dan 3.139 ha tanaman produktif. Jumlah produksi 5.149 ton/th. Produktivitas 1.640 kg/ha/th dan jumlah tenaganya 1.735 orang.

Luas total perkebunan karet swasta nasional di kabupaten Musi Banyuasin adalah 759 ha. Terdiri dari 364 ha tanaman muda, 326 ha tanaman produktif dan 68 ha tanaman tua. Jumlah produksi total 581 ton/th, dengan produktivitas 1.780 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 373 orang. Untuk Kabupaten Banyuasin, luas totalnya 1.920 ha dengan 799 ha tanaman muda, 1005 tanaman produktif, dan 117 ha tanaman tua. Produksi total 1.706 ton/th dengan produktivitas 1.698 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 945 orang. Luas kawasan perkebunan kelapa rakyat di kab Musi Banyuasin, luas total 4.951 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 865 ha, tanaman produktif 3.897 ha dan tanaman tua 189 ha. Total produksi kopra 5.002 ton dengan produktivitas rata-rata 1.284 kg/ha/ tahun. Jumlah petani total 14.663 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan kelapa rakyat 47.285 ha, terdiri dari tanaman muda 2.065 ha, tanaman dewasa/produktif 37.639 ha, tanaman tua 7.581 ha. Total produksi kopra 44.269 ton, dengan produktivitas lahan 1.176 kg/ha/tahun. Jumlah petani 33.713 orang. Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin tidak terdapat perkebunan kelapa yang dikelola oleh perusahaan negara maupun swasta.

C. Kondisi dan Karakteristik Spesifik Kawasan Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)

1. Flora dan Fauna

Dari seluruh kawasan Kelola Sendang, areal yang menyisakan keragaman flora dan fauna cukup tinggi adalah wilayah hutan rawa gambut Merang Kepayang, walaupun saat ini kondisinya sudah terganggu oleh aktivitas *illegal logging* dan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada tahun 2011, dari 30 petak ukur tercatat sejumlah 1.629 individu yang terhimpun dalam 84 jenis dan 25 famili. Dari jenis-jenis tersebut terdapat jenis yang keberadaannya melimpah yakni jenis ribu-ribu, tembesu, gelam dan balam. Tembesu dan gelam merupakan jenis pionir yang merupakan jenis sekunder dan banyak tumbuh pada lahan gambut yang telah rusak akibat kebakaran dan kedalaman gambut relatif dangkal. Jenis yang frekuensi kemunculannya tinggi antara lain medang, balam, sigam, uya-uya, mahang dan durian.

Fauna yang terdapat di wilayah ini, banyak dijumpai di wilayah Hutan Rawa Gambut (HRG) Merang Kepayang meliputi berbagai Kelas yaitu Mamalia baik mamalia teresterial maupun mamalia arboreal, reptilia, amphibi. Pada kelas mamalia masih dijumpai Harimau Sumatera dan tapir. Temuan ini karena areal *peat dome* berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekosistem gambut dengan Taman Nasional Berbak Jambi. Untuk kelas reptilia, Sungai Merang merupakan endemik buaya sinyulong.

2. Jenis Tanah dan Karakteristik Geologis

a. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu dan Tengah, Meliputi: Kawasan Hutan Meranti dan Lalan Mangsang Mendis (LMM) dan sekitarnya

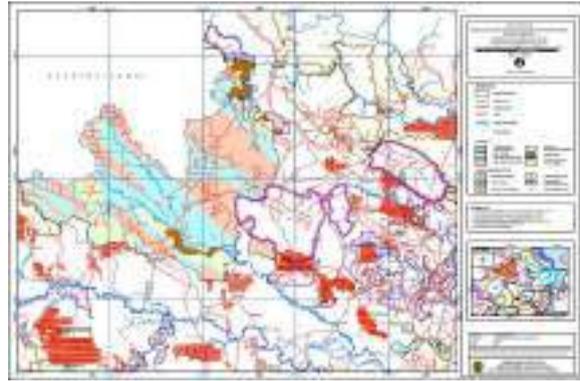
Berdasarkan peta jenis tanah yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah II Palembang, wilayah

kelola sendang memiliki beberapa klasifikasi jenis tanah antara lain Asosiasi glei humus dan organosol, Asosiasi podmerkum podcokum, Aluvium coklat kelabu, Aluvial hidromorf, Aluvial kelabu muda, Hidromorf kelabu dan podsolik merah kuning. Jenis tanah yang paling dominan adalah Asosiasi glei humus dan organosol kemudian Asosiasi podmerkum podcokum dan Aluvial hidromorf. Jenis tanah terdiri dari Asosiasi glei humus dan organosol, hidromorf kelabu dan bahan batuan berupa batuan Aluvial dengan fisiografi dataran. Pada kawasan HP Mangsang Mendis, jenis tanahnya digolongkan dalam Asosiasi glei humus dan organosol dan batuan berupa Aluvial dengan dataran. Jenis batuan adalah Holosen, Plio-Plitosen, Sedimen Epiclastika. Batuan yang ada terdiri dari Resen (aluvium), Holosen, Endapan Rawa (Dishut Prov. Sumsel, 2009).

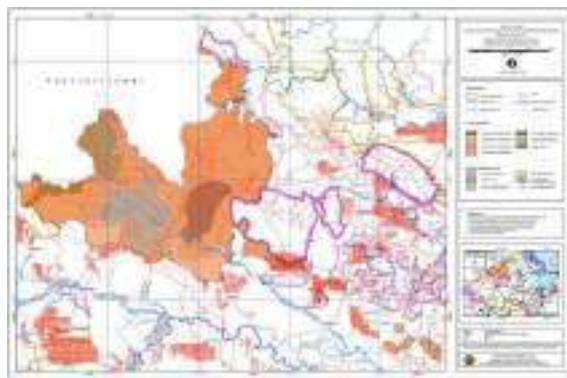
Secara umum, karakteristik lahan di Kawasan Kelola Sendang yang salah satunya termasuk dalam kawasan hutan produksi LMM (Lalan Mendis Mangsang) dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar yaitu lahan gambut yang mendominasi wilayah HP (Hutan Produkai) Lalan dan tipe dataran yang mendominasi HP Mangsang Mendis. Jenis tanah aluvial mendominasi sepanjang pinggir sungai utama seperti S. Lalan, S. Merang dan S. Kepahiang. Lebih dari 50% kawasan Kelola Sendang yang masuk ke dalam area hutan LLM ini merupakan kubah gambut dengan kedalaman antara 10 cm – 450 cm. Menurut sistem klasifikasi tanah FAO, tanah gambut ini disebut histosol. Tanah gambut memiliki karakteristik antara lain rendahnya nilai pH tanah. Ketersediaan unsur hara yang terbatas serta daya fiksasi terutama P yang tinggi dan mempengaruhi kesuburan lahan. Subsistensi atau penurunan permukaan lahan gambut dapat terjadi akibat adanya drainase atau pengeringan yang menyebabkan oksidasi. Oksidasi tersebut meningkatkan emisi gas rumah kaca ke dalam atmosfer. Selain itu pengeringan lahan gambut menyebabkan fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena efek kering tak balik (*irreversible drying*) dari bahan organik gambut. Kering di musim kemarau juga meningkatkan kerawanan lahan gambut terhadap bahaya kebakaran.

Secara geologi, sebagian wilayah Kelola Sendang yang berada di kawasan Hulu dan Tengah termasuk dalam kawasan kelola hutan Meranti dan Lalan Mangsang Mendis terdiri dari kelompok sedimen *epiclastica Tuf* dan *tuf pasir*, *Aluvium* - endapan danau dan pantai, Endapan rawa, Batu lumpu dan batu pasir, serta Batu pasir-Batu lumpur dan Batu bara. Tipe geologi yang mendominasi wilayah tersebut adalah tipe geologi endapan rawa. Hal ini dikarenakan wilayah ini lebih banyak yang merupakan lahan rawa gambut.

Pada Gambar 3.33 dan 3.34 ditampilkan Peta Geologis dan Kondisi Tanah pada beberapa wilayah di Kawasan Kelola Sendang.



Gambar 3.33. Peta Kondisi Geologis di Kawasan Kelola Sendang Hulu dan Tengah, Wilayah Kawasan Hutan Meranti, Lalan Mangsang Mendis dan sekitarnya (Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)



Gambar 3.34. Peta Tanah di Kawasan Kelola Sendang Hulu dan Tengah, Wilayah Kawasan Hutan Meranti, Lalan Mangsang Mendis dan sekitarnya (Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

b. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir, Meliputi Kawasan Kelola Hutan Lalan Sembilang (LS) dan Sekitarnya

Berdasarkan informasi dari kegiatan survei (survey tim BPKH, 2014) jenis tanah yang berada di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 3 jenis tanah, yaitu seperti pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Jenis Tanah di Wilayah Kawasan Kelola Hutan Lalan Sembilang

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	A. Glei Humus & Organosol	41.181,08	67,51
2	Air	581,79	0,95
3	Aluvial Hidromorf	14.854,51	24,35
4	Hidromorf Kelabu	4.381,95	7,18
Jumlah		60.999,34	100,00

(Sumber :Hasil Analisis BPKH Wilayah II Palembang, 2016)

Jenis tanah di wilayah kawasan hutan produksi Lalan Sembilang ada tiga jenis yaitu A Glei Humus dan organosol, Aluvial Hidromorf dan Hidromorf kelabu. Dari ketiga jenis tanah yang tersebar di kawasan Lalan Sembilang ini, yaitu: jenis tanah yang mendominasi wilayah adalah jenis tanah Glei yaitu jenis tanah yang terbentuk karena pengaruh genangan air, dilanjutkan

dengan jenis tanah alluvial yang merupakan hasil endapan erosi di dataran rendah serta sebaran paling kecil jenis tanah Hidromorf Kelabu yang hampir selalu tergenang air. Keadaan beberapa jenis tanah ini adalah

1) **Aluvial**

Merupakan hasil endapan erosi di dataran rendah. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah aluvial memiliki manfaat di bidang pertanian salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian. Tanah ini terbentuk akibat endapan dari berbagai bahan seperti aluvial dan koluviat yang juga berasal dari berbagai macam asal. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah muda, yang terbentuk dari endapan halus di aliran sungai. Tanah aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Tanah aluvial memiliki struktur tanah yang pejal dan tergolong liat atau liat berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%.

2) **Aluvial Geli Humus**

Tanah ini terbentuk dari hasil endapan bahan aluvial. Tanah ini terbentuk di wilayah dengan curah hujan lebih dari 1500 mm/tahun. Tanah giel humus jenuh air dan memiliki kandungan bahan organik tinggi dilapisan atas. Tanah jenis ini tersebar di dataran rendah yang berawa-rawa. Pada umumnya tanah ini banyak digunakan untuk persawahan.

3) **Hidromorf Kelabu**

Jenis tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal yaitu topografi merupakan dataran rendah atau cekungan, hampir selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu, hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlembung hingga masif, konsistensi lekat, bersifat asam (pH 4.5-6.0), kandungan bahan organik. Ciri khas tanah ini adanya lapisan glei kontinu yang berwarna kelabu pucat pada kedalaman kurang dari 0.5 meter akibat dari profil tanah selalu jenuh air. Penyebaran di daerah beriklim himid hingga sub humid, curah lebih dari 2000 mm/tahun. Tanah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

4) **Organosol**

Merupakan tanah yang terjadi dari bahan induk organik, seperti gambut dan rumput rawa pada iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Tanah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak terjadi diferensiasi horison secara jelas, ketebalan lebih dari 0.5 m, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi agak lekat, kandungan organik lebih dari 30%, umumnya bersifat sangat asam (pH 4,0), dalam kandungan unsur hara rendah. Tanah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan.

Geologi wilayah Lalan Sembilang terdiri dari berbagai batuan diantaranya Aluvium, Batu lumpur, Batu pasir, batu bara, endapan rawa, sedimen epiclastika, tuf, dan tuf pasir. Sebaran geologi di area Kawasan Kelola Hutan Produksi Lalan Sembilang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Geologi di Wilayah Kawasan Lalan Sembilang Kabupaten Banyuasin

No.	Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvium, endapan danau dan pantai	7372,74	12,09
2	Batulumpur dan batupasir	171,91	0,28
3	Batupasir, batulumpur dan batubara	2325,99	3,81
4	Danau dan Sungai	897,79	1,47
5	Endapan rawa	46709,12	76,57
6	Sedimen epiclastika, tuf, tuf pasiran	3521,79	5,77
Jumlah		60999,34	100,00

Sumber : Hasil Analisis CRST oleh Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2016

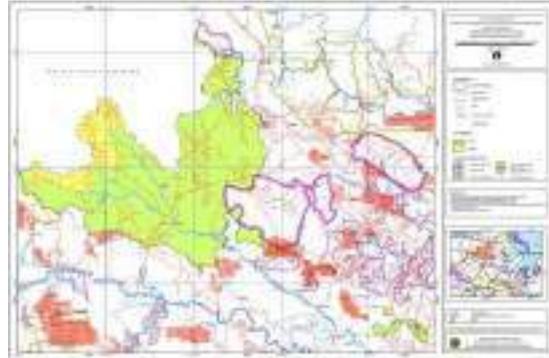
Batu pasir merupakan batuan endapan yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butiran batuan. Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Seperti halnya pasir, batuan pasir dapat memiliki jenis warna dengan warna umumnya coklat muda, coklat, kuning, merah, abu-abu dan putih. Karena lapisan batu pasir sering kali membentuk karangan atau bentukan trografis tinggi lainnya, warna tertentu batu pasir dapat diindentikan dengan daerah tertentu. *Batubara* batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon dan oksigen. *Sedimen epiciastika* terbentuk dari sedimentasi campuran bahan rombakan batuan piroklastik dengan batuan epiklastik baik yang bersifat vulkanik maupun yang non vulkanik, sehingga menurut William (1954) diberi nama sesuai dengan ukurannya dan masing-masing diberi kata vulkanik. Batuan epiklastik dapat terjadi karena pencampuran batuan sedimen vulkanik dengan batuan vulkanik melalui proses aliran langsung dari pusat erupsi gunung api. *Truff* adalah batuan gunung api yang terbentuk dari suatu campuran fragmen mineral batuan gunung api dalam matrik debu gunung api dalam matrik debu gunung api. *Truff* terbentuk dari kombinasi

3. Topografi

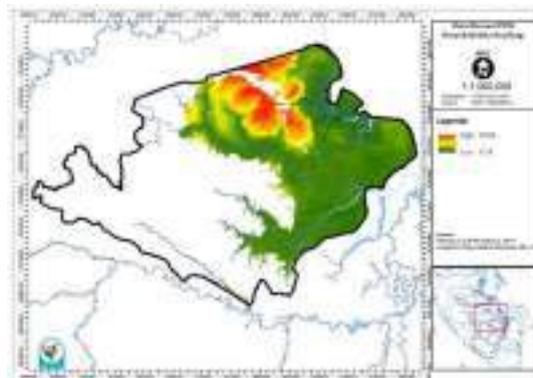
Secara keseluruhan topografi di Hutan Produksi Meranti dan Lalan Mangsang Mendis cenderung datar dengan ketinggian berkisar dari 2 – 10 m dpl. Khususnya di lahan gambut pada kawasan hutan produksi Lalan dengan kelerengan dibawah 3%. Kubah gambut di kawasan hutan produksi Lalan memiliki panjang slope lebih dari 500 meter. Beda tinggi antara puncak kubah gambut dengan pinggir sungai rata-rata mencapai 5 m. Sedangkan di kawasan hutan produksi Mangsang Mendis sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 30 m dpl dengan kelerengan hingga 20%. Bentuk slope di wilayah ini cukup bergelombang dengan panjang slope antara 100 – 500 meter.

Berdasarkan Peta Kelerengan Wilayah Lalan Sembilang memiliki satu tipe kelerengan yaitu datar dengan kelerengan antara 0% sampai 8 %. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuasin

(2012-2032), sifat dan kondisi topografi serta kemiringan tersebut, kemampuan lahan Kabupaten Banyuasin berada dalam kemampuan pengembangan sangat tinggi, dengan klasifikasi kelerengan 0-2% cocok untuk pengembangan pemukiman dan pertanian akan tetapi, wilayah pada kelerengan ini berpotensi terhadap bencana banjir. Sedangkan untuk kelerengan 2-5% memiliki kesesuaian lahan untuk industri, irigasi terbatas dan pengembangan pemukiman. Pada Gambar 3.35 menggambarkan kondisi Topografi kawasan Kelola Sendang. Gambaran Kondisi kelerengan Kawasan Kelola Sendang secara keseluruhan, disajikan dalam bentuk peta seperti pada Gambar 3.36.



Gambar 3.35. Kondisi Kelerengan pada Area Kawasan Kelola Sendang bagian Hulu, Kawasan Kelola Hutan Meranti dan Sekitarnya (Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)



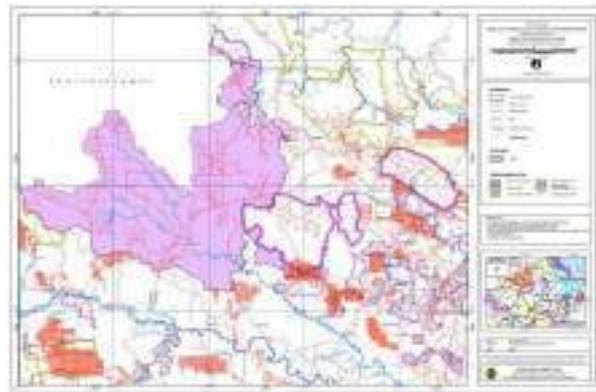
Gambar 3.36. Peta Kelerengan Kawasan Kelola Sendang, Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin (Sumber: ZSL, 2016)

4. Iklim

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Oldeman, kawasan kelola sendang hulu dan tengah termasuk kedalam zona agroklimat B1, dimana jumlah bulan basah (rata-rata bulanan lebih dari 200 mm) sebanyak 7-9 bulan per tahun dan hanya sekitar 2 bulan lembab dan tanpa bulan kering (di bawah 60 mm). Hal ini menyebabkan sebagian besar kawasan hutan produksi Lalan tidak akan mengalami kekeringan. Berdasarkan pemantauan stasiun cuaca Kecamatan Bayung Lencir selama periode 1994 – 2005, rata-rata curah hujan mencapai 2.409 mm per tahun dengan rata-rata per bulan sebesar 200,75 mm. Jumlah hari hujan bulanan berkisar antara 8 hari (bulan Juni) hingga 22 hari (bulan Desember). Pada Gambar 3.37 ditampilkan

gambaran mengenai Kondisi Iklim di Kawasan Kelola Sendang Musi Banyuasin.

Pola hujan di kawasan ini dapat dipilah menjadi dua musim. yaitu musim kemarau yang berlangsung selama bulan Mei – Oktober dan musim penghujan yang berlangsung selama bulan November – April. Walaupun secara rata-rata tidak memiliki bulan kering, kawasan ini juga mengalami kebakaran di lahan gambut. khususnya pada saat terjadi anomali iklim El-Nino pada tahun 1997, 2004 dan 2006. El-Nino merupakan kejadian iklim yang akan terulang kembali di masa mendatang dan menyebabkan dampak kekeringan yang cukup ekstrim khususnya di wilayah lahan gambut yang terdegradasi dan terdeforestasi.



Gambar 3.37. Kondisi Iklim di Kawasan Kelola Sendang Musi
(Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

Sedangkan tipe iklim di Sumatra Selatan secara umum, termasuk di wilayah Lalan Sembilang, Banyuasin beriklim Tropis. Pernyataan iklim tropis ini digambarkan oleh beberapa ahli dengan berbagai istilah: 1) Termasuk iklim A (iklim hujan tropis), menurut *Koppen* ; 2) Termasuk iklim A (daerah sangat basah), menurut *Schmidt-Ferguson* 1950;3) Termasuk iklim B1 (daerah dengan 7 sampai dengan 9 bulan basah dan dua bulan kering), menurut *Oldeman* 1979

Berdasarkan peta iklim yang terlampir dalam dokumen ini, Lalan Sembilang secara keseluruhan termasuk pada tipe iklim B1 yang penggolongannya didasarkan menurut Oldeman memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu rata-rata $26,10^{\circ}$ – $27,40^{\circ}$ Celcius serta kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4% - 85,5% sepanjang tahun. Kondisi iklim Kabupaten Banyuasin secara umum beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Rata-rata curah hujan per bulan 166,17 mm dan hari hujan perbulan 9,92 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata 397,00 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata 0,00 mm. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.

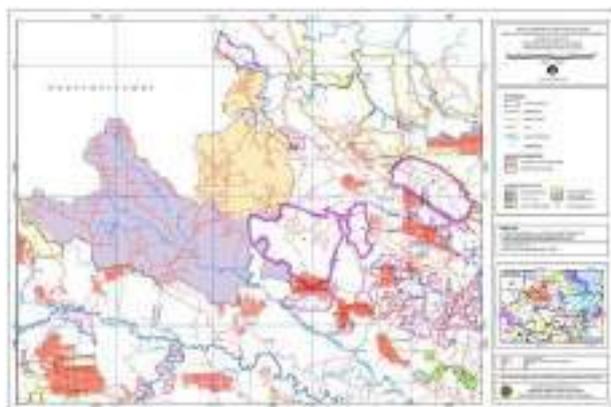
Tabel 3.5. Data Curah Hujan Bulanan dan Hari Hujan Perbulan di Banyuasin
Kabupaten Banyuasin

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1	Januari	185	11
2	Pebruari	264	13
3	Maret	397	21
4	April	139	10
5	Mei	180	8
6	Juni	103	8
7	Juli	75	8
8	Agustus	0	-
9	September	59	2
10	Oktober	185	8
11	Nopember	145	14
12	Desember	262	16

Sumber : Kabupaten Banyuasin dalam angka, 2016

5. Hidrologi dan karakteristik DAS

Wilayah Kelola Sendang bagian Tengah yang meliputi wilayah Lalan Mendis Mangsang merupakan wilayah DAS Lalan yang memiliki beberapa cabang sungai utama antara lain S. Medak, S. Merang dan S. Kepayang. Akibat perubahan tutupan hutan dan drainase yang buruk, lebar sungai-sungai tersebut menjadi lebih lebar dibandingkan 20 tahun silam. Perubahan sistem hidrologis tersebut juga disebabkan oleh aktifitas *illegal logging*, yang banyak menggali parit untuk mengeluarkan kayu tebangan. Menyebabkan percepatan pengeringan lahan gambut melalui pengaliran air simpanan dalam kubah gambut ke aliran sungai, akibatnya meningkatkan debit sungai saat musim hujan. Para penebang liar juga merubah sistem hidrologi dengan memperpanjang sungai kecil hingga berpuluh-puluh kilometer. Misalnya Sungai Tembesu Daro pada tahun 1990 awal hanya sepanjang sekitar 600 meter, dan saat ini mencapai lebih dari 14 km hingga menembus kubah gambut dalam. Pola DAS di kawasan Keloas Sendang pada Gambar 3.38.



Gambar 3.38. Peta DAS Kawasan Kelola Sendang (Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

Bila memperhatikan kondisi daerah aliran sungai (DAS) dalam kawasan ini maka telah terjadi perubahan sistem hidrologis yang kurang baik. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan tutupan lahan yang kurang seimbang sebagai dampak dari pembukaan lahan besar-besaran

untuk hutan tanaman, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Selain itu juga disebabkan oleh adanya aktivitas *illegal logging* yang banyak menggali parit untuk mengeluarkan kayu tebang. Diperkirakan ke depan akan terus terjadi percepatan pengeringan lahan gambut melalui pengaliran air simpanan dalam kubah gambut ke aliran sungai pada musim kemarau dan sebaliknya akan meningkatkan debit sungai saat musim hujan. Untuk itu upaya pengendalian perambahan hutan, kebakaran hutan, dan *illegal logging* perlu menjadi salah satu prioritas yang perlu segera ditangani bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dan berkepentingan seperti instansi kehutanan dan perusahaan serta pemerintah desa beserta masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Berdasarkan hasil analisa tim BPKH wilayah II dan RTRW Kabupaten Banyuasin hidrologi kawasan Lalan Sembilang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan bagian (Sub DAS) dari DAS yang lebih besar yaitu DAS Musi dan DAS Sembilang/Benawang yang bermuara ke selat bangka. DAS Musi memiliki Sub DAS Macan dan DAS Sembilang/Benawang memiliki Sub DAS Benu Simpang Kiri. Dalam Wilayah Kelola Sendang Hilir yang meliputi kawasan Lalan Sembilang bagian utara terdapat 2 Sungai Besar yaitu Sungai Sembilang dan Sungai Benawang. Selain itu terdapat beberapa anak sungai yang berada di wilayah KPHP Unit II Lalan Sembilang seperti, S. Simpang Bugis, S. Simpang Kayu Turun, S. Simpang Air Rawa, S. Simpang Haji M Nur, S. Simpang Kuntul, dan S. Simpang Jaya Aropan. Anak-anak sungai tersebut merupakan anak sungai dari Sungai Sembilang yang mengalir sepanjang tahun. Anak sungai Sungai Benawang memiliki 3 anak sungai yaitu S. Simpang penyalin, S. Agas, dan S. Simpang Langgar.

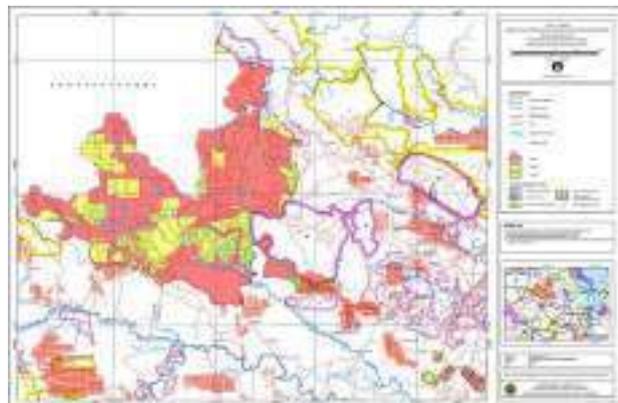
6. Aksesibilitas Kawasan Hutan

Kawasan Kelola Sendang yang berada di sekitar wilayah kawasan kelola hutan Meranti ini atau jika dilihat dari batasan pola DAS berada di bagian hulu ini memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi dan cukup mudah untuk dijangkau serta berada pada posisi yang sangat strategis. Wilayah ini dapat dicapai dari berbagai arah. Transportasi yang digunakan terutama berupa angkutan darat (jalan) namun pada sebagian wilayah dapat menggunakan angkutan air (sungai). Dari arah utara, wilayah konsesi restorasi ekosistem (PT. REKI) yang berada dalam Kelompok Hutan Sungai Meranti–Sungai Kapas dapat dicapai dari Provinsi Jambi, yaitu sekitar 80 km arah barat daya dari Kota Jambi melewati jalan aspal trans Sumatera ke arah Muara Bulian dengan jarak \pm 50 km, kemudian masuk jalan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada, berupa jalan yang telah diperkeras sejauh \pm 35 km, dan sampai di *base camp* KM. 35 PT Asialog, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari Jambi. Perjalanan selanjutnya melalui jalan eks *logging* PT. Asialog berupa jalan tanah tanpa perkerasan dengan jarak sekitar 10 km mencapai areal Kelompok Hutan Sungai Meranti–Sungai Kapas. Bekas jalan *logging* tersebut sulit dilewati apabila hujan turun.

Dari arah selatan, dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, untuk mencapai kawasan KPHP Unit IV Meranti berjalan ke arah barat laut dengan jarak sekitar 170 km. Desa

Lubuk Bintialo dan Sako Suban yang berada dalam areal KPHP, dapat ditempuh dari Palembang melalui Sekayu–Mangun Jaya melalui jalan aspal dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum (bis, mobil travel) dengan waktu tempuh 5-6 jam. Dilanjutkan dari Mangun Jaya ke Lubuk Bintialo melalui jalan aspal dan tanah (kondisi rusak) menggunakan angkutan umum pedesaan atau ojek motor dengan waktu tempuh 1-2 jam. Disamping perjalanan darat, dari Lubuk Bintialo ke Sako Suban dapat pula ditempuh lewat jalur air, melalui Sungai Batanghari Leko– Sungai Kapas menggunakan perahu/ketek dengan waktu tempuh 3-4 jam. Dari arah timur, Desa Lubuk Bintialo dan Sako Suban dapat dicapai, dari kota Palembang menuju Simpang Gas (arah ke Bayung Lencir dan arah Jambi) melalui jalan aspal trans Sumatera lintas timur menggunakan kendaraan umum (bis, mobil travel) dengan waktu tempuh 5-6 jam. Selanjutnya dari Simpang Gas ke Lubuk Bintialo melalui jalan berbatu dan tanah (*gravel road*) sekitar 60 km yang dibangun oleh perusahaan minyak dan gas Conoco Phillips Grissik Ltd. menggunakan angkutan umum pedesaan atau ojek motor dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Beberapa pola akses ke kawasan Kelola Sendang disajikan pada Gambar 10.

Sedangkan kawasan Kelola Sendang Tengah meliputi wilayah LMM memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi dan cukup mudah untuk dijangkau. Kawasan ini dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur air (sungai). Jalan darat yang dapat digunakan, selain menggunakan jalan propinsi dan jalan kabupaten, juga dapat menggunakan jalan-jalan yang dibangun dan/atau dipelihara oleh pihak- pihak perusahaan, seperti perusahaan kelapa sawit dan perusahaan pertambangan (migas dan batubara).



Gambar 3.39. Peta Akses pada beberapa wilayah di Kawasan Sendang Kelola
(Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

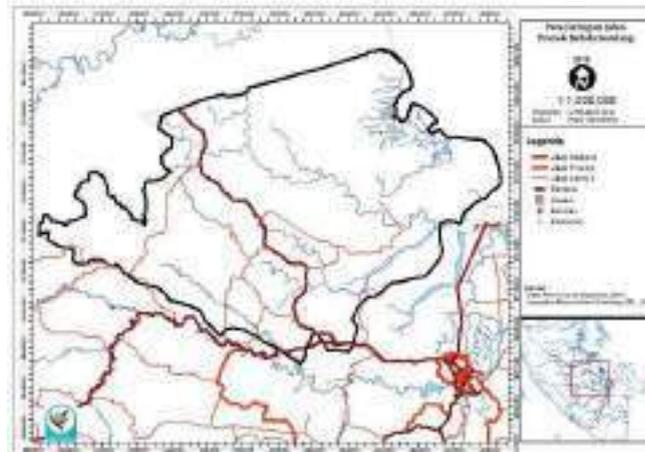
Jalan yang dibangun oleh pihak perusahaan pertambangan berada di kawasan HP Mangsang Mendis dengan kondisi jalan yang diperkeras dengan sirtu. Akses jalan sungai yang bisa dilalui dari Ibu Kota Provinsi menuju wilayah ini adalah Sungai Musi kemudian masuk ke Sungai Lalan dan selanjutnya dapat masuk ke kawasan hutan melalui Sungai Merang ataupun Sungai Kepayang. Akses jalan lalu lintas antar desa juga ada dua alternatif yaitu akses darat

dan air. Kondisi jalan bervariasi, ada yang memakai perkerasan aspal, beton, namun ada juga yang masih memakai tanah. Gambaran secara umum tentang kondisi aksesibilitas ke Kawasan Kelola Sendang disajikan pada Gambar 3.40. Sementara Kondisi akses jalan antar desa diperinci pada table 3.6.



Gambar 3.40. Peta Akses Transportasi di Kawasan Kelola Sendang
(Sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2016)

Berdasarkan Peta yang diperoleh bahwa perjalanan menuju wilayah Kelola Sendang umumnya memiliki aksesibilitas sedang artinya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu jalan darat atau jalan sungai. Perjalanan menuju wilayah Lalan Sembilang dapat dilakukan melalui jalan darat dan sungai. Akses menuju kawasan Kelola Sendang bagian tengah yang meliputi kawasan Lalan Sembilang ditempuh melalui jalan darat dari ibukota Provinsi Jambi menuju Desa Petaling dengan jarak tempuh 120 km waktu yang dibutuhkan selama \pm 3 jam. Setelah itu menuju ke Dusun Pancuran waktu yang dibutuhkan 1 jam dengan jarak tempuh 50 km. Akses menuju desa-desa yang terdekat dengan kawasan ini umumnya jalan darat yang berupa jalan aspal dan jalan tanah. Perjalanan menuju kawasan Kelola Sendang yang meliupti wilayah Lalan Sembilang melalui sungai dari jalan Tanjung Api-api sampai ke Jembatan simpang PU kecamatan Tanjung Lago menuju Desa Karang Agung lir sampai ke Sungai Sembilang dengan menggunakan alat transportasi *Speed*. Secara spasial, aksesibilitas ke kawasan Sembilang Dangku melalui jaringan jalan ditunjukkan pada Gambar 3.41.



Gambar 3.41. Peta Jaringan Jalan di Kawasan Sembilang Danguku
(sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2016)

Pada Tabel 3.6 disajikan data mengenai kondisi akses jalan antar desa dan kategori moda transportasi yang dapat digunakan antar desa.

Tabel 3.6. Kondisi Akses Jalan Antar Desa di Kawasan Kelola Sendang

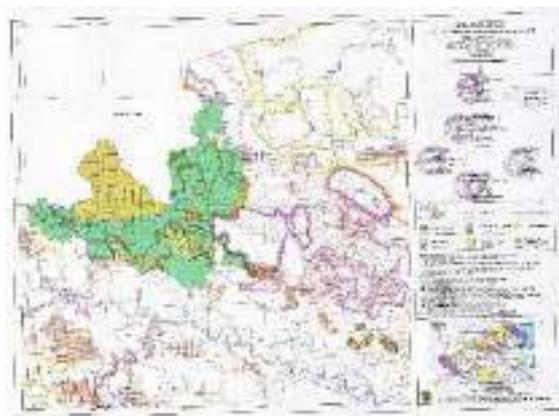
No	Kecamatan/Desa	Lalu Lintas Antar Desa	Perkerasan Jalan
A	Bayung Lencir		
1	Simpang Bayat	Darat	Aspal/Beton
2	Senawar Jaya	Darat	Aspal/Beton
3	Pulai Gading	Darat & Air	Tanah
4	Muara Medak	Darat & Air	Tanah
5	Mendis Jaya	Darat & Air	Tanah
6	Mendis	Darat	Tanah
7	Mekar Jaya	Darat	Aspal/Beton
8	Kepayang	Darat & Air	Tanah
9	Bayung Lencir	Darat & Air	Aspal/Beton
10	Telang	Darat	Aspal/Beton
11	Tampang Baru	Darat	Aspal/Beton
12	Sindang Marga	Darat	Aspal/Beton
13	Simpang Tungkal	Darat	Aspal/Beton
14	Pandan Sari	Darat	Aspal/Beton
15	Muara Merang	Darat & Air	Tanah
16	Margomulyo	Darat	Aspal/Beton
17	Kali Berau	Darat	Aspal/Beton
B	Lalan		
1	Sukajadi	Darat & Air	Aspal/Beton
2	Suka Makmur	Darat & Air	Tanah
3	Sri Gading	Darat & Air	Tanah
4	Mandala Sari	Darat & Air	Aspal/Beton
5	Jaya Agung	Darat & Air	Aspal/Beton
6	Bumi Agung	Darat & Air	Tanah
7	Bandar Agung	Darat & Air	Aspal/Beton
8	Karang Agung	Darat & Air	Tanah

Sumber: BPKH, Wil. II Palembang, 2016.

D. Potensi Kawasan Sembilang Dangku (Kelola Sendang) Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)

1. Potensi Wilayah Kelola Sendang (Hulu), Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya

Secara umum pola tata hutan di Kawasan Kelola Sendang Hulu meliputi wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti tersaji pada Gambar 3.38. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi, wilayah ini telah dirancang dalam blok dan petak, yang terdiri dari Blok Hutan Lindung (HL) Pemanfaatan pada Wilayah Tertentu seluas 16.325,20 Ha, Blok Hutan Produksi untuk Pemanfaatan IUPHHK-HA (Hutan Alam) seluas 50.153,73 Ha, Blok Hutan Produksi untuk Pemanfaatan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) seluas 142.267,51 Ha, Blok Hutan Produksi untuk Pemberdayaan pada Wilayah Tertentu seluas 19.316,31 Ha, Blok Hutan Produksi untuk Perlindungan seluas 16.099,58 Ha. Gambaran mengenai alokasi Tata Hutan di kawasan ini disajikan pada Gambar 3.42, sedangkan data kuantitatif tersaji pada Tabel 3.7. yang dideskripsikan pada Gambar 3.43.

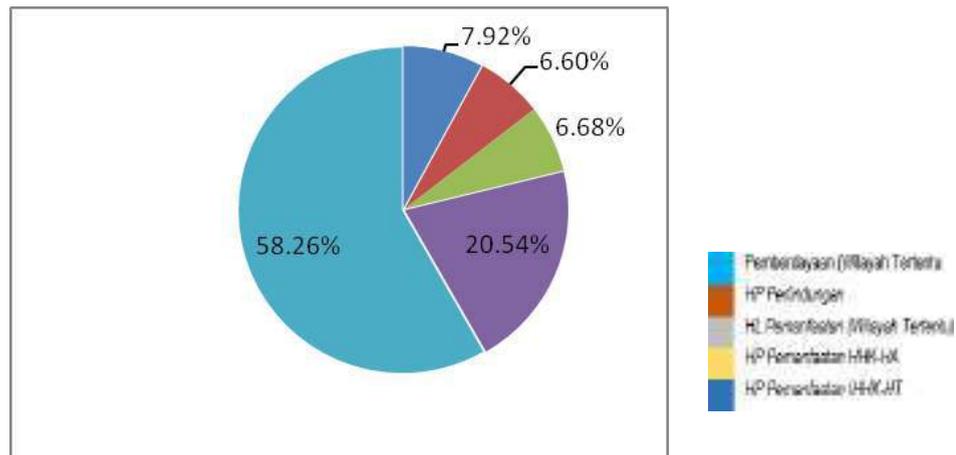


Gambar 3.42. Peta Tata Hutan Di Wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti, Wilayah Kelola Sendang (Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

Tabel 3.7. Rancangan pembagian blok di Kawasan Kelola Hutan Produksi Meranti

Nama Blok		
HL-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu)	16.325,20	6,68
HP-Pemanfaatan HHK-HA	50.153,73	20,54
HP-Pemanfaatan HHK-HT	142.267,51	58,26
HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu)	19.316,31	7,92
HP-Perlindungan	16.099,58	6,60
Jumlah	244.162,33	100,00

Sumber: Hasil Analisis BPKH 2016



Gambar 3.43. Proporsi Luas Blok di Kawasan Hutan Produksi Meranti
(Sumber: Hasil Analisis team project base line ZSL, 2018)

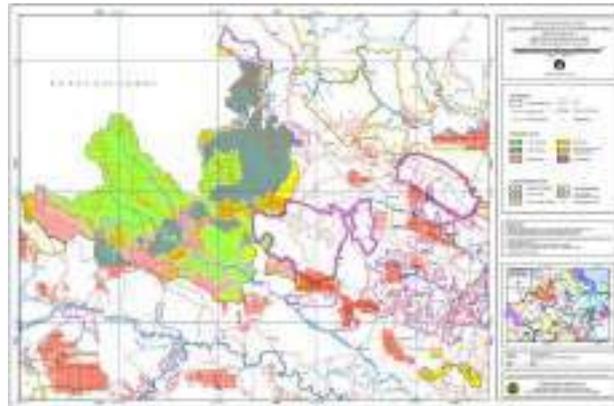
a. Penutupan Vegetasi

Hasil analisa citra BPKH Wil II Palembang (2013) menunjukkan bahwa penutupan vegetasi di dalam wilayah Meranti sebagian besar merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder (39,32%), disusul Hutan Tanaman (28,29%) dan Pertanian Lahan Kering Campur Semak (14,72%), Semak Belukar (12,25%), Perkebunan (5,33%), Permukiman (0,05%). Sisanya merupakan areal pertambangan (0,04%). Terlihat bahwa penutupan vegetasi di areal Meranti dalam bentuk hutan masih cukup baik (sekitar 67,61%) bila dibandingkan dengan penutupan vegetasi dalam bentuk non hutan (sekitar 32,39%). Data spasial untuk menggambarkan pola tutupan lahan disajikan pada Gambar 3.44. Sedangkan data spasial tutupan lahan yang menggambarkan tentang pola pemanfaatan lahan disajikan pada Gambar 3.45. Pada Tabel 3.8 menampilkan data kuantitatif luasan kawasan berdasarkan tipe tutupan lahan.

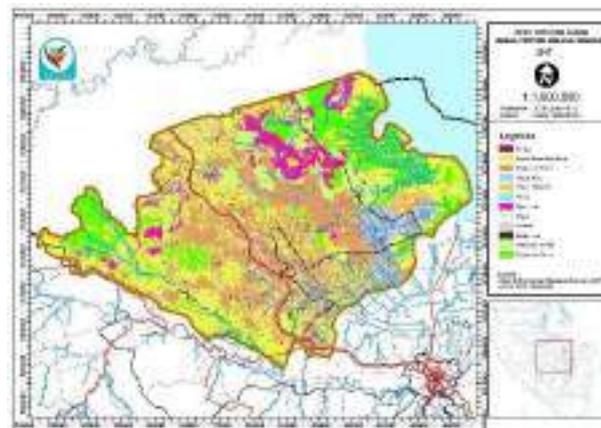
Tabel 3.8. Luas Penutupan Vegetasi di Kawasan Kelola Sendang bagian hulu, Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti

No	Penutupan Vegetasi	Luas	
		(ha)	(%)
1	Perkebunan	13.002,93	5,33
2	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	35.948,14	14,72
3	Hutan Tanaman	69.085,07	28,29
4	Semak Belukar	29.898,14	12,25
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	95.999,54	39,32
6	Pertambangan	107,07	0,04
7	Pemukiman	121,43	0,05
Total		244.162,33	100,00

Sumber: BPKH Wilayah II Palembang, 2014



Gambar 3.44. Peta Pola Umum Penutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang
(Sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)



Gambar 3.45. Peta Tutupan Lahan untuk menggambarkan Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Kelola Sendang (Sumber: hasil olah data spasial ZSL,

b. Potensi Kayu

Potensi kayu di areal Meranti dapat bersumber dari hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL). Hutan produksi yang ada sebagian telah dikelola melalui pemberian izin pengelolaan, terutama dalam bentuk IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE. Disamping areal yang telah dibebani izin/hak, masih terdapat areal hutan yang belum dibebani hak.

1) Potensi Kayu di Hutan Alam

Berdasarkan hasil survei inventarisasi hutan (oleh BPKH Wil II) diketahui bahwa di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Restorasi Ekosistem (RE) sebagian areal berupa belukar dan sebagian lagi masih berhutan dengan kerapatan jarang sampai sedang. Potensi semua jenis pohon berdiameter 20 cm ke atas paling besar ditemukan di kawasan hutan lindung dengan rata-rata 44,33 batang / ha, sedangkan di hutan produksi memiliki potensi yang paling rendah dengan potensi rata-rata hanya 5,82 batang/ha (Tabel 3.11).

Potensi permudaan di areal HL, HP, dan HPT di luar Hutan Tanaman (HT) dalam wilayah Meranti berdasarkan hasil inventarisasi untuk tingkat semai (*seedling*) terdapat 130 jenis

dengan jumlah rata-rata 61,56 batang / ha. Potensi permudaan tingkat pancang (*sapling*) terdapat 143 jenis dengan jumlah rata-rata sebanyak 68,96 batang / ha. Terdapat permudaan tingkat tiang (*poles*) sebanyak 146 jenis dengan jumlah batang rata-rata sebesar 57,07 batang/ha.

Tabel 3.9. Potensi Pohon Diameter 20 cm ke Atas di Bagian Hulu Kelola Sendang Wilayah Meranti

No	Fungsi Hutan	Potensi semua jenis pohon berdiameter 20 cm up	
		Jumlah batang (n/ha)	Volume (m ³ /ha)
1	Hutan Lindung	44,33	49,02
2	Hutan Produksi (HP)	5,82	3,77
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	22,64	22,64

Sumber: BPKH Wilayah II Palembang, 2014

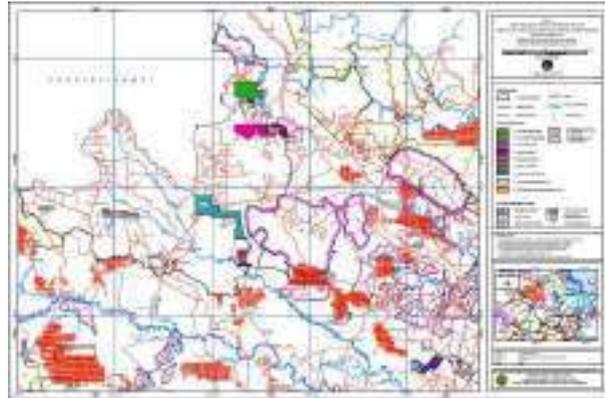
2) Potensi Kayu di Hutan Tanaman

Potensi di areal Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dikelola dalam bentuk Hutan Tanaman (HT) cukup bervariasi. Terdapat 5 IUPHHK-HT yang aktif di dalam wilayah Meranti. Jenis pohon yang ditanam meliputi akasia, ekaliptus, jabon, sungkai, dan karet. Luas penanaman yang sudah direalisasikan hingga tahun 2013 sebesar 30.091,68 Ha. Sebagian besar berasal dari tanaman pokok (76,13%). Berdasarkan hasil perhitungan, potensi kayu pada hutan tanaman di Meranti sekitar 2,37 juta m³ (Tabel 12). PT. Rimba Hutani Mas hingga kini belum melakukan kegiatan penanaman. Gambaran mengenai sebaran lokasi IUPHHK-HT di kawasan ini disajikan pada Gambar 3.46.

Tabel 3.10. Realisasi tanaman IUPHHK-HT Bagian Hulu Kelola Sendang Wilayah Meranti

Perusahaan	Realisasi Tanaman (ha)			Luas Total (ha)	Potensi Kayu Saat ini (m ³)
	Pokok	Kehidupan	Unggulan		
PT. Bumi Persada Permai I	3.808,32	1.832,3	1.832,3	7.472,92	590.136,49
PT. Rimba Hutani Mas	0	0	0	0	0
PT. Pakerin	4.691	0	0	4691	370.448,27
PT. Bumi Persada Permai II	202,67	2.127,81	1.389,7	3.720,18	293.782,61
PT. Sentosa Bahagia Bersama	13.443,46	0	0	13.443,46	1.061.630,04
PT. Wahana Agro Mulia	764,12	0	0	764,12	60.342,56
Jumlah	22.909,57	3.960,11	3.222	30.091,68	2.376.339,97

Keterangan: Pendekatan perhitungan potensi kayu menggunakan data hasil IHMB PT BPP I tahun 2010 = 78,97 m³/ha (Sumber: Laporan/Dokumen Perusahaan Konsesi, diolah)



Gambar 3.46. Peta Izin Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan Kelola Sendang
(sumber: BPKH Wil II Plg, 2015)

3) Potensi Kayu di Wilayah Tertentu

Potensi kayu di areal yang belum dibebani hak di dalam areal ini cukup beragam. Berdasarkan hasil referensi (Tim Terpadu, DisHut Kabupaten MUBA, BPKH Wilayah II Palembang, BPKP, LSM Wahana Bumi Hijau, PT. Sentosa Bahagia Bersama (SBB), PT. Pakerin dan personil KPHP, 2014) ditemukan adanya potensi jenis kayu hutan lahan kering sekunder berupa jenis meranti dan rimba campuran, sedangkan hasil hutan bukan kayu berupa jernang. Potensi pada penutupan lahan semak belukar berupa jenis rimba campuran dengan diameter kurang dari 30 cm. Dijumpai juga kayu akasia yang tidak produktif pada penutupan lahan hutan tanaman (Tabel 3.12). Berdasarkan hasil analisis spasial, diketahui bahwa total potensi kayu di areal yang belum dibebani hak yang terdiri dari Blok HL-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu) 49,02 m³/ha, Blok HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu) 3,77 m³/ha. (Tabel 3.13). Pada Gambar 3.47 dan 3.48 tersaji Peta Area Potensi Kayu Di Wilayah Kelola Hutan Meranti dan Peta Pemegang konsesi Potensi Kayu pada wilayah tertentu di Kawasan Kelola Sendang.

Tabel 3.11 Kondisi Tutupan Lahan Bagian Hulu Kelola Sendang Wilayah Meranti

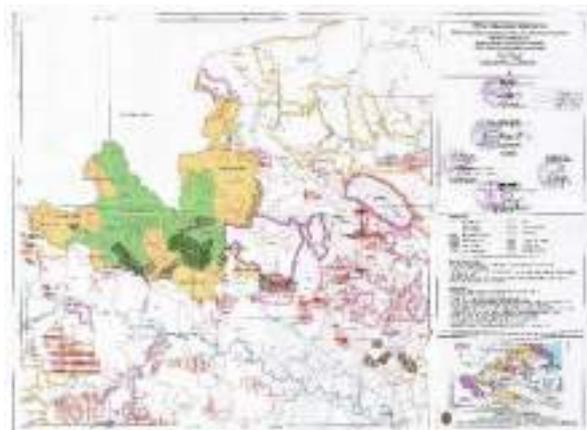
No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Jenis	Keterangan
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	9.848,51	Jenis meranti dan rimba campuran; HHBK: jernang	
2	Hutan tanaman	788,45	<i>Acacia mangium</i> , tidak Produktif	Ekspansi PT. WAM; PT. Pakerin
3	Perkebunan	9.581,01	Sawit, umur 7 – 15 Tahun	PT.BSS,PT.Pinago, PT.MBI
4	Semak belukar	5.396,80	Jenis rimba campuran, didominasi pohon berdiameter < 30 cm	
5	Pertanian Lahan Kering Campuran	9.843,80	Tanaman karet, sawit, tanaman buah-buahan dan tanaman pertanian.	Penduduk Lubuk Bintalo, Pangkalan Bulian, Sako Suban, Babat Supat
6	Pemukiman	121,43		Pemukiman penduduk Desa Lubuk Bintalo, Desa Pangkalan Bulian, Babat Supat, Sako Suban
7	Pertambangan	30,95	Minyak dan gas	Aktif
Jumlah		35.641,51		

Sumber: BPKH Wil II, 2014

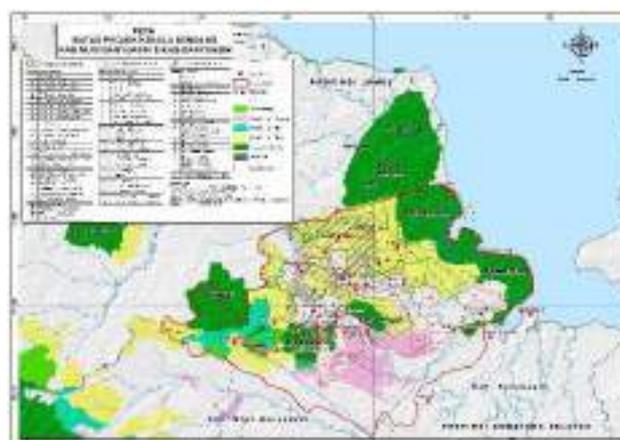
Tabel 3.12. Potensi Kayu di Wilayah Tertentu Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti.

Tutupan Vegetasi Berdasarkan Blok	Luas (ha)	Potensi (m ³)
HL-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu) Moratorium	16.325,20	800.261,00
Hutan Lahan Kering Sekunder	8.127,71	3.984,20
Pertanian Lahan Kering Campuran	4.162,55	2.040.482,00
Hutan Tanaman	94,12	4.613,76
SemakBelukar	3.940,81	193.178,50
HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu)	19.316,31	72.822,50
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.720,80	6.487,42
Pertanian Lahan Kering Campuran	5.672,25	21.384,38
Hutan Tanaman,	694,33	2.617,62
SemakBelukar	1.455,99	5.489,08
Perkebunan	9.581,01	36.120,41
Pertambangan	30,95	116,68
Pemukiman	121,43	457,79
Jumlah	35.641,51	873.084,00

Ket: Pendekatan potensi kayu menggunakan hasil survey BPKH (potensi kayu untuk hutan lindung = 49,02 m³/ha; potensi kayu untuk hutan produksi = 3,77 m³/ha);
Sumber: Hasil analisis data BPKH Wil II. 2014)



Gambar 3.47. Potensi Kayu pada Wilayah Tertentu di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti (Sumber: BPKH Wil II Palembang, 2015)



Gambar 3.48. Peta Pemegang Konsesi Potensi Kayu pada Wilayah Tertentu di Kawasan Kelola Sendang (Sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2018)

c. Potensi Hutan Non Kayu

Berdasarkan laporan dan dokumen pemegang konsesi, potensi hasil hutan non kayu yang diusahakan masyarakat terutama di areal restorasi ekosistem meliputi madu hutan, jernang dan rotan (Tabel 3.13).

Tabel 3.13. Potensi Non Kayu di Areal Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti

No	Jenis	Lokasi
1	Madu	Konsesi RE, HL Meranti Sungai Jernih
2	Jernang	Konsesi RE, Blok HP-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu) pada HP Meranti Hulu Sungai Kapas
3	Rotan	Tersebar di kawasan HL, kawasan lindung pemegang izin
4	Bambu	Tersebar di kawasan HL, kawasan lindung pemegang izin, pemukiman penduduk
5	Getah karet	Tersebar di sekitar pemukiman penduduk

Sumber: Laporan/Dokumen Perusahaan Konsesi dan Hasil *groundcheck* Tim Terpadu KPHP Unit IV Meranti, 2014

Berdasarkan informasi di kawasan Kelola Sendang hulu wilayah kawasan kelola hutan Meranti juga menemukan adanya potensi madu alam sialang. Madu alam/hutan pada umumnya diambil dari lebah yang bersarang di pohon sialang. Potensi jernang terdapat terutama di kawasan hutan alam (RE). Berdasarkan hasil *groundcheck* ditemukan pula adanya potensi jernang di areal Blok HP-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu) pada Hulu Sungai Kapas. Jernang tersebut telah diusahakan oleh masyarakat dan menjadi sumber penghasilan tambahan. Rotan yang dipungut adalah jenis rotan manau dan rotan getah. Rotan manau dipungut dari dalam hutan sedangkan rotan getah pada umumnya dipungut dari pinggir sungai. Rotan yang diproduksi rata-rata sekitar 2 truk per bulan dan biasanya dijual dalam bentuk rotan mentah/basah.

d. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

1) Keberadaan Flora Langka

Hasil inventarisasi vegetasi menunjukkan tipe vegetasi di wilayah ini berupa belukar, kebun karet, kebun sawit, hutan dengan kerapatan jarang dan sedang. Jenis pohon yang ditemukan di lokasi tersebut sebanyak 145 jenis. Beberapa jenis pohon dominan di HP adalah Parkat, Menggiris, Medang, Terap, Pulai, Putat, Merawan, Bernai, Petanang, dan Petaling. Flora jenis pohon di dalam kawasan umumnya didominasi jenis Parkat, Menggiris, Medang, Kelapung, Terap, Pulai, Meranti, Petanang, Kelat, Kempas, dan Pasang. Jenis flora dalam kawasan HL didominasi oleh jenis Terap, Kelapung, Medang, Menggiris, dan Parkat (Tabel 3.15). Jenis flora terutama jenis pohon yang dilindungi secara terbatas dan langka dalam skala lokal yang meliputi jenis Jelutung (*Dyera spp.*), Surian (*Toona spp.*), Meranti Damar (*Shorea spp.*), Bulian (*Eusideroxylon zwageri*) dan Tembesu (*Fragaea fragant*) serta kayu Onglen.

2) Keberadaan Fauna Langka

Keanekaragaman fauna yang terbesar terdapat di areal restorasi ekosistem (PT. REKI). Di areal ini ditemukan minimal sebanyak 380 spesies yang terdiri atas 61 spesies kelas mamalia, 269 spesies kelas aves, 31 spesies kelas reptilia dan 19 spesies kelas amfibia.

Di areal hutan restorasi tersebut terdapat penyebaran spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi undang-undang (Tabel 3.14 dan 3.15). Di areal konsesi hutan tanaman (PT. Bumi Persada Permai) masih terdapat beberapa jenis fauna yang dilindungi. Terdapat 6 jenis dari kelas mamalia yang dilindungi, yaitu beruk, beruang madu, rusa, kancil, gajah dan harimau sumatera. Selain mamalia yang dilindungi, juga terdapat kelas aves yang dilindungi, yaitu elang putih, enggang, ayam hutan, dan raja udang serta satu spesies reptilia yaitu ular kobra.

Tabel 3.14. Potensi Fauna di Kawasan Sembilang Dangku Bagian Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti

No	Kondisi Hutan	Kelas	Jumlah Spesies
1	Hutan produktif	Mamalia, Aves, Reptilia	18, 17, 2
2	Hutan kurang produktif	Mamalia, Aves	15, 14
3	Hutan tidak Produktif	Mamalia, Aves, Reptilia	8; 11; 1

Sumber: Laporan/Dokumen Perusahaan Konsesi, diolah tim recheck; 2015

Tabel 3.15. Potensi Flora di Kawasan Sembilang Dangku Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti

No	Fungsi Kawasan	Penutupan Vegetasi	Jenis Dominan
1	Hutan Produksi (HP)	Belukar (Br)	- Parkat - Menggiris (<i>Koompassia malaccensis</i> Maing) - Medang (<i>Litsea firma</i> spp.) - Terap (<i>Artocarpus</i> spp.) - Pulai (<i>Alstonia</i> spp.)
		Hutan Sekunder (Hs)	- Putat (<i>Barringtonia</i> spp.) - Merawan (<i>Hopea</i> spp.) - Pulai (<i>Alstonia</i> spp.) - Bernai - Petanang (<i>Alstonia</i> spp.) - Petaling (<i>Ochanostachys amentacea</i> MAST)
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Belukar (Br)	- Parkat - Menggiris (<i>Koompassia malaccensis</i> Maing) - Medang (<i>Litsea firma</i> spp.) - Kelapung, Terap (<i>Artocarpus</i> spp.) - Pulai (<i>Alstonia</i> spp.)
		Hutan Sekunder (Hs)	- Meranti (<i>Shorea</i> spp.) - Medang (<i>Litsea firma</i>) - Petanang (<i>Alstonia</i> spp.) - Kelat (<i>Eugenia</i> spp.) - Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i> Maing) - Pasang (<i>Quercus</i> spp.)
3	Hutan Lindung (HL)	Belukar (Br)	- Terap (<i>Artocarpus</i> spp.) - Kelapung - Medang (<i>Litsea firma</i>) - Menggiris (<i>Koompassia malaccensis</i> Maing) - Parkat

Sumber: BPKH Wilayah II Palembang, diolah Tim, 2015

e. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Potensi jasa lingkungan mencakup jasa pemanfaatan air, pemanfaatan untuk wisata alam dan estetika/keindahan serta kenyamanan. Di kawasan konsesi (PT. SBB) terdapat kawasan lindung yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata berupa tegakan onglan yang tergolong jenis pohon langka. Disamping sebagai kawasan wisata alam, areal tegakan onglan tersebut juga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan hutan dengan nilai konservasi yang tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*). Dengan tingginya keanekaragaman (*biodiversity*) yang ada di kawasan Kelola Sendang bagian hulu di wilayah kawasan hutan Meranti khususnya pada hutan alam maka sangat besar potensinya untuk dikembangkan dalam bentuk/skema perdagangan karbon (Tabel 3.16).

Tabel 3.16. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Meranti

No	Jenis Potensi	Lokasi
1	Kayu langka (kayu Onglen)	Konsesi HTI PT. SBB, dan PT. REKI
2	Hutan dengan nilai konservasi tinggi (<i>High Conservation Value Forest/HCVF</i>)	Konsesi HTI PT. SBB, dan PT. REKI
3	Karbon	Hutan alam

Sumber: Laporan/Dokumen Perusahaan Konsesi, diolah tahun 2015

2. Potensi Wilayah Kawasan Kelola Sendang (Bagian Tengah), Wilayah Kawasan Hutan Lalan Mendis Mangsang dan Sekitarnya

Berdasarkan pembagian hutan menurut fungsi, keseluruhan wilayah hutan LMM merupakan fungsi hutan produksi, yang tergabung dalam kelompok HP Lalan dan HP Mangsang Mendis. Pada wilayah hutan tersebut kebanyakan sudah diberikan izin pengusahaan hutan berupa IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dengan berbagai kondisi, ada yang aktif, ada yang non aktif dan ada yang sedang dalam proses usulan perizinan. Menurut Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, standar prosedur dan kriteria pengelolaan hutan tentang Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa "Pembagian blok harus memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan", sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa "Dalam pembagian blok sebagaimana dimaksud dimungkinkan untuk menetapkan blok sebagai wilayah tertentu", dan pada Pasal 7 ayat 3 "Dalam hal wilayah yang bersangkutan telah ada ijin atau hak, pembagian petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang ijin atau hak. Atas dasar hal tersebut serta melihat realisasi kondisi dan keadaan, maka pembagian blok untuk wilayah LMM dibagi menjadi 4 (empat) blok yakni blok pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (HHK-HA), blok pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (HHK-HT), blok pemanfaatan Jasa Lingkungan dan hasil Hutan Bukan kayu (Jasling dan HHBK): pengelolaan dengan sistem restorasi, stock carbon, dan areal konservasi gambut dalam), dan blok Pemberdayaan (HD, HTR, dan wilayah tertentu).

Luasan dari setiap klasifikasi blok dan persentasinya disajikan pada (tabel 3.17).

Tabel 3.17. Luasan dan Presentasi Pembagian Blok pada Kawasan Sembilang Dangku Bagian Tengah Wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis (LLM)

No	Klasifikasi Blok	Luas (Ha)	Persen
1	Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam dan Hutan Tanaman (HHK-HA dan HT):	116.164,92 Ha	63,92
	a. Blok Pemanfaatan HHK-HA :	39.236,63 Ha	
	b. Blok Pemanfaatan HHK-HT :	126.928,29 Ha	
2	Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Jasling_HHBK)	34.675,90 Ha	13,34
3	Blok Pemberdayaan Masyarakat :		
	a. Wilayah Tertentu	32.983,67 Ha	12,6
	b. Pemberdayaan HTR dan HD	26.155,51 Ha	10,05
Jumlah		259.940,00 Ha	100

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin; BPKH Wil. II Palembang, 2015

b. Informasi Penutupan Vegetasi

Berdasarkan data hasil interpretasi citra Lansat tahun 2011 (BPKH wilayah II), areal berhutan hanya mencapai 25,87% meliputi hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Hutan sekunder merupakan kondisi hutan yang tersuksesi secara alami dari hutan yang sebelumnya mengalami gangguan penebangan dan kebakaran. Kondisi tutupan lahan yang lain yang persentasinya besar adalah belukar rawa mencapai 28,65% dan pertanian lahan kering/kebun campuran 19,86%, lebih jelas luasan dan persentasi tutupan lahan di wilayah disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Luas dan Presentasi Tutupan Lahan tahun 2011

No	Klasifikasi Lahan	Luas (ha)	Presentasi
1	Belukar Rawa	76.193	28,65
2	Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan	2.366	0,88
3	Hutan mangrove primer	54	0,03
4	Hutan mangrove sekunder	1.025	0,39
5	Hutan rawa primer	5.035	1,89
6	Hutan rawa sekunder	57.052	21,45
7	Hutan tanaman	3.248	1,23
8	Lahan terbuka	6.827	2,56
9	Pemukiman/ lahan terbangun	458	0,17
10	Perkebunan	17.231	6,47
11	Pertambangan	290	0,12
12	Pertanian lahan kering	19.957	7,50
13	Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur	52.823	19,86
14	Rawa	667	0,25
15	Savana/padang rumput	10.963	4,12
16	Semak belukar	53.47	2,02
17	Transmigrasi	77	0,02
18	Tubuh air	6.357	2,38
Jumlah		265.953	100

Sumber: Interpretasi Citra Landsat oleh BPKH Wilayah II, 2015

c. Potensi Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu dapat diperoleh dari pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan hutan alam, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa dan kawasan Restorasi Ekosistem. Jenis tanaman yang berasal dari hutan tanaman adalah jenis tanaman yang berasal dari tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan. Tanaman pokok yang diusahakan oleh pemilik izin IUPHHK selama ini adalah tanaman Akasia dan Eucaliptus, tanaman unggulannya terdiri dari jenis meranti payau, pulai, ramin, sedangkan tanaman kehidupan terdiri dari jelutung. Berikut diuraikan potensi kayu yang berasal dari areal yang diusahakan sebagai areal HTI. 2015 hutan habis terbakar antara WLMS dengan karang agung. Sekitar 600 Ha, cikal bakal konflik dikawasan ini (Tabel 3.19).

Tabel 3.19. Potensi kayu yang berasal dari IUPHHK-HT Kawasan Kelola Sendang Hulu, Wilayah Kawasan Hutan Meranti

No.	Nama Perusahaan	Tanaman Pokok		Tanaman Unggulan		Tanaman Kehidupan
		Jenis	Luas (Ha)	Jenis	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	PT. Rimba Hutani Mas (RHM)	Akasia, Eucaliptus	168.430	Meranti payau, pulai, ramin	6.620	18.376
2	PT. Bumi Persada Permai (BPP)	Akasia, Eucaliptus	40.073		3.257	7.003
3	PT. Sumber Hijau Permai (SHP)	Akasia, Eucaliptus	2.876		520.970	
4	PT. Wahana Lestari Makmur Sukses (WLMS)		167.000			
5	PT. Tunas Hutan Pratama		1.468.000			
6	PT. Pakerin		33.686		3.310	4.301
7	PT. Tiesco Cahaya Pertiwi		-			
8	PT. Rickym Mas Jaya		15.300			
9	PT. Tripupa Jaya		-			

Sumber: Interpretasi Citra Landsat oleh BPKH Wilayah II, 2015

Potensi kayu yang berasal dari areal-areal hutan yang diusahakan oleh masyarakat adalah kayu karet, setelah karetnya tidak lagi memproduksi getah. Selain itu terdapat juga Kayu Rimba Campuran (KRC) yang tumbuh alami berasosiasi dengan tanaman karet seperti pulai, medang, simpur, seru/puspa, sungkai, terap, balam, kayu labu, serta tanaman buah. Ada kegiatan yg diusahakan masyarakat jenis usaha bernama Agro Silvo Forestry (pola coba, sejak tahun 2015 sekitar 2 thn terakhir, lokasi di Kepayang di Hutan Desa Talang Nualan di Desa Kepayang) yang sudah diusahakan sekitar 20 Ha baru mulai, komponen yg terlibat masyarakat lokal, yg sdh menunjukkan hasil jenis tanaman jelutung, meranti, tembesu, keranji, pulai (3:2=3 karet:1 jenis lain) baru 5 Ha.

d. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi hasil hutan non kayu antara lain rotan, getah dan madu. Getah berasal dari getah karet yang menjadi tanaman kehidupan HTI atau dari beberapa kawasan hutan yang diusahakan oleh masyarakat. Selain getah karet terdapat potensi getah lainnya yaitu getah jelutung, selain berasal dari hutan alam, mulai sekarang ada wacana Hutan Desa Kepayang akan membudidayakan jelutung. Potensi rotan dapat didapat dari kawasan hutan Merang dan beberapa areal yang berada di bantarsungai. Untuk hasil hutan bukan kayu berupa rotan, areal produktif diperkirakan seluas 11,70 ha (10% dari 42% dari kawasan yang masih berhutan). Potensi rotan menurut pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 97.166 batang atau 685 ton. Menurut informasi dan data, setiap hektar kawasan hutan LMM terdapat sekitar 10 batang rotan.

Berarti setidaknya ada potensi rotan sebesar 111.700 batang atau 788 ton. Produksi rotan saat ini diperkirakan sekitar 26,336 batang atau sekitar 186 ton setiap tahunnya. Seluruh hasil hutan non kayu ini masih mengandalkan sepenuhnya dari sumber daya hutan yang ada. Hasil hutan bukan kayu yang berupa getah adalah getah karet dan getah jelutung. Getah karet dan getah jelutung ini merupakan hasil tanaman yang dibudidayakan pada lahan konsesi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang diwajibkan untuk di tanami dengan tanaman unggulan (10%) dan tanaman kehidupan (5%).

e. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Konservasi alam pada Kawasan Kelola Sendang bagian Tengah di wilayah kawasan hutan Lalan Mendis Mangsang ditujukan pada wilayah HRG Merang Kepayang. Pada areal ini dijumpai keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Terdapat 23 jenis flora dan 14 jenis fauna yang masuk dalam kategori dilindungi karena hampir punah (Tabel. 3.21). Kawasan HRG Merang Kepayang merupakan salah satu hutan rawa gambut tersebut yang masih tersisa dan penting di Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan ini menjadi salah satu area kunci Keanekaragaman Hayati di Pulau Sumatera dan bernilai penting karena merupakan bagian dari suatu sistem hutan rawa gambut yang lebih luas yang terbentang dari Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi hingga ke Taman Nasional Sembilang di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil survey project SSFFMP tahun 2008 tercatat ada 12 spesies mamalia yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara berdasarkan kriteria yang berlaku dalam IUCN Red Data List, empat (4) spesies termasuk dalam kelompok spesies yang terancam punah dengan kategori genting (*Endangered*) tingkat keterancamannya. Jenis mamalia besar yang ditemukan adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumaterae*), yang tercatat sebagai jenis yang sangat kritis terancam punah menurut kategori IUCN (*Critically Endangered, CE 1+2a*).

Tabel. 3.20. Daftar jenis vegetasi penting dan dilindungi yang ditemukan

No	Nama Jenis	Suku	Nama Lokal	Status
1	<i>Alstonia pneumatiphora</i>	Apocynaceae	Pule Rawa	LC/NE EN
2	<i>Anisoptera costata</i>	Dipterocarpaceae	Mersawa	LC/NE
3	<i>Calophyllum Pulcherimum</i>	Clusiaceae	Bintangur	LC/NE
		Anacardiaceae	Trentang	LC/NE
4	<i>Calophyllum soulatri</i>	Hiericaceae	Grunggung	
		Arecaeae	Palem Merah	Dilindungi
5	<i>Camnos coriaceum</i>	Mimosaceae	KerANJI	LC/NELC/NE
6	<i>Cratoxylum arborescen</i>	Apocynaceae	Daun Burung	LC/NE/Dilindungi
		Sapotaanaceae	Jelutung	LC/NE/Dilindungi VU
7	<i>Cyrtostacyislakka</i>	Thimelaeaceae	NyatoH	
8	<i>Dialium indum</i>	Myristicaceae		Dilindungi
9	<i>Durio carinatus</i>	Mimosaceae	Ramin	Dilindungi
10	<i>Dyera costulata</i>	Sapotaaceae	Dara-data	Dilindungi
11	<i>Ganua Motleyana</i>	Sapotaaceae		Dilindungi
12	<i>Gonystylus bancanus</i>	Burseraceae	Mengris/kempas	LC/NE
		Dipterocarpaceae	Suntai	
13	<i>Knema SPP</i>	Dipterocarpaceae		
14	<i>Compassia malaccensis</i>	Dipterocarpaceae	Balam enari rawa	
15	<i>Palaquium leiocarpum</i>	Dipterocarpaceae	Meranti	
		Dipterocarpaceae		
16	<i>Palaquium burokii</i>		Meranti Bunga	
17	<i>Santiria leavigata</i>		Meranti batu	
18	<i>Shorea Parvifolia</i>		Punak	
19	<i>Shorea teysmanniana</i>			
20	<i>Sorea uliginosa</i>		Rasak	
21	<i>Tetra merista glabra</i>		Rasak	
22	<i>Vatica rassak</i>			
23	<i>Vatica umbonat</i>			

Sumber: SSFFMP, 2008

Keterangan:

EN = *Endanger* (terancam) LC = *Least Concern* (beresiko rendah) NE= *Not Evaluated* (belum dievaluasi)
 VU= *vulnerable* (rentan)

Temuan ini bisa dipahami mengingat areal *Peat Dome* Merang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekosistem gambut dengan Taman Nasional Berbak di Jambi, yang merupakan habitat Harimau Sumatera. Selain itu, juga masih ditemukan jejak spesies Tapir Asia (*Tapirus indicus*, *vulnerable* A2c+3c+4c). Beruang madu (*Helarctos malayanus*, *vulnerable* A2cd+3cd+4cd), dan spesies lainnya. Mengacu pada konvensi perdagangan satwa dan tumbuhan liar (CITES) terdapat lima (5) spesies yang termasuk dalam *Appendix I* yang berarti merupakan jenis yang terancam kepunahan dan perdagangannya diatur hanya untuk kebutuhan tertentu saja seperti untuk penelitian. Enam (6) spesies lainnya termasuk dalam kelompok *Appendix II*, yang termasuk kategori ini adalah spesies yang tidak terlalu terancam kepunahan jika diperdagangkan diatur berdasarkan kuota yang disepakati dalam konvensi antara negara yang meratifikasi CITES(COP).

Tabel 3.21. Species mamalia penting di HRG Merang-Kepayang

No	Namalndonesia/Lokal	Namallmiah	Status
1	Malu-malu, kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	P, App II
2	Simpai	<i>Presbytis melalophos</i>	P, App II
3	Lutung, cekong	<i>Presbytis cristatus</i>	P, App II
4	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	P, App II
5	Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	P, APP I, EN
6	Rusa sambar	<i>Cervus unicolor</i>	P
7	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	P
8	Napu	<i>Tragulus napu</i>	P
9	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatrea</i>	P, App I, EN
10	Kucing kuwuk	<i>Felis bengalensis</i>	P, App I
11	Beruang madu	<i>Helartos malayanus</i>	P, App I, EN
12	Gajah	<i>Elephas maximus</i>	P, App I, EN
13	Kera ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	App II
14	Berang-berang cakar-kecil	<i>Aonyx cinerea</i>	App II

Sumber: SSFFMP, 2008

Keterangan:

P = Dilindungi oleh undang-undang di Indonesia

Pp I & APP II = Appendix I & II (CITES)

EN = Endangered species

Nt = Near Threatened (Kriteria keterancaman-punah dari IUCN)

Dari hasil penilaian keanekaragaman hayati di area *Peat Dome* Merang, masih terdapat cukup banyak spesies burung yang ditemukan (Tabel 3.22).

Tabel 3.22. Daftar spesies burung yang ditemukan di Kawasan Kelola Sendang Tengah

Family	Nama Indonesia/Lokal	Nama Ilmiah	Tahun Pengamatan			Kategori Menurut IUCN
			2001	2003	2008	
Anhingidae	Pecukularasia	<i>Anhinga melanagaster</i>	0			NT
Ciconiidae	Bangau storm	<i>Ciconiastormi</i>	0	1		EN
	Bangau tongtong	<i>Leptoptilos Javanicus</i>		0	0	A2c+3c VU A2cde+3cde
Anatidae	Mentok rimba	<i>Cairina scutulata</i>			1	EN
	Elang Wallace	<i>Spizaetus nanus</i>			0	A2cd+3cd VU A2c+3c
	Elang ikan kecil	<i>Ichthyophaga Humilis</i>		0	0	NT
Psittacidae	Elang ikan kepala kelabu	<i>Ichthyophaga ichtyaetus</i>			0	NT
	Betet ekor panjang	<i>Psittacula longicauda</i>		0	0	NT
	Nuri tanau	<i>Psittinus cyanurus</i>			0	NT
	Kadalan beruang	<i>P. (Rhopodytes) Diardi</i>			0	NT
Trogonidae	Kuntur putrid	<i>Harpactes duvaucelii</i>			0	NT
	Kadalan beruang	<i>P. (Rhopodytes) diardi</i>			0	NT

Trogonidae	Luntur putrid	<i>Harpactes duvaucelii</i>		0		NT
	Julang jambul hitam	<i>Rhyticeros (Aceros) corrugatus</i>		0	0	NT
	Kangkareng hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>	0	0	0	NT
	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>		0	0	NT
	Takur tutut	<i>Megalaima Rafflesii</i>	0	0		NT
	Caladi badok	<i>Meiglyptes tukki</i>	0	0		NT
	Sempur hujan darat	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	0	0	0	NT
Champephagidae	Sepah tulin	<i>Pericrocotus igneus</i>		0	0	NT
	Cipoh jantung	<i>Aegithinia viridissima</i>			0	NT
	Cucak rumbai tungging	<i>Pycnonotus Eutilotus</i>	0			NT
	Pelanduk dada putih	<i>Trichastoma rostratum</i>	0	0	0	NT
	Asi besar	<i>Malacopterum Magnum</i>	0		0	NT
	Asi dada kelabu	<i>Malacopterum albogulare</i>	0			NT
	Ciung air pongpong	<i>Macronous ptilosus</i>	0			NT
	Pelanduk ekor pendek	<i>Malacocincla malaccense</i>			0	NT
	Tepus kaban	<i>Stachyris nigricollis</i>			0	NT
	Sikatan rimba dada kelabu	<i>Rhinomyias umbratilis</i>	0			NT

Sumber: SSFFMP, 2008

Keterangan :

EN : *Endangered*/Terancam punah VU : *Vulnerable*/rentan NT : *Near Threatened*/hampir terancam
 0 : Hasil Pengamatan oleh Gonneretal.(2001),Lubisatal. 2004 dan Waltert,2008
 I : Hasil pengamatan lembaga local

f. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Salah satu keunggulan kawasan kelola sendang yang berada di wilayah Lalan Mendis Mangsang adalah tingginya nilai biodiversitasnya terutama pada wilayah HRG Merang. Dari sisi potensi flora, terdapat sekitar 23 jenis flora penting yang dilindungi. Adapun dari sisi potensi fauna, tercatat 18 jenis mamalia dan 12 diantaranya dilindungi serta berbagai spesies burung (aves) yang dilindungi yang keberadaannya sudah termasuk kategori terancam punah. Dengan mempertimbangkan tingginya potensi flora dan fauna yang dilindungi di wilayah HRG Merang dan keunikan bentang lahannya yang berupa kubah gambut besar maka pengelolaan wilayah ini hendaknya perlu tetap dipertahankan sebagai kawasan yang dilindungi, sehingga wilayah ini yang diperuntukkan sebagai pencadangan pemanfaatan jasa lingkungan adalah wilayah eks proyek penciptaan prakondisi memasuki kegiatan perdagangan karbon dengan skema REDD, yaitu *Merang REDD Pilot Project (MRPP)*.

Di dalam wilayah ini terdapat potensi lahan gambut yang luas. Sebagian lahan ini masuk dalam kategori gambut dalam dan sangat dalam. Oleh karena itu peluang pemanfaatan untuk kegiatan jasa lingkungan berupa penyimpanan dan penyerapan karbon melalui skema perdagangan karbon sangat terbuka. Potensi karbon yang dapat disimpan maupun diserap di wilayah ini khususnya pada kawasan Merang cukup tinggi.

Selain untuk penyimpanan dan penyerapan karbon, wilayah ini berpotensi juga sebagai

pemulihan ekosistem yang rusak (restorasi). Hal ini bercermin dari semakin tingginya tekanan kerusakan hutan oleh berbagai aktifitas pada areal yang berhutan. Selain itu di wilayah ini terdapat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan banyak terdapat flora dan fauna dilindungi serta memiliki bentang lahan (*landscape*) yang cukup unik seperti kubah gambut dan hutan rawa gambut. Sehubungan dengan itu, pada saat adanya kebijakan moratorium **Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru** (PIPIB) melalui intruksi presiden No. 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, ada beberapa kawasan hutan rawa gambut yang masuk pada wilayah PIPIB.

Pada lokasi seluas \pm 24.000 Ha, Pemerintah Kab. Musi Banyuasin dengan inisiasi dukungan dan kontribusi *The German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety* (BMU) dengan pelaksana GIZ Indonesia, selama tiga tahun yang dimulai tahun 2010 melakukan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Lahan (ekosistem hutan rawa gambut) untuk alternatif dan peluang baru bagi nilai tambah yang dapat dinikmati daerah dan masyarakat, disamping nilai ekonomi dari produk hasil hutan dan jasa lainnya atas keberadaan hutan melalui penciptaan prakondisi memasuki kegiatan perdagangan karbon dengan skema REDD. Sasaran program ini adalah sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan hutan rawa gambut yang terdegradasi.

Sedangkan tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan rehabilitasi hutan alam rawa gambut beserta segenap keanekaragaman hayatinya melalui sistem Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi dan persiapan menuju mekanisme kompensasi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui REDD. Berdasarkan informasi, kawasan HP Lahan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk perdagangan karbon. Hal ini dikarenakan adanya kandungan karbon yang besar baik yang terkandung di dalam biomasa hutan maupun di dalam tanah gambut. Selain itu, kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang dilindungi, seperti harimau, tapir, beruang madu dan buaya senyulong. Setelah berakhirnya program REDD, areal tersebut tengah dimohon untuk menjadi wilayah yang diusahakan untuk pemanfaatan hutan alam dengan pola restorasi oleh PT. Global Alam Lestari sedang dalam proses perijinan.

3. Potensi Wilayah Kawasan Kelola Sendang (Hilir), Wilayah Kawasan Hutan Lahan Sembilang dan Sekitarnya.

Berdasarkan status fungsi kawasan, potensi sumber daya alam, kondisi biofisik, keadaan masyarakat dan keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada di wilayah Lahan Sembilang, maka pembagian blok pengelolaan hutan akan dibagi menjadi 3 blok (Tabel 3.23):

- (1) **Blok Perlindungan** adalah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang, akan dijadikan sebagai blok perlindungan yang diharapkan juga berfungsi sebagai *buffer zone* terhadap kawasan Taman Nasional Sembilang.

- (2) **Blok pemanfaatan hutan tanaman** adalah wilayah yang sudah dimanfaatkan sebagai hutan tanaman oleh pemilik izin dan yang sedang melakukan proses permohonan izin IUPHHK-HTI.
- (3) **Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** adalah yang memiliki tingkat kelerengan datar, kondisi agak terbuka serta memiliki akses terhadap masyarakat. Luasan masing-masing klasifikasi blok dan persentasinya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.23. Luasan dan Presentasi Klasifikasi Tata Hutan

No.	Blok Tata Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HP - Pemanfaatan HHK HT (TRIPUPA)	20.210,77	33,13
2	HP - Pemanfaatan HHK HT (SHP)	25.765,33	42,24
HP - Pemanfaatan, Jasling dan HHBK = Blok			
3	Wilayah Tertentu	8.745,15	14,34
4	HP – Perlindungan	6.278,33	10,29
Jumlah		60.999,34	100,00

Sumber: Hasil Analisis CRST oleh Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2016

Selanjutnya semua blok dalam tata hutan akan dikelompokkan menjadi kelas yang akan dibentuk menjadi kelas perusahaan seperti diuraikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24. Korelasi Tata Hutan, Kelas Hutan dan Kelas Perusahaan

Blok Tata Hutan	Kelas Hutan	Kelas Perusahaan
Blok Perlindungan	Perlindungan kawasan	-
Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK = Blok Wilayah Tertentu	Jasa Lingkungan	1. Pemanfaatan sumberdaya air 2. Penelitian dan pendidikan 3. Sumberdaya genetik 4. Penangkaran satwa 5. Jasa simpanan dan serap Carbon
	Pengembangan Hutan Hasil bukan Kayu	1. Getah (jelutung rawa) 2. Nibung 3. Rotan 4. Buah
Blok Pemanfaatan Hutan Tanaman	Hutan tanaman industry	1. Akasia 2. Eucalyptus Sp
	Pengembangan hasil Hutan Kayu	1. Kayu pertukangan 2. Kayu bahan baku industri (kayu serat) 3. Kayu Energi

Sumber: Hasil Analisis Tim BPKH Wil. II Palembang, tahun 2015)

a. Potensi Penutupan Vegetasi

Berdasarkan data dari peta penutupan lahan BPKH Wilayah II Palembang tahun 2015 hasil penafsiran Citra Lansat, jenis penutupan lahan yang berada di wilayah KPHP Unit II Lalan Sembilang terdiri dari 7 jenis penutupan lahan yakni hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman, belukar rawa, semak belukar, lahan terbuka, dan tubuh air (Tabel 3.25).

Tabel 3.25. Luas Penutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Sembilang Banyuasin

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Hutan			
1	Hutan Tanaman	26.834,41	43,99
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	12.392,12	20,32
3	Hutan Mangrove Primer	11.180,13	18,33
4	Hutan Mangrove Sekunder	7.963,97	13,06
Non Hutan			
5	Semak Belukar	1.922,52	3,15
6	Tubuh Air	674,10	1,11
7	Belukar Rawa	32,10	0,05
Jumlah		60.999,34	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2015

Jenis penutupan lahan yang paling dominan adalah Hutan Tanaman seluas 26.834,41 Ha (43,99%). Terdapat juga Hutan lahan kering sekunder seluas 12.392,12 Ha (20,32%), Hutan mangrove primer seluas 11.180,13 Ha (18,33%), Hutan mangrove sekunder seluas 7.963,97 Ha (13,06%), Semak Belukar seluas 1.922,52 Ha (3,15%), tubuh air seluas 674,10 Ha (1,11%), dan Belukar Rawa seluas 32,10 Ha (0,05%).

b. Potensi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

1) Hasil Hutan Kayu

Keadaan vegetasi hutan di kawasan Kelola Sendang Bagian Tengah wilayah kelola hutan Lalan Sembilang yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan mempunyai dua tipe hutan yaitu hutan basah/rawa musiman dan Hutan Mangrove.

2) Hutan Rawa

Potensi kayu di Hutan Rawa terdapat kayu komersil kelas satu, komersil kelas dua, kayu indah satu, kayu indah dua, jenis yang di lindungi, dan jenis lainnya (Tabel 3.25). Diameter yang diamati berkisar dari diameter 20 cm \geq 50 cm yang selanjutnya dikelompokkan menjadi empat kelas diameter.

Tabel 3.26. Potensi Kayu Strata Pohon di Hutan Rawa Wilayah Lalan Sembilang

	Nama Jenis	Perdagangan	Nama Latin
Komersil Satu			
1	Asam-asam	Asam	<i>Mangifera spp</i>
2	Balam	Nyatoh	<i>Palaquium confertum HJL</i>
3	Durian hutan	Durian	<i>Durio spp</i>
4	Huru kacang	Meranti	<i>Litsea firma Hook f.</i>
5	Jelutung	Jelutung	<i>Dyera spp</i>
6	Kelungkung	Meranti Merah	<i>S.palembanica Miq.</i>
7	Keruing	Keruing	<i>Dipterocarpus spp.</i>

8	Kulim	Kayu Bawang	<i>Scorodocarpus borneensis</i> Becc.
9	Manggah	Medang	<i>Litsea firma</i> Hook f.
10	Medang	Medang	<i>Cinnamomum</i> spp.
11	Meranti	Meranti	<i>Shorea</i> spp.
12	Merawan	Merawan	<i>Hopea</i> spp.
13	Merbau	Merbau	<i>Intsia</i> spp.
Komersil Dua (KRC)			
1	Labu	Labu	<i>Endospermum malaccense</i> M. Arg.
2	Banitan	Mempisang	<i>Kandelia candel</i> Druce
3	Berumbung	Berumpung	<i>Adina minutiflora</i> Val.
4	Cabe-cabe	Cenge	<i>Mastixia rostrata</i> Bl.
5	Cempedak air	Terap	<i>Artocarpus</i> spp
6	Gerunggang	Gerunggang	<i>Cratoxylum</i> spp.
7	Jaha	Ketapang	<i>Terminalia</i> spp.
8	Kelat	Jambu-jambu	<i>Syzygium</i> spp.
9	Kelumpang	Kelumpang	<i>Sterculia</i> spp.
10	Kempas	Kempas	<i>Koompassia malaccensis</i> Maing.
11	Kenanga	Kenanga	<i>Cananga</i> sp.
12	KerANJI	KerANJI	<i>Dialium</i> spp
13	Laban	Gopasa	<i>Vitex</i> spp.
14	Mahang	Mahang	<i>Macaranga</i> spp
15	Mampat	Gerunggang	<i>Cratoxylum aeborescens</i> (Vahl)
16	MarANJI	KerANJI	<i>D. platysepalum</i> Baker
17	Medang kunyit	Medang	<i>Litsea firma</i> Hook f.
19	Menggeris	Kempas	<i>Koompassia malaccensis</i> Maing.
20	Menjalin	Menjalin	<i>Xanthophyllum</i> spp.
21	Petaling	Petaling	<i>Ochanostachys amentacea</i> MAST
22	Pisang-pisang	Mempisang	<i>Kandelia candel</i> Druce
23	Pudungan	.----	.----
24	Pulai	Pulai	<i>Alstonia</i> spp.
25	Pulai Nasi	Jelutung	<i>Dyera</i> spp
26	Punak	Punak	<i>Tetramerista glabra</i> Miq
27	Rengas	Rengas	<i>Gluta aptera</i> (King) Ding Hou
28	Simpur	Simpur	<i>Dillenia</i> spp.
29	Suren	Simpur	<i>Dillenia</i> spp.
30	Tembesu	Tembesu	<i>Fagraea</i> spp.
31	Terap	Terap	<i>Artocarpus</i> spp.
32	Terentang	Terentang	<i>Camnosperma</i> spp
33	Tulang	Tulang	<i>Kurrimia paniculata</i> spp.
34	Ubar	Jambu-jambu	<i>Eugenia</i> spp

35	Semampat	Semampat	<i>Cratoxylon aff formosum DYER</i>
KAYU INDAH SATU			
1	Arang-arang/Siamang	Malam. K	<i>Diospyros macrophylla BL</i>
KAYU INDAH DUA			
1	Perepat	Perepat	<i>Combretocarpus rotundatus Dans.</i>
2	Ramin	Ramin	<i>Gonystylus bancanus Kurz</i>
3	Rengas Burung	Rengas	<i>Melanorrhoea spp.</i>
JENIS DILINDUNGI			
1	Balam	Nyatoh	<i>Palaquium confertum HJL</i>
2	Durian	Durian	<i>Durio spp</i>
3	Jelutung	Jelutung	<i>Dyera costulata Hook f</i>
4	Surian	Suren	<i>Toona Sureni Merr</i>
JENIS LAIN LAIN			
1	Antui	.----	.----
2	Bangan	.----	.----
3	Dukuh	.----	.----
4	Garam-garam	.----	.----
5	Gelam tikus	.----	.----
6	Gula-Gula	.----	.----
7	K.Nyamuk	.----	.----
8	Kayu tapis	.----	.----
9	Kayu Tulang	.----	.----
10	Luay	.----	.----
11	Merpuyan	.----	.----
12	Pecah piring	.----	.----
13	Pelangas	Pelangas	<i>A. microcalyx HASSK</i>
14	Pelawan	Pelawan	<i>Tritania obovata R. BR</i>
15	Pelempang	Pelempang	<i>Andinandra dimusa JACK</i>
16	Putat	Putat	<i>Planchonia valida BL</i>
17	Randu	.----	.----
18	Sabat	.----	.----
19	Tajam buntut	.----	.----
20	Tampui	.----	<i>Baccaurea javanica MUELL ARG</i>
21	Temberas	.----	<i>Memecylon oligoneuron BL</i>
22	Tetak tinggi	.----	.----

Sumber : BPKH Wilayah II Palembang, 2015

Berdasarkan data Tim dari BPKH, diketahui bahwa masa tegakan untuk seluruh strata penutupan lahan rata-rata perhektar dari seluruh kelas diameter dan seluruh kelompok jenis adalah 50 batang dengan volume 120,79 m³. Untuk kelompok jenis komersil satu rata-rata perhektar pada seluruh kelas diameter adalah 20 batang dengan volume

49,62 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini antara lain Meranti, keruing, Merawan, Merbau, jelutung dan lain-lain. Kelompok jenis komersil dua rata-rata perhektar dari seluruh kelas diameter adalah 19 batang dengan volume 52,28 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini antara lain Ketapang, Kenanga, Kempas, Medang, Mahang dan lain-lain. Kelompok jenis kayu indah satu rata-rata perhektar dari seluruh kelas diameter adalah 1 batang dengan volume 1,62 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini antara lain Arang-arang dan Siamang (*Diospyros macrophylla* BL). Kelompok jenis kayu indah dua rata-rata perhektar untuk seluruh kelas diameter adalah 2 batang dengan volume 6,05 m³. Jenis pohon untuk kelompok ini antara lain Perepat, Ramin, dan Rengas, sedangkan untuk kelompok jenis lain-lain rata-rata perhektar dari seluruh kelas diameter adalah 7 batang dengan volume 11,22 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini antara lain petaling, Dukuh, Kayu tapis, Kayu Tulang Antui, Bangan dan lain-lain, lebih terperinci data tersebut disajikan pada Table 27.

Hasil kayu yang terdapat di Hutan rawa tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan atau dapat menjamin *sustained stock* dengan adanya potensi kayu permudaan yang termasuk pada strata tiang, pancang dan semai. Di areal Hutan Rawa potensi permudaan tingkatan anakan (semai) rata-rata per hektar dari seluruh kelompok jenis adalah 18.909 batang. Kelompok jenis komersil satu rata-rata perhektar adalah 7.066 batang dengan jenis anakan antara lain Asam, Nyatoh, Durian, Jelutung, Medang, dan Meranti.

Tabel 3.27. Potensi Kayu Pada Strata Pohon Di Hutan Rawa Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Lalan Sembilang

No.	Kelompok Jenis	Kelas Diameter (cm)												Jumlah		
		20 – 29,9			30 – 39,9			40 – 49,9			≥ 50			B	N	V
		B	N	V	B	N	V	B	N	V	B	N	V			
1	Komersil Satu	0.44	9	4.56	1.12	12	13.73	1.94	13	26.17	5.64	17	79.60	9.14	51	124.06
2	Komersil Dua (KRC)	0.59	12	5.79	1.03	11	11.85	1.41	9	18.64	6.67	16	94.42	9.69	48	130.69
3	Kayu Indah Satu	0.04	1	0.48	0.03	0	0.43	0.10	1	1.35	0.14	1	1.79	0.31	3	4.06
4	Kayu Indah Dua	0.05	1	0.55	0.15	2	1.65	0.30	2	4.22	0.57	1	8.69	1.07	6	15.11
5	Lain-Lain	0.38	8	4.03	0.43	4	4.97	0.63	4	7.48	0.87	3	11.56	2.31	19	28.04
Jumlah		1.51	30	15.41	2.75	29	32.63	4.37	29	57.86	13.89	37	196.06	22.53	125	301.96

Sumber : BPKH wilayah II Palembang Tahun 2015

Keterangan :

N = Jumlah Batang/Ha

B = Luas Bidang dasar(m²/Ha)

V = Volume Pohon (m³/Ha)

Kelompok jenis komersil dua (kayu Rimba Campuran) rata-rata perhektar adalah 6.768 batang dengan jenis anakan untuk kelompok ini antara Mempisang, Berumpung, Terap,

Jambu-Jambu, Kelat, Keranji, Kelumpang, Keranji, Kulim, Luay, Kempas, Mendarahan, Pasang, Petaling, Pulai, Punak, dll. Kelompok jenis kayu indah satu rata-rata perhektar adalah 1.028 batang dengan jenis anakan untuk kelompok ini antara lain Malam K, Asam Kandis, Arang-arang, dan Siamang. Kelompok jenis kayu indah dua rata-rata perhektar adalah 1.360 batang dengan jenis anakan antara lain Perepat, Petaling, dan Ramin. Sedangkan untuk kelompok jenis lain-lain rata-rata per hektar adalah 2.687 batang dengan jenis anakan antara lain Antui, Bangan, Dukuh, Gamat, Garam-garam, Gelam tikus, K. Nyamuk, Tajam Buntut, Temberas, dan Tetak Tinggi.

Potensi permudaan tingkat sapihan (pancang) rata-rata per hektar pada seluruh kelompok jenis adalah 6.967 batang. Kelompok jenis komersil satu rata-rata per hektar mencapai 2.778 batang dengan jenis sapihan antara lain balam, Nyatoh, Durian, Jelutung, Medang, dan Mengiris. Kelompok jenis komersil dua (Kayu Rimba Campuran) rata-rata per hektar mencapai 2.505 batang dengan jenis sapihan antara lain Mempisang, Cempedak air, Berumpung, Laban, Mahang, Simpung, Kelat, Keranji, Kulim, Luay, Kempas, Petaling, Pulai, Punak, dan Rengas. Kelompok jenis kayu indah satu rata-rata per hektar adalah 265 batang dengan jenis sapihan antara lain Arang-arang, dan Siamang. Kelompok jenis kayu indah dua rata-rata per hektar adalah 282 batang dengan jenis sapihan antara lain Perepat dan Ramin. Sedangkan untuk kelompok jenis lain-lain rata-rata per hektar mencapai 1136 batang dengan jenis sapihan antara Antui, Sapat, dan Tajam Buntut.

Potensi permudaan tingkat tiang (*pole*) rata-rata per hektar pada seluruh kelas diameter dan seluruh kelompok jenis adalah 798 batang dengan luas bidang dasar 8,18 m². Kelompok jenis komersil satu rata-rata per hektar dari seluruh kelas diameter adalah 273 batang dengan luas bidang dasar 2,68 m². Jenis yang termasuk di kelompok ini antara lain Asam-Asam, Balam, Durian Hutan, Jelutung, Keruing, Kulim, Medang, dan Meranti. Kelompok jenis komersil dua (Kayu Rimba Campuran) rata-rata perhektar untuk seluruh kelas diameter adalah 240 batang dengan luas bidang dasar 2,52 m². Jenis tiang untuk kelompok ini antara lain Banitan, Berumbung, Cabe-Cabe, Cempedak Air, Medang Kunyit, Menggeris, Petaling, Pisang-Pisang, Pudungan, Pulai, Punak, Rengas, Simpung, Tembesu.

Kelompok jenis kayu indah satu rata-rata perhektar dari seluruh kelas diameter adalah 19 batang dengan luas bidang dasar 0,20 m². Jenis-jenis yang termasuk pada kelompok ini antara lain Arang-Arang, dan Siamang, kelompok jenis kayu indah dua rata-rata per hektar dari seluruh kelas diameter adalah 45 batang dengan luas bidang dasar 0,48 m². Jenis yang termasuk pada kelompok ini antara lain Perepat, Ramin, dan Rengas Burung. Sedangkan untuk kelompok jenis lain-lain rata-rata per hektar dari seluruh kelas diameter adalah 218 batang dengan luas bidang dasar 2,30m². Jenis tiang yang termasuk pada kelompok ini antara lain Bangan, Dukuh, Garam-Garam, Gelam Tikus, Gula-Gula, K. Nyamuk, Kayu Tapis, Tulang, Luay, Merpuyan, Pelangas,

Pelawan, Pelempang, Putat, Sabat, Tajam Buntut, Tampui, Temberas, Dan Tetak Tinggi. Hasil kayu lainnya adalah yang berasal dari hasil produksi hutan tanaman yang berasal dari tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan, lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Rekapitulasi Jumlah anakan, sapihan dan tiang (Ha) di hutan rawa Kawasan Kelola Sendang Hilir wilayah kelola Hutan Lalan Sembilang

No	KKK	Semai	Pancang	Kelas Diameter (Cm)						Jumlah Tiang	
				5,0 – 9,99		10,0 – 14,99		15,0 – 19,9			
				N	N	B	N	B	N	B	N
1	Komersiil satu	7,066	2,778	0.54	134	1.09	94	1.05	45	2.68	273
2	Komersiil dua (krc)	6,768	2,505	0.45	109	0.99	85	1.08	46	2.52	240
3	Kayu indah satu	1,028	265	0.03	8	0.08	7	0.10	4	0.20	19
4	Kayu indah dua	1,360	282	0.07	20	0.22	17	0.19	8	0.48	45
6	Jenis lain lain	2,687	1,136	0.48	104	0.79	68	1.03	46	2.30	218
Jumlah		18,909	6,967	1.57	374	3.16	271	3.45	150	8.18	795

Sumber : BPKH Wilayah II Palembang, Tahun 2011

3) Hutan Mangrove

Potensi hasil hutan kayu yang ada di Wilayah Lalan Sembilang dapat berasal dari potensi kayu hutan Mangrove, Hutan Rawa, dan potensi kayu dari Hasil Tanaman Industri yang dikelola oleh perusahaan HTI. Potensi kayu alam yang masih terdapat di areal Lalan Sembilang masih cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survey potensi kayu tim BPKH wilayah II Palembang tahun 2015 yang menggambarkan bahwa di Hutan Mangrove Sekunder masih terdapat kayu komersil kelas satu seperti Jangkang (*Bakau/Rhizophora spp*). Disamping itu juga terdapat kayu komersil dua yang tergolong pada kayu rimba campuran (KRC) seperti Penyirih (*Nyirih/Xylocarpus granatum J. Konig*) dan Tumuk (*Bakau/Rhizophora spp*).

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim dari BPKH, diketahui bahwa masa tegakan untuk seluruh strata penutupan lahan jumlah perhektar dari seluruh kelas diameter dan seluruh kelompok jenis adalah 230 batang dengan volume 134.239 m³. Untuk kelompok jenis komersil kelas satu jumlah perhektar pada seluruh kelas diameter adalah 13 batang dengan volume 9.03 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini adalah Jangkang (*Bakau/Rhizophora spp*). Sedangkan untuk kelompok jenis komersil kelas dua jumlah perhektar pada seluruh kelas diameter adalah 110 batang dengan volume 80,46 m³. Jenis pohon yang termasuk pada kelompok ini adalah Penyirih

(Nyirih/*Xylocarpus granatum* J. Konig) dan Tumuk (*Bakau/Rhizophora spp*), lebih terperinci data tersebut disajikan pada Table 3.29.

Tabel 3.29. Potensi Kayu pada strata pohon di areal Hutan Mangrove wilayah Lalan Sembilang

No	KKK	Kelas Diameter (Cm)/Ha														
		10,0 – 19,9			20,0 – 29,9			30,0 – 39,9			40 Cm Up			50 Cm Up		
		B	N	V	B	N	V	B	N	V	B	N	V	B	N	V
1	Komersil Dua	0.05	2.00	0.28	0.08	2.00	0.50	0.22	2.33	1.85	0.24	1.33	1.88	0.59	7.67	4.52
2	Komersil Satu	0.42	17.00	2.46	1.18	24.00	8.53	1.36	15.00	10.49	2.19	13.00	18.75	5.15	69.00	40.23
3	Kayu Indah Satu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kayu Indah Dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0.46	19.00	2.74	1.26	26.00	9.03	1.58	17.33	12.34	2.43	14.33	20.63	5.74	76.67	44.75

Sumber : BPKH wilayah II Palembang Tahun 2015

Keterangan :

N = Jumlah Batang/Ha

B = Luas Bidang dasar(m²/Ha)

V =Volume Pohon (m³/Ha)

Hasil kayu yang terdapat di Hutan Mangrove tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan atau dapat menjamin *sustained stock* dengan adanya potensi kayu permudaan yang termasuk pada strata tiang, pancang dan semai. Di areal Hutan Mangrove potensi permudaan tingkatan anakan (semai) rata-rata perhektar dari seluruh kelompok jenis adalah 198.477 batang. Kelompok jenis komersi satu rata-rata perhektar adalah 30.862 batang dengan jenis anakan antara lain Jangkang (*Bakau/Rhizophora spp*). Kelompok jenis komersil dua (Kayu Rimba Campuran) rata-rata perhektar adalah 167.616 batang dengan jenis anakan untuk kelompok ini antara lain Penyirih (*Nyirih/Xylocarpus granatum* J. Konig) dan Tumuk (*Bakau/Rhizophora spp*), lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30. Rekapitulasi Jumlah anakan, sapihan dan tiang (Ha) di Hutan Mangrove Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang

No.	KKK	Semai	Pancang	Tiang	B
		N	N	N	
1	Komersil Satu	92443.74	116.1093	23.88535	0.078063
2	Komersil Dua	501837.5	879.1136	130.0425	0.535977
3	Kayu Indah Satu	0		0	0
4	Kayu Indah Dua	0		0	0
5	Lain – lain	0		0	0
Jumlah		594281.2	995.2229	153.9278	0.61404

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, Tahun 2015

4) Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, getah dan buah. Potensi hutan bukan kayu yang berasal dari getah adalah tanaman Jelutung, dan Pulai. Potensi hutan bukan kayu yang berasal dari buah adalah tanaman Durian Hutan. Potensi rotan dapat didapat dari kawasan Hutan Produksi ada 9 jenis rotan yaitu Balam, cacing, Dahan, Gambir, Sego, Semambu, Semut, Serimit dan Tunggal. Jenis rotan yang paling banyak dijumpai adalah rotan Sego, dan Dahan. Jenis rotan banyak di temukan di hutan rawa yang berbatasan dengan wilayah kelola hutan Lalan Mangsa Mendis.

c. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Perlindungan flora dan fauna di Indonesia didasarkan atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang selanjutnya diperinci dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar. Jenis flora yang ada di wilayah Lalan Sembilang di kawasan Hutan Rawa yang di lindungi ditemukan sebanyak 4 jenis dengan didominasi oleh jenis Nyatoh, Durian, Jelutung, Meranti, dan Suren. Sedangkan jenis flora yang dilindungi sesuai dengan SK. Menteri Pertanian No: 54/kpts/Um/2/1972, di lokasi ditemukan sebanyak jenis pohon yang dilindungi yaitu Durian, Jelutung, dan Surian. Ada juga beberapa flora yang masuk pada daftar Appendix CITES dan daftar Red List IUCN baik yang tergolong pada LR (*Low Risk*) atau resiko rendah ataupun CR (*Critically Endangered*) atau kritis.

Tabel 3.31. Daftar Jenis Tumbuhan dan Status Perlindungan di Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir Wilayah Lalan Sembilang

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Perlindungan	
			PP 7/99	IUCN
1	<i>Alstonia spatula blume</i>	Pulai Pipit	-	LR/lc ver 2.3 (1994)
2	<i>Santiria griffithii</i>	Kedondong Hutan	-	LR/lc ver 2.3 (1994)
3	<i>Hopea mengerawan</i>	Ngerawan/merawan	-	CR/lc cd, B1 + 2c ver 2.3. (1994)
4	<i>Kompassia malaccensis</i>	Kempas	-	LR/lc ver 2.3 (1994)
5	<i>Nephelium cuspidatum</i>	Rambutan Hutan	-	LR/lc ver 2.3 (1994)

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, Tahun 2015

Berdasarkan hasil survey BPKH wilayah II Palembang dan studi literatur, bahwa di wilayah Lalan Sembilang masih terdapat beberapa jenis satwa dilindungi baik yang termasuk pada klas, mamalia, reptil Aves dan Amphibi. Perlindungan tersebut didasarkan pada PP No.7/1999, daftar CITES dan Daftar Red List IUCN. Daftar satwa dilindungi disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32. Daftar Jenis Satwa dan Status Perlindungan di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang

No	Kelompok/ Nama Ilmiah	Nama Lokal	Status Satwa Liar		
			Pp no. 7/99	IUCN	CITES
A. MAMALIA					
1	<i>Lutra lutra</i>	Berang-berang	P	-	I
2	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing Bakau	P	-	-
3	<i>Neofelis nebulosa</i>	Macan Dahan	P	EN	I
4	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera	P	EN	III
5	<i>Cyanogale bennetti</i>	Musang Air	P	-	II
6	<i>Elephas indicus</i>	Gajah Sumatera	P	EN	III
B. PRIMATA					
7	<i>Hylobates agilis</i>	Unko	P	EN	I
8	<i>Macaca Fascicularis</i>	Kera Ekor Panjang	-	LC	II
9	<i>Macaca Nemestrisna</i>	Beruk	-	VU	II
10	<i>Presbytis cristata</i>)	Lutung Kelabu	-	EN	II
C. AVES					
11	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk Ular	P		-
16	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rangkok Badak	-		I
17	<i>Rhinoplax virgil</i>	Rangkok Helm	-		I
18	<i>Anrhacoceros malayanus</i>	Rangkong Hitam	-		II
Reptilia					
19	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya	P	EN	II
20	<i>Serpentes</i>	Ular	-	-	II

Sumber : BPKH wilayah II Palembang, Tahun 2015

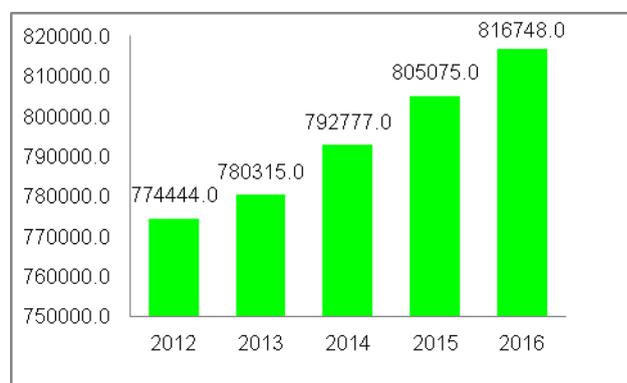
Keterangan :

LC /Least Concern (kurang diperhatikan), NT/Near Threatened (mendekati terancam), VU/Vulnerable (rawan), dan EN/Endangered (Genting)

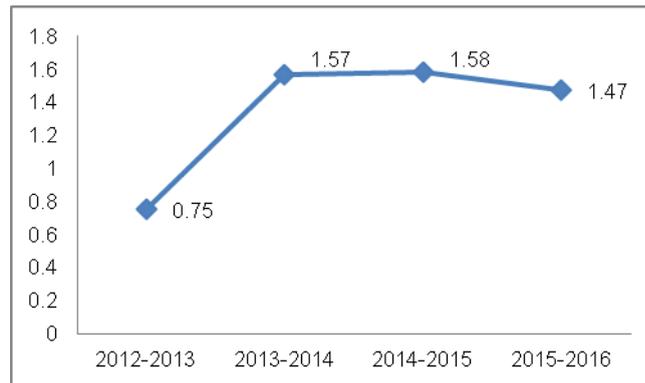
E. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Kawasan Kelola Sendang Secara Umum

1. Kondisi Dinamika Kependudukan

Dinamika kependudukan adalah telaah atas perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika kependudukan selain digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu yang lain, juga dapat untuk mempelajari dan mengantisipasi keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain.



Gambar 3.49 Perkembangan jumlah penduduk pada Lanskap Sembilang Danguku (Sumber: Kompilasi Kecamatan dalam Angka 2012-2016 dalam PSU-PIU KS, 2018)



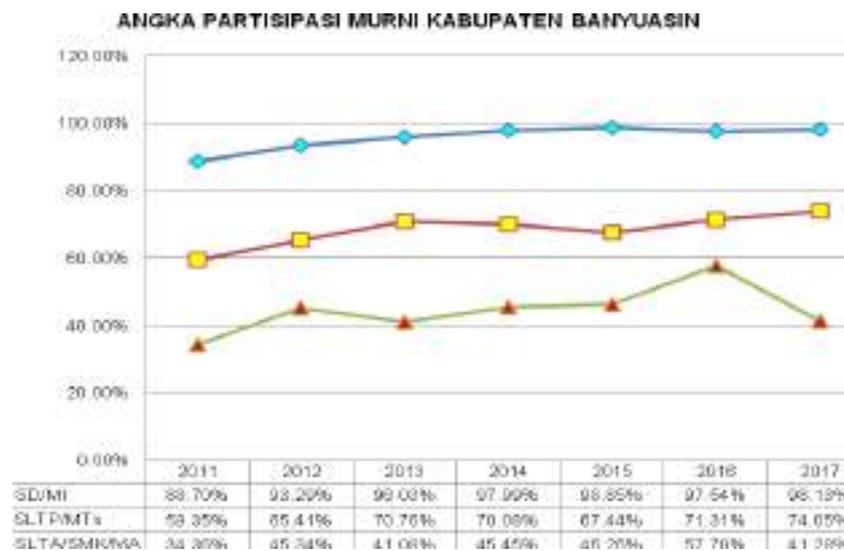
Gambar 3.50 Laju Pertumbuhan Penduduk Lanskap Sembilang Dangku
(Sumber: Data Olahan dari Kab. Banyuasin dan MUBA dalam Angka 2012-2016 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di areal Lanskap Sembilang Dangku bernilai positif yang artinya terjadi penambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Tercatat terjadi peningkatan sebesar 42.304 jiwa atau sekitar 5% dalam kurun 4 tahun (2012-2016). Laju pertumbuhan pertahun berkisar antara 1,47 – 1,58 % dengan nilai rerata 1,54% per tahun dimana angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka proyeksi pertumbuhan rata-rata provinsi Sumatera Selatan (1,46%) dan nasional (1,36%).

2. Kondisi Tingkat Pendidikan

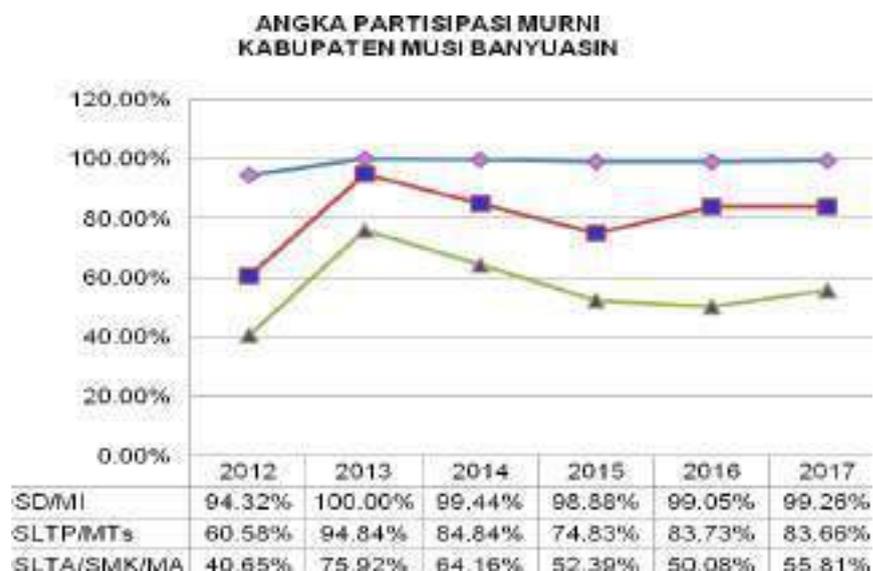
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat. Secara umum kondisi pendidikan masyarakat yang berada di lanskap ini masih rendah dikarenakan masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak lulus pendidikan dasar. Kondisi kualitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari tingkat lulusan yang ada. Data yang tersedia dalam hal ini berupa data di tingkat kabupaten, belum tersedia data di tingkat lanskap.

Salah satu data yang tersedia adalah data Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.



Gambar 3.51. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyuasin
 Sumber: Kabupaten Banyuasin dalam Angka, 2012-2017 dalam PSU-PIU KS, 2018

Angka Partisipasi Murni tingkat SD dan SMP di Kabupaten Banyuasin cenderung meningkat. Pada tingkat SD, hampir semua kelompok usia SD bersekolah, hampir mencapai 100%. Kondisi yang berbeda terdapat pada tingkat SMP yang pada tahun 2017 hanya mencapai 74,05%, yang artinya 25,95% penduduk usia SMP tidak berpartisipasi di sekolah tingkat SMP. Untuk APM tingkat SMA, angkanya cenderung fluktuatif, dengan angka APM tertinggi pada tahun 2016 (57,70%) yang menurun pada tahun 2017 hingga mencapai angka 41,38%. Profil pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat tergambar pada Gambar 3.52 Angka Partisipasi Murni.



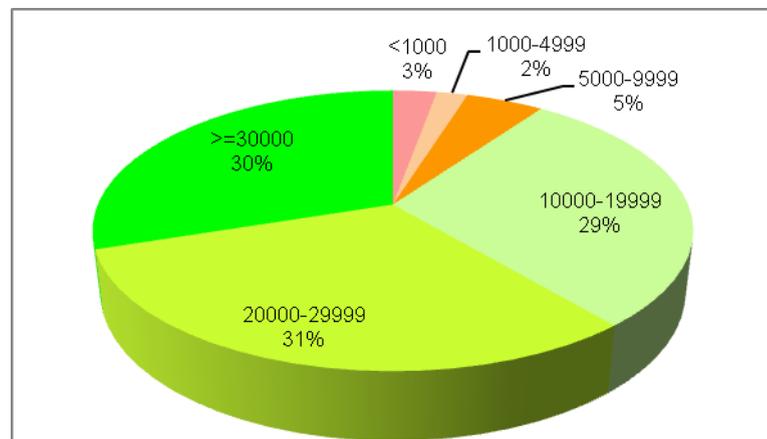
Gambar 3.52 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Musi Banyuasin
 Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka, 2012-2017 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Angka Partisipasi Murni tingkat SD di Kabupaten Musi Banyuasin hampir mencapai 100%. Kondisi yang berbeda terdapat pada tingkat SMP yang pada tahun 2017 hanya mencapai 83,66%, yang artinya 16,34% penduduk usia SMP tidak berpartisipasi di sekolah tingkat SMP. Untuk APM tingkat SMA, angkanya cenderung fluktuatif, dengan angka APM tahun 2017 di angka 55,81%.

3. Kondisi Aset dan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan

Jika melihat proporsi antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada didapat rata-rata ketersediaan lahan yang masih mencukupi sebagai aset sumber penghidupan masyarakat Lanskap Sembilang Dangku. Namun yang harus diingat adalah fakta bahwa sebagian lahan besar lahan yang tersedia berupa kawasan hutan negara dimana wewenang pengelolaannya diatur melalui mekanisme prosedural yang tidak selalu mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi sumber penghidupannya masyarakat berinisiatif untuk mengakses lahan hutan negara, baik secara sadar atau tidak bahwa lahan yang mereka garap merupakan kawasan hutan yang pemanfaatannya harus melalui prosedur perizinan. Dari sebuah survei yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga tersebut tidak memiliki izin resmi.



Gambar 3.53 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Yang Menguasai Lahan Kawasan Hutan Menurut Golongan Luas Lahan (Ha) di Sumsel

(Sumber: BPS 2014 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Dari Gambar 3.53 terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan menguasai lahan lebih dari 1 Ha. Hanya sebagian kecil saja yang kurang dari 1 Ha, yaitu 10%nya saja. Dari total 29,651 rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan, sebanyak 64,4 % nya tidak berizin. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat terhadap lahan hutan secara legal masih sangat terbatas.

Demikian pula dengan akses terhadap sumberdaya hutan non lahan. Dari 34,118 rumah tangga yang memungut hasil hutan tanpa menguasai lahan di kawasan hutan, hampir seluruhnya (97,7%) tidak berizin. Hanya 2,3% saja yang berizin, dengan sebagian besar izin tidak tertulis.

Tabel 3.33. Jumlah Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Jenis Perizinan

Jenis Perizinan	Pemanfaatan Kawasan Hutan	
	Menguasai Lahan Kawasan Hutan	Memungut Hasil Hutan/Menangkap Satwa Liar
A. Yang mendapat izin	10,542	775
1. Kementerian Kehutanan	82	83
2. Dinas kehutanan	72	68
3. Bupati/walikota	0	0
4. Camat	49	
5. Lurah/kepala desa	2,429	154
a. Tertulis	1,137	
b. tidak tertulis	1,292	154
6. lainnya	7,810	470
a. tertulis	2,275	
b. tidak tertulis	5,535	470
B. Tidak mendapat izin	19,109	33,343
Jumlah	29,651	34,118

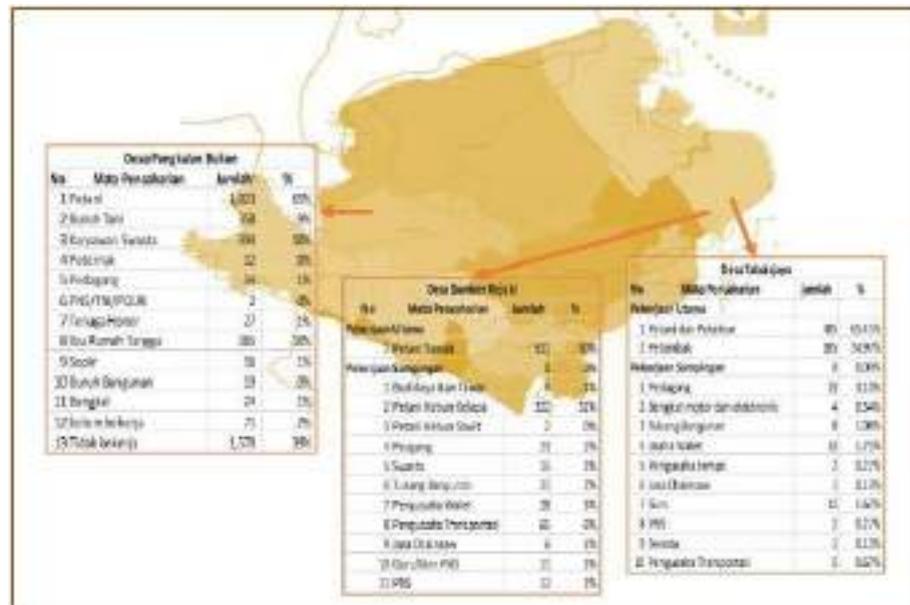
(Sumber: BPS 2014 dalam PSU-PIU KS, 2018)

4. Mata Pencaharian

Hampir keseluruhan area Lanskap Sembilang Dangku merupakan kawasan perdesaan dengan karakter agraris yang kuat. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, dan sektor pertanian lainnya. Pada lanskap ini masyarakat juga menjalankan beberapa aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif seperti berburu, memanen madu di hutan, memanen rotan dan buah hutan. Di beberapa desa, masyarakat juga masih terlibat dalam pembalakan liar ataupun pertambangan minyak bumi illegal. Pertambangan illegal ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Data dari tiga desa di Lanskap Sembilang Dangku berikut ini dapat dijadikan gambaran profil mata pencaharian masyarakat di dalam lanskap. Data ini merupakan data dari Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin serta Desa Tabala Jaya dan Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

Data dari ketiga desa menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya terkait dengan kegiatan pertanian, baik sebagai petani, pekebun, maupun buruh tani atau buruh kebun. Sedangkan untuk pekerjaan di luar pertanian sangat bervariasi komposisinya di ketiga desa tersebut. Khusus untuk desa di sekitar kawasan hutan di Sumatra Selatan, terdapat data mengenai sumber penghasilan utama masyarakat sekitar hutan yang diterbitkan oleh BPS.



Gambar 3.54. Karakteristik Mata Pencaharian Penduduk 3 Desa di Lanskap Sendang
(Sumber: Monografi Desa-KELOLA Sendang, 2017 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Data tahun 2014 ini memperlihatkan bahwa sumber penghasilan utama dari sebagian besar rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah dari usaha perkebunan (75,38%). Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan banyak menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan, baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Hal tersebut juga tercermin dari kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 40,36% pada tahun yang sama.

Tabel 3.34. Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Sumber Penghasilan Utamanya dan Status Pekerjaan

No	Sumber Penghasilan Utama	Status Pekerjaan		Jumlah	Persentase
		Usaha	Buruh		
1	Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar	617	388	1.005	0,81%
2	Penangkaran satwa/tumbuhan liar	53	0	53	0,04%
3	Budidaya tanaman kehutanan	40	48	88	0,07%
4	Pemanfaatan wisata alam				0,00%
5	Padi/palawija	15.424	214	15.638	12,61%
6	Hortikultura	1.058	215	1.273	1,03%
7	Perkebunan	77.426	16.083	93.509	75,38%
8	Peternakan	158	31	189	0,15%
9	Perikanan	22.48		2.248	1,81%
10	Jasa Pertanian	382	799	1.181	0,95%
11	Penambang/penggalian	718	756	1.474	1,19%
12	Industri/kerajinan	187	0	187	0,15%
13	Perdagangan/hotel/restoran/rumah makan	2.541	64	2.605	2,10%
14	Angkutan,pergudangan, dan komunikasi	541	356	897	0,72%
15	Sektor lain	1.417	1.561	2.978	2,40%
16	Pendapatan dan penerimaan lainnya			725	0,58%
	Jumlah	102.810	20.515	124.050	100,00%

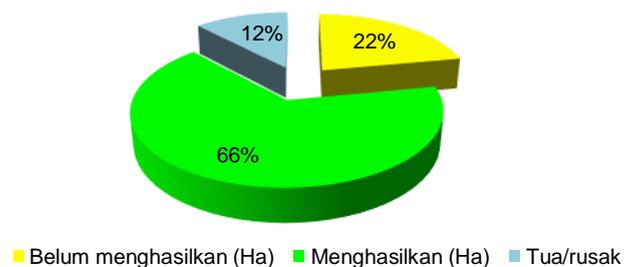
(Sumber: PSU-PIU KS, 2018)

5. Komoditi Utama Pertanian

Sektor agraris merupakan sektor yang banyak menopang penghidupan masyarakat di areal Lanskap Sembilang Dangku. Sebagian besar sektor agraris khususnya pada sub sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit sudah terintegrasi dengan sektor industri besar yang menampung hasil dari kebun rakyat. Pada bagian ini akan ditinjau 4 komoditi perkebunan utama yaitu karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Selain itu akan ditinjau pula hal terkait komoditi padi, perikanan lebak lebug dan peternakan.

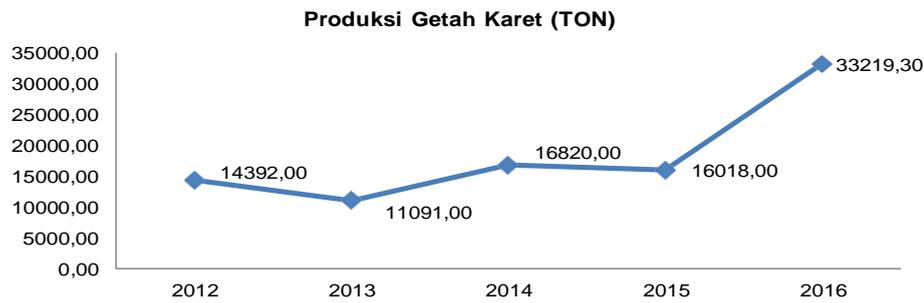
1) Karet

Komoditi karet di Lanskap Sendang merupakan salah satu komoditi andalan yang banyak diusahakan oleh masyarakat secara mandiri. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 69.586 petani karet di Kabupaten Musi Banyuasin dan 31.494 petani karet di Kabupaten Banyuasin.28 Pada areal lanskap, luas kebun karet rakyat adalah 232.373,50 Ha yang terdiri 66% berupa tanaman usia produktif (menghasilkan), 22% tanaman belum menghasilkan, dan 12% tanaman tua/rusak.



Gambar 3.55 Kondisi Tanaman Karet pada Lanskap Sembilang Dangku
(Sumber: Kompilasi Kecamatan Dalam Angka 2016 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Dari data yang ada, semenjak tahun 2012-2015 terjadi kenaikan luasan tanaman produktif sebesar 88,47% atau rata-rata 30% dalam setahun. Produksi getah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012-2016, yaitu sebesar 132% dengan rata-rata kenaikan per tahun 26,44%. Kenaikan produksi getah terutama terjadi dari tahun 2015-2016 dimana pada tahun 2015 produksi getah sebesar 168.918 ton dan naik hampir dua kali lipat menjadi 332.719,30 ton pada 2016.



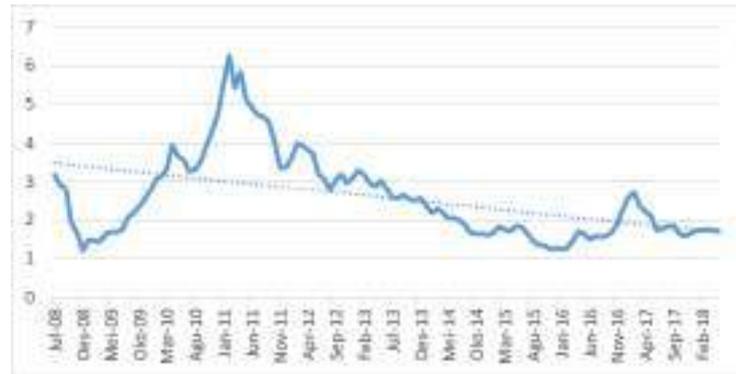
Gambar 3.56 Perkembangan Produksi Getah Karet di Lanskap Sendang
(Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2012-2016) dalam PSU-PIU KS, 2018)

Sebaran areal karet rakyat terdapat diseluruh kecamatan yang ada di Lanskap Sendang dengan luasan terbesar di Kecamatan Bayung lencir dan Tanjung Lago. Areal karet di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh areal karet yang menghasilkan dengan luasan di Kecamatan Bayung Lencir lebih dari 30.000 Ha dan di Tanjung Lago lebih dari 20.000 Ha.



Gambar 3.57 Sebaran Luas Tanaman Karet Pada Lanskap Sendang
(Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, 2018)

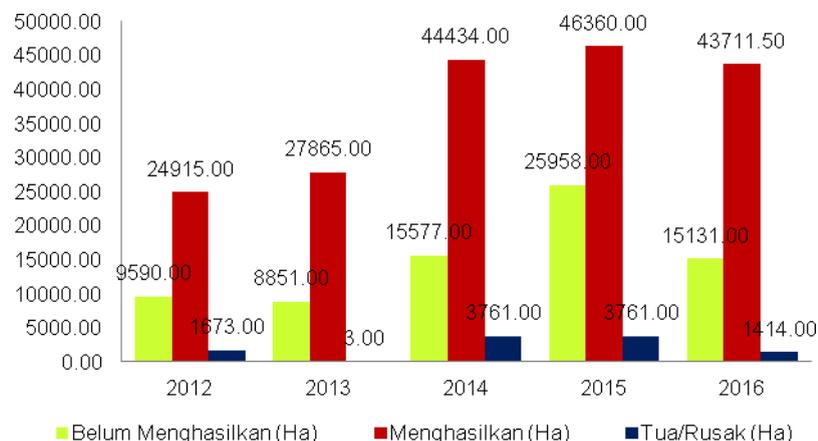
Karet merupakan komoditi penting bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di lanskap Sembilang Dangku dan mempunyai fluktuasi harga yang tinggi. Berikut gambaran kecenderungan (*trend*) harga karet dunia. Gambar 3.58 memperlihatkan bahwa harga karet sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada rentang tahun 2008 hingga 2018, harga mengalami penurunan drastis hingga pada titik terendah pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2016. Harga tertinggi terjadi pada awal tahun dan terus merosot turun hingga awal 2016. Pada tahun 2017, harga karet sedikit mengalami kenaikan namun segera mengalami penurunan lagi. Dibandingkan dengan harga karet tertinggi pada awal tahun 2011, harga karet pertengahan tahun 2018 hanya sebesar 27%-nya saja.



Gambar 3.58 Kecenderungan Perubahan Harga Karet Dunia (USD/kilogram)
(Sumber: *indexmundi.com* dalam PSU-PIU KS, 2018) dalam PSU-PIU KS, 2018)

2) Kelapa Sawit

Pada Lanskap Sembilang Dangku, dari 19 kecamatan yang ada hampir seluruhnya memiliki komoditi sawit rakyat yang dibudidayakan secara mandiri oleh petani. Hanya di Kecamatan Suak Tapeh dan Tanjung Lago yang belum memiliki sawit rakyat yang sudah berproduksi. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 54.502 petani kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dan 32.685 petani kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin.²⁹Total luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat yang diusahakan sebesar 43.711,50 Ha pada tahun 2016, naik sebesar 75,44% dari tahun 2012, dimana rata-rata terdapat penambahan luasan hampir 19% per tahun.



Gambar 3.59 Kondisi Tanaman Sawit Rakyat pada Lanskap Sembilang Dangku
(Sumber: *Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2012-2017)* dalam PSU-PIU KS, 2018)

Pada sisi produksi terdapat fluktuasi jumlah produksi yang dihasilkan dari Lanskap Sendang, dimana penambahan areal panen secara konstan tidak selalu menghasilkan kenaikan produksi secara linear. Tren penurunan jumlah produksi sawit rakyat dimulai pada tahun 2015 sampai 2016, dimana produksi pada tahun 2016 turun sekitar 35% meskipun luas areal panennya hanya menurun sebesar 1,6%.



Gambar 3.65. Produksi Kopi Rakyat Pada Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2015) dalam PSU-PIU KS, 2018)

Produktivitas tanaman kopi rakyat yang diusahakan di areal lanskap masih rendah. Masih di bawah produktivitas kopi rakyat secara nasional maupun provinsi. Harga kopi dunia cukup fluktuatif terutama untuk kopi jenis arabica yang sempat mengalami lonjakan harga pada sekitar tahun 2011. Walaupun relatif lebih stabil dibanding jenis arabica, harga kopi jenis robusta juga mengalami dinamika perubahan harga



Gambar 3.66. Produktivitas Kopi Rakyat
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2015) dalam PSU-PIU KS, 2018)



Gambar 3.67. Dinamika Harga Kopi Dunia
 Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (2015) dalam PSU-PIU KS, 2018)

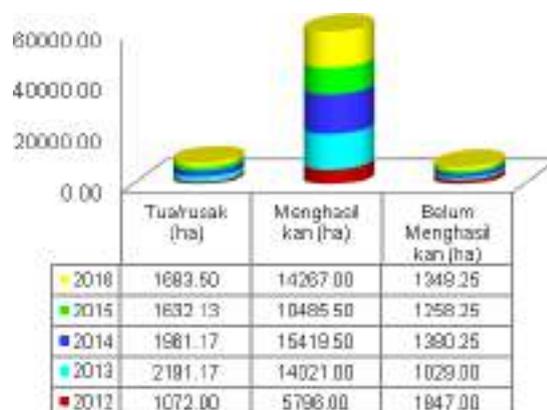
4) Kelapa

Kelapa merupakan salah satu produk unggulan areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama pada wilayah yang masuk di Kabupaten Banyuasin. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 14.663 petani kelapa di Kabupaten Musi Banyuasin dan 33.713 petani kelapa di Kabupaten Banyuasin. Secara ekonomis, produk kelapa mampu bersaing dengan produk-produk perkebunan lainnya. Produk kelapa semuanya dikelola oleh masyarakat. Pada awalnya produk kelapa dijual dalam bentuk kopra, tetapi beberapa tahun terakhir kelapa banyak dijual dalam bentuk utuh bersama tempurung dan sabutnya. Kelapa utuh ini sekarang banyak diminati oleh negara-negara seperti Tiongkok dan Thailand, sebagian juga dikirim ke Jakarta. Pada saat ini pengiriman kelapa mencapai 60-70 kontainer per hari, sehingga tidak mengherankan kelapa menempati posisi ke-12 sebagai komoditi unggulan ekspor Sumatera Selatan, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 1 triliun per tahun.

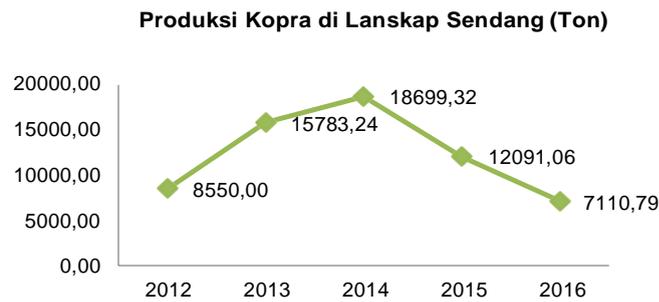
Perubahan bentuk komoditi kelapa dari kopra menjadi kelapa utuh tercermin dari data turunnya produksi Kopra secara drastis di area Lanskap Sembilang Dangku, walaupun luas area tanaman kelapa yang menghasilkan semakin luas.



Gambar 3.68 Kondisi Tanaman Kelapa di Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, (2018)



Gambar 3.69 Potensi Kelapa di Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, (2018)



Gambar 3.70. Produksi Kopra di Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, 2018)

5) Padi

Padi merupakan salah satu komoditi unggulan pada areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama untuk wilayah yang berada di Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut tercermin dari luasan panen yang mencapai sekitar 20% dari luas total panen provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut memiliki arti bahwa areal Lanskap Sembilang Dangku memiliki posisi dan peran yang penting bagi produksi pangan di level regional. Untuk produktivitas padi di Lanskap Sembilang Dangku mencapai 4,37 ton/ha/tahun dimana lebih rendah dari produktivitas provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 4,98 ton/ha/tahun.



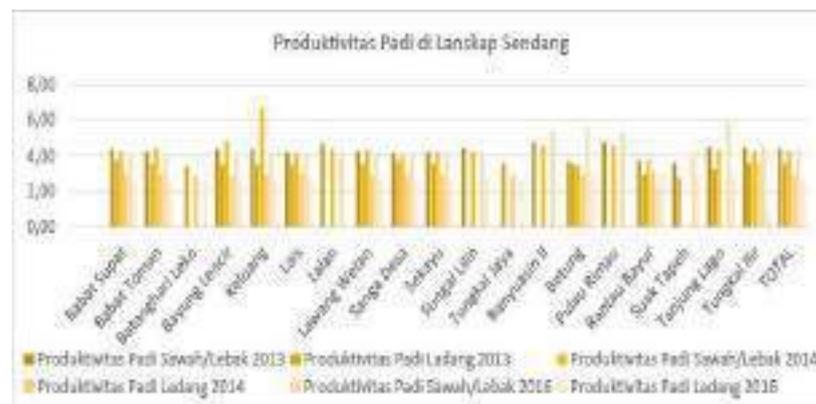
Gambar 3.71 Luas dan Produksi Padi di Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, 2018)

Pada areal lanskap Sembilang Dangku, pertanian padi tersebar merata di seluruh kecamatan meskipun ada yang memiliki hanya padi ladang (Kecamatan Batanghari leko dan Tungkal jaya). Sentra pertanian padi terluas ada di kecamatan Lalan, Pulau rimau, Rantau bayur, Tanjung lago dan Banyuasin II.



Gambar 3.72. Sebaran Luas Areal Padi Sawah/Lebak di Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, 2018)

Untuk produktivitas lahan pertanian padi, nilainya cukup merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Keluang yang produktivitas padi sawahnya pada tahun 2014 melebihi 6 ton/ Ha.



Gambar 3.73 Produktivitas Padi di Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017) dalam PSU-PIU KS, 2018)

6) Perikanan Lebak Lebung

Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar wilayahnya secara geografis merupakan dataran rendah yang banyak dialiri sungai dan rawa-rawa. Rawa lebak lebung merupakan rawa-rawa yang terdapat disekitar aliran sungai dimana areal tersebut tergenang saat musim penghujan dan kering saat musim kemarau. Fluktuasi ketinggian air antara musim penghujan dan musim kemarau sangat tinggi, dimana pada saat tergenang disebut sebagai lebak dan pada saat surut, sisa-sisa genangan disebut sebagai lebung; sistem pasang surut inilah yang secara bersama-sama disebut sebagai sistem lebak lebung. Areal lebak lebung melalui sistem pasang surutnya menciptakan sebuah mekanisme pompa nutrisi alami yang berasal dari dekomposisi serasah vegetasi sehingga mengandung unsur hara tinggi yang cocok untuk kegiatan pertanian maupun perikanan. Lebak biasanya berada di antara dua buah sungai besar di dataran rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang genangan airnya dipengaruhi pasang surut air

laut harian,lebak tergenang selama musim hujan dan berangsurangsur kering pada musim kemarau.

Ada tiga jenis lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan. Lebak pematang atau dangkal, bila genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan; lebak tengahan, dengan genangan air antara 50–100 cm selama 3—6 bulan; dan lebak dalam bila genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami dikenal dengan istilah **Lebak Lebung**.

Propinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar;. potensi tersebut meliputi perairan laut dengan luas 95.000 Km² dan perairan umum seluas 2,5 juta Ha yang terdiri 15 % rawa, 43 % lebak (total rawa lebak 58%), 31% sungai besar serta anaknya, dan 11% danau (DKp, 2002). Sekitar 146.279 hektar areal lebak lebung dikelola 220 ribu petani di Sumatera Selatan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Secara kewilayahan dari areal lebak lebung yang ada, sebanyak 58,96 persen tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir. Sisanya 41,04 persen ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Muaraenim, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, dan Kota Palembang. Potensi lahan sawah lebak dan rawa yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan serta jumlah kolam/tebat/empang yang ada di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tak hanya sebagai kawasan ekologis, lebak lebung membentuk kebudayaan lokal. Khususnya lewat interaksi petani dengan alam yang dibangun berdasarkan nilai kearifan terhadap alam. Sistem usaha tani yang dibangun dalam kebudayaan lebak lebung adalah sistem terpadu antara tanaman semusim (padi sawah, palawija, dan sayuran), ternak (kerbau dan itik), serta usaha penangkapan ikan.

Tabel 3.35. Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin

Jenis Lahan	Muba (Ha)	Banyuasin (Ha)
Sawah Lebak	30.487	30.839
Rawa	109.845	220.490
Kolam/Tebat/Empang	1.385	425

Sumber: Data BPS, 2017 dalam PSU-PIU KS, 2018)

Di areal lebak lebung, pohon seperti kelapa, mangga, durian dan duku, hanya dapat ditanam di lahan yang tidak tergenang, misalnya di pinggiran sungai. Musim tanam pagi di lebak hanya sekali dalam setahun. Palawija dan sayuran ditanam bersamaan dengan padi yang ditanam pada galangansawah lebak. Sedangkan pada musim hujan, petani menangkap ikan, menggembala ternak, atau mengusahakan kerajinan tangan, seperti tenun pakaian adat, anyaman tikar, dan alat rumah tangga.

Pada saat ini terdapat ancaman keberlanjutan sistem perikanan lebak lebung yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait.

Berdasarkan hasil telaah literatur, diindikasikan ada beberapa hal yang mengancam kelestarian lebak lebung, antara lain:

1. Pencemaran perairan
2. Konversi areal lebak lebung
3. Kerusakan sistem tata air alami akibat pembangunan kanal-kanal
4. Perubahan iklim

Pada konteks Lanskap Sendang, data yang ada menunjukkan penurunan hasil tangkapan perikanan air tawar, meskipun belum ada data yang spesifik menjelaskan koneksinya dengan perubahan pada sistem lebak lebung.



Gambar 3.74 Produksi Perikanan Lanskap Sendang

Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2014-2016) dalam PSU-PIU KS, 2018)

7) Peternakan

Sumber protein yang didapatkan masyarakat area lanskap meliputi sumber protein hewani dari peternakan. Berikut ini gambaran jumlah ternak besar di area lanskap Sembilang Dangku tahun 2012 sampai 2016:



Gambar 3.75 Jumlah Ternak Besar di Area Lanskap Sembilang Dangku

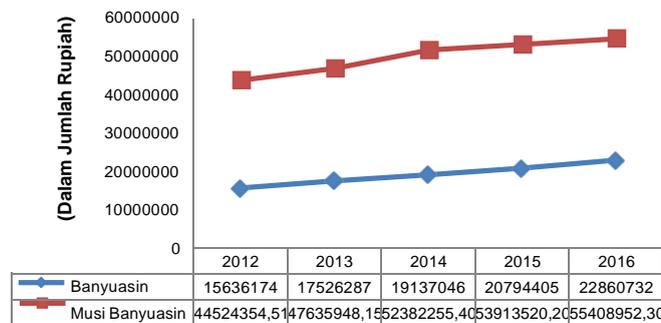
Sumber: Data olahan dari BPS Banyuasin dan Musi Banyuasin (2012-2016) dalam PSU-PIU KS, 2018)

Jumlah ternak besar yang paling banyak dibudidayakan adalah ternak sapi. Pada tiap tahunnya populasi ternak sapi cenderung meningkat meskipun terlihat fluktuatif. Pada tahun 2012 populasi sapi hanya 29.357 ekor meningkat pada tahun 2016 menjadi 64.672 ekor. Kambing menjadi posisi kedua populasi terbanyak setelah sapi dengan jumlah 44.001 ekor ada tahun 2016. Kambing menjadi pilihan kedua masyarakat lanskap Sendang dalam mengonsumsi sumber protein hewani setelah sapi.

6. Perekonomian Wilayah

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 hingga 2016 Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



Gambar 3.76 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin
 Sumber: Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Dalam Angka (2012-2016)

Kenaikan nilai PDRB Kabupaten Banyuasin terutama disumbang oleh Sektor Usaha Industri Pengolahan serta Sektor Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan untuk Sektor Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Usaha konstruksi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor mampu menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi pada Kabupaten tersebut. Sektor-sektor tersebut mempunyai peran besar terhadap basis perekonomian Kabupaten.



Gambar 3.77. Distribusi PDRB Setiap Sektor Kab. Musi Banyuasin dan Banyuasin (2016)
 Sumber: Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Dalam Angka, BPS 2016

Setiap tahunnya distribusi PDRB ADH Kabupaten Banyuasin di dominasi oleh sektor Agro yaitu pertanian. Kehutanan, peternakan dan perikanan. Pada posisi kedua diikuti oleh sektor industri pengolahan yang memungkinkan di tahun yang akan datang akan menyaingi sektor agro karena di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 hingga 2016 secara fluktuatif terdapat sektor yang meningkat dan menurun. Tercatat bahwa sektor PDRB yang meningkat meliputi sektor Industri pengolahan, Perdagangan otomotif, Transportasi, Akomodasi Pangan, Informasi Komunikasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan serta jasa sosial. Sektor yang menurun meliputi sektor agro, pertambangan, listrik serta gas, konstruksi, real estate, administrasi pemerintahan dan jasa lainnya. Sedangkan pada sektor pengadaan air dan limbah, jasa keuangan dan jasa perusahaan tidak mengalami pergeseran di setiap tahunnya cenderung stabil di presentase yang sama.

Tabel 3.36. Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Sektor Usaha Kabupaten Banyuasin

No	Sektor Usaha	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*	36,39	36,6	34,54	35,26	36,11
2	Pertambangan dan penggalian	7,94	8,23	8,85	7,12	6,43
3	Industri Pengolahan**	23,24	22,93	24,02	23,92	23,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,09	0,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	13,31	13,19	13,18	12,7	12,31
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,7	9,57	9,48	10,94	11,39
8	Transportasi dan Pergudangan	0,62	0,64	0,63	0,62	0,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	0,38	0,41	0,42	0,37	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,67	0,71	1,79	1,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
12	Real Estate	0,51	0,51	0,5	0,44	0,45
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintah, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,86	3,11	3,14	2,89
15	Jasa Pendidikan	2,13	2,21	2,35	2,47	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,43	0,45	0,47	0,48
17	Jasa Lainnya	0,37	0,34	0,33	0,32	0,31

Keterangan:

__ = Meningkat * : Tertinggi pertama
 _ = Menurun **: Tertinggi kedua

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian menjadi sektor penyokong PDRB, lambat laun akan digantikan oleh sektor industri pengolahan karena sektor agro yang cenderung akan terus turun sedangkan sektor industri pengolahan cenderung selalu meningkat. Perbedaan karakter perekonomian antara Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin menyebabkan juga berbedanya karakter PDRB masing-masing kabupaten di setiap tahunnya. Berikut ini Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 hingga 2016:

Tabel 3.37. Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. MUBA

No	Sektor Usaha	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	11,82	11,99	11,61	12	12,15
2	Pertambangan dan penggalianP	68,38	66,54	65,75	61,37	57,6
3	Industri Pengolahan	4,62	4,93	5,15	6,34	7,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
6	Konstruksi	5,66	6,11	6,37	7,02	7,47
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,48	2,69	2,84	3,52	4,35
8	Transportasi dan Pergudangan	0,15	0,17	0,18	0,21	0,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
10	Informasi dan Komunikasi	0,13	0,14	0,14	0,16	0,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	1,45	1,49	1,66	1,82
12	Real Estate	0,96	1,11	1,26	1,54	1,78
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintah, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	2,71	2,88	3,48	3,91
15	Jasa Pendidikan	1,31	1,4	1,53	1,78	1,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,24	0,24	0,28	0,3
17	Jasa Lainnya	0,36	0,4	0,42	0,46	0,49

Keterangan:

— = Meningkat

— = Menurun

* : Tertinggi pertama

** : Tertinggi kedua

Karakter Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin di setiap tahunnya mulai tahun 2012 hingga 2016 cenderung meningkat dan didominasi oleh sektor pertambangan, kemudian di posisi kedua jauh di bawah pertambangan adalah sektor pertanian. Meskipun Sektor pertambangan menjadi sektor tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Musi Banyuasin, tapi di setiap tahunnya sektor pertambangan mengalami penurunan. Berbeda dengan sektor yang lainnya yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Perbedaan yang jauh antara presentase sektor pertambangan dan sektor agro tidak memungkinkan bagi sektor agro akan menggantikan posisi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Musi Banyuasin.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah memunculkan proses perubahan kondisi perekonomian daerah tersebut dilihat dalam periode tertentu. Proses pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan kenaikan kapasitas produksi jasa/produk pada sisi nilai ekonomi dalam bentuk kenaikan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Berikut ini gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dari tahun 2012 hingga 2016:



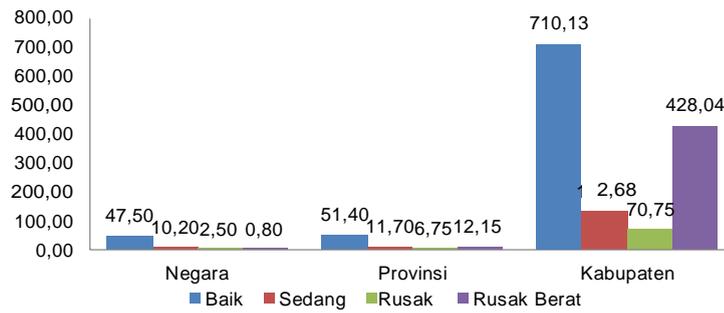
Gambar 3.78 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin
 Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka 2012-2017

Meskipun PDRB ADH Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin menunjukkan kenaikan nilai, tidak dengan laju pertumbuhan pada kedua kabupaten tersebut. Grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami trend yang fluktuatif tapi cenderung menurun. Hal tersebut menandakan bahwa kedua kabupaten tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang semakin tahun semakin melamban. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena terjadi penurunan sektor unggulan di masing-masing kabupaten dimana pada Banyuasin, sektor agro yang menjadi sektor unggulan penyumbang nilai PDRB terbesar mengalami penurunan. Sama halnya dengan Kabupaten Musi banyuasin yang juga mengalami penurunan pada sektor unggulan penyumbang terbesar PDRB yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

Jika menilik pada data PDRB kedua kabupaten tersebut terlihat nilainya terus meningkat selama 2010-2016, akan tetapi jika disandingkan dengan angka pertumbuhan 2012-2016 akan tampak fluktuasi yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya kontraksi ekonomi pada tahun-tahun tersebut akibat penurunan vitalitas sektor unggulan seperti yang sudah dijabarkan diparagraf sebelumnya. Melemahnya permintaan dunia terhadap produk karet dan penurunan harga barang tambang seperti batubara dan minyak bumi ditengarai sebagai faktor pemicu perlambatan pertumbuhan di kedua kabupaten ini.

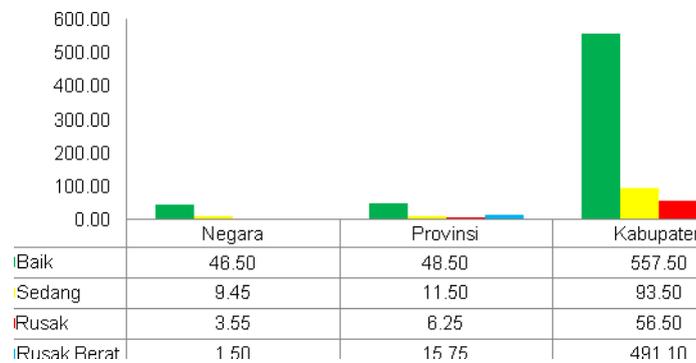
3) Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah keharusan yang harus diperhatikan pemerintah dalam memenuhi salah satu tujuan pelayanan publik demi memenuhi salah satu tujuan bernegara yaitu kesejahteraan. Infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas produksi sebuah daerah adalah jalan. Semakin layak infrastruktur jalan pada daerah tersebut, maka semakin baik pula mobilitas penduduk sehingga menghasilkan produktivitas yang juga semakin baik. Berikut ini gambaran jalan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.



Gambar 3.79 Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan Kab. Banyuasin Tahun 2016
 Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin 2016

Berdasarkan pada gambar di atas jumlah jalan yang ada di Kabupaten Banyuasin sepanjang 1.484,60 km. Kabupaten Banyuasin mempunyai peran yang besar dalam mengelola jalan kabupaten dengan jumlah 1.341,60 km dengan panjang jalan yang terkategori baik sepanjang 710,13 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik 809,03 km atau sebesar 54% dari total seluruh jalan yang ada di kabupaten Banyuasin mulai dari jalan negara, provinsi hingga kabupaten. Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin terbilang cukup memprihatinkan, 34,86 % jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat. Tidak jauh berbeda kondisi jalan di Kabupaten Banyuasin, berikut ini gambaran kondisi jalan Kabupaten Musi Banyuasin:

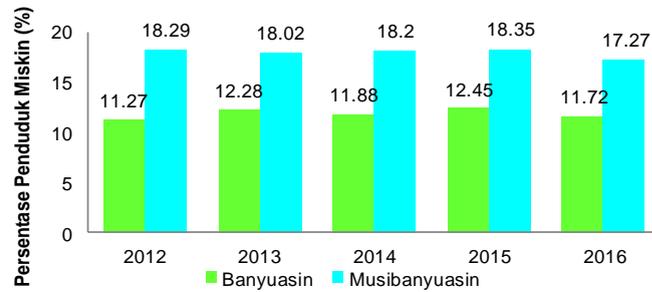


Gambar 3.80 Jalan Menurut Kondisi & Status Jalan Kabupaten Musi Banyuasin 2016
 Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2017

Berdasarkan pada gambar di atas jumlah jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 1.341,60 km. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola jalan kabupaten sepanjang 1.198,60 km dengan jalan dengan kategori baik sepanjang 557,50 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik mulai dari jalan negara, provinsi dan kabupaten sejumlah 652,50 km atau sebesar 49% dari total seluruh jalan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Infrastruktur di Kabupaten ini tergolong memprihatinkan karena 42,83 % berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

4) Kemiskinan

Kedua kabupaten yang ada masih mempunyai beban terhadap tingkat kemiskinan warganya. Jumlah keluarga miskin di kedua kabupaten ini dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan yang signifikan.



Gambar 3.81 Presentase Penduduk Miskin di Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin
Sumber: Olahan Data BPS Banyuasin dan Musi Banyuasin (2013-2017)

Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa di kedua kabupaten presentasi penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang nyata selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016). Sebagai perbandingan prosentase penduduk miskin pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 adalah 13,2% sedangkan angka nasional 10,86%.

5) Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2015: xii). Penduduk usia kurang 15 tahun meski telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak semua angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan sehingga menghasilkan angka pengangguran. Berdasarkan data yang ada di dua kabupaten ini tingkat pengangguran cenderung naik dalam kurun waktu 2013-2015.

Pada tahun 2014 terjadi lonjakan serapan tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan penambahan sebesar 28.910. Hal ini diduga karena adanya ekspektasi terhadap kinerja pemerintah sehingga sektor usaha merespon secara positif dengan pembukaan lapangan kerja baru terutama pada sektor primadona yaitu kelapa sawit dan karet.

Tabel 3.38. Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kegiatan

Kabupaten Banyuasin				
Jenis Kegiatan Utama		2013	2014	2015
I	Angkatan Kerja	349,292	371,536	381,520
	Bekerja :	326,608	360,524	360,305
	Menganggur :	22,684	11,012	21,215
II	Bukan Angkatan Kerja	201,295	179,051	189,879
	Sekolah	36,394	47,516	56,065
	Mengurus Rumah Tangga	133,683	113,586	117,690
	Lainnya	31,218	17,949	16,124
	Jumlah	349,292	371,536	381,520
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,32	65,48	66,77
IV	Tingkat Pengangguran	4,12	2,00	5,56
Kabupaten Musibanyuasin				
Jenis Kegiatan Utama		2013	2014	2015
I	Angkatan Kerja	247,468	278,929	285,123
	Bekerja :	239,5,85	268,495	269,140
	Menganggur :	7,883	10,434	15,983
II	Bukan Angkatan Kerja	158,490	139,425	141,215
	Sekolah	31,421	37,018	36,864
	Mengurus Rumah Tangga	97,939	92,753	91,596
	Lainnya	29,130	9,654	12,755
	Jumlah	405,958	418,354	426,338
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,96	66,67	66,88
IV	Tingkat Pengangguran	3,19	3,74	5,61

Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2014-2017)

Tabel 3.39 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten

	Tahun		
	2013	2014	2015
Banyuasin			
Angka pertumbuhan	5,18	5,14	5,56
Angka Pengangguran	22.684	11.012	21.215
Musi Banyuasin			
Angka pertumbuhan	3,95	4,67	2,29
Angka Pengangguran	7.883	10.434	15.983

Sumber: Kompilasi Kabupaten Dalam Angka, 2017

Jika disandingkan dengan angka pertumbuhan, terdapat anomali di Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2013-2014 terjadi penurunan angka pertumbuhan lebih dari 1% yang seharusnya secara teoritis memicu penurunan serapan angkatan kerja. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, dimana terjadi peningkatan serapan kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran sebesar lebih dari 50%. Hal sebaliknya terjadi pada Kabupaten Musi Banyuasin dimana peningkatan angka pertumbuhan 0,72% dari tahun 2013-2014 tidak berdampak pada naiknya serapan angkatan kerja. Bahkan angka pengangguran meningkat sebesar 32,36% dari tahun sebelumnya.

F. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Kawasan Sembilang Dangku (Kelola Sendang) Berdasarkan Unit Analisis Batasan DAS (Hulu, Tengah dan Hilir)

1. Masyarakat Kawasan Sendang Kelola (Hulu), Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Meranti: Sako Suban Lubuk Bintialo dan Sekitarnya

Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di kawasan Kelola Sendang bagian Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang berada di sekitarnya. Secara ekonomi, sosial, dan budaya, ketergantungan masyarakat sekitar areal tapak terhadap keberadaan hutan masih cukup tinggi.

a. Kondisi Ekonomi Masyarakat

1) Aspek Ketenagakerjaan

Angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012 sebesar 9.279 orang, lebih rendah dari tahun 2010 (15.620 orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2012 (sebesar 66,82%) juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 (sebesar 67,39%). Demikian juga tingkat pengangguran mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2010 sampai 2012 (Tabel 3.40).

Tabel 3.40. Kondisi Tenaga Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
	Bekerja	Menganggur		
2010	245.101	15.620	67,39	5,99
2011	274.172	12.784	73,35	4,46
2012	258.055	9.279	66,82	3,47

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

2) Aspek Sarana Prasarana Perekonomian

Sarana dan parasara perekonomian yang tersebar sampai tingkat desa adalah koperasi. Jumlah koperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 sebanyak 212 unit, terdiri dari 138 unit primer koperasi dan 74 unit Koperasi Unit Desa (KUD). Jumlah anggota koperasi pada tahun 2010 sebanyak 52.498 orang, terdiri atas 37.202 orang anggota koperasi primer dan 15.296 anggota KUD. Sarana perdagangan cukup banyak terdapat di wilayah sekitar ini. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Bayung Lencir yang mencapai 1.104 buah mulai dari pasar umum, pasar desa, toko, kios, warung, dan restoran. Jenis sarana perdagangan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Batanghari Leko (Tabel 3. 41).

Tabel 3.41. Jumlah Sarana Perdagangan di Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti

Kecamatan	Jenis Sarana Perdagangan						Jumlah
	Pasar Umum	Pasar Desa	Toko	Kios	Warung	Restoran	
Batanghari Leko	-	4	17	-	27	-	48
Sanga Desa	-	3	24	-	38	-	65
Bayung Lencir	1	7	423	135	508	291	1.103
Babat Supat	-	1	30	-	42	9	82
Tungkal Jaya	-	1	41		37	6	85
Lais	-	3	-	121	-	351	475
Babat Toman	1	3	34	30	140	10	218
Jumlah	2	22	569	286	792	667	2.076

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

3) Aspek Tingkat Kesejahteraan

Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 sebesar Rp. 275.807,- per kapita per bulan. Dari tahun 2010 sampai 2012 terjadi penurunan cukup signifikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebanyak 20,06% tahun 2010, turun menjadi 18,29% tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan, dan angka kemiskinan pada tahun 2012 juga masih lebih tinggi dari angka tingkat provinsi

Tabel 3.42. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			
	Musi Banyuasin		Sumatera Selatan	
	(orang)	(%)	(orang)	(%)
2010	113 400	20,06	1.125.730	15,47
2011	108 900	18,99	1.074.810	14,24
2012	106 900	18,29	1.057.030	13,78

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010–2012 dari 71,81 menjadi 73,15. Namun nilai IPM ini masih berada dibawah nilai IPM tingkat Provinsi (Tabel 3.43).

Tabel 3.43. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten MUBA

Tahun	Nilai IPM	
	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
2010	71,81	73,0
2011	72,44	73,4
2012	73,15	74,0

S
Sumber: BPS Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan, 2015

Upah minimum pada tahun 2012 di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp. 1.195.220 per bulan, sama dengan besaran upah minimum di tingkat provinsi. Berdasarkan data statistik Provinsi Sumatera Selatan (2012), kebutuhan hidup layak di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.411.727,25 per bulan dan meningkat menjadi Rp. 1.565.588,44 per bulan pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan fakta bahwa besaran upah minimum masih di bawah besaran kebutuhan hidup layak

b. Kondisi Sosial Masyarakat

1) Aspek Kependudukan

Kawasan Kelola Sendang bagian hulu wilayah kelola hutan Meranti mencakup 4 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah penduduk di 4 kecamatan yang ada di sekitar wilayah ini, yaitu di Kecamatan Batanghari Leko, Sanga Desa, Bayung Lencir dan Babat Supat pada tahun 2012 sebanyak 163.218 jiwa. Kepadatan penduduk di kecamatan sekitar kawasan ini berkisar 10–99 jiwa/km². Kecamatan Bayung Lencir memiliki jumlah penduduk paling banyak dan bahkan pada ranking tertinggi di tingkat kabupaten, tetapi memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah Meranti berkisar 2–7 % atau rata-rata 4%, lebih tinggi dari rata-rata tingkat kabupaten (Musi Banyuasin) (Tabel 44).

2) Aspek Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah sekitar kawasan kelola hutan Meranti secara umum cukup memadai. Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sebanyak 261 unit atau rata-rata 37 unit per kecamatan. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs) sebanyak 90 unit atau rata-rata 13 unit per kecamatan. Adapun Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA/MA) sebanyak 40 unit atau 6 unit per kecamatan (Tabel 44 dan 45).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Musi Banyuasin untuk umur 7-12 tahun mencapai 97,69 dan umur 13-15 tahun sebesar 84,11. Namun APS untuk umur 16-18 tahun baru mencapai 49,10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 100% dan SMP/MTs mencapai 94,84%.

Namun untuk SMA/MA baru tercapai 75,92%. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 106,96%, dan SMP/MTs sebesar 109,36%. Tetapi untuk tingkat SMA/MA baru mencapai 81,46%. Jumlah perguruan tinggi sebanyak 5 unit, yaitu Politeknik Sekayu, AKPER dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit.

Tabel 3.44. Jumlah Penduduk di Kecamatan Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Batanghari Leko	16	22.100	2,38	10,48
2	Sanga Desa	19	31.400	2,12	99,05
3	Bayung Lencir	23	78.700	7,54	16,24
4	Babat Supat	16	34.900	3,96	68,29
5	Tungkal Jaya	16	42.300	3,92	51,51
6	Lais	15	54.300	2,54	71,87
7	Babat Toman	13	30.100	2,90	23,32
	Jumlah	118	293.800	(rata-rata) 3,62	(rata-rata) 48,68
	<i>Kabupaten MUBA</i>		<i>592.4005</i>	<i>3,06</i>	<i>41,53</i>

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

Tabel 3.45. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Sekitar Kawasan Hutan Meranti

No	Kecamatan	SD/MI (Unit)	SLTP/MTs (Unit)	SMA/SMK/MA (Unit)
1	Batanghari Leko	21	10	2
2	Sanga Desa	41	13	6
3	Bayung Lencir	55	18	7
4	Babat Supat	32	15	7
5	Tungkal Jaya	24	10	5
6	Lais	43	17	6
7	Babat Toman	45	7	7
	Jumlah	261	90	40
	Rata-Rata	37	13	6

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

3) Aspek Kesehatan

Fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan memadai. Berdasarkan data statistik Provinsi Sumatera Selatan (2012), di Musi Banyuasin terdapat 3 unit Rumah Sakit Umum (RSU) dengan jumlah fasilitas tempat tidur 223 unit. Di tingkat kecamatan terdapat Puskesmas sebanyak 25 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 108 unit. Disamping fasilitas tersebut, juga terdapat pusat pelayanan terpadu (Posyandu) sebanyak 500 unit. Fasilitas kesehatan yang ada didukung dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup.

Terdapat 73 orang tenaga medis (dokter), 374 orang tenaga keperawatan dan didukung 238 orang tenaga non keperawatan serta 95 tenaga kesehatan lainnya. Jenis penyakit yang sering diderita penduduk di sekitar areal KPHP Unit IV Meranti adalah diare dengan 5.695 kasus dan malaria dengan 711 kasus. Adapun kecamatan yang paling banyak terkena penyakit adalah Kecamatan Tungkal, Batanghari Leko, dan Lais (Tabel. 3.46).

Tabel 3.46. Jumlah Penderita Penyakit di Kecamatan Sekitar Kawasan Meranti

Kecamatan	Jenis Penyakit						Jumlah
	Pneumonia	Diare	TBC/BT A+	Malaria	IMS	DBD	
Batanghari Leko	-	836	1	184	5	-	1.026
Sanga Desa	-	183	6	466	2	1	658
Bayung Lencir	-	524	35	23	-	46	628
Babat Supat	-	425	11	2	-	-	438
Tungkal Jaya	-	2.229	-	16	7	-	2.252
Lais	5	814	42	8	3	3	875
Babat Toman	-	684	19	12	4	3	722
Jumlah	5	5.695	114	711	21	53	

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2014

Sarana air minum yang utama digunakan masyarakat di wilayah sekitar wilayah kelola hutan Meranti adalah sumur gali. Pembuangan air limbah rata-rata sudah tersedia cukup banyak di masing-masing kecamatan, kecuali kecamatan Babat Supat dan Tungkal Jaya. Jamban keluarga juga sudah membudaya dan digunakan oleh banyak masyarakat di sekitar wilayah ini (Tabel 3.47).

Tabel 3.47. Jumlah Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga di Kecamatan Sekitar Meranti

Kecamatan	Jenis dan Jumlah Sarana					
	Sumur Pompa Tangan		Air Hujan	Sumur Gali	Pembuangan Air Limbah	Jamban Keluarga
	Dangkal	Dalam				
Batanghari Leko	74	5	238	457	4.682	1.788
Sanga Desa	30	3	-	1.513	7.035	2.073
Bayung Lencir	59	5	20	8.707	4.438	15.399
Babat Supat	11	-	-	-	-	3.049
Tungkal Jaya	-	-	-	-	-	7.356
Lis	75	7	20	1880	675	4090
Babat Toman	100	10	129	5298	3350	3393
Jumlah	349	30	407	15.180	20.180	25.702

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

4) Aspek Keagamaan

Mayoritas penduduk (98,49%) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama lain (Tabel 3.48).

Tabel 3.48. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah(orang)	Persentase(%)
1	Islam	581.402	99,89
2	Hindu	111	0,02
3	Kristen	165	0,03
4	Katholik	277	0,05
5	Budha	71	0,01
Jumlah		582.026	100,00

Sumber: BPS Musi Banyuasin, 2015

c. Kondisi Budaya Masyarakat

1) Kondisi Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di dalam kawasan Kelola Sendang Hulu wilayah kelola hutan Meranti yang dapat diidentifikasi adalah masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dahulu lebih dikenal dengan sebutan suku "Kubu". Keberadaan masyarakat SAD antara lain di desa Lubuk Bintialo dan di desa Sakosuban. Masyarakat SAD hidup berkelompok, ada yang sudah menetap tetapi kebanyakan masih suka berpindah-pindah tempat tinggal, oleh karena itu keberadaan masyarakat SAD tidak tercatat dalam administrasi kependudukan tingkat desa. Satu kelompok masyarakat SAD terdiri dari sekitar 40–80 kepala keluarga (KK).

Di Lubuk Bintialo terdapat 2 kelompok SAD, satu kelompok di sebelah hulu Camp 26 (eks camp PT. Inhutani V) dengan anggota lebih kurang 80 KK dan satu kelompok di sebelah hilir Camp 26 dengan anggota sekitar 40 KK. Di Sakosuban terdapat satu kelompok dengan jumlah sebanyak 40 KK. Beberapa KK SAD ada yang sudah memiliki kebun karet, meskipun sumber penghasilannya masih sangat tergantung pada hasil hutan. Sementara itu beberapa remaja SAD sudah ada yang memiliki sepeda motor, sehingga mereka sudah bersosialisasi dengan penduduk sekitarnya. Lokasi pemukiman mereka pada umumnya jauh dari lokasi pemukiman atau perkampungan masyarakat biasa. Masyarakat SAD juga tidak bisa hidup membaur dengan masyarakat desa, karena memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang berbeda. Alasan yang menyebabkan berpindah-pindah SAD adalah adat yang masih dipegang dan diterapkan. Salah satu adat SAD yang masih dilakukan, adalah "melangu". Yaitu pergi meninggalkan rumah atau tempat tinggalnya apabila ada salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Adapun alasan prinsip yang lain sehingga SAD sering berpindah-pindah tempat tinggal adalah mata pencaharian mereka berladang atau menanam padi, mencari dan memungut hasil hutan, sehingga mereka sangat tergantung pada keberadaan hutan dan hasilhutan.

Masyarakat SAD pada umumnya masih menganut kepercayaan animisme. Mereka melakukan pemujaan atau penyembahan terhadap benda- benda, seperti pohon, batu dan tempat yang dianggap memiliki kekuatan ghaib. Pada hari tertentu di bulan Zulhijjah, masyarakat SAD berkumpul untuk melakukan ritual di suatu tempat yang disebut "batin".

Mereka membawa berbagai jenis makanan dan melakukan upacara yang dipimpin oleh ketua adat. Selain “batin” masyarakat SAD juga memiliki upacara adat yang lain, seperti upacara adat pernikahan dan upacara adat kematian. Upacara pesta perkawinan yang disebut “gawe”. “Gawe” dilaksanakan di rumah orang tua temanten putri karena mereka menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Hal yang khusus pada upacara “gawe” tersebut adalah makanan yang disajikan, seperti nasi, harus dari hasil menanamsendiri. Pernikahan dianggap tidak sah apabila nasi yang disajikan dimasak dari beras yang dibeli dari pasar atau dari toko. Pembinaan masyarakat SAD telah dilakukan antara lain oleh Dinas Sosial. Program yang dilaksanakan adalah pemukiman menetap dan program pendidikan bagi anak-anak SAD serta pelayanan kesehatan. Program tersebut dipandang tidak berhasil karena masyarakat SAD pindah meninggalkan pemukiman. Demikian pula sekolahan yang dibangun, pembelajaran terpaksa harus berhenti karena tidak adagurunya.

2) Kondisi Budaya dan Tata Nilai Hutan

Budaya masyarakat Musi Banyuasin tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan tradisi yang telah lama dilaksanakan dan sejarah panjang suku/bangsa Melayu. Kebudayaan Melayu tersebut berinteraksi dengan agama yang dianutnya, sehingga dapat dikatakan budaya yang berkembang adalah MelayuIslam. Motto Kabupaten Musi Banyuasin “**Serasan Sekate**” dapat diterjemahkan bahwa masyarakat Musi Banyuasin selalu mengutamakan kerukunan dan tetap memegang teguh azas musyawarah untuk mufakat yang dijiwai semangat gotong royong. Masyarakat Musi Banyuasin mengutamakan kebersamaan dibanding sikap individual dan menunjukkan pula bahwa masyarakat memegang prinsip demokrasi.

Budaya dan tata nilai dalam masyarakat terkait dengan hutan dan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah ini telah berkembang sejak lama. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam hasil pengamatan dan FGD Tim Fakultas kehutanan UGM di desa Pangkalan Bulian dan Lubuk Bintialo yang dilaksanakan tahun 2013. Pada awal keberadaan Desa Pangkalan Bulian ataupun Lubuk Bintialo terdapat ketentuan hukum adat yang mengatur dengan ketat arahan fungsi hutan, yaitu hutan larangan, hutan belukar/ladang berpindah, atau peruntukan lainnya menurut adat lokal. Kondisi sekarang ini hutan adat, telah berubah fungsi oleh kesepakatan yang bersifat eksternal, berasal dari kebijakan pemerintah. Walaupun demikian, kelembagaan adat ini tidak sepenuhnya hilang, akan tetapi masih diakui dan disepakati sebagai warisan budaya masyarakat.

2. Masyarakat Kawasan Sendang Kelola Bagian Tengah, Wilayah Kawasan Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya

a. Kondisi Sosial Kependudukan

Wilayah administrasi yang masuk di wilayah sekitar Lalan Mangsang Mendis adalah Kecamatan Bayung Lincir dan Kecamatan Lalan. Ada 18 (delapan belas) yang termasuk Kecamatan Bayung Lincir dan 8 (delapan) desa termasuk di Kecamatan Lalan. Keberadaan desa-desa tersebut ada yang berada dalam wilayah Kelola Sendang, berbatasan ataupun berada di sekitarnya. Dari sejumlah desa yang wilayah administrasinya berbatasan/bersinggungan dengan kawasan KPHP, terdapat beberapa desa yang berpengaruh besar dalam pengelolaan wilayah ini, yaitu Desa Mangsang, Kepayang, Muara Medak, Muara Merang, Pulai Gading, Mendis, Mendis Jaya dan Karang Agung. Desa Mangsang dengan luas wilayah administrasi 120 Km², merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, dengan jumlah dusun atau RT sebanyak 37, sedangkan Desa Mendis dengan luas 308,71 Km², merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit, dengan jumlah dusun/RT sebanyak 11. Daftar luas dan jumlah penduduk dari setiap desa disajikan pada tabel 49.

Rata-rata kepemilikan lahan garapan (khususnya kebun karet) oleh penduduk di dalam dan sekitar wilayah LMM berkisar 0,5 – 4 hektar, tumbuh di lahan milik di sekitar desa. Beberapa lokasi kebun karet masyarakat digarap di talang-talang di dalam kawasan hutan produksi. Namun lahan untuk pemukiman semuanya berada di luar kawasan hutan dengan status lahan bervariasi, ada yang sudah bersertifikat, ada yang masih girik (Letter C). Dari luasan lahan desa tersebut, di bangun untuk pemukiman, lahan garapan kebun, dan lahan garapan sawah.

Tabel 3.49. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di dalam dan Sekitar KPHP

No	Kecamatan/ Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa) / KK	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Jumlah Dusun/ RT	Rata-rata /dusun / RT	Ket
A. Bayung Lencir							
1.	Muara Merang	169,12	3.006 / 640	17,8	8	375,8	**
2.	Mangsang	120,00	10.620 / 1.857	88,5	37	287,0	**
3.	Pulai Gading	450,00	2.500 / 831	5,6	28	89,3	**
4.	Muara Medak	655,00	7.200 / 1.300	10,9	28	257,1	**
5.	Mendis	308,71	1.502 / 392	4,9	11	136,5	*
6.	Mendis Jaya	141,29	1.763 / 360	12,5	13	135,6	*
7.	Berojaya Timur	20,00	3.673 / 972	183,7	27	136,0	*Tr
8.	Beji Mulyo	39,00	3.320 / 850	85,1	7	474,3	*Tr
9.	Margo Mulyo	39,00	1.853 / 515	47,5	18	102,9	*Tr
10.	Pandan Sari	19,00	1.443 / 574	75,9	17	84,9	*Tr
11.	Tampang Baru	82,00	1.701 / 516	20,7	5	340,2	*Tr
12.	Kali Berau	530,00	2.119 / 679	3,9	15	141,3	*

13.	Sindang Marga	120,00	1.235 / 312	10,3	4	308,8	*
14.	Telang	75,00	1.250 / 308	16,7	5	250	*
15.	Simpang Bayat	65,00	1.677 / 379	25,8	5	335,4	*
16.	Bayung Lencir	320,00	7.042 / 1.761	22	27	260,8	*
17.	Senawar Jaya		4.535 / 1.205	14,5	21	215,9	*
18.	Sukajaya		5.216 / 1.399	15,2	23	226,8	*
19.	Mekar Jaya		4.383 / 1.139	21,4	17	257,8	*
20.	Kepayang		1.908 / 455	14,4	7	272,6	**

B. Lalan

1	Karang Agung	348,00	2.195 / 602	6,31	3	731,7	**
2	Ringin Agung	23,00	1.387 / 314	60,30	4	346,8	*Tr
3	Mekar Sari	15,00	868 / 175	57,87	4	217	*Tr
4	Mandala Sari	31,00	1.104 / 241	35,61	4	276	*Tr

Sumber : BPS/Bappeda Kab. Musi Banyuasin 2013 (Kecamatan Dalam Angka 2013)

Keterangan :

*: Wilayah Administrasi Berbatasan Langsung dengan HP MangsangMendis.

** : Bersinggungan Langsung/berada di antara HP Lalan dan HP Mangsang Mendis

Tr : Desa Transmigrasi

Sistem pengairan yang digunakan dalam menggarap sawah pada umumnya tidak memakai sistem pengairan atau murni mengandalkan alam, walaupun terdapat sudah ada yang melakukan teknik pengairan non teknis. Daftar status lahan pemukiman beserta keberadaannya terhadap kawasan hutan dan luasan teknik yang dipakai untuk pengairan sawah disajikan pada Tabel 3.52

Pada umumnya, hasil berupa getah karet dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada pengumpul lokal di desa setempat, selanjutnya pengumpul lokal akan menjual getah kepada pengumpul di luar desa dengan harga jauh lebih tinggi. Pertanian intensif pada dasarnya bukan merupakan pilihan bagi penduduk di sekitar wilayah ini karena pada umumnya kualitas lahan gambut yang kurang subur. Di beberapa desa, memelihara atau beternak ikan juga bukan pilihan bagi penduduk setempat karena kualitas air sungai dan air parit bersifat asam, tidak cocok untuk ikan.

Tabel 3.50. Sumber Penghasilan Setiap Desa Pada Wilayah Lalan Mendis angsang

No	Kecamatan / Desa	Penghasilan Utama	Komoditi
1	A. Bayung lencir		
	1. Simpang Bayat	Pertanian	Karet
	2. Senawar Jaya	Pertanian	Karet
	3. Pulai Gading	Pertanian	Palawija
	4. Muara Medak	Pertanian	Kelapa Sawit
	5. Mendis Jaya	Pertanian	Karet
	6. Mendis	Pertanian	Karet
	7. Mekar Jaya	Pertanian	Karet
	8. Kepayang	Pertanian	Kelapa Sawit

	9. Bayung Lencir 10. Telang 11. Tampang Baru 12. Sindang Marga 13. Simpang Tungkal 14. Pandan Sari 15. Muara Merang 16. Margo Mulyo 17. Kali Berau 18. Mangsang	Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian	Karet Karet Karet Karet Karet Kelapa Sawit Karet Kelapa Sawit Karet Palawija
2	B. Lalan 1. Sukajadi 2. Suka Makmur 3. Sri Gading 4. Mandala Sari 5. Jaya Agung 6. Bumi Agung 7. Bandar Agung 8. Karang Agung	Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Perdagangan Rumah Makan	Padi Kelapa Sawit Padi Padi Padi Padi Padi Padi

Tabel 3.51. Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan Kelola Sendang Wilayah LMM

No	Jenis Pekerjaan	No	Jenis Pekerjaan
1	Buruh PT. Perkebunan Sawit	13	Sopir KM/Speed
2	Petani Karet	14	Nelayan
3	Petani Sawit	15	Peternak Kambing
4	Buruh Tani	16	Pekerja Sawmill
5	Membuat Arang	17	Sopir Mobil
6	Peternak Ayam	18	Pencari Rotan
7	Pedagang	19	Petani Padi
8	Petani Sayur/Palawija	20	Pengojek
9	Tukang Kayu	20	Guru
10	Peternak Sapi	22	Guru Ngaji
11	Montir	23	Bidan Desa
12	Penebang Kayu	24	Tenaga Medis

Tingkat pendapatan masyarakat desa di dalam dan sekitar wilayah KPHP Unit III LMM sangat bervariasi. Berdasarkan uji petik dari dua desa di Desa Muara Merang dan Desa Kepayang, tingkat pendapatan masyarakat didominasi oleh kelompok berpenghasilan antara 6–12 juta/tahun, berkisar antara 45–50%. Kelompok berpenghasilan kurang dari 6 juta/tahun berkisar antara 15–25%. Sedangkan kelompok berpenghasilan diatas 12 juta/tahun mencapai 25–40%.

Tabel 3.52. Status Lahan Pemukiman Penduduk Setiap Desa

No	Desa	Status Lahan	Kondisi Topografi	Ketinggian DPL (m)	Letak dengan Kawasan Hutan
1	A. Bayung Lencir				
	1. Simpang Byat	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	127	Diluar Kawasan Hutan
	2. Senawar Jaya	Girik (Letter C)	Daratan	12	
	3. Pulau Gading	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	127	
	4. Muara Medak	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	15	
	5. Mendis Jaya	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	21	
	6. Mendis	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	18	
	7. Mekar Jaya	Girik (Letter C)	Daratan	12	
	8. Kepayang	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	15	
	9. Bayung Lencir	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	15	
	10. Telang	Girik (Letter C)	Daratan	27	
	11. Tampang Baru	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	60	
	12. Sindang Marga	Girik (Letter C)	Daratan	10	
	13. Simpang Tungkal	Area Jual Beli	Daratan	16	
	14. Pandan Sari	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	120	
	15. Muara Merang	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	15	
	16. Margo Mulyo	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	127	
	17. Kali Berau	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	18	
	18. Mangsang	Girik (Letter C)	Daratan	15	
2	B. Lalan				
	1. Suka Jadi	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	4	Diluar Kawasan Hutan
	2. Suka Makmur	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	1	
	3. Sri Gading	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	4	
	4. Mandala Sari	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	2	
	5. Jaya Agung	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	3	
	6. Bumi Agung	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	4	
	7. Bandar Agung	Sertifikat Hak Milik (SHM)	Daratan	3	
	8. Karang Agung	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	Daratan	4	

b. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan penduduk desa di wilayah ini tergolong heterogen, pada umumnya penduduk adalah pendatang yang berasal dari berbagai kabupaten dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan, yaitu dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Palembang dan suku lainnya seperti dari Pulau Jawa, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Dari sisi administrasi kependudukan, masih banyak ditemukan penduduk pendatang di dalam wilayah desa yang tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar KPHP Lalan 95% adalah etnis Melayu, yakni dari pengaruh budaya Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Palembang, Jambi dan Medan. Sedangkan masyarakat lainnya berasal dari suku Jawa dan Bali. Adat istiadat yang ada di beberapa desa di wilayah ini sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya.

Tabel 3.53. Luas Penggunaan Lahan dari Setiap Desa Pada Wilayah Kelola Sendang Tengah

No	Desa	Luas Desa	Luas Lahan Pertanian Sawah		
			Berpengairan Teknis	Berpengairan Non Teknis	Tidak Berpengairan
1	A. Bayung Lencir				
	1. Simpang Bayat	73.785.52	0	0	0
	2. Senawar Jaya	50.489.46	0	0	0
	3. Pulai Gading	95.213.27	0	0	0
	4. Muara Medak	87.966.97	0	0	0
	5. Mendis Jaya	12.300.19	0	0	1061
	6. Mendis	35.653.9	0	0	250
	7. Mekar Jaya	29.757.25	0	0	0
	8. Kepayang	14.563.35	0	0	3119
	9. Bayung Lencir	36.010.79	0	0	1104
	10. Telang	22.195.64	0	0	0
	11. Tampang Baru	27.412.42	0	0	0
	12. Sindang Marga	29.245.27	0	0	0
	13. Simpang Tungkal	34.575.09	0	0	1500
	14. Pandan Sari	4.287.10	0	0	0
	15. Muara Merang	10.8247.20	0	0	0
	16. Margo Mulyo	8.398.44	0	0	0
	17. Kali Berau	55.737.20	0	0	0
	18. Mangsang	76.415.59	0	0	369
2	B. Lalan				
	1. Sukajadi	3.284.49	0	701	0
	2. Suka Makmur	7.280.36	0	0	0
	3. Sri Gading	5.114.26	0	1163	0
	4. Mandala Sari	4.857.49	0	2196	0
	5. Jaya Agung	5.436.25	0	2565	0
	6. Bumi Agung	2.276.46	0	2702	0
	7. Bandar Agung	3.346.58	0	2053	0
	8. Karang Agung	65.824.63	0	1530	0

Prosesi adat dilakukan hanya pada saat pernikahan, kelahiran anak, upacara kematian, dan dalam memecahkan konflik warga. Adat istiadat masyarakat di daerah ini dipengaruhi oleh hukum Islam.

c. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di setiap desa terdiri dari Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah. Sebaran dan jumlah sekolah-sekolah tersebut dari setiap desa diuraikan pada tabel 3.54.

Tabel 3.54. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Setiap Desa Pada Wilayah LMM

No	Desa	TK	SD	SMP	SMU	Ponpes	Madrasah
1	A. Bayung Lencir						
	1. Simpang Bayat	0	4	0	0	0	0
	2. Senawar Jaya	1	3	1	0	1	1
	3. Pulai Gading	1	3	1	0	0	0
	4. Muara Medak	0	2	0	0	0	0
	5. Mendis Jaya	0	1	0	0	0	0
	6. Mendis	0	1	0	0	0	0
	7. Mekar Jaya	1	2	0	1	0	0
	8. Kepayang	0	1	0	0	0	0
	9. Bayung Lencir	1	5	2	1	1	1
	10. Telang	0	1	0	0	0	0
	11. Tampang Baru	0	1	0	0	0	0
	12. Sindang Marga	0	1	0	0	0	0
	13. Simpang Tungal	2	4	1	0	3	0
	14. Pandan Sari	0	1	1	0	0	0
	15. Muara Merang	0	3	1	0	0	0
	16. Margo Mulyo	3	2	0	0	0	0
	17. Kali Berau	0	1	0	0	0	0
18. Mangsang	1	5	0	0	0	0	
2	B. Lalan						
	1. Suka Jadi	0	1	0	0	0	0
	2. Suka Makmur	0	1	0	0	0	0
	3. Sri Gading	0	1	0	0	0	0
	4. Mandala Sari	1	1	0	0	0	0
	5. Jaya Agung	0	1	0	0	0	0
	6. Bumi Agung	1	2	1	0	0	1
	7. Bandar Agung	1	1	1	1	0	0
	8. Karang Agung	0	1	1	0	0	0

d. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah desa sekitar hanya terdapat di Desa Bayung Lencir. Adapun di desa-desa yang lainnya berupa Poskesdes dan Pustu. Sumber air minum yang digunakan ada yang sudah menggunakan sumur, namun masih juga terdapat yang masih menggunakan air sungai, danau dan air hujan. Untuk menunjang pengadaan sumber air minum masyarakat, sudah ada yang memanfaatkan jasa penjualan air minum/air kemasan. Berikut disajikan daftar sarana kesehatan dan sumber air minum yang digunakan masyarakat.

Tabel 3.55. Sarana Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan dari Setiap Desa

No	Desa	Puskesmas	Sumber Air Minum	Fasilitas Jual Beli Air Minum
A	Bayung Lencir			
	1. Simpang Bayat	Tidak	Sumur	Ada
	2. Senawar Jaya	Tidak	Sumur	Tidak
	3. Pulai Gading	Tidak	Sumur	Ada
	4. Muara Medak	Tidak	Sumur	Tidak
	5. Mendis Jaya	Tidak	Sumur	Tidak
	6. Mendis	Tidak Tidak	Sumur	Tidak
	7. Mekar Jaya		Sumur	Tidak
	8. Kepayang	Tidak Ada	Sunggai/Danau	Tidak
	9. Bayung Lencir		PAM/air dlm kemasan	Tidak
	10. Telang	Tidak	Sumur	Ada
	11. Tampang Baru	Tidak	Sumur	Ada
	12. Sindang Marga	Tidak	Sumur	Tidak
	13. Simpang Tungkal	Tidak	Sumur	Ada
	14. Pandan Sari	Tidak	Sumur	Ada
	15. Muara Merang	Tidak	Sumur	Tidak
	16. Margo Mulyo	Tidak	Sumur	Ada
	17. Kali Berau	Tidak Tidak	Sumur	Tidak
18. Mangsang		Sumur	Tidak	
B	Lalan			
	1. Suka Jadi	Tidak	Air Hujan	Ada
	2. Suka Makmur	Tidak	Air Hujan	Tidak
	3. Sri Gading	Tidak Tidak	Air Hujan	Tidak
	4. Mandala Sari		Air Hujan	Ada
	5. Jaya Agung	Tidak	Air Hujan	Tidak
	6. Bumi Agung	Tidak	Air Hujan	Ada
	7. Bandar Agung	Tidak	Air Hujan	Tidak
8. Karang Agung	Tidak	Air Hujan	Ada	

e. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat adat yang berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (2004), yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri, sedangkan menurut AMAN mengemukakan bahwa masyarakat adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar wilayah LMM tidak terdapat masyarakat adat. Masyarakat yang ada merupakan masyarakat gabungan dari berbagai etnis yang ada di Sumatera Selatan, luar Sumatera Selatan, Jawa dan etnis lainnya. Di samping itu banyak desa yang merupakan daerah transmigrasi yang merupakan masyarakat pendatang. Secara etnis, lebih banyak etnis melayu ditambah dengan warga transmigrasi Jawa dan Bali.

3. Masyarakat Kawasan Sendang Kelola Hilir, Wilayah Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya

a. Kondisi Sosial Kependudukan

Kecamatan yang sering berinteraksi dalam Kawasan Kelola Sendang Hilir di wilayah kelola hutan Lalan Sembilang adalah Kecamatan Banyuasin II dengan beberapa desa yang di sajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.56. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Sekitar Lalan Sembilang

No	Nama Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
1	Sumber Rejeki	2.512	20,93	120,01
2	Mekar Sari	2.276	21,16	107,56
3	Karang Sari	1.331	13,50	98,59
4	Majuria	1.540	11,88	129,62
5	Tabala Jaya	1.358	27,54	49,31
6	Tanah Pilih	1.445	889,62	1,62
7	Sungsang IV	2.992	1.769,07	1,691
8	Sri Agung	2.519	21,08	119,49
9	Jati Sari	2.665	20,30	131,28
Jumlah		17.252	2.795,08	759,171

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015

Keberadaan kawasan Kelola Sendang Hilir wilayah kelola hutan Lalan Sembilang yang berdekatan dengan kecamatan Banyuasin II dan desa yang berdekatan telah menimbulkan banyak konsekuensi. Diantaranya adalah masalah tumpang tindih kawasan hutan dengan pemukiman masyarakat.

b. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian)

Mata pencaharian penduduk yang ada di dalam dan sekitar wilayah kelola hutan Lalan Sembilang paling dominan adalah petani dan berkebun. Pola usaha tani umumnya berupa pola usaha tani campuran dengan sistem tumpang sari. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di empat desa sekitar kawasan hutan Banyuasin Kabupaten Banyuasin merupakan masyarakat transmigrasi dari tahun 1984 sampai tahun 1986 yang sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian, tanaman pangan. Sedangkan untuk masyarakat di wilayah perairan mata pencahariannya lebih dominan pada bidang perikanan (budidaya dan nelayan), pola penghidupan mata pencaharian masyarakat baik di sekitar wilayah hutan maupun di wilayah perairan disajikan pada Gambar 3.82.



Gambar 3.82. Lahan Penghidupan Masyarakat Transmigrasi di Wilayah Hutan dan di Wilayah Perairan Kawasan Hilir Kelola Sendang Wilayah Lalan Sembilang.

(Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

Perladangan merupakan sistem cocok tanam tradisional rendah input budidaya dan sangat tergantung pada alam, yang dicirikan oleh penyiapan lahan secara tebas-tebang-bakar (*slash and burn*) pada musim kemarau, kemudian tanpa pengolahan tanah dilanjutkan dengan tugal dan tanam padi pada awal musim penghujan, pemeliharaan berupa penyiangan tanpa pemupukan, dan kemudian panen padi pada saat tanaman umur sekitar 5 bulan. Dalam satu tahun satu bidang lahan hanya dapat ditanami sekali. Selain padi, biasanya peladang juga menanam sayur, ubi-ubian, jagung, pisang dan lain-lain untuk kebutuhan sendiri.

c. Pendidikan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah untuk menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan indikator kemajuan pembangunan di daerah tersebut dengan dibangunnya fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program yang mendukung pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), program sekolah gratis.

Program pendidikan untuk peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun). Sarana sekolah yang telah ada di kecamatan Banyuasin di sekitar wilayah Lalan Sembilang, Kabupaten Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 3.56 Sarana Pendidikan di desa sekitar wilayah Lalan Sembilang dapat dilihat pada Gambar 3.83.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan diketahui bahwa tingkat pendidikan dari desa yang berada disekitar kawasan hutan Banyuasin yang dijadikan sampel, hampir semuanya memiliki warga penduduk dengan pendidikan yang relatif sedang. Jumlah sekolah dasar tidak seimbang dengan fasilitas untuk Sekolah Menengah Pertama, hal ini

mencerminkan bahwa anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar melanjutkan ke SMP sehingga program wajib belajar 9 tahun sampai dengan tingkat SMP sudah tercapai, kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) ke daerah Transmigrasi yaitu desa Jati Sari.

Tabel 3.57. Sarana pendidikan di Desa Sekitar Kawasan hutan Lalan Sembilang

No	Nama Desa/Kelurahan	Tingkat Sekolah			
		TK	SD	SLTP	SLTA
1	Sumber Rejeki	1	1	1	-
2	Sri Agung	1	1	-	-
3	Karang Sari	-	1	-	-
4	Majuria	-	1	-	-
5	Tabala Jaya	-	1	-	-
6	Sungsang IV	-	2	-	-
7	Tanah Pilih	-	1	-	-
8	Jati Sari	1	1	1	1
9	Mekar Sari	-	1	-	-
Jumlah		3	10	2	1

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015



Gambar 3.83. Sarana Pendidikan di desa sekitar Wilayah Lalan Sembilang
(Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

d. Sarana dan Prasarana Perekonomian Masyarakat

Sarana dan prasarana perekonomian di desa sekita wilayah Lalan Sembilang masih tergolong masih terbatas di sebabkan oleh biasanya transaksi jual beli hanya ada pasar tradisional berupa pasar kalangan pada hari-hari tertentu saja, sedangkan untuk kebutuhan yang lebih besar dan banyak. Umumnya masyarakat membelinya ke Palembang. Jarak antara Desa cukup dekat yaitu sekitar 3 km, sedangkan untuk ke kota kecamatan sekitar 110 km, untuk ke Kabupaten Banyuasin sekitar 190 km dan menuju ke Provinsi sekitar 150 Km.

Sarana ekonomi lainnya di desa yang di survei yang ada hanya warung dengan jumlah yang terbatas, masing-masing desa rata-rata terdapat warung 6 sampai 15 buah yang menjual beberapa kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, gula, minyak sayur, minyak tanah, rokok, susu, sabun, dan lain-lain. Kondisi Sarana ekonomi dapat di lihat pada

Gambar 3.83. Sarana perekonomian lainnya adalah tersedianya lembaga toko/kios dan warung yang menyediakan bahan pokok sehari-hari seperti Tabel 3.57.



Gambar 3.84. Warung di desa sekitar wilayah kelola hutan Lalan Sembilang
(Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

Tabel 3.58 Banyaknya Akomodasi Warung Makan, dan Toko Kelontongan di Desa Sekitar Kawasan hutan KPHP Unit II Lalan Sembilang

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Akomodasi	
		Warung Makan	Kelontongan
1	Sumber Rejeki	1	16
2	Sri Agung	2	15
3	Karang Sari	3	28
4	Majuria	2	20
5	Tabala Jaya	-	17
6	Sungsang IV	12	35
7	Tanah Pilih	3	15
8	Jati Sari	5	15
9	Mekar Sari	3	29
Jumlah		31	190

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015

Sarana dan prasarana tempat olah raga yang terdapat di desa sekitar kawasan hutan Lalan Sembilang adalah Lapangan olah raga, posyandu, dan sebagainya seperti pada Gambar 3.85.



Gambar 3.85. fasilitas dan Sarana Layanan Publik di Desa sekitar wilayah Lalan Sembilang (Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

e. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang nantinya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di kecamatan Banyuasin II disajikan pada Tabel 3.58 dan Tabel 3.59.

Tabel 3.59 : Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Banyuasin II

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan
1	Rumah Sakit	-
2	Pukesmas	2
3	Pukesmas Pembantu	4
4	Pokesdes	25
5	Posyandu	17
6	Pos Obat	1
Jumlah		49

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015.

Berdasarkan table di atas fasilitas kesehatan (Gambar 3.83) telah tersedia di kecamatan Banyuasin II seperti pukesmass, pukesmas pembantu, pokesdes, posyandu dan pos obat, akan tetapi belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat yang akan berobat ke Rumah sakit akan menuju ke rumah sakit Kabupaten Banyuasin.

Tabel 3.60 Jumlah tenaga Kesehatan Di Kecamatan Banyuasin II

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	3
2	Dokter Gigi	2
3	Bidan	38
4	Perawat	14
5	Sanitarian	1
6	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1
Jumlah		59

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015

Adapun untuk tenaga kesehatan di Kecamatan Banyuasin II dari Tabel 3.58 dan Tabel 3.59 terlihat bahwa masih kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan di suatu daerah.



Gambar 3.86. Sarana Kesehatan di Desa sekitar wilayah Lalan Sembilang
(Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

f. Sosial Budaya Masyarakat

Keadaan penduduk di empat desa Kecamatan Banyuasin II yang ada di dalam dan sekitar Wilayah Kelola Sendang Hilir wilayah Lalan Sembilang tergolong heterogen, selain penduduk lokal juga masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang tersebut ada yang datang melalui program transmigrasi dan ada juga yang datang secara mandiri melalui keluarganya. Daerah asal pendatang antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Medan. Etnis yang ada antara lain etnis Ogan, Banyuasin, Musi, Jawa, Sunda, Bali dan Batak. Kehidupan mereka ada yang sudah menetap ada juga yang masih pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat kehidupan mereka semakin hari terus terdesak oleh kegiatan pengembangan kehutanan dan perkebunan baik yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun oleh perusahaan.

Tempat kehidupan mereka semakin hari terus terdesak oleh kegiatan pengembangan kehutanan dan perkebunan baik yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun oleh perusahaan. Mereka bergerak mencari lokasi-lokasi hutan yang utuh. Diantara mereka yang sudah menetap, mata pencaharian mereka adalah berkebun karet, sawit serta menanam tanaman pertanian seperti padi, ubi, berdagang ikan asin dan ikan sungai. Disamping itu mereka masih tetap mengandalkan meramu hasil hutan.

Pada kalangan anak-anak mudanya ada yang telah memiliki sepeda motor, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan penduduk sekitarnya. Tradisi atau adat istiadat yang ada di beberapa desa di wilayah Lalan Sembilang pada umumnya sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sumatera Selatan. Prosesi adat dilakukan hanya pada saat pernikahan, kelahiran anak, upacara kematian dan dalam memecahkan konflik/perselisihan antar warga. Adat istiadat masyarakat di daerah ini dipengaruhi oleh hukum Negara.

Kelembagaan yang terdapat di empat desa di Wilayah Kecamatan Banyuasin II yang ada di dalam dan sekitar Wilayah Lalan Sembilang yang ada hanya Lembaga Adat Desa atau Rapat Adat Desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa). Lembaga ini terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun sudah beberapa tahun belakangan ini lembaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat desa sehingga masyarakat kurang merasakan manfaatnya, disamping itu karena kondisi adanya asimilasi suku lain (masyarakat pendatang) dan paktor ekonomi yang membuat mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan lembaga informal yang ada di desa hanya sebatas kelompok tani, lembaga inipun mempunyai nasib yang sama yaitu tidak aktif berfungsi.

g. Agama Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa perlu dilakukan upaya kehidupan beragama yang bertujuan mewujudkan dan mengembangkan suasana kehidupan yang berkesinambungan, selaras, serasi dan seimbang dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Data-data yang terkait dengan agama disajikan pada Tabel 60.

Berdasarkan Tabel 3.60 Agama yang dipeluk mayoritas penduduk adalah Islam, sedangkan agama lain yang dipeluk adalah Kristen. Di Desa Karang Sari dan Majuria 100% penduduk memeluk agama Islam, sedangkan di Desa Sumber Rejeki dan Mekar Sari penduduk mayoritas memeluk agama Islam sebagian penduduk yang memeluk agama Kristen. Dalam melaksanakan ibadah, dari setiap agama mempunyai tempat ibadah masing-masing antara lain masjid, langgar untuk pemeluk agama Islam (Gambar 22), Gereja untuk pemeluk agama Kristen. Jumlah tempat Ibadah yang ada di setiap Kecamatan ditampilkan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dari Desa Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang

No	Nama Desa/Kelurahan	Agama				
		Islam	Kristen	Protestan	Hindu	Budha
1	Sumber Rejeki	2.512	-	-	-	-
2	Sri Agung	2.519	-	-	-	-
3	Karang Sari	1.331	-	-	-	-
4	Majuria	1.540	-	-	-	-
5	Tabala Jaya	1.358	-	-	-	-
6	Sungsang IV	2.992	-	-	-	-
7	Tanah Pilih	1.445	-	-	-	-
8	Jati Sari	2.665	-	-	-	-
9	Mekar Sari	2.276	-	-	-	-
Jumlah		17.252	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.61 Agama yang dipeluk mayoritas penduduk adalah Islam, sedangkan agama lain yang dipeluk adalah Kristen. Di Desa Karang Sari dan Majuria 100% penduduk memeluk agama Islam, sedangkan di Desa Sumber Rejeki dan Mekar Sari penduduk mayoritas memeluk agama Islam sebagian penduduk yang memeluk agama Kristen. Dalam melaksanakan ibadah, dari setiap agama mempunyai tempat ibadah masing-masing antara lain masjid, langgar untuk pemeluk agama Islam (Gambar 3.86), Gereja untuk pemeluk agama Kristen. Jumlah tempat Ibadah yang ada di setiap Kecamatan ditampilkan pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62. Jumlah sarana ibadah dari Desa Sekitar Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang Kabupaten Banyuasin

No	Nama Desa/Kelurahan	Sarana Ibadah				
		Masjid	Surau	Gereja	Vihara	Pura
1	Sumber Rejeki	6	12	-	-	-
2	Sri Agung	8	9	-	-	-
3	Karang Sari	10	2	-	-	-
4	Majuria	3	7	-	-	-
5	Tabala Jaya	3	5	-	-	-
6	Sungsang IV	2	3	-	-	-
7	Tanah Pilih	2	-	-	-	-
8	Jati Sari	2	10	-	-	-
9	Mekar Sari	3	9	-	-	-
	Jumlah	39	57	-	-	-

Sumber : Kecamatan Banyuasin II dalam angka tahun 2016



Gambar 3.87. Sarana Peribadatan (a) Masjid (b) Langgar/Musholla di desa sekitar Wilayah Lalan Sembilang (Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

h. Bahasa Mayoritas

Bahasa mayoritas yang digunakan di tiga desa sekitar kawasan hutan KPHP Unit II Banyuasin Kabupaten Banyuasin adalah melayu, sebagian yang lain menggunakan Bahasa jawa, Bugis dan Sunda. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan orang luar daerah biasanya menggunakan bahasa Palembang atau Bahasa Indonesia.

i. Keberadaan Masyarakat Hukum adat

Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil kongres masyarakat adat nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (2004) yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun menurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Sedangkan menurut AMAN mengemukakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun menurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan pengertian tersebut di wilayah KPHP Unit II Lalan Sembilang tidak terdapat masyarakat adat.

j. Aksesibilitas

Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa-desa yang ada di sekitar wilayah KPHP unit II Lalan Sembilang sekitar kawasan hutan cukup memadai, sebagian besar jalan-jalan yang ada di desa sudah di cor beton sedangkan jalan yang menghubungkan desa-desa masih berupa jalan tanah dan jalan melalui sungai atau kanal, untuk perhubungan keluar desa masyarakat masih menggunakan sarana air seperti *speedboat*, tongkang dan lain-lain (Gambar 3.87)



Gambar 3.88. Sarana Perhubungan antar desa di Kawasan Hilir Kelola Sendang Wilayah Lalan Sembilang (Sumber: dokumentasi pribadi dan BPKH Will II, 2015)

Sarana dan prasarana komunikasi di desa-desa yang di survei sudah cukup memadai, jaringan telepon khususnya lewat hand phone (hp) yang ada di desa-desa tersebut dapat digunakan dengan baik. Sarana hiburan pada di hampir seluruh desa-desa yang di survei telah dapat menikmati sarana informasi dan hiburan mengingat telah tersedia listrik secara swadaya antar masyarakat.

G. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kelola Sendang Bagian Hulu, Wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti, Sako Suban Lubuk Bintialo dan Sekitarnya

Di dalam kawasan Kelola Sendang Hulu wilayah kelola hutan Meranti dan sekitarnya terdapat berbagai usaha kehutanan baik dalam bentuk pemanfaatan hutan maupun penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan berupa hutan tanaman (IUPHHK-HT)

dan restorasi ekosistem (IUPHHK-HA). Sedangkan penggunaan kawasan hutan dalam bentuk Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan gas dan batubara.

a. Izin dan Pencadangan Pemanfaatan Hutan

Jumlah perusahaan pemegang IUPHHK-HT sebanyak 6 perusahaan dan satu perusahaan IUPHHK-HA. Areal yang telah dibebani hak untuk usaha kehutanan seluas 307.390 ha (luas berdasarkan SK Menteri Kehutanan), terdiri dari 255.220 ha untuk IUPHHK-HT dan 52.170 ha IUPHHK-HA. Namun areal konsesi tersebut tidak seluruhnya masuk dalam wilayah KPHP Unit IV Meranti.

Total areal yang berada dalam wilayah KPHP Unit IV Meranti seluas 208,315 ha (Tabel 3.62). Berdasarkan perhitungan berbasis SK Menteri Kehutanan, luas KPHP Unit IV Meranti seluas 252.267 ha, di dalam wilayah kawasan hutan Meranti masih terdapat areal seluas 35.642 Ha yang belum dibebani izin.

b. Ijin dan Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan

Di dalam Kawasan KPHP Unit IV Meranti terdapat juga usaha non kehutanan dalam bentuk Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Jumlah pemegang IPPKH sebanyak 14 unit izin usaha dengan total luas areal izin pinjam pakai 25.246,07 ha. Penggunaan kawasan izin pinjam pakai sebagian besar (99%) untuk pertambangan batubara dan sarana pendukungnya dan sisanya (1%) untuk pertambangan gas dan fasilitas pendukungnya (Tabel 3.63).

Tabel 3.63. Pemanfaatan kawasan untuk IUPHHK di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Hutan Meranti

No	Perusahaan	Nomor SK	Tanggal SK	Luas	Masuk dalam areal KPHP		Jenis tanaman pokok	Status
				(ha)	(ha)	(%)		
IUPHHK-HT								
1	PT. Bumi Persada Permai I	50.153	7 September 2004	59.345	38.187	18,33	- <i>Acacia</i> sp. - <i>Eucalyptus</i>	IUPHHK-HT, Aktif
2	PT. Rimba Hutani Mas	208,315	22 Maret 2007	67.100	12.131	5,83	- <i>Acacia</i> sp. - <i>Eucalyptus</i>	IUPHHK-HT, Aktif
3	PT. Pakerin	226/Kpts-II/1998	27 Februari 1998	43.380	23.375	11,22	- <i>Acacia mangium</i>	IUPHHK-HT, Tidak Aktif
4	PT. Bumi Persada Permai II	79/Menhut-II/2009	5 Maret 2009	24.050	24.283	11,66	- <i>Acacia</i> sp. - <i>Eucalyptus</i> - Sungkai - Jabon	IUPHHK-HT, Aktif
5	PT. Sentosa Bahagia Bersama	249/Menhut-II/2009	24 April 2009	55.055	53.639	25,75	- <i>Acacia</i> sp. - Karet	IUPHHK-HT, Aktif
6	PT. Wahana Agro Mulia	252/Menhut-II/2009	6 Mei 2009	6.290	6.547	3,14	- <i>Acacia mangium</i> - Karet	IUPHHK-HT, Aktif
IUPHHK-HA								
7	Restorasi Eko Sistem Indonesia	293/Menhut-II/2007	28 Agustus 2007	52.170		24,07	- Kayu alam	IUPHHK-HA, Aktif
Total				307.390		100,00		

Sumber: Laporan/Dokumen Perusahaan Konsesi, diolah (BPKH Wil II, 2015)

Tabel 3.64. IPPKH dalam Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Hutan Meranti

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahun Ijin	Masa Berlaku (thn)	Kegiatan
Tahap Eksploitasi					
1	PT.Seleraya Merangin Dua	47,98	Februari 2014	19	
	Minyak Bumi	47,98	-	-	
2	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	48,59	Agustus 2013	10	Jalan Inspeksi (Jalan Gas Suban - Dayung)
3	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	75,88	Januari 2012	11	Pengembangan Lapangan Gas Suban Tahap 2
4	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	13,70	Februari 2013	5	Sumur Gas Suban 13 dan 14 Penambahan sumur gas Suban tahap 2
5	Conoco Phillips (Grissik), Ltd	212,59	Februari 2014	9	Pengembangan Lapangan Gas Suban Tahap 1
6	ConocoPhillips (Grissik), Ltd	30,33	Februari 2014	9	Pengembangan Lapangan Gas Sumpal
	<i>Tambang Gas</i>	381,09			
Tahap Eksplorasi					
1	PT. Sentosa Kurnia Bahagia	5.500,00	Juli 2010	4	Eksplorasi Tambang Batubara
2	PT. Mensa Bara Bumi	1.477	Januari 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
3	PT. Persada Makmur Jaya	2.088,00	Mei 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
4	PT. Lais Coal Mine	1.763,00	Juni 2012	2	Eksplorasi Tambang Batubara
5	PT. Andalan Satria Abadi	4.000,00	Maret 2013	2	Eksplorasi Tambang Batubara
6	PT. Duta Alam Ekapratama	4.000,00	Maret 2013	21 bln	Eksplorasi Tambang Batubara
7	PT. Duta Alam Jaya	4.000,00	Maret 2013	20 bln	Eksplorasi Tambang Batubara
8	PT. Muba Coal Mine	1.989,00	Februari 2013	1	Eksplorasi Tambang Batubara
	<i>Tambang Batubara</i>	24.817,00			
	Jumlah	25.246,07			

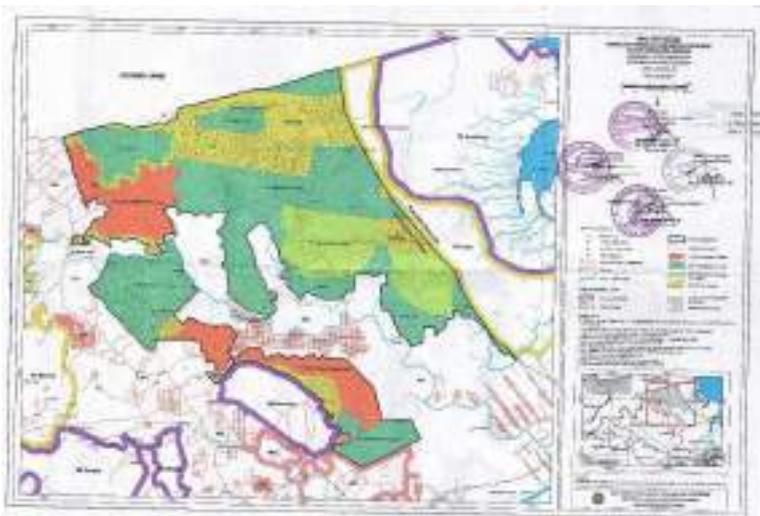
Sumber: BPKH Wilayah II, 2014

2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Kelola Sendang Tengah, Wilayah Kelola Hutan Lalan Mendis Mangsang dan Sekitarnya

a. Izin-Izin dan Pencadangan Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, memanfaatkan jasa lingkungan,

serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dalam kawasan Kelola Sendang Tengah wilayah kelola hutan Lalan Mangsang Mendis berupa pemanfaatan hutan produksi dengan mengatur kelestarian hasil yang semaksimal mungkin melibatkan masyarakat. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, wilayah Lalan Mangsang Mendis merupakan Hutan Produksi Tetap (HP), selanjutnya dibagi menjadi beberapa peruntukkan pemanfaatan wilayah hutan antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan IUPHHK-Restorasi. Pada Gambar 3.89 tersaji Peta Tata Hutan di Kawasan kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Mangsang Mendis.



Gambar 3.89. Peta Tata Hutan di kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Lalan Mangsang Mendis (Sumber: BPKH Wilayah II Palembang, 2015)

1) Hutan Tanaman Industri (HTI)

Dari luasan kawasan kelola sendang tengah wilayah kelola hutan Lalan Mangsang Mendis LMM \pm 259.940,00 ha, sebanyak \pm 182.450 Ha atau (68,60%) telah dibeban ijin pemanfaatan hasil hutan dan sisanya \pm 83.503 (31,40) telah dimohon untuk berbagai tujuan pemanfaatan baik untuk pengelolaan Hutan Alam, HTI, HTR, ataupun HD. Sampai saat ini tercatat ada 9 perusahaan HTI dengan izin IUPHHK-HT antara lain PT. Rimba Hutani Mas (RHM), PT. Bumi Persada Permai (BPP), PT. Sumber Hijau Permai (SHP), PT. Pakerin, PT. Rickym Mas Jaya (RMJ), PT. Tiesco Cahaya Pertiwi (TCP), PT. Tunas Harapan Pratama (THP), dan PT. Wahana Lestari Makmur Sukses. Lebih terperinci keberadaan IUPHHK-HTI tersebut disajikan pada (tabel 3.64).

Pemanfaatan ruang kawasan LMM yang dominan adalah untuk IUPHHK-HTI. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, tercatat 5 pemegang IUPHHK-HTI dengan luas konsesi keseluruhan mencapai \pm 120.020 Ha atau 45,19 % dari luas wilayah KPHP, dengan perincian sebanyak \pm 96.060 Ha (36,11 %) berupa IUPHHK-HT aktif dan \pm 24.140 IUPHHK-HT Baru (akhir 2009). Selama tahun 2009, Kementerian Kehutanan telah merespon dua permohonan IUPHHK-HTI baru, yaitu IUPHHK-HTI a.n.

PT. Tunas Hutan Pratama dengan SK Nomor SK.673/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas yang disetujui ±10.130 Ha dan IUPHHK HTI a.n. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses (WLMS) dengan SK Nomor SK.484/MENHUT- II/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan luas yang disetujui ± 14.010 Ha.

Tabel 3.65. Daftar Pemegang IUPHHK-HTI di Kawasan Hutan LLM

No.	Pemegang ijin	SK Menhut	Luas Ijin (Ha)	Keterangan
1	PT.RimbaHutani Mas (RHM)	SK. Menhut No. SK.90/ Menhut-II/2007 tgl. 22 Maret 2007	Total:±67.100 Lalan:±55.150 Mrt : ± 11.980	IUPHHK-HTI Aktif
2	PT. Bumi Persada Permai (BPP)	SK Pembaharuan IUPHHK-HT Menhut No. SK.337/Menhut-II/2004; 7 september 2004	Total : ± 59.345 Mendis : ± 24.410 Selaro : ± 34.935	IUPHHK-HTI Aktif
3	PT.SumberHijau Permai (SHP)	SK Pembaharuan IUPHHK-HT MenhutSK.29/Menhut-II/2006 tgl. 13 Feb 2006	Total : Byg.Lencir: ± 30.040 LMM: 5.100	IUPHHK-HTI Aktif
4	PT. Wahana Lestari Makmur Sukses (WLMS)	No. 484/MENHUT-II/2009 Tgl. 19 Agustus 2009	Total : ± 14.010	IUPHHK-HTI Aktif Kab. Musi Banyuasin 4.000 Ha Kab. Banyuasin
5	PT. Tunas Hutan Pratama	No. 673/Menhut-II/2009 Tgl. 15 Oktober 2009	Total : Lalan : ± 10.130	26.040 Ha IUPHHK-HTI Baru
6	PT. Pakerin	SK. IUPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin No. 500/1168/IV/2002 3 Juni 2002	Total : ± 43.380 DiHP.Lalan±11.982	Proses pemindahan Hak
7	PT. Tiesco Cahaya Pertiwi	SK. IUPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin No. 500/1168/IV/2002 3 Juni 2002	4.800	IUPHHK-HTI Baru
8	PT.Rictym Mas Jaya		8.082	Dalam proses perizinan

Sumber : Dinas Kehutanan Musi Banyuasin, 2013 (diolah)

2) IUPHHK Hutan Alam dan Jasa Lingkungan

Selain dimanfaatkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, kawasan hutan Lalaln Mangsang Mendis juga dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan alam dalam bentuk IUPHHK-HA. sebanyak ± 56.000 Ha (21,06 %) atas nama PT. Bumi Pratama Usaha Jaya (BPUJ) dan IUPHHK-Restorasi sebagai fungsi penyimpanan carbon atas nama PT. Global Alam Lestari seluas 22.280ha.

3) Hutan Desa

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah mengalokasikan kawasan hutan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat yaitu permohonan penetapan Hutan Desa (HD) seluas \pm 17.200 Ha untuk Desa Muara Medak dan Desa Kepayang serta HTR seluas \pm 16.802 Ha ke Menteri Kehutanan. Pada awal tahun 2010 Kementerian Kehutanan telah menetapkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat No.522/1452/Kehut/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Hutan Desa Merang menjadi Lokasi HD dengan SK. Menteri Kehutanan No. 54/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan luas \pm 7.250 Ha. HD ini nantinya akan dikelola sesuai dengan ketentuan pemanfaatan yang berlaku umum oleh Lembaga Desa dengan pendampingan dari berbagai Lembaga Masyarakat dan lembaga lainnya yang tidak mengikat.

4) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Dalam rangka merealisasikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pada tahun 2009, Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan adanya HTR dengan nomor surat usulan Bupati Musi Banyuasin No. 522/3205/Kehut/2009 tanggal 31 Desember 2009 seluas 16.802 ha (kawasan kelola hutan Lalan Mangsang Mendis 9.278 ha). Data HD dan HTR dapat dilihat pada tabel 3.65.

Tabel 3.66. Daftar Jenis Pemanfaatan Hutan pada Blok Pemberdayaan

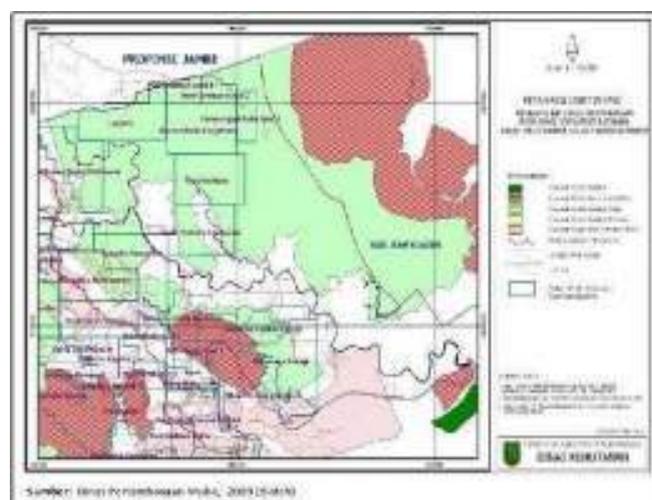
No	Jenis Pemanfaatan	Nama Lembaga Pengelola	Rekomendasi	SK Menuhut	Luas (Ha)	Keterangan
1	Hutan Desa	Hutan Desa Muara Marang		No.54/Menhut-II 2010 tgl 21 Januari 2010	7.250	
2	Hutan Desa	Hutan Desa Muara Medak	Usulan Bupati Musi Banyuasin No.522/2235/Kehut/2010 tgl 25 Januari 2010		4.248	Luas Usulan 10.900
3	Hutan Desa	Hutan Desa Kepahyang		No. 573/Menhut-II 2010 TGL 23 Agustus 2013	5.170	
4	Hutan Taman Rakyat	HTR	Usulan Bupati Musi Banyuasin No.522/3205/Kehut/ 2009 tgl 31 Desember 2009		9.279	Proses Perijinan

Sumber: Dinas Kehutanan Musi Banyuasin, 2014

b. Izin-Izin dan Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan wilayah hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dari keseluruhan wilayah hutan LMM terdapat beberapa kegiatan kehutanan antara lain: pertambangan minyak dan gas oleh JOB Pertamina Amerada HESS Jambi-Merang dan NV.

Penggunaan wilayah hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dari keseluruhan wilayah hutan LMM terdapat beberapa kegiatan yang bukan kegiatan kehutanan antara lain pertambangan minyak dan gas oleh JOB Pertamina Amerada HESS Jambi-Merang dan NV. Tately. Selain migas terdapat juga pertambangan batubara baik yang sudah produksi/exploitasi ataupun baru tahap eksplorasi dan penyelidikan umum. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009, diketahui bahwa pada kawasan HP Lalan dan HP. Mangsang Mendis telah diterbitkan ijin Bupati Musi Banyuasin dan Departemen ESDM untuk kegiatan Pertambangan Batubara, berupa ijin Penyelidikan Umum / eksplorasi dan eksploitasi (Tabel 3.66. dan Gambar 3.90).



Gambar 3.90. Peta Pemegang KP/IUP Pertambangan di Wilayah LMM
(sumber: BPKH Wil II Palembang, 2015)

Tabel 3.67. Pemegang KP/IUP di Kawasan Kelola Hutan LMM

No	Pemegang KP/IUP	Luas (ha)	Status Kegiatan
1	PT. Manggala Alam Lestari	4,550	Produksi
2	PT. Buana Bara Ekapratama	13,680	Eksplorasi
		4,974	Produksi
3	PT. Titan Prawira Sriwijaya	8,712	Eksplorasi
4	PT. Sumatera Sumber Energi A.	13,910	Eksplorasi
5	PT. Musi Banyuasin Tambang Batubara A.	13,450	Eksplorasi
6	PT. Putra Musi Banyuasin Coal	16,235.3	Eksplorasi
7	PT. Primaraya Energi	19,710	Eksplorasi
8	PT. Sumatera Resources	20,000	Eksplorasi
9	PT. Intiperdana Bumitirta	19,950	Penyelidikan Umum

10	PT. Lapindo Bumi Mineral	19.310	Penyelidikan Umum
11	PT. Multi Guna Energy	19.500	Penyelidikan Umum
12	PT. Nusa Indah Pratama	4.517	Eksplorasi
13	PT. Bumi Perdana Sempurna	18.290	Penyelidikan Umum
14	PT. Cahaya Indah Nusa Pratama	11.740	Eksplorasi
15	PT. Lapindo Bumi Mineral	19.310	Penyelidikan Umum
16	PT. Mentari Naluri Sejahtera	19.700	Penyelidikan Umum

Sumber : Dinas Pertambangan Musi Banyuasin, 2012 (diolah)

3. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Kelola Sendang Bagian Hilir, Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya

a. Ijin Pencadangan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan analisis spasial data di tingkat provinsi, ada wilayah di Kawasan Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang telah memiliki penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan. Saat ini ada 2 jenis perkebunan yang areal konsesinya sedikit masuk dalam kawasan hutan Lalan Sembilang, yaitu ijin usaha perkebunan (Tabel 3.67).

Tabel 3.68. Ijin Pemanfaatan Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang

Ijin					Luas (Ha)
No	Pemanfaatan	Pemegang Ijin	Surat	Investasi	
1	IUPHHK-HTI	PT. Tri Pupajaya	583/Menhut-	Kayu Serat	19.760,69
			II/2009 tanggal 2	(<i>Acacia Sp</i> dan <i>Eucalyptus Sp</i>)	
2	IUPHHK-HTI	PT. Sumber Hijau Permai	29/Menhut-	Kayu Serat	25.800,15
			II/2006 Tanggal	(<i>Acacia Sp</i> dan <i>Eucalyptus Sp</i>)	
			13 Februari 2006		

Sumber : Hasil Analisis Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2015

b. Ijin Pencadangan Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan Hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang tidak ada kegiatan penggunaan kawasan hutan.

B IV. ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN KENDALA KAWASAN KELOLA SENDANG

A. Isu Strategis dan Permasalahan Umum Kawasan Kelola Sendang

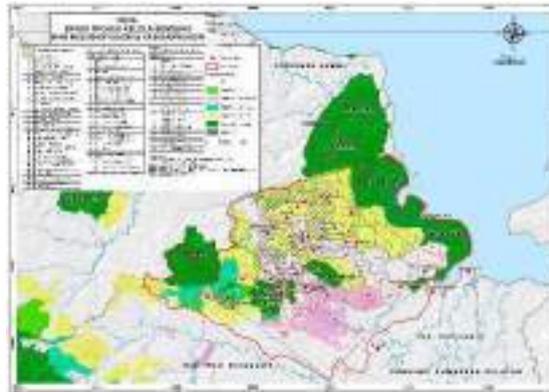
Kawasan Kelola Sendang atau Lanskap Sembilang Dangku merupakan lanskap multifungsi baik untuk fungsi penghidupan masyarakat, fungsi produksi dan juga fungsi konservasi. Fungsi konservasi di dalam lanskap ini direpresentasikan oleh keberadaan Taman Nasional Berbak Sembilang dan 2 Suaka Margasatwa (SM), SM Dangku dan SM Bentayan. Pada kawasan budidaya sebagian besar lahan pada lanskap Sembilang Dangku merupakan kawasan hutan produksi dan juga kawasan perkebunan. Selain itu terdapat beberapa wilayah pertambangan. Di luar itu merupakan lahan yang dikelola oleh masyarakat baik berupa ladang, kebun rakyat, persawahan dan juga kawasan/areal budidaya perikanan darat.

Sejumlah persoalan masih dirasakan oleh para pihak dalam mengembangkan perekonomian, konservasi atau menata kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar aktor atau parapihak yang menjalankan perannya pada lanskap Sembilang Dangku ini masih diwarnai sejumlah konflik. Produksi berbasis sumberdaya lahan masih diwarnai oleh persoalan rendahnya tingkat produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas langkah yang diambil baru sebatas perluasan area budidaya (ekstensifikasi). Disisi lain, komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat belum menghasilkan nilai tambah dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan/turunannya. Selain itu persoalan kebutuhan dasar seperti aksesibilitas, pemenuhan kebutuhan air bersih dan juga energi listrik masih menjadi persoalan di kawasan lanskap Sembilang Dangku ini.

Untuk membahas lebih lanjut tentang isu strategis dan permasalahan umum di Kawasan Kelola Sendang ini, akan ditunjukkan beberapa data spasial. Pada Gambar 4.1 ditampilkan Peta status lahan hutan Kawasan Kelola Sendang, dapat dilihat secara proporsional penentuan fungsi kawasan. Sedangkan pada Gambar 4.2 ditunjukkan peta batas Kawasan Kelola Sendang disertai dengan area konsesi pada masing-masing wilayah. Pada gambar terlihat penentuan area konsesi berdasarkan produk sasaran, meliputi area konsesi tanaman hutan, tanaman perkebunan dan konsesi untuk area pertambangan.



Gambar 4.1. Peta Peruntukan dan Status Hutan dalam Kawasan Kelola Sendang (sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2018)



Gambar 4.2. Peta Batasan Wilayah Berdasarkan Area Konsesi dalam Kawasan Kelola Sendang (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

Peta spasial pada Gambar 4.1 dan 4.2 untuk membantu dalam menjelaskan dan mendeskripsikan pembahasan berikut terkait dengan point dan isu yang berkembang di Kawasan Kelola Sendang.

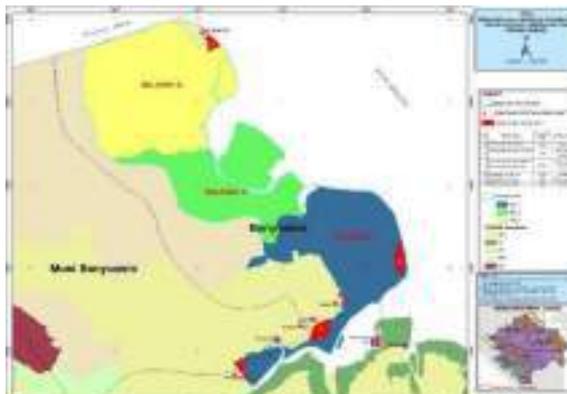
1. Konflik Pemanfaatan Lahan

Pada lanskap Sembilang Danguku ini banyak dijumpai kasus konflik pemanfaatan lahan. Konflik pemanfaatan lahan ini terjadi antara beberapa pemangku kepentingan. Berdasarkan pihak/pemangku kepentingan yang terlibat maka konflik pemanfaatan lahan ini dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Konflik masyarakat dengan perusahaan
- 2) Konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, misalnya dalam hal batas kepemilikan ataupun batas antar desa
- 3) Konflik antara perusahaan dengan perusahaan terkait dengan batas konsesi antar perusahaan
- 4) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya batas desa dengan batas kawasan hutan
- 5) Konflik antara perusahaan dengan pemerintah, misalnya konsesi perusahaan dengan kawasan hutan/kawasan konservasi

Wujud konflik pemanfaatan lahan yang paling mengemuka pada lanskap Sembilang Danguku adalah antara masyarakat dengan kawasan konservasi. Saat ini kawasan konservasi tersebut mengalami tekanan perambahan lahan yang cukup tinggi. Di Taman Nasional Berbak dan Sembilang SPTN Wilayah II terdapat perambahan kawasan oleh masyarakat. Pada Gambar 4.3 menunjukkan peta konflik lahan di Taman Nasional Sembilang menurut studi yang dilakukan pada tahun 2016.

Suaka Margasatwa Bentayan mempunyai persoalan yang cukup pelik karena sebagian besar kawasannya telah dirambah oleh masyarakat. Hingga tahun 2017 dilaporkan telah ada 1.449 KK yang merambah kawasan Bentayan. Suaka Margasatwa Bentayan juga mempunyai persoalan tumpang tindih lahan dengan PT London Sumatera seluas 31,615 ha. Selain SM Bentayan, SM Danguku juga mengalami konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat dan perusahaan



Gambar 4.3 Peta konflik lahan di Taman Nasional Sembilang
(sumber: PSU-PIU, 2018)

. Perambahan terjadi di 4 lokasi yaitu Sungai Napuh, Sungai Petai, Sungai Biduk, dan Rebon Jaro, sementara itu dalam hal *illegal logging* terdapat 6 sawmill yang beroperasi di sekitar kawasan yang diduga menggunakan bahan baku dari dalam kawasan. Tumpang tindih kawasan terjadi antara kawasan SM Dangku dan PT. BSS, PT MBI, PT. PSM PT BTS.



Gambar 4.4. Perambahan di kawasan Suaka Marga Satwa Dangku
(Sumber: PSU-PIU, 2018; Balai KSDA Sumatera Selatan, BPKH Wil II Palembang, 2015)

2. Pembalakan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin

Gangguan kawasan hutan berupa pembalakan liar (*Illegal logging*) dan pertambangan tanpa izin (*illegal minning*) masih terus terjadi di Kabupaten Banyuasin maupun Musi Banyuasin. Dari pemantauan yang dilakukan kegiatan pembalakan liar ini berlangsung di kawasan konservasi maupun hutan produksi.



Gambar 4.5 Alur jaringan illegal logging di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin
(Sumber: Rencana Operasi Gabungan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi TN Sembilang Kabupaten Banyuasin. 2016 dalam PSU-PIU, 2018)



Gambar 4.6 Rakit Log dan Tumpukan Kayu di Kawasan TN Sembilang
(Sumber: Rencana Operasi Gabungan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi TN Sembilang Kabupaten Banyuasin. 2016 dalam PSU-PIU, 2018)

Pembalakan liar juga berlangsung sangat intensif di kawasan Hutan Desa Muara Merang dan Desa Kepayang. Studi degradasi hutan yang dilakuan WBH Sumsel menunjukkan, Hutan Desa Kepayang yang luasnya enam ribu hektar dengan hutan kerapatan tinggi sebesar 29 persen pada 2010 turun drastis menjadi 12 persen pada 2013. Sedangkan hutan kerapatan sedangnya mengalami peningkatan dari 21 persen pada 2010, menjadi 32 persen pada 2013. Tidak hanya mengambil kayu secara illegal namun para pelaku ini juga kemudian melakukan perambahan kawasan dengan menjadikan kawasan hutan produksi sebagai perkebunan sawit.

Dilain pihak kasus *illegal minning* atau *illegal drilling* juga masih marak terjadi di Lanskap

Sembilang Dangku terutama pada pertambangan minyak bumi, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertambangan ilegal ini sudah terjadi turun temurun dimana masyarakat memanfaatkan sumur tua untuk ditambang lagi. Karena dilaksanakan tanpa ijin maka pengawasan sulit dilakukan sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan, selain itu juga membahayakan masyarakat karena dilakukan tanpa sistem keamanan yang memadai. Meskipun demikian kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat karena mampu memberikan sumber pendapatan bagi mereka.



Gambar 4.7 Pertambangan Minyak oleh Masyarakat di Desa Muara Medak
(Sumber : Dok. KELOLA Sendang dalam PSU-PIU, 2018)

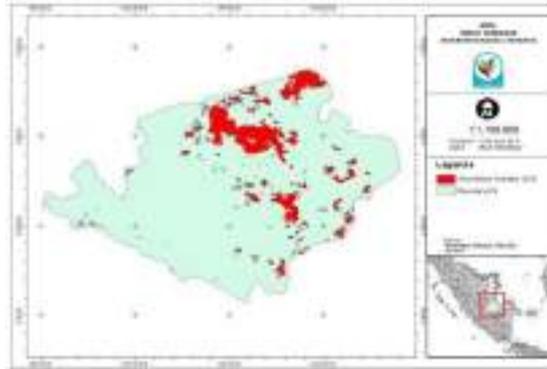
3. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang relatif tinggi. Secara teoritis kebakaran hutan dan lahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan ke dalam dua kategori yaitu faktor pemicu dan faktor pendukung. Di Sumatera Selatan faktor pemicu terjadinya kebakaran (penyulutan api) adalah:

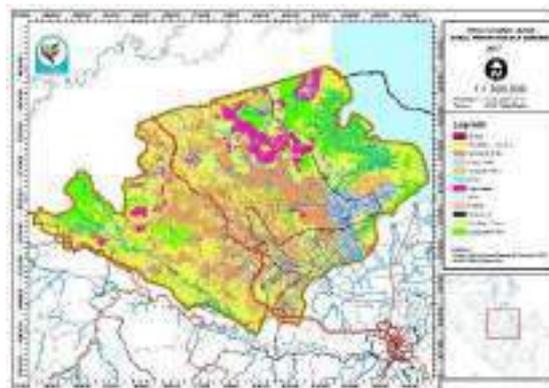
- a. Penyiapan Lahan
- b. Berburu, Mencari ikan, ekstraksi gelam
- c. Konflik lahan
- d. Kelalaian Manusia

Sementara itu faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim, kondisi fisik lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah membuat mereka menggunakan pembakaran sebagai teknik pembukaan lahan yang paling murah.

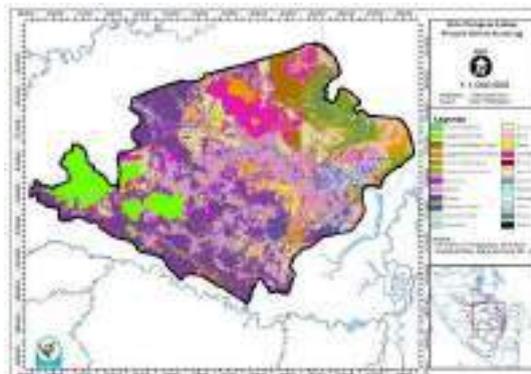
Pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 ditunjukkan data mengenai kondisi tutupan lahan pada dua tahun terakhir. Jika dicermati, diperlukan waktu relatif lama untuk memulihkan suatu ekosistem yang telah mengalami degradasi baik secara alami maupun yang disebabkan oleh intervensi manusia.



Gambar 4.8 Sebaran area kebakaran tahun 2015 pada lanskap Sembilang Dangkou
(sumber: PSU-PIU, 2018)



Gambar 4.9 Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tahun 2017 (sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2018)

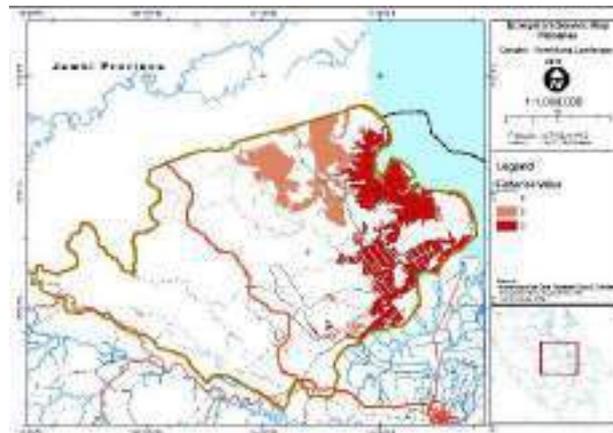


Gambar 4.10 Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Tahun 2018
(sumber: hasil olah data spasial ZSL, 2018)

4. Degradasi Ekosistem Sungai dan Rawa

Seperti diketahui kawasan Kelola Sendang termasuk dalam tipe ekosistem lahan basah (*low land*), salah satu penciri ekosistem lahan basah di kawasan ini adalah adanya ekosistem rawa dan sungai yang membentang hampir pada lebih dari sebagian Kawasan Kelola Sendang. Seiring dengan perubahan lahan dari hutan primer menjadi lahan perkebunan dan hutan tanaman yang terjadi secara masif, ekosistem rawa dan sungai menjadi terpengaruh kualitasnya.

Perkebunan dan hutan tanaman mensyaratkan perubahan bentuk alamiah permukaan lahan untuk mendukung kegiatan budidaya. Selain itu penggunaan pupuk kimia terjadi secara intensif sepanjang tahun dengan volume yang terus meningkat seiring dengan perluasan lahan perkebunan dan hutan tanaman. Penggunaan pupuk kimia ini akan mempengaruhi kualitas perairan yang berupa sungai ataupun rawa karena tidak semua akan diserap tanaman. Sebagian bahan kimia tersebut larut bersama proses aliran permukaan dan terakumulasi di sungai ataupun rawa. Vegetasi di sekitar sungai atau rawa juga mengalami degradasi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Dampak terjadinya degradasi ekosistem sungai dan area perairan di Kawasan Kelola Sendang akan berimbas langsung pada produksi hasil perikanan sebagai salah satu mata pencaharian dan sumber income utama bagi masyarakat yang berada di wilayah perairan. Khususnya untuk sebagai masyarakat yang menetap di bagian hilir kawasan Kelola Sendang atau wilayah kawasan hutan Lalan Sembilang yang dominan berada di wilayah ekosistem perairan. Pada Gambar 4.11 tersaji Peta kawasan perikanan dengan potensi sumberdaya perikanan di kawasan hilir Kelola Sendang.

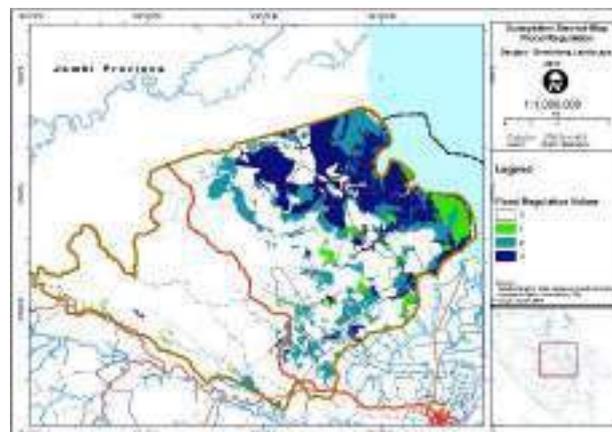


Gambar 4.11 Peta Kawasan Perikanan Kelola Sendang
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

Pada Gambar 4.12 dan 4.13 ditunjukkan Peta Layanan Ekosistem Kelola Sendang dalam pengaturan suplai air dan pengaturan dataran banjir. Terlihat bahwa kawasan Kelola Sendang Hilir memiliki kecenderungan sebagai kawasan ekosistem lahan basah yang terendam air terutama sebagai dampak dari dinamika pasang surut muka air laut. Dengan kata lain kawasan Kelola Sendang bagian hilir lebih memiliki akses terhadap pengaruh atau efek pasang surut muka air laut. Kondisi ini akan membentuk pola kecenderungan akan pentingnya fungsi ekosistem hilir sebagai area tangkapan air (*catchman area*).



Gambar 4.12. Peta Layanan Ekosistem Supply Air pada Kawasan Kelola Sendang (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)



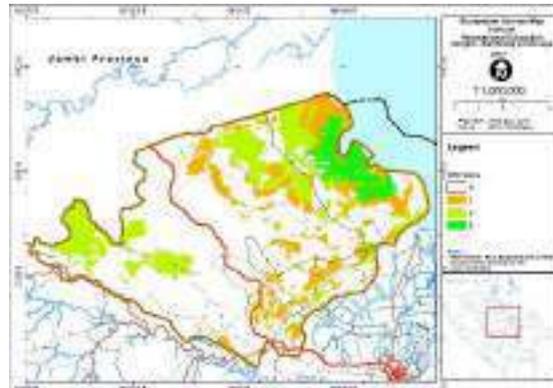
Gambar 4.13. Peta Layanan Ekosistem Pengaturan Dataran Banjir pada Kawasan Kelola Sendang (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

5. Konflik Antara Manusia dan Satwa

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan budidaya baik oleh masyarakat maupun perusahaan mempunyai konsekuensi semakin menyempitnya habitat fauna atau satwa liar. Lanskap Sembilang Dangku secara alamiah merupakan habitat beberapa satwa langka yang dilindungi seperti harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*) dan lain sebagainya. Satwa-satwa tersebut mengalami tekanan yang hebat sebagai akibat rusaknya habitat mereka. Selain itu perburuan hewan liar yang masih sering terjadi juga mengancam keberadaan satwa-satwa langka tersebut.

Akibat dari kerusakan habitat dan perburuan, sering terjadi konflik antara manusia dan satwa. Kejadian berupa bermukimnya manusia di habitat satwa liar, maupun masuknya satwa liar ke area pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi tak terhindarkan dan menimbulkan konflik. Pada Gambar 4.14 ditunjukkan Peta Batas Kawasan Lindung Taman Nasional Sembilang dalam wilayah Kelola Sendang. Sebagai suatu kawasan lindung dan telah ditetapkan sebagai cagar

biosphere dunia, TN Sembilang memiliki fungsi selain sebagai kawasan konservasi juga merupakan suatu bentang ekosistem yang dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, pengembangan nilai-nilai hayati, sosial dan budaya serta sebagai salah satu *area ecotourism*. Pada Peta terlihat bagaimana Lanskap Kelola Sembilang dalam mendukung fungsi suatu ekosistem, antaranya adalah fungsi sebagai zona pendidikan dan *ecotourism*.



Gambar 4.14. Peta Layanan Ekosistem Area Pendidikan dan Ecotourism pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Pendidikan dan Ecotourism (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

6. Produktivitas Pertanian Rendah

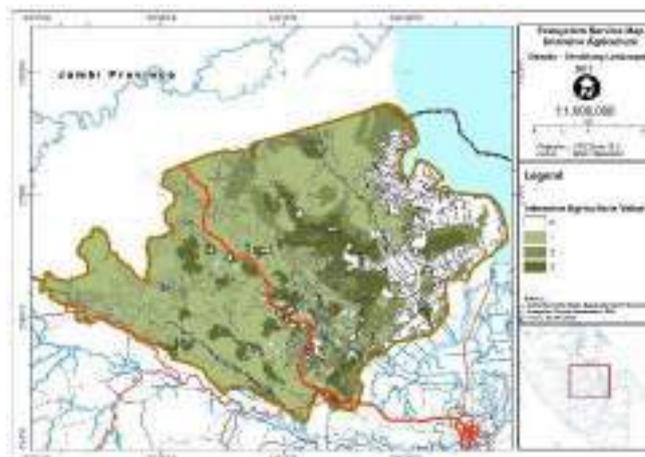
Rendahnya nilai produktivitas beberapa komoditi pertanian dan juga perkebunan yang ada di lanskap Sembilang Dangku menunjukkan bahwa kegiatan budidaya pertanian di lanskap ini belum terjadi secara optimal. Akibatnya adalah untuk menghasilkan volume produksi yang diharapkan masih dilakukan dengan cara ekstensifikasi, membuka lahan baru, dan pada ujungnya dapat mengancam keberadaan kawasan atau lahan non budidaya (kawasan lindung). Berdasarkan data statistik yang ada, komoditi utama yaitu sawit mempunyai angka produksi hanya pada kisaran 10 -15 ton per ha, sementara potensinya hingga pada angka 30 ton/ha. Permasalahan rendahnya produksi perkebunan kelapa sawit rakyat adalah belum diterapkannya teknologi secara tepat mulai dari penggunaan bibit unggul, teknologi budidaya dan panen/pasca panen. Penggunaan bibit asalan akan berdampak dalam jangka panjang yakni produksi yang rendah. Selain itu dalam budidaya, petani pada umumnya hanya menerapkan teknologi sederhana yang diketahui secara tidak langsung dari petani lainnya sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Produksi perikanan darat juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013 produksi perikanan darat mencapai kisaran 25.000 ton pada tahun 2013 dan turun drastis pada angka sekitar 5000 ton pada tahun 2016.

Produksi pada sawah/ lebak cenderung naik, namun padi ladang mengalami penurunan. Sedangkan tingkat produksi ternak masih sangat minim. Dengan luasan area pedesaan yang mencapai hampir 1,6 juta ha populasi hewan ternak di lanskap Sendang sangatlah minim. Tercatat bahwa rata-rata populasi sapi yang ada adalah sekitar 6500 ekor (0,004 ekor/ha) dan

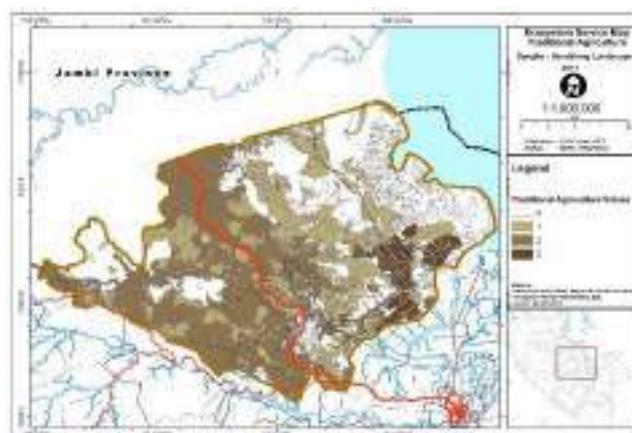
domba sekitar 5000 ekor (0,003 ekor/ha).

Terkait dengan asumsi tentang empat hal, yaitu: 1) produktivitas pertanian rendah, 2) rendahnya nilai tambah komoditi, 3) dinamika harga komoditi yang sangat fluktuatif serta 4) rendahnya variasi produk pertanian maka disajikan data spasial seperti yang tersaji pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. Berdasarkan peta dapat dideskripsikan bahwa Kawasan Kelola Sendang dipandang sebagai suatu ekosistem memiliki fungsi layanan (*ecosystem service*) dalam mendukung kegiatan intensifikasi pertanian dan pertanian tradisional. Pada Gambar 4.15 menunjukkan masih lemahnya kegiatan intensifikasi pertanian, upaya intensifikasi pertanian hanya dilakukan pada area tertentu di bagian tengah kawasan Kelola Sendang.



Gambar 4.15. Peta Layanan Ekosistem Intensifikasi Pertanian Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Intensifikasi Pertanian
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

Namun pada sebagai wilayah Kelola Sendang Khususnya di bagian Hulu atau sebagian wilayah Kelola Hutan Meranti, Sako Suban, serta sebagian wilayah Tengah: Medak dan Mendis kegiatan pertanian tradisional lebih mendominasi untuk menopang pola kehidupan mereka. Masyarakat lebih memiliki peluang untuk mengembangkan nilai kecakapan hidup (*life skill*) untuk mengembangkan pola-pola pertanian tradisional.



Gambar 4.16. Peta Layanan Ekosistem Area Pertanian Tradisional pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Area Pertanian Tradisional
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

7. Nilai Tambah Komoditi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Rendah

Lanskap Sembilang Dangku dapat dikatakan sebagai kawasan pedesaan (*rural area*) dengan berbagai hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan juga perikanan. Ekonomi masyarakat ditopang dan berkembang dari proses produksi beberapa komoditi dari sektor-sektor diatas. Namun hingga saat ini yang berkembang baru pada produksi bahan mentah saja belum ada proses penciptaan nilai tambah yang berarti. Upaya untuk mengembangkan industri kecil pengolahan makanan dan juga kerajinan telah dirintis oleh Kabupaten Musi Banyuasin maupun Kabupaten Banyuasin namun belum menghasilkan jumlah produk olahan yang cukup banyak jumlahnya. Padahal tersedia berbagai potensi bahan baku yang di lanskap Sembilang Dangku ini, beberapa diantaranya adalah:

1. Pengolahan hasil perikanan
2. Pengolahan kelapa
3. Pengolahan karet
4. Pengolahan gambir

8. Fluktuasi Harga Komoditi Utama

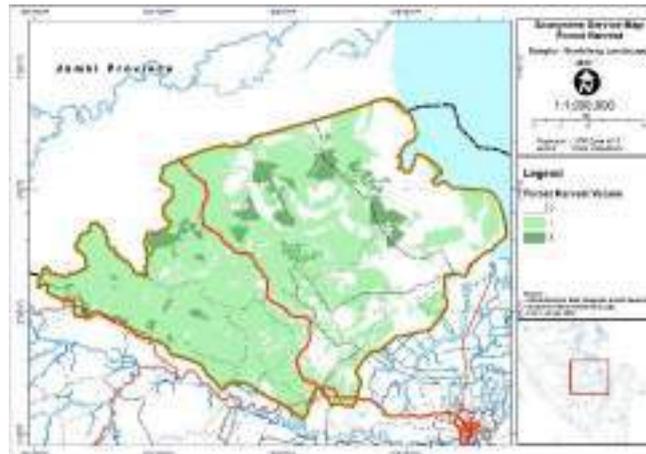
Sawit dan karet merupakan komoditi yang sangat rentan terhadap situasi perekonomian global. Harga kedua komoditi ini dipengaruhi oleh permintaan global dan juga nilai tukar rupiah. Harga karet dan sawit dunia yang sangat fluktuatif akan berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi para petani penghasil kedua komoditi utama tersebut.

Harga karet di pertengahan tahun 2018 bila dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir termasuk di harga yang rendah (51% dari harga tertinggi). Komoditi sawit juga mengalami fenomena yang hampir sama , di pertengahan tahun 2018 bila dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir termasuk di harga yang rendah juga yaitu (51% dari harga tertinggi). Jika harga berada pada titik terendah petani akan membiarkan saja tanaman karet ini tanpa perawatan ataupun penyadapan. Oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah antisipasi/mitigasi terhadap fenomena ini.

9. Rendahnya Variasi Produk Pertanian

Isu ini sebenarnya masih terkait dengan isu fluktuasi harga komoditi utama. Pada umumnya petani-petani di Lanskap Sendang bergantung hanya pada kedua atau salah satu komoditi diatas (karet dan sawit). Hal ini menyebabkan secara ekonomi petani juga sangat rentan terhadap fenomena ini. Penambahan variasi komoditi atau pengembangan sistem dan pola wanatani akan mengurangi resiko ini.

Terkait dengan pernyataan ketiga point di atas, yaitu: 1)rendahnya nilai tambah komoditi, 2) dinamika harga komoditi yang sangat fluktuatif, serta 3) rendahnya variasi produk pertanian maka disajikan data spasial seperti yang tersaji pada Gambar 4.17 tentang Peta Layanan Ekosistem untuk Mengidentifikasi Hasil Hutan.



Gambar 4.17. Peta Layanan Ekosistem Area Hasil Hutan pada Kawasan Kelola Sendang Fungsinya Mengidentifikasi Kawasan Hasil Hutan
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

Seperti telah disampaikan di awal bahwa hasil hutan dibedakan menjadi hasil hutan kayu dan non kayu. Berdasarkan analisis peta dapat dideskripsikan bahwa area yang mampu mensuplai dan menyediakan hasil hutan signifikan dengan akses layanan transportasi di kawasan Kelola Sendang Bagian Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Jika dikaji lebih lanjut, pada kawasan Kelola Sendang yang sebagian termasuk di wilayah kelola hutan lalan Mangsang Mendis ini pengelolaan hasil hutan relatif lebih produktif. Kawasan konsesi di daerah ini memiliki target produksi lebih tinggi selain didukung daya dukung alam, daya dukung sosial dan kelembagaan.

10. Tingkat Kemiskinan Yang Masih tinggi

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu pada angka 17,27% pada tahun 2016 diatas angka provinsi (13,2%) dan nasional (10,86 %). Sementara di Kabupaten Banyuasin tingkat kemiskinannya lebih rendah yaitu pada angka 11,72% pada tahun yang sama.

Tingkat kemiskinan ini apabila dikaitkan dengan corak kehidupan agraris di Lanskap Sembilang Dangku, dapat tercermin dari Nilai Tukar Petani. Nilai tukar petani secara umum di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2017 adalah 96,4158 . Nilai Tukar Petani dibawah 100 ini menggambarkan bahwa kenaikan harga konsumsi lebih besar daripada kenaikan harga produksi petani.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 untuk Kabupaten Musi Banyuasin 66,45 dan Kabupaten Banyuasin 65,01. Angka tersebut di bawah angka nasional maupun provinsi. Di tahun yang sama IPM Indonesia 70,18 sedangkan IPM Provinsi Sumatera Selatan 68,2459. Secara khusus IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 variabel pokok. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita riil.

11. Tingkat Pendidikan Masih Rendah

Tingginya angka kemiskinan di kedua kabupaten berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan. Sebagai gambaran, angka partisipasi murni tingkat SMA dan sederajat di kedua kabupaten pada tahun 2017 berkisar pada angka 50%. Dengan demikian sekitar 50% anak berusia sekolah SMA dan sederajat tidak bersekolah, sehingga beresiko mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya.

12. Akses Sumberdaya Lahan Masyarakat

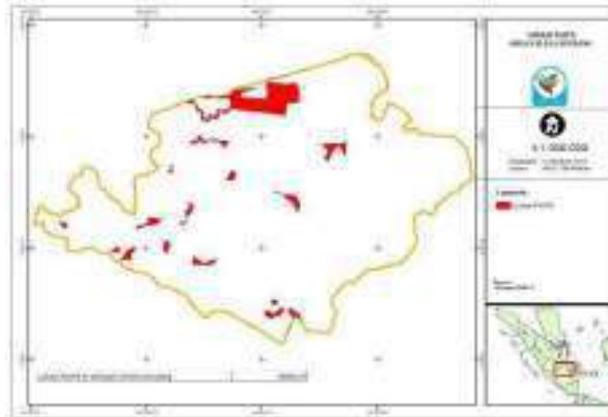
Kawasan hutan adalah areal yang ditetapkan oleh negara untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan baik sebagai fungsi konservasi, lindung, maupun produksi. Yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa di dalam hutan negara terdapat masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Sebagian besar desa-desa Lanskap Sembilang Dangku berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Seringkali masyarakat mengalami hambatan untuk mengakses lahan hutan karena terganjal peraturan legal dan formal perijinan pemanfaatannya. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat untuk mengakses lahan hutan meskipun tidak memiliki izin formal yang disyaratkan.

Dari data survei rumah tangga disekitar kawasan hutan 2014, didapatkan data bahwa di Sumatera Selatan 64,4% masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan negara yang memanfaatkan lahan hutan tidak memiliki izin. Untuk itu dibutuhkan mekanisme untuk mendorong kebijakan dan program yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan hutan negara secara proporsional dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan.

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan Program Perhutanan Sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Hal ini meningkatkan peluang masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan secara legal. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan **Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS)**. Berikut PIAPS di dalam area Lanskap Sembilang Dangku. Selain itu, pada Lanskap Sembilang Dangku juga tinggal komunitas Wong Kubu. Wong Kubu adalah komunitas lokal di Sumatera Selatan dan Jambi yang hidup di dalam dan dari sumberdaya hutan tropis, beberapa pihak menyebut mereka sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kehidupannya sangat tergantung dari sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka. Perikehidupan mereka sangat sederhana, di mata Wong Kubu, hutan adalah segala-galanya; hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Di hutan mereka mencari madu, rotan, jernang dan hasil hutan lainnya.

Di Sumatera Selatan Wong Kubu tersebar mulai dari Sungai Lalan, Batanghari Leko dan Rawas dan terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu Kubu Lalan, Kubu Tungkal, Kubu Bayat dan Kubu Rawas. Masyarakat adat seperti Wong Kubu seringkali terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan termasuk hak untuk mengakses lahan hutan sebagai sumber penghidupan dan kultur mereka. Berkurangnya luasan lahan hutan alam akibat kegiatan logging dan konversi

menjadi areal perkebunan mengasingkan mereka dari ruang hidup alamiahnya. Aktivitas pemenuhan penghidupan mereka dianggap illegal karena ruang hidup mereka menjadi areal-areal konsesi perkebunan, tambang, dan hutan tanaman. Dibutuhkan dorongan kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan kultural yang dipadukan dengan perspektif hak hidup layak untuk menjamin keberadaan mereka dimasa datang.



Gambar 4.18. Lokasi PIAPS di Area Lanskap Sembilang Dangku
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

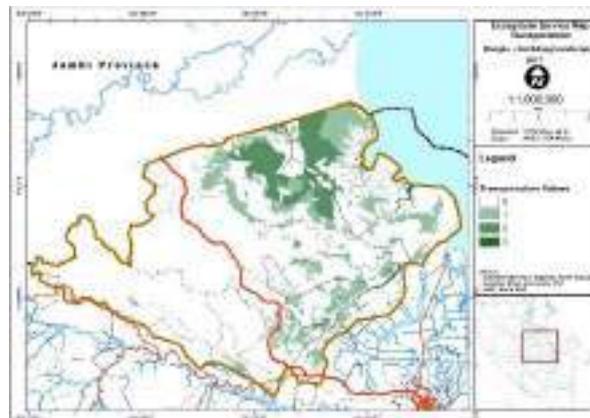
13. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin keberlangsungan penghidupan warga negara. Terdapat 2 jenis infrastruktur berdasarkan fungsi utamanya yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur dasar. Infrastruktur ekonomi yaitu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi. Infrastruktur dasar merupakan fasilitas-fasilitas utama yang menopang penghidupan masyarakat seperti air bersih, jalan arteri desa, listrik, sanitasi lingkungan; dimana hal-hal tersebut diprioritaskan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pada konteks Lanskap Sembilang Dangku, kebutuhan infrastruktur dasar yang dianggap prioritas untuk dipenuhi berupa jaringan jalan, air bersih, dan listrik. Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin terbilang cukup memprihatinkan, 34,86 % jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat, sedangkan pada Kabupaten Musi Banyuasin untuk jalan rusak dan rusak berat sejumlah 42,83%. Angka tersebut baru memperhitungkan fasilitas infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten; belum memperhitungkan jalan-jalan arteri desa yang menghubungkan antar desa dan kota.

Layanan air bersih juga masih menjadi sebuah permasalahan di Lanskap dimana hampir sebagian besar desa yang ada didalamnya belum memiliki layanan air bersih yang memadai terutama bagi areal-areal yang merupakan kawasan gambut. Pengembangan teknologi dan kelembagaan layanan air bersih merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi mengingat air bersih merupakan prasyarat utama kehidupan. Begitu juga terkait layanan elektrifikasi dimana sebagian besar desa di Lanskap belum terlayani fasilitas listrik secara memadai.

Untuk lebih memperjelas deskripsi tentang akses fasilitas dan akses transportasi di kawasan Kelola Sendang pada Gambar 4.19 ditunjukkan fungsi ekosistem Kawasan Kelola Sembilang. Bahwa Ekosistem lanskap Kelola Sendang merupakan wilayah tempat berlangsungnya proses aktivitas interaksi dan mobilitas yang terintegrasi dalam sistem transportasi semua komponen dalam kawasan. Pada Gambar ditunjukkan bahwa ada kecenderungan dinamika proses transportasi lebih ke arah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi. Atau dengan kata lain akses layanan transportasi cenderung lebih aktif di Kawasan Kelola Sendang Tengah wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kecenderungan ini, antara lain lebih terbukanya akses ke wilayah ini, beberapa komoditi utama banyak dihasilkan dari kawasan Kelola Sendang Tengah wilayah hutan Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya serta sebagian kawasan Hilir Lalan Sembilang sekitarnya.



Gambar 4.19. Peta Layanan Ekosistem Transportasi di Kawasan Kelola Sendang Fungsinya dalam Mengidentifikasi Akses Transportasi
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

B. Isu Strategis dan Permasalahan Kawasan Kelola Sendang Berdasarkan Batasan Wilayah (Hulu, Tengah dan Hilir DAS Musi)

Beberapa permasalahan yang muncul merupakan gangguan, tantangan dan kendala dalam pengelolaan Kawasan Kelola Sendang.

1. Pada Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya

a. Deforestasi dan Degradasi Lahan

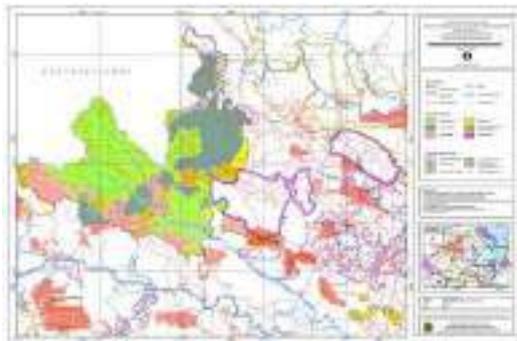
Deforestasi di areal Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola hutan Meranti cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kawasan hutan yang terjadi selama ini. Degradasi lahan di dalam kawasan ini juga menjadi ancaman serius terhadap lingkungan yang penting. Perubahan tutupan lahan dari berhutan menjadi non hutan cukup banyak terjadi (Tabel 4.1).

Pada Gambar 4.20 ditunjukkan gambaran secara spasial pola tutupan lahan kawasan kelola sendang hulu wilayah kelola hutan Meranti, sedang pada Gambar 4.21 pola tutupan lahan pada wilayah tertentu di kawasan kelola sendang hulu wilayah kelola hutan Meranti.

Tabel 4.1. Deforestasi dan Degradasi Lahan yang Terjadi di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti (Tahun 2000 – 2011)

oNo	Penutupan Lahan	
	2000	2011
1	Tanah Terbuka	Perkebunan
2	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Perkebunan
3	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Tanah Terbuka
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak Belukar
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	Tanah Terbuka
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
7	Hutan Tanaman	Semak Belukar
8	Semak Belukar	Perkebunan
9	Semak Belukar	Tanah Terbuka
10	Semak Belukar	Perkebunan
11	Tanah Terbuka	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
12	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Perkebunan

Sumber: Hasil Analisis Spasial (2013) BPKH Wil II Palembang, 2015



Gambar 4.20 Peta Tutupan Lahan Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti (Sumber: BPKH, 2015)



Gambar 4.21. Peta Tutupan Lahan Pada Wilayah Tertentu Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti (Sumber: BPKH, 2015)

Hasil interpretasi citra di kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah yang dilakukan oleh BPKH Wilayah II Palembang tahun 2011 menyebutkan lahan seluas 7.590,751 ha perlu direhabilitasi. Sementara hasil penafsiran terhadap citra Landsat tahun 2013 menyebutkan

bahwa sekitar 7.999,15 ha perlu direhabilitasi dan berdasarkan RTkRHL BPDAS MUSI tahun 2011 menyebutkan sekitar 3.329 ha lahan pada kawasan ini perlu direhabilitasi. Hasil studi secara spesifik di kawasan Hutan Lindung dalam wilayah kelola hutan Meranti menunjukkan hasil bahwa sebagian besar merupakan semak belukar. Hasil studi terkait dengan penutupan lahan di kawasan Hutan Lindung Meranti Sungai Merah (Kadembah) menunjukkan bahwa tegakan hutan alam yang ada telah terdegradasi. Penutupan lahan didominasi oleh semak belukar, tanaman karet dan padang alang-alang.

b. Lahan Kritis

Ancaman lainnya yang perlu mendapat perhatian di areal ini adalah luas, sebaran, dan tingkat kekritisannya. Terhadap areal yang diklasifikasikan sebagai lahan sangat kritis dan kritis maka diperlukan adanya pengutamakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi. Secara keseluruhan, lahan dengan klasifikasi sangat kritis seluas 5.872,89 ha (2,41%). Wilayah ini tersebar pada Blok Pemanfaatan HHK-HA (RE) seluas 277,16 ha atau 0,11%, Blok HP Pemanfaatan HHK-HT (5.019,50 ha atau 2,06%), Blok HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu) seluas 228,04 ha atau 0,09%, dan HP-Perlindungan (349,19 ha atau 0,14%). Sedangkan lahan dengan klasifikasi kritis berjumlah 11.294,03 ha (4,63%). Lahan kritis ini terdapat di Blok HL-Pemanfaatan (Wilayah Tertentu) seluas 90,17 ha atau 0,04%, dan Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT seluas 7.904,38 ha atau 3,24%, Blok HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu) seluas 2.549,60 ha atau 1,04%, dan HP-Perlindungan (749,88 ha atau 0,31%). (Tabel 4.2)

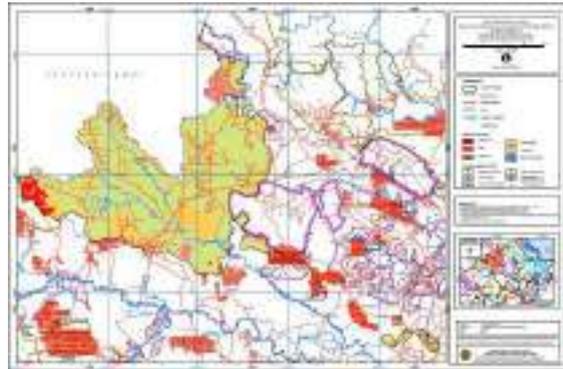
Tabel 4.2. Tingkat Kekritisannya Lahan di Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti sekitarnya.

Tingkat Kekritisannya Lahan	Luas	
	Ha	(%)
Agak Kritis	1361,47	0,56
Kritis	11294,03	4,63
Potensial Kritis	27094,57	11,10
Sangat Kritis	5872,89	2,41
Tidak Kritis	198539,36	81,31
Jumlah	244162,33	100,00

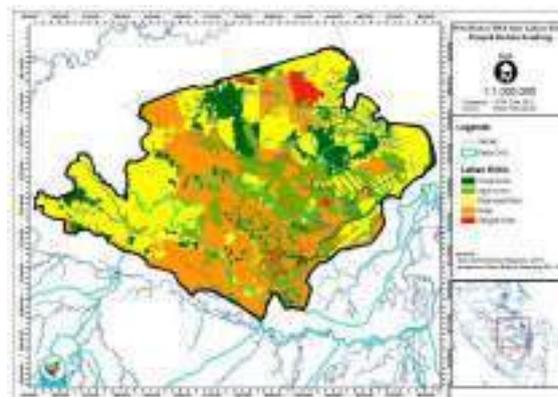
Sumber: Hasil analisis spasial (BPKH Wil II, 2015)

Gambaran mengenai Peta lahan kritis di kawasan Kelola Sendang Hulu wilayah kelola hutan Meranti ditahun 2014 disajikan secara spasial pada Gambar 4.22. Pada gambar peta terlihat kondisi kawasan dominan berada pada kondisi tidak kritis dan potensial kritis. Pada zona tertentu Sako Suban dan Perbatasan Lubuk Bintialo dalam kondisi sangat kritis dan kritis.

Sedangkan data mengenai kondisi tingkat kekritisannya lahan di Kawasan Kelola Sendang pada tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Gambar 4.23 ditunjukkan tentang Peta Lahan Kritis pada Kawasan kelola Sendang tahun 2018. Tingkat kecenderungan lahan kritis secara berurutan ada dalam tiga level: 1) kritis, 2) potensial kritis, agak kritis, tidak kritis dan sangat kritis.



Gambar 4.22. Peta Lahan Kritis Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti
(sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)



Gambar 4.23. Peta Lahan Kritis Kawasan Kelola Sendang Wilayah Hulu, Tengah dan Hilir
Wilayah DAS Musi (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

c. Kerawanan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran lahan dan hutan menjadi salah satu gangguan serius dalam kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu, di kawasan kelola hutan produksi Meranti yang meliputi area Sako Suban, Lubuk Bintialo, Pangkalan Bulian, Berlian Jaya, Simpang Tungkal dan Peninggalan. Terdapat beberapa bagian wilayah yang telah diberikan izin untuk melakukan pengusahaan hutan tetapi belum melakukan aktifitas di lapangan. Kondisi ini menyebabkan sistem pengawasan perusahaan belum dilakukan dan menyebabkan tidak adanya kontrol terhadap penggunaan api liar oleh pihak lain serta terbukanya akses akibat tidak adanya pengawasan pada areal tersebut. Selain kegiatan pemanfaatan hutan belum berjalan optimal, penggunaan kawasan hutan untuk tujuan non kehutanan seperti eksplorasi serta eksploitasi gas dan batubara juga berdampak pada peningkatan potensi kerawanan kebakaran lahan dan hutan. Meningkatnya penggunaan akses di dalam kawasan Kelola Sendang bagian hulu ini (kawasan kelola hutan Meranti) untuk kepentingan penambangan ini perlu dimonitoring dengan lebih baik.

Kebakaran lahan dan hutan dapat menghabiskan sumberdaya alam di dalam hutan, maka pencegahan kebakaran lahan dan hutan menjadi sangat penting. Resiko terjadinya kebakaran

lahan dan hutan dapat dicermati dari Peta Kerawanan Kebakaran Lahan dan Hutan yang telah disusun sebelumnya oleh *South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP)* tahun 2007 (Gambar 4.24).

d. Perambahan Hutan dan Lahan

Perambahan hutan dan lahan di wilayah ini menjadi isu yang sangat penting. Perambahan hutan dan lahan umumnya dilakukan untuk kegiatan berkebun atau bertani. Sebagian areal juga dibuka (open acces) untuk wilayah pemukiman penduduk. Perambahan hutan dan lahan umumnya dilakukan oleh masyarakat pada kawasan yang berfungsi sebagai hutan produksi maupun hutan lindung. Hasil Inventarisasi Dinas Kehutanan Kab.Musi Banyuasin sampai pada bulan April-Juni 2014 menjumpai adanya masyarakat yang telah mengelola Hutan Lindung Meranti Sungai Jernih (Tabel 4.3).

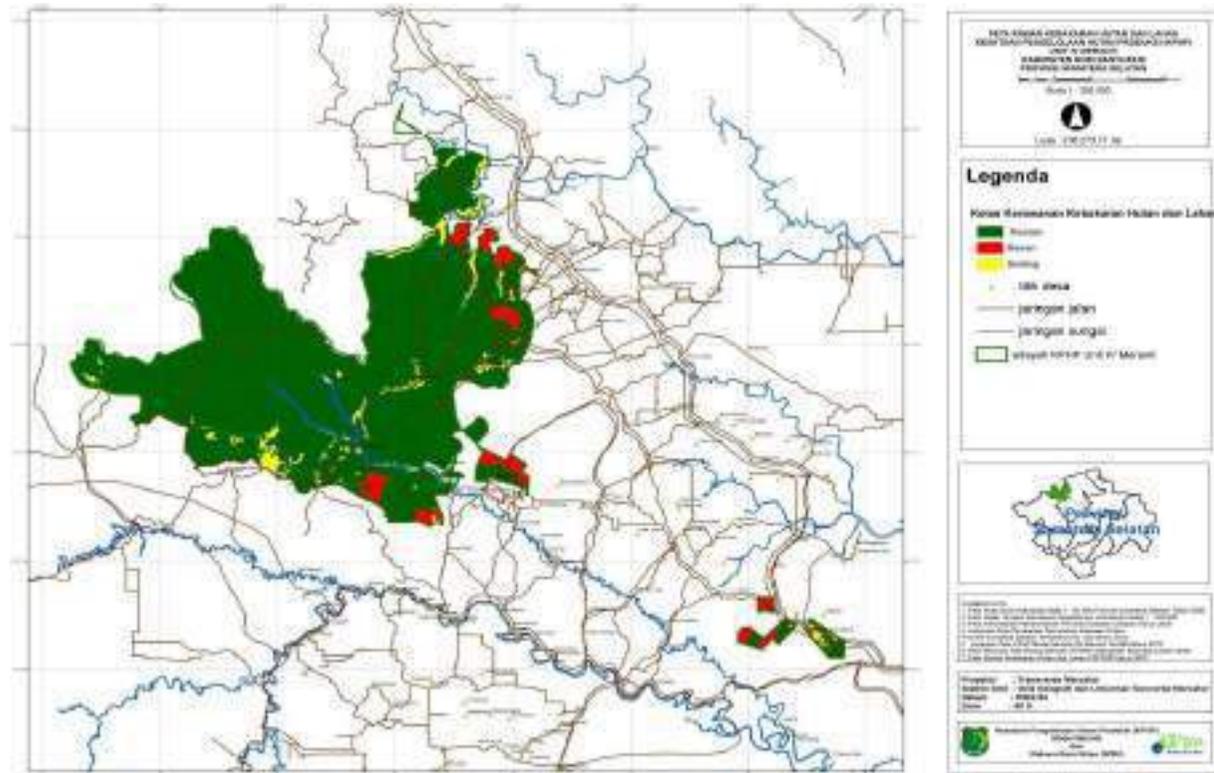
Tabel 4.3. Kasus Perambahan Hutan oleh Masyarakat di Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti

No	Lokasi	Tanaman		Jml Jiwa	Tahun Mengelola	Asal Penduduk (Jiwa)	
		Karet (Ha)	Sawit (Ha)				
1	HL Meranti Sungai Jernih	227	0	108	2005	Mura	17
2	HL Meranti Sungai Jernih	0	4	1	2000	Jawa	55
3	HL Meranti Sungai Jernih	497	0	158	2011 s.d-2013	Babat Toman	2
4	HL Meranti Sungai Jernih	0	4	1	2008	Batanghari Leko	160
						Sekayu	2
						Lahat	2
						OKU	1
						Sul-Sel	21
						Pagar Alam	1
						Bayung Lencir	6
Jumlah		724	8	267	-	-	267

Sumber: Hasil Inventarisasi Dishut Muba, 2014

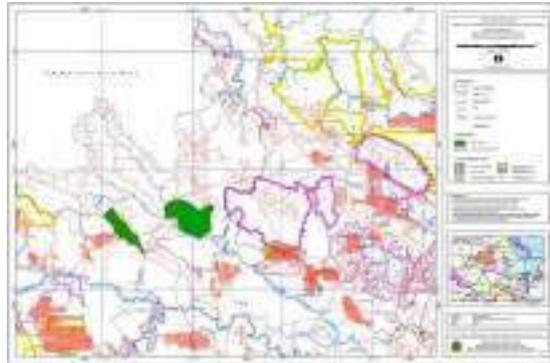
Berdasarkan analisis data dan informasi, diketahui juga adanya sebaran pemukiman yang berada di dalam kawasan kelola hutan Meranti ini seluas 174,81 ha.

Pemukiman tersebut berada di Blok HL-Pemanfaatan seluas 3,06 ha, Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT seluas 34,75 ha, dan Blok HP-Pemberdayaan (Wilayah Tertentu) 136,99 ha. Apabila dilihat dari status lahan maka pemukiman ini tersebar pada beberapa perusahaan konsesi, wilayah moratorium, dan wilayah yang belum dibebani izin (Tabel 4.4).



Gambar 4.24. Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Lahan dan Hutan Kawasan Kelola Sendang Hulu, Wilayah Kelola Hutan Meranti: Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya.
(sumber: BPKH WIL II , 2015)

Pada Gambar 4.25 tersaji Peta Moratorium beberapa areal dalam Kawasan Kelola Hutan Produksi Meranti, dari peta tersebut dapat diperoleh gambaran tentang status beberapa areal dalam kawasan.



Gambar 4.25 Peta Moratorium Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (Sumber: BPKH Wil.II, 2015)

e. Pembalakan Liar

Tumpang tindih izin pemanfaatan kawasan hutan di dalam kawasan ini juga terjadi oleh pihak perusahaan perkebunan sawit. Pada beberapa kasus, kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan luasan dan status kawasan dari berbagai pihak terkait yang memiliki kepentingan dan mengeluarkan perizinan pengolahan/pengusahaan hutan dan lahan pada lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tumpang tindih paling banyak terjadi di Blok HP-Pemberdayaan (wilayah tertentu) (3.494,24 ha atau 60,34%) dan Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT (2.178,33 ha atau 37,62%) (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Lokasi Tumpang Tindih Areal Perkebunan di dalam Wilayah Meranti

No	Nama Kebun Berdasarkan Blok	Nama Ijin	Luas	
			(ha)	(%)
	HL_Pemanfaatan			
1	Pelangi Inti Pertiwi	Moratorium	46,59	0,80
	HP_Pemanfaatan IUPHHK-HT			
2	Berkat Sawit Sejati	PT.Bumi Persada Permai	843,00	14,56
3	Berkat Sawit Sejati	PT.Pakerin	245,64	4,24
4	Bumi Serasan Sawit Brkh.	PT. Rimba Hutani Mas	3,78	0,07
5	Bumi Serasan Sawit Brkh.	PT.Pakerin	47,66	0,82
6	Dwi Resa Usaha-Bth Lk	PT.Sentosa Bahagia Bersama	34,83	0,60
7	Mitra Ogan-2	PT.Pakerin	28,61	0,49
8	Mitra Ogan-2	PT.Sentosa Bahagia Bersama	26,63	0,46
9	Mitra Ogan-3	PT.Pakerin	6,56	0,11
10	Pelangi Inti Pertiwi	PT.Pakerin	339,56	5,86
11	Pinago Utama	PT.Pakerin	514,33	8,88
12	Pinago Utama	PT.Sentosa Bahagia Bersama	0,00	0,00
13	Sari Persada Raya	PT.Pakerin	87,74	1,52

	HP_Pemberdayaan (Wilayah Tertentu)			
14	Berkat Sawit Sejati	Tidak dibebani izin	2.286,16	39,48
15	Bumi Serasan Sawit Brkh.	Tidak dibebani izin	4,97	0,09
16	Pelangi Inti Pertiwi	Tidak dibebani izin	41,69	0,72
17	Pinago Utama	Tidak dibebani izin	1.125,75	19,44
18	Sari Persada Raya	Tidak dibebani izin	35,66	0,62
	HP_Perlindungan			
19	Berkat Sawit Sejati	PT.Bumi Persada Permai	5,79	0,10
20	Bumi Serasan Sawit Berkah	PT.Bumi Persada Permai	7,67	0,13
21	Mitra Ogan-2	PT.Sentosa Bahagia Bersama	8,23	0,14
22	Musi Banyuasin Indah	PT.Sentosa Bahagia Bersama	0,00	0,00
23	Pinago Utama	PT.Sentosa Bahagia Bersama	6,08	0,10
24	Sari Persada Raya	PT.Bumi Persada Permai	44,12	0,76
Jumlah			5.791,06	100,00

Sumber: Hasil analisis spasial, BPKH Wil.II, 2015)

2. Pada Kawasan Kelola Sendang Bagian Tengah Wilayah kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis (LMM) dan sekitarnya

a. Tingkat Kekritisan Lahan Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil analisis data tabular dan spasial, tingkat, lokasi, dan luas lahan kritis pada kawasan LMM terdiri dari 5 (lima) klasifikasi lahan kritis dimulai dari level tidak kritis sampai sangat kritis. Luasan kekritisan dan presentasinya tahun 2007 dapat dilihat pada tabel (4.5), sedangkan tahun 2010 (Tabel 4.6).

Tabel 4.5. Tingkat dan Luas Lahan Kritis di Wilayah Lalan Mangsang Mendis tahun 2007

No.	Tingkat Kekritisan	Luas(ha)	Persentasi (%)
1	Tidak kritis	60,589	22,78
2	Agak Kritis	24,584	9,24
3	Potensial Kritis	122,633	46,11
4	Kritis	57,566	21,65
5	Sangat Kritis	582,000	0,22

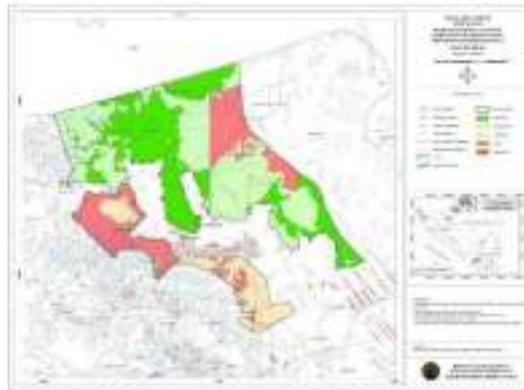
Sumber: Hasil analisis spasial, BPKH Wil.II, 2015)

Tabel 4.6. Tingkat dan Luas Lahan Kritis di Wilayah LMM tahun 2010

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (ha)	Persentasi (%)
1	Tidak kritis	80.792,60	30,38
2	Agak Kritis	100.469,96	37,77
3	Potensial Kritis	29.472,90	11,08
4	Kritis	54.614,74	20,53
5	Sangat Kritis	622,71	0,23

Sumber: Hasil analisis spasial, BPKH Wil.II, 2015)

Kondisi ini mengindikasikan adanya ancaman terjadinya lahan kritis hingga sangat kritis apabila tidak segera dilakukan rehabilitasi dan reklamasi. Untuk itu upaya rehabilitasi dan reklamasi perlu diprioritaskan pada lahan hutan yang sangat kritis dan/atau kritis serta potensial kritis. Gambaran secara spasial mengenai cakupan area kekritisian lahan di kawasan Kelola sedang disajikan pada Gambar 4.27.



Gambar 4.26 Peta Kekritisian Lahan di Kawasan Kelola Sengah
(Sumber: BPKH Wil. II, 2015)

b. Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan

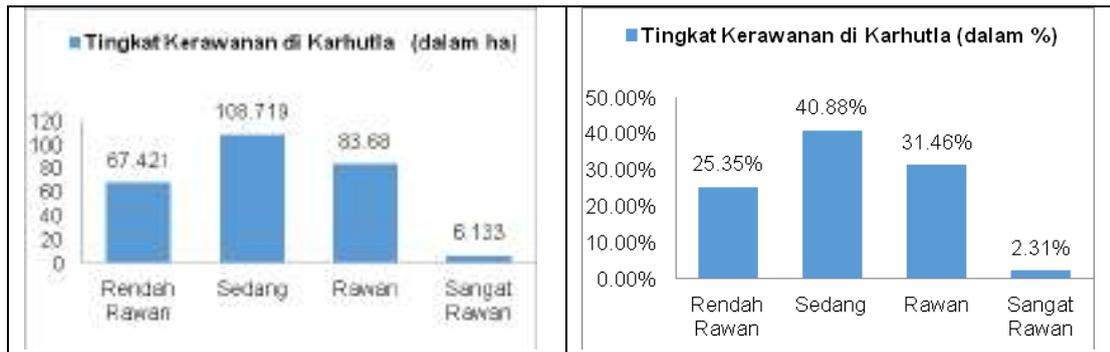
Tingkat kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dapat dianalisa dari kondisi fisik lahan hutan dan tekanan kawasan hutan dari gangguan alam maupun kegiatan manusia. Berdasarkan ketersediaan data spasial dan tabular yang ada diketahui lebih dari 30% dari luas kawasan KS Wilayah LMM masuk dalam kategori rawan. Selebihnya termasuk pada level rendah, sedang dan sangat rawan. Yang paling luas adalah yang berpotensi sedang. Hal ini tetap harus menjadi perhatian karena kalau tidak dikelola akan berpotensi menjadi rawan. Secara terperinci luasan potensi kebakaran disajikan pada (tabel 4.7).

Tingginya potensi kebakaran hutan kawasan Kelola Sengah Wilayah Kelola Hutan LMM terutama disebabkan oleh banyaknya lahan gambut yang ada di dalam kawasan. Ada puluhan kubah gambut yang terbentuk dan tersebar di dalam kawasan LMM dimana salah satunya merupakan kubah gambut terbesar yaitu Kubah Gambut Merang yang mencapai luasan lebih dari dua ratus ribu hektar.

Tabel 4.7. Kelas Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Kelola Sengah
Tengah Wilayahn Kesatuan Hutan Lalan Mangsang Mendis

No.	Tingkat Kerawanan Karhutlah	Luas	
		(ha)	(%)
1	Rendah rawan	67,421	25,35
2	Sedang	108,719	40,88
3	Rawan	83,680	31,46
4	Sangat rawan	6,133	2,31
	Total	265,953	100,00

Sumber : Hasil Analisis spasial, BPKH Wil II, 2015



Gambar 4.27. Kelas Kerawanan Karhutla dalam Luas (a) dan dalam prosentase (b) di Kawasan Kelola Sendang Tengah Wilayah Kesatuan Hutan Lalan Mangsang Mendis (Sumber : Hasil Analisis spasial, BPKH Wil II, 2015)

c. Tingkat Kerawanan Penebangan Liar

Permasalahan penebangan liar atau ilegal logging hampir terjadi di setiap wilayah hutan di Indonesia. Khususnya di wilayah LMM juga merupakan permasalahan yang tak berkesudahan, terlebih lagi HRG (Hutan Rawa Gambut) Merang Kepahyang mempunyai potensi yang tinggi terjadinya keberlangsungan penebangan liar karena didukung dengan akses yang mudah dan terdapat banyak penampungan kayu berupa Sawmill yang ada di sepanjang Sungai Lalan. Berdasarkan hasil penelitian Yuningsih (2009), terdapat tiga sungai utama yang menjadi akses pengangkutan kayu hasil penebangan liar di wilayah hutan rawa gambut Merang Kepahyang. Daya tebang 1 - 2 pohon/orang/hari (mencapai 0,5 - 1 m³/hari). Satu kelompok penebang terdiri dari 3- 4 orang, berarti volume tebang dapat mencapai 1,5 m³ - 4m³/ hari atau rata-rata 3 m³ /hari/kelompok tebang. Dengan luas areal penebangan rata-rata 10 ha/bulan/kelompok tebang, maka volume kayu yang dapat ditebang menjadi 70 – 100 m³/bulan/kelompok tebang, sehingga dapat diprediksi dalam satu periode tebang (± 3 bulan) dapat mengeluarkan kayu sebesar 94.500 m³ - 135.000 m³ kayu bulat dan 54.000 m³ - 72.000 m³ kayu balok.

Dengan kemampuan eksploitasi sebesar 10 ha/bulan/kelompok tebang, apabila paling sedikit 300 orang (± 75 kelompok) yang melakukan penebangan berarti areal yang mengalami deforestasi sebesar 750 hektar/bulan/sungai. Akses menuju kawasan MRPP umumnya dilakukan melalui 3 sungai yaitu Buring, Tembesu Daro dan Kepayang yang berarti 2.000 hektar lebih per bulan. Untuk satu priode tebang yang waktu efektifnya adalah 6 bulan menjadi 12.000 hektar lebih. Pada areal MRPP yang luasnya 24.000 hektar apabila tidak cepat dilakukan tindakan, maka dalam 2 priode tebang atau paling lama 2 tahun seluruh areal MRPP akan mengalami degradasi. Para pihak yang terlibat dalam Jaringan ilegal logging di kawasan hutan produksi terbatas terdiri dari kelompok penebang, penghanyut/ pengawal kayu, koordinator penebang, pemilik parit/pemilik modal yang sebagian mempunyai sawmil, pemilik sawmil, oknum aparat keamanan di sungai, cukong kayu di daerah penadahan kayu,

Depot-depot kayu di dalam kabupaten atau luar kabupaten, atau provinsi lain.

Atas dasar itulah sehingga penanganan penebangan liar harus menjadi perhatian yang serius yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu diperlukan adanya kerjasama beberapa pihak terkait dalam pengendaliannya sebagaimana yang diinstruksikan oleh presiden RI pada Inpres No.4 Tahun 2005. Secara hukum, perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku illegal logging. Selanjutnya pelaku illegal logging atau mantannya perlu diberikan pembinaan spritual.

d. Tingkat Kerawanan Perambahan Lahan

Saat ini dimana-mana, di hampir seluruh nusantara terdapat permasalahan kehutanan yaitu penguasaan lahan oleh masyarakat baik dijadikan perkebunan ataupun pemukiman. Hal ini, bisa dikatakan sebagai suatu proses yang alami dimana semakin tahun jumlah penduduk semakin meningkat baik di perkotaan, di pedesaan ataupun masyarakat yang ada di sekitar hutan. Adanya penambahan penduduk ini menimbulkan peningkatan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, sehingga perlu perluasan lahan untuk pemukiman maupun lahan untuk garapan pertanian dan perkebunan. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah sudah banyak menggulirkan peraturan pemanfaatan hutan dengan skema pemberdayaan masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), HTR, dan HD. Namun dalam hal ini belum secara keseluruhan direspon oleh masyarakat. Selain itu banyak para pengamat kehutanan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya kekeliruan dari kebijakan. Tidak sedikit kejadian yang berawal dari penguasaan lahan hutan oleh masyarakat berujung perselisihan antara masyarakat-perusahaan dan juga pemerintah sehingga menjadi permasalahan konflik yang tak berkesudahan. Khususnya di Wilayah KPHP Unit III LMM, ada beberapa pemilik izin yang tidak aktif melaksanakan operasional pengelolaan hutan sehingga membuka peluang terjadinya perambahan hutan.

e. Keberadaan dan Komitmen Pemegang Izin

Berdasarkan hasil penelahaan dan inventarisir data pengelolaan lahan, terdapat beberapa wilayah hutan yang sudah diberikan izin, namun tidak dilakukan pengelolaan secara efektif oleh pemegang izin. Beberapa kegiatan seperti nyata dalam pembangunan hutan seperti pembukaan wilayah, pembinaan tegakan, pemeliharaan dan produksi tidak terlihat. Dalam kaitannya dengan manajemen kawasan sebagai unit kelola terintegrasi diperlukan beberapa strategi dalam aspek manajerial yang perlu dilaksanakan secara bersama dengan semua pihak terkait sehingga aspek bina bangun kawasan sebagai kesatuan dimensi manajerial lebih terkoordinir dan mempunyai nilai tambah (*added-value*) baik dalam efisiensi biaya maupun optimalisasi hasil. Komitmen dan koordinasi dalam pembangunan kehutanan tersebut menjadi arti penting dimana dalam beberapa aspek perlindungan, aksesibilitas kawasan serta

pemberdayaan masyarakat lebih optimal.

Ketimpangan yang terjadi sebagai dampak dari tidak efektifnya operasional pihak pengelola kawasan telah memberikan dampak negatif terutama dalam kecenderungan kerawanan antara lain kebakaran, illegal logging dan tingginya gangguan keamanan kawasan yaitu secara tidak langsung telah menimbulkan dampak terbukanya akses dan peluang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya menjadikan kawasan sebagai sumber pelanggaran hukum. Pada akhirnya mengakibatkan menurunnya stabilitas kawasan dan memunculkan potensi konflik.

3. Pada Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir, Meliputi: Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan sekitarnya

Illegal Logging menjadi isu strategis yang muncul yang merupakan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Hutan Lalan Sembilang adalah perambahan hutan. Masalah dihadapi dalam pengelolaan kawasan Lalan Sembilang menjadi yang permasalahan yang pelik dan rumit yang dalam penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak.

Perambahan yang ada di wilayah hilir hutan Lalan Sembilang adalah perambahan yang dilakukan oleh masyarakat dari desa Bakung Provinsi Jambi dan Sekayu Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan *illegal logging* dilakukan oleh masyarakat sekitar Kawasan Hutan Produksi Lalan Sembilang khususnya di daerah *Buffer Zone* PT. Tri Pupa yang berdekatan dengan kawasan lindung Taman Nasional Berbak Sembilang. Pada Gambar 4.27 ditunjukkan Peta layanan ekosistem Kawasan Kelola Sendang dalam pengaturan iklim baik iklim makro dan iklim mikro kawasan. Berdasarkan hasil analisis spasial pada gambar, dapat diperoleh gambaran bahwa kawasan Kelola Sendang Hilir memiliki kecenderungan paling optimal dalam mekanisme pengaturan iklim mikro kawasan. Beberapa faktor yang mendukung argumentasi ini adalah dominansi tutupan vegetasi tegakan di kawasan Taman Nasional Sembilang relatif masih cukup baik, dibanding dua wilayah Kelola Sendang lainnya (Hulu dan Tengah). Peruntukan kawasan Kelola Sendang hilir dengan Taman Nasional Sembilang sebagai cagar biosphere telah memberikan andil dalam menjaga pengaturan keseimbangan iklim makro dan mikro di kawasan ini. Namun dalam perjalanan waktu, diperlukan upaya serius dari banyak pihak untuk mampu mengkondisikan kawasan ini agar mampu memberikan kontribusi dalam menyediakan tutupan vegetasi (*land cover*) yang mampu mengimbangi emisi gas rumah kaca. Kondisi habitat yang mampu menciptakan pengaturan iklim akan berimbas pada pengkayaan jenis fauna atau satwa liar penghuninya.



Gambar 4.28 Peta Layanan Ekosistem Pengaturan Iklim (Makro dan Mikro) pada Kawasan Kelola Sendang (sumber: hasil olah data spasial, ZSL, 2018)

Selanjutnya jika kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, fungsi dan peran ekosistem sebagai tempat berlangsungnya siklus materi dan transformasi energy di permukaan bumi akan terjaga.

C. Tantangan, Peluang, Kendala dan Permasalahan Kawasan Kelola Sendang

1. Tantangan

a. Pembentukan Hutan Normal

Akibat belum beroperasinya beberapa izin konsesi pemanfaatan yang telah diberikan pada areal di kawasan kehutanan, target pencapaian kondisi hutan normal menjadi terkendala. Hutan normal ini dapat menjadi salah satu indikator kinerja terhadap pencapaian kelestarian produksi atau hasil. Monitoring terhadap rencana dan target dari setiap pemegang konsesi pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan perlu diutamakan. Selain itu evaluasi realisasi dari perencanaan di tingkat lapangan seperti yang tercantum dalam dokumen RKU dan RKT perusahaan perlu ditindaklanjuti.

b. Realisasi Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis data dan informasi, fokus dari pemegang izin konsesi pemanfaatan hutan lebih kepada pencapaian target penanaman pada areal tanaman pokok (seluas 70% dari total areal konsesi). Orientasi bisnis ini perlu juga diimbangi dengan pemenuhan kewajiban perusahaan konsesi dalam hal penanaman jenis tanaman unggulan dan tanaman kehidupan. Dari data realisasi penanaman jenis-jenis tanaman unggulan dan tanaman kehidupan, terlihat bahwa pencapaian rencana sesuai dengan dokumen komitmen pemegang konsesi pemanfaatan hutan masih rendah. Isu strategis ini dapat menjadi salah satu kegiatan utama untuk 10 tahun ke depannya.

c. Kontribusi Kawasan Kelola Hutan terhadap Daerah

Selama ini sumbangan subsektor kehutanan pada pendapatan Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin belum cukup signifikan.

Antara pendapatan dan pengeluaran di sektor kehutanan masih belum berimbang. Sumbangan ini umumnya berupa pajak dan kontribusi pada PDRB. Potensi kontribusi Kawasan Kelola Hutan cukup besar mengingat sepertiga (1/3) dari luas kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin berada di dalam areal Kawasan Kelola Sendang dan Wilayah Kelola Hutan.

Sumber utama pemasukan di subsektor kehutanan berasal dari pajak Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH). Pada tahun 2012, total besaran PSDH/IHH adalah Rp. 36,477 milyar, jumlah ini dibagi untuk Nasional (Pusat), Provinsi, dan Kabupaten dengan porsi tertentu. Ke depan, sumber pemasukan ini diharapkan dapat semakin meningkat dan signifikan yang berasal dari Kawasan Kelola Hutan.

d. Peran Kawasan Kelola Hutan terhadap Kesejahteraan Rakyat

Peran subsektor kehutanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini semakin menurun, setelah sempat “*booming*” pengelolaan hutan dengan skema Hak Pengusahaan Hutan di awal tahun 1970an hingga 1990an. Peningkatan peran inilah yang sedang didorong kembali melalui sistem kawasan kelola hutan produksi (KPHP) dengan beragam model atau skema pemanfaatan hutan. seperti hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan Kemitraan Kehutanan dengan Masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dapat diukur dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan Kemitraan Kehutanan. Selain itu dilakukan juga dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Salah satu upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuka seluas mungkin peluang masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

2. Peluang

a. Kerjasama Pendanaan dengan Pihak Ketiga

Lembaga yang dilahirkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model di Indonesia, sebagian pendanaan saat ini masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kehutanan. Selain itu sebagai sebuah institusi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda), sumber pendanaan kegiatan kawasan pengelolaan hutan produksi mulai tahun 2015 akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yuasin.

Namun demikian, sangat dimungkinkan bagi kawasan kelola hutan produksi di tingkat tapak untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan. Potensi pendanaan ke depan dapat diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak donor (baik dalam maupun luar negeri) yang kegiatannya fokus pada sektor kehutanan, lingkungan hidup maupun pengembangan kapasitas. Saat ini banyak tercatat lembaga donor luar negeri maupun organisasi non pemerintah yang

melakukan aktifitas bantuan kegiatan dan pengembangan kapasitas di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

b. Kerjasama Pengelolaan dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatannya, Kelola Hutan dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga untuk mengelola areal Wilayah Tertentu (WT). Dengan luasan yang cukup signifikan, kerjasama dalam berbagai skema tentunya dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat pencapaian tujuan KPHP ke depannya. Landasan hukum kerjasama pengelolaan areal yang belum dibebani hak/izin ini telah disediakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur tatacara kemitraan Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi dengan masyarakat (Permenhut No. 39/2014) dan kemitraan KPHP dengan perusahaan (Permenhut No. 47/2014).

3. Kendala

a. Kepastian Batas Kawasan

Kepastian batas kawasan merupakan salah satu prasyarat bagi kelancaran program dan implementasi kegiatan di kawasan Kelola Sendang. Perbedaan batas juga menimbulkan kendala mulai dari perencanaan lebih detail, operasional hingga penyelesaian konflik yang terjadi.

Sering ditemukannya perbedaan batas kawasan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan maupun RTRW Kabupaten.

Selain perbedaan batas, dari hasil analisis spasial diketahui adanya beberapa perubahan status lahan (*land status*). Adanya perbedaan batas ini membuka peluang terjadinya konflik karena adanya tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan.

b. Sinergisitas Para Pihak antara Pemanfaat Hutan & Pengguna Kawasan Hutan

Addendum Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 2001 memungkinkan adanya izin penggunaan kawasan hutan (IPPKH) untuk tujuan pertambangan, berupa izin eksplorasi dan eksploitasi. Dalam beberapa kasus, koordinasi antara pihak pemanfaat kawasan hutan (seperti IUPHH untuk Hutan Tanaman) dengan izin usaha tambang untuk eksplorasi kurang berjalan dengan baik. Pihak pemanfaat kawasan sering tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang rencana dan lokasi kegiatan eksplorasi yang biasanya dalam skala luas. Sementara pihak pengguna kawasan untuk eksplorasi dibatasi waktu kegiatannya dalam hitungan waktu.

c. Komitmen Pemegang Ijin.

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi terhadap pengelolaan lahan, terdapat beberapa wilayah hutan yang sudah diberikan izin, namun tidak dilakukan pengelolaan secara efektif oleh pemegang izin. Kegiatan operasional dalam pembangunan hutan seperti pembukaan wilayah hutan, pembinaan tegakan, pemeliharaan dan produksi tidak terlihat.

Akibat tidak adanya kegiatan di tingkat lapangan, maka pengawasan terhadap gangguan hutan juga menjadi tidak optimal. Akibatnya akses bagi pihak lain menjadi lebih terbuka sehingga potensi terjadinya penebangan liar, perambahan hutan dan lahan, serta kebakaran lahan dan hutan semakin tinggi. Potensi konflik dengan penduduk pendatang juga akan semakin meningkat pada masa mendatang.

Kurangnya komitmen dari pemegang izin ini selain menimbulkan persoalan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup, juga mengakibatkan pencapaian hasil hutan berupa kayu dan non kayu menjadi tidak optimal (berdasarkan Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan). Pencapaian target hutan normal juga menjadi tertunda.

Selain itu, komitmen pemegang izin pengguna kawasan hutan dalam melakukan kegiatan reklamasi juga masih belum optimal. Realisasi penanaman untuk reklamasi selama ini belum mencapai target yang tercantum dalam rencana usaha tambang. Kondisi ini membuat upaya untuk mempercepat pengurangan deforestasi dan degradasi menjadi terkendala.

4. Permasalahan

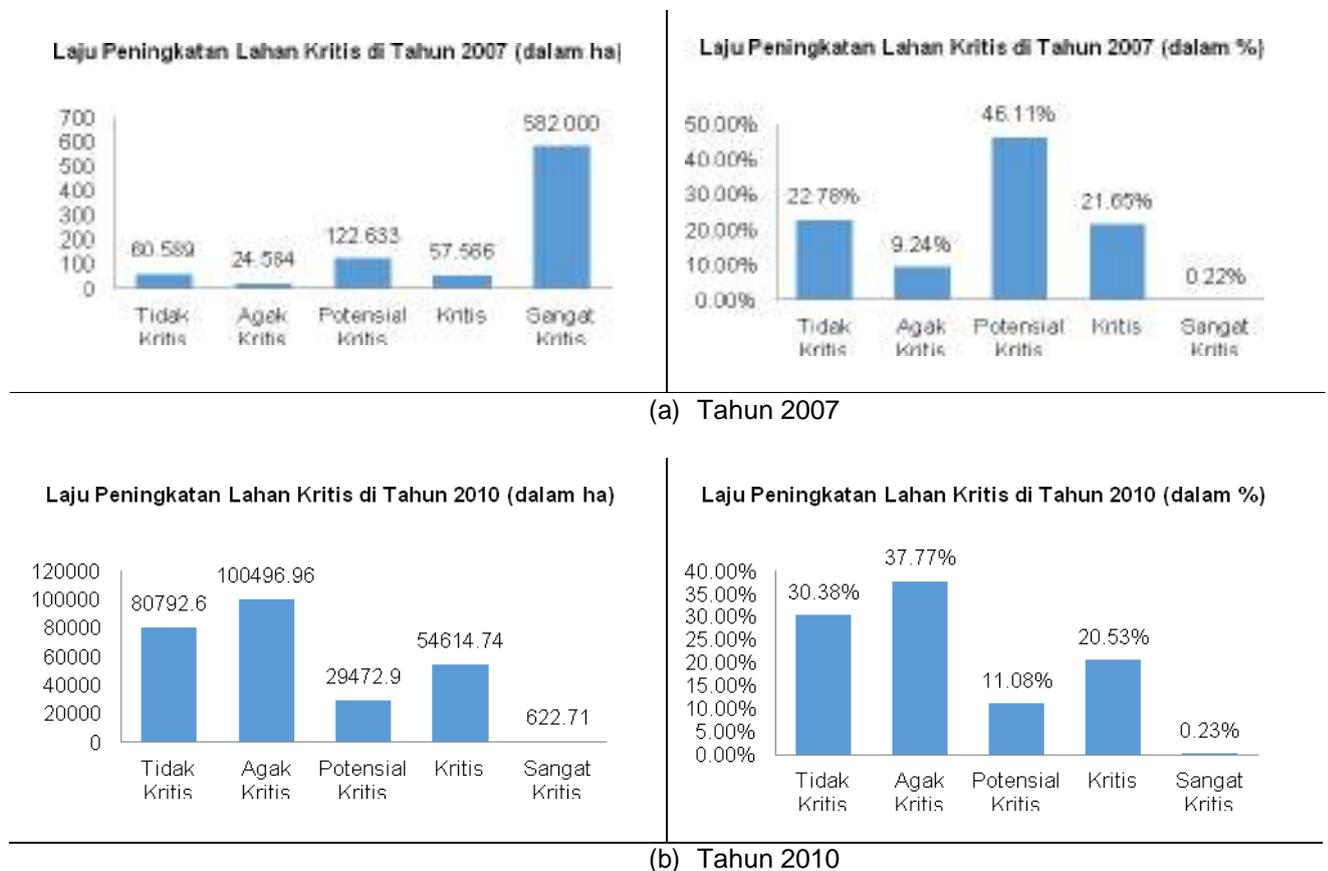
Permasalahan yang berhasil terangkum antara lain permasalahan : 1) laju peningkatan lahan kritis, 2) rawannya potensi kebakaran, 3) masih banyaknya *illegal logging*, 4) semakin meningkatnya laju perambahan hutan, dan 5) adanya pemegang izin yang tidak komitmen dalam mengelola hutan. Dari hasil analisis lahan kritis seperti yang tersaji pada (tabel 4.8), kekritisian lahan relatif stabil bahkan terlihat ada nilai peningkatan pada lahan yang kondisinya tidak kritis dan berkurangnya nilai lahan yang sangat kritis. Namun terlihat ada peningkatan yang drastis pada kelas nilai agak kritis. Hal ini dimungkinkan terjadi peningkatan aktivitas pembukaan lahan. Jika pembukaan lahan tersebut berada di wilayah yang berijin berarti sedang melakukan aktivitas *land clearing*, namun apabila hal tersebut terjadi di wilayah yang tidak berizin berarti merupakan aktivitas masyarakat dalam perluasan lahan garapan pada kawasan hutan.

Pada realisasinya kondisi kekritisian lahan adalah dari aktivitas HTI, aktivitas penggunaan hutan dan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hutan secara ilegal. Untuk mengatasi hal ini akan diprogramkan secara intensif mengenai monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin pemanfaatan maupun penggunaan hutan, sedangkan dengan masyarakat akan dilakukan pendekatan sosial sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi mitra dalam membangun hutan.

Tabel 4.8 Laju peningkatan lahan kritis di Kawasan Kelola Sendang

No.	Tingkat Kekritisan	Tahun 2007		Tahun 2010	
		Luas (ha)	Persentasi (%)	Luas (ha)	Persentasi (%)
1	Tidak kritis	60,589	22,78	80.792,60	30,38
2	Agak Iritis	24,584	9,24	100.469,96	37,77
3	Potensial Kritis	122,633	46,11	29.472,90	11,08
4	Kritis	57,566	21,65	54.614,74	20,53
5	Sangat Kritis	582,000	0,22	622,71	0,23

(Sumber: Hasil olah data spasial, BPKH Wil II. 2015)



Gambar 4.29. Laju Peningkatan Lahan Kritis di Kawasan Kelola Sendang dalam Luas dan Persentase di Tahun 2007 (a) dan 2010 (b) (Sumber: Hasil olah data spasial, BPKH Wil II. 2015)

Permasalahan lain adalah masih maraknya *illegal logging*, terutama di wilayah yang diperuntukkan sebagai jasa lingkungan yakni di areal hutan rawa gambut Merang Kepayang. Hal ini disebabkan karena di areal tersebut masih memiliki potensi kayu yang cukup, ditambah dengan akses pengangkutan kayu yang mudah yakni memakai fasilitas angkutan air melalui Sungai Buring, Sungai Tembesu Daro, kemudian ke Sungai Merang

yang selanjut keluar di Sungai Lalan. Hal lain yang memicu adalah adanya tempat penampungan yaitu *sawmill-sawmill* dan pembuatan peti kemas yang berada sepanjang Sungai Lalan yang setiap saat dapat menampung kayu hasil penebangan liar tersebut. Dalam mengatasi ilegal logging sangat rumit karena tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola kawasan hutan tetapi terkait dengan stakeholder yang lain sebagaimana yang tercantum dalam Intruksi presiden RI nomor.4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI yang melibatkan 18 *stakeholders*.

Perambahan hutan merupakan permasalahan yang muncul di setiap kawasan hutan di seluruh Indonesia. Kejadian ini ada unsur alami sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan lahan garapan dan keperluan untuk pemukiman serta prasarana sosial semakin meningkat. Bersamaan dengan itu pada tahun 1990-an terjadi kebijakan pencabutan izin-izin HPH, namun tidak dibarengi dengan sistem manajemen baru, sehingga terjadi *open acces* secara fisik dan secara administratif. Instansi-instansi pengurusan hutan banyak keterbatasan untuk berbuat dan bertindak, sehingga pembinaan hutan dan perlindungan hutan tidak berjalan. Mulai saat itu masyarakat setempat mulai menggarap lahan, selanjutnya dipindah tangankan kepada penduduk pendatang lalu membuka lagi lahan hutan yang baru dan kejadian itu terus berlanjut sampai saat ini. Kondisi sekarang sudah banyak yang menguasai lahan hutan dalam hamparan yang luas (puluhan hektar) yang dimiliki oleh perorangan baik masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut atau pun masyarakat kota.

Hal lain yang memicu adanya perambahan hutan adalah adanya pemegang ijin yang tidak aktif, tidak melakukan operasional pembinaan hutan bahkan perlindungan dan pengamanan hutan. Keadaan ini dapat membuka peluang masyarakat untuk menggarap lahan hutan karena terlihat tidak ada yang mengelola dan menjaganya. Teknik penyelesaian ini cukup unik karena harus mensinergikan antara faktor ekonomi, ekologi dan sosial budaya sehingga dituntut kepiawaian para pengelola kawasan hutan dalam menemukan solusi mengatasi permasalahan. Namun terdapat kendala dalam penyelesaiannya yaitu terkait dengan wilayah yang masih berizin namun tidak terdapat aktivitas di lapangan (non aktif). Untuk permasalahan ini diharapkan adanya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN PERSPEKTIF PENGELOLAAN BERKELANJUTAN KAWASAN KELOLA SENDANG

A. Arah Kebijakan Terkait Tata Kelola Lanskap Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Kajian kebijakan ini merupakan upaya untuk melakukan refleksi terhadap kesesuaian konsep Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (*Sustainable Landscape Management/ SLM*) dengan arus utama kebijakan pembangunan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dapat dipastikan bahwa inisiatif pendekatan lanskap selaras dengan kebijakan pembangunan yang tengah bergulir dan bahkan dapat menjadi media penyempurnaan bagi implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

Arah pembangunan nasional sendiri dalam dekade terakhir diwarnai oleh berbagai terobosan kebijakan pada ranah kelola dan pemulihan lingkungan hidup dan juga perhatian pada penanggulangan kemiskinan. Perlu disadari bersama bahwa dibalik upaya-upaya kelola lingkungan hidup tersebut pembangunan di Indonesia masih diwarnai oleh keterbatasan penyediaan kebutuhan dasar bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan dan masih tingginya angka kemiskinan, termasuk di Sumatera Selatan sendiri. Sementara itu dalam 5 tahun terakhir terdapat dorongan yang kuat dalam menyiapkan infrastruktur dan jaringan transportasi guna memperlancar pertukaran barang dan jasa antar wilayah.

Jika dicermati, 10 prinsip dari pendekatan lanskap masih menitik-beratkan pada penyelenggaraan proses dan mungkin masih perlu diperkaya dengan bagaimana dengan capaian-capaian khusus yang ingin diraih dan penciptaan nilai tambah/keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional. Penyelarasan dan peningkatan konektivitas memerlukan energi tersendiri dan akan lebih mudah jika memang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang *in line* dengan hal ini.

Sebagai hasil kajian kebijakan, maka dapat dicatat berbagai dukungan dari kebijakan pembangunan yang tengah berlaku saat ini terhadap implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan nantinya, yaitu:

1. Terdapat landasan hukum yang kuat terkait dengan akses terhadap informasi publik yang merupakan faktor sangat penting untuk memupuk kepercayaan antar aktor melalui skema manajemen kolaboratif.
2. Telah adanya penataan keruangan yang membagi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara tegas pada pola pemanfaatan sumberdaya lahan.
3. Beberapa substansi kebijakan mendorong pada skema-skema kolaborasi antar pihak, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan daerah penyangganya.

4. Dalam kebijakan tentang perusahaan, dan usaha berbasis pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah menempatkan pihak swasta juga merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab cukup besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan juga pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang hidup di sekitar tempat usahanya.
5. Adanya dorongan kuat untuk memulihkan kerusakan lingkungan di tingkat nasional. Hal ini tergambar secara konkret melalui komitmen-komitmen dalam hal pengurangan emisi, perlindungan keragaman hayati, dan juga berbagai regulasi tentang perlindungan hutan dan lahan.

Saat ini, kebijakan pemerintah pusat mendukung berkembangnya skema yang memperluas akses masyarakat kepada sumberdaya lahan terutama dengan berbagai dukungan terkait dengan perhutanan sosial dan juga reforma (pembaharuan) agraria. Hal ini merupakan pintu masuk yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif ke depan. Jika dilihat dari kebijakan di tingkat daerah maka kurun waktu 3 tahun terakhir banyak sekali inisiatif kebijakan di tingkat provinsi yang berorientasi pada Pembangunan Hijau, meskipun demikian perlu dikritisi bahwa orientasi ini masih belum terlalu kuat bobotnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Kebijakan yang ada, secara mendasar memberikan berbagai peluang bagi implementasi pendekatan lanskap ini. Beberapa peluang untuk menjalankan atau mengimplementasikan pendekatan lanskap dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pendekatan Lanskap Dalam Rencana Pembangunan

Secara nasional pemerintah Indonesia mempunyai visi tentang kondisi Indonesia dimasa yang akan datang digambarkan sebagai "Indonesia Yang Asri". Istilah asri ini sangat sinkron dengan terwujudnya kondisi lingkungan yang baik, indah dan terpulihkan dari segala jenis kerusakan dan konflik pengelolaan. Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun sejak 10 tahun yang lalu dan saat ini memasuki tahapan ketiga dimana perencanaan tersebut masih berlaku hingga 10 tahun ke depan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam tahapan pembangunan jangka panjangnya mempunyai agenda dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Fokus utama dari agenda tersebut adalah memperbesar kapasitas restorasi, memantapkan batas kawasan hutan, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat fungsi hutan dalam ranah sosial dan ekologi.

Jika diperhatikan isi rencana pembangunan jangka panjang yang ada pada kabupaten, belum terlihat adanya target-target terukur dalam perencanaan jangka panjang terkait dengan Persoalan-persoalan lingkungan hidup. Perlu kiranya untuk memperkuat substansi pengelolaan, perlindungan dan juga pemulihan lingkungan hidup.

Pendekatan Lanskap dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang dapat dijalankan melalui beberapa hal berikut ini:

1. Sinkronisasi agenda dalam jangka panjang, yaitu memadukan rencana-rencana dalam Pengelolaan Lanskap dengan rencana-rencana yang ada pada pemerintah pusat maupun daerah
2. Dalam menyusun indikator pengelolaan lanskap dapat didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang dipakai pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, karena indikator-indikator kinerja tersebut juga didasarkan pada capain-capain dalam *Sustainable Development Goals*
3. Pendekatan Lanskap dapat dijadikan media dalam memediasi parapihak yang terlibat konflik (tumpang tindih) dalam hal tata ruang

2. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan seperti:

1. adanya kewajiban ijin lingkungan dan AMDAL.
2. Adanya kewajiban unit-unit usaha untuk melakukan kelola sosial dan kelola lingkungan, dan
3. Adanya kewajiban-kewajiban terhadap usaha-usaha pengelolaan SDA terhadap upaya pemulihan lingkungan atau reklamasi.

Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan membuka akses masyarakat setempat. Pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya lahan ke depan banyak diwarnai oleh beberapa hal strategis yaitu:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menguat
2. Upaya restorasi lingkungan yang semakin ketat
3. akses masyarakat yang semakin menguat

Oleh karena itu pendekatan lanskap harus dapat memberikan jawaban atas beberapa kecenderungan diatas. Terdapat beberapa peluang pengembangan kebijakan di bidang PSDA di tingkat daerah, diantaranya adalah:

1. Menguatkan koordinasi dan hubungan harmonis antara sektor *private* dan sektor publik (pemerintah daerah) dalam kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
2. Memadukan/mensinergikan agenda-agenda pembangunan daerah dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
3. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) perusahaan dan reklamasi lingkungan/lahan
4. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan di daerah dalam mendukung implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria.

3. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati

Kebijakan pengelolaan hidup di Indonesia telah menunjukkan unsur kewaspadaan yang cukup tinggi terhadap resiko lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan maupun arahan penataan ruang wajib didasari oleh telaah lingkungan hidup berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun hal ini masih nampak lemah jika dilihat dari produk-produk kebijakan di tingkat daerah karena masih minimnya produk kebijakan di tingkat daerah yang mempunyai fokus sasaran pada isu-isu lingkungan hidup, apalagi jika dilihat dari praktek di lapangan maka pertimbangan lingkungan hidup masih sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah didukung oleh berbagai produk kebijakan baik yang terkait dengan pengelolaan kawasan, ekosistem, DAS, maupun berbasis spesies. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memelopori produk kebijakan daerah tentang pengelolaan keanekaragaman hayati, namun sayang kebijakan ini baru berupa rencana aksi yang berjangka pendek. Beberapa peluang pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi hayati yang dapat dikembangkan di daerah adalah:

1. Penyusunan rencana kelola zona penyangga di Taman Nasional dan Suaka Margasatwa secara kolaboratif antara pengelola (KPH maupun BKSDA), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan konsesi swasta yang ada pada zona penyangga
2. Pengembangan kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya ataupun tipologi ekosistem yang khas, misalnya terkait dengan pengelolaan ekosistem rawa lebak, ekosistem mangrove dan juga pesisir
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya yang diluar kawasan konservasi yang bersifat partisipatif dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal
4. Mengembangkan sistem monitoring keragaman hayati pada kawasan produksi

4. Pendekatan Lanskap Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya telah terbangun sistem tata kelola pemerintahan dengan segenap perangkat perencanaan, struktur kelembagaan dan juga sistem evaluasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan juga panjang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten mendasarkan penyelenggaraan pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan. Selain itu perencanaan pembangunan juga didukung oleh dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh masing masing instansi atau Organisasi Pelaksana Daerah (OPD).

Organisasi pemerintahan di daerah saat ini juga sedang menata dirinya lagi seiring diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah provinsi lebih menguat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam terutama sumberdaya hutan dan sumberdaya laut. Saat ini juga tata kelola pemerintahan di tingkat bawah sedang bergeliat seiring menguatnya peran desa dalam pembangunan. Sejak terbit UU No.6 Tahun 2016 maka

kewenangan pemerintah desa dalam mengatur “dirinya” sendiri semakin kuat. Dengan adanya instrumen seperti Peraturan Desa, RPJMDes dan juga secara konkret adanya dukungan Dana Desa maka Pemerintah Desa dan masyarakatnya mempunyai cukup kekuatan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Semua inisiatif di tingkat tapak harus memperhatikan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu tata kelola pemerintahan saat ini juga semakin terbuka dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mendapatkan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah atau data/informasi yang ada pada badan publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan ini maka pendekatan lanskap dapat berperan dalam:

1. Memberikan masukan/pengaruh positif dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang terpadu dan berkelanjutan
2. Memperkuat sistem dan tata kelola sumberdaya alam yang adil dan lestari di tingkat desa dengan menggunakan instrumen yang ada, baik berupa Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
3. Melakukan sinkronisasi dan validasi data pengelolaan sumberdaya alam diantara parapihak baik pemerintah, swasta, maupun organisasi-organisasi non pemerintah (LSM) yang mempunyai inisiatif dalam pengelolaan sumberdaya alam.
4. Menyusun Rencana Aksi Kolaboratif Jangka Panjang yang dapat memberikan panduan bagi parapihak dalam pengelolaan sebuah unit lanskap tertentu.

5. Inovasi Kebijakan Daerah Pendukung Pendekatan Lanskap

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat mempercepat capaian pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumsel yang terbit pada Bulan Mei 2017 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 452/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Sumatera Selatan, yang diterbitkan pada Bulan Juli 2017. Kedua produk kebijakan ini merupakan dukungan yang sangat lugas bagi pengembangan pendekatan lanskap di Sumatera Selatan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan di daerah yang dapat mempunyai implikasi langsung dan juga harus diperhatikan dalam pengembangan pendekatan lanskap di Sumatera Selatan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bulan Desember 2016

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau Lahan, pada April 2016
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 527/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan, pada Bulan Agustus 2017

Kebijakan tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan mencerminkan kesadaran dan pandangan tentang perlunya koordinasi dan sinergi diantara sektor-sektor berbasis lahan tersebut, sedangkan kebijakan tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara didalamnya juga mengatur tentang kegiatan reklamasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Artinya jika kedua kebijakan ini dilaksanakan akan dapat mendukung pendekatan lanskap yang akan dikembangkan. Sedangkan tentang kebijakan untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta juga akan mampu memberikan percepatan dalam hal sinergi dan integrasi data pembangunan terutama data spasial atau keruangan.

Pada tahun 2007 telah terbit Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025. Dalam dokumen ini disampaikan bahwa terdapat beberapa tantangan khusus terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Sumatera Selatan, yaitu terkait dengan:

1. Rendahnya produktivitas lahan sawah, yang hanya sekitar 3,33 ton GKG/ha padahal targetnya adalah 5,1, ton GKG/ha, dan sebagian sawah masih panen 1 kali dalam setahun
2. Luasnya lahan hutan yang gundul (tanpa vegetasi hutan)
3. Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan peningkatan peran sektor kehutanan dalam ranah sosial dan ekologi. Sebagai catatan laju deforestasi di Sumatera Selatan mencapai 192.824 ha per tahun (laporan Bank Dunia dalam RPJP Sumatera Selatan 2005-2025)
4. Dalam pengelolaan sumberdaya air perlu mengembangkan jaringan rigasi dan drainase untuk sawah tadah hujan dan pengembangan jaringan kelembagaan rawa dan rawa lebak.
5. Untuk energi terbarukan perlu dikembangkan energi alternatif yang ekonomis bagi masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa inisiatif kebijakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin yang selaras dengan pendekatan lanskap diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun masih banyak kelemahan, namun kedua kebijakan tersebut mencerminkan keinginan pemerintah daerah kabupaten untuk mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkeadilan.

Saat ini pemerintah daerah sebenarnya masih mempunyai beban yang tidak ringan dalam mengimplementasikan berbagai inovasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penguatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam. Bahkan implementasi dari kebijakan-kebijakan lama seperti kewenangan dalam memantau kegiatan pertambangan, perkebunan dan juga kehutanan belum sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. Kebijakan dan Agenda Strategis

Dengan memperhatikan berbagai produk kebijakan terkait dengan *Sustainable Landscape Management* diatas maka dapat dianalisis beberapa kebijakan yang dapat memberikan pengaruh kuat (*significant*) dan bahkan memberikan daya ungkit (*leverage*) terhadap implementasi pendekatan lanskap di lapangan. Kebijakan dan program tersebut adalah yang terkait dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengelolaan kawasan konservasi, dan yang mendorong kolaboratif multipihak.

a. Pemulihan Ekosistem dan Pengurangan Emisi

Kebijakan dan program yang perlu diprioritaskan terkait dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi adalah sinkronisasi agenda restorasi gambut, optimalisasi rehabilitasi lahan dan restorasi lingkungan untuk pengurangan emisi, pemenuhan kewajiban reklamasi lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, program perhutanan sosial dalam menangani perambahan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi. Berikut penjelasan dari masing-masing kebijakan dan program tersebut:

1. **Sinkronisasi agenda restorasi gambut**, dalam hal ini perlu mensinkronkan agenda dan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah dan mendorong semua pihak mempunyai dasar perencanaan dan pengelolaan yang sama berdasarkan peta ekoregion gambut yang sama.
2. **Optimalisasi rehabilitasi lahan dan restorasi lingkungan untuk pengurangan emisi.** Penting untuk menyusun kriteria dan indikator capaian dalam kegiatan rehabilitasi ini mengingat kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama dan berulang setiap tahun namun masih sulit untuk memantau keberhasilan dan capaiannya. Perlu mencantumkan target pengurangan emisi dalam setiap inisiatif rehabilitasi lahan ataupun restorasi lingkungan
3. **Pemenuhan kewajiban reklamasi lingkungan.** Dalam hal ini perlu dipetakan lagi tentang pihak-pihak (perusahaan) yang mempunyai kewajiban reklamasi lahan dan dipantau sejauh mana kewajiban ini telah dipenuhi.
4. **Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.** Perlu mengembangkan sistem pengendalian yang lebih responsive terhadap gejala terjadinya kebakaran hutan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dan berbasis teknologi informasi terkini. Perlu disusun peta zonasi daerah rawan kebakaran dengan menetapkan tingkat kerawanan. Sistem monitoring diperkuat pada zona-zona dengan kerawanan tinggi
5. **Sinkronisasi kebijakan dan program perhutanan sosial dalam menangani perambahan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi.** Menyusun road map ataupun rencana aksi penanganan perambahan pada kawasan konservasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

b. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Kebijakan dan program yang perlu diprioritaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria, optimalisasi pengelolaan program Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL/CSR), Dana Desa,

kebijakan area tanaman kehidupan pada Kawasan HTI, penguatan kelembagaan kelompok tani dan memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam pengelolaan plasma nutfah. Berikut penjelasan dari masing-masing kebijakan dan program tersebut:

1. **Implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria**²³. Dalam hal ini perlunya memperkuat kelembagaan baik di tingkat *stakeholder* daerah (kabupaten) dan juga kelembagaan di tingkat desa dan masyarakat. Dalam hal pembaruan agraria juga harus mementingkan pemetaan wilayah administratif desa secara tuntas, dimana hal ini seringkali menjadi persoalan yang sangat krusial bagi pengelolaan sumberdaya alam di tingkat desa dan masyarakat.
2. **Optimalisasi pengelolaan program Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR)**. Dalam hal ini perlu melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan oleh perusahaan, mengevaluasinya dan disusun perencanaan yang lebih terarah dan sinergis. sedapat mungkin agenda ini juga disinkronkan dengan agenda pembangunan daerah.
3. **Optimalisasi Dana Desa**. Desa-desa seharusnya mempunyai rencana dan tahapan untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu didorong untuk mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada, terutama dana desa dan akses terhadap sumberdaya lahan (melalui perhutsos dan pembaruan agraria) dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada pada mereka.
4. Mengoptimalkan kebijakan tentang area tanaman kehidupan pada Kawasan HTI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memperkuat kelembagaan kelompok tani petani menuju organisasi tani yang modern dan mempunyai orientasi sosial dan ekonomi yang mantap dan terukur.
6. Memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam pengelolaan plasma nutfah lokal, seperti pengembangan perikanan tangkap dan budidaya berbasis plasma nutfah lokal, pengembangan budidaya dan industri rakyat berbasis kelapa, pengembangan budidaya dan produk berbasis gambir, Pengembangan pertanian terpadu (*integrated farming*)

c. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terkait dengan pengelolaan lanskap Sembilang-Dangku, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat menjadi pedoman bagi kolaborasi dalam pengelolaan pada kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa. Beberapa substansi kebijakan yang dapat dijadikan pendukung bagi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. adanya peluang bagi partisipasi masyarakat luas dalam pengelolaan Suaka Margasatwa dan Taman Nasional
2. terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang dapat menjadi pedoman bersama
3. terdapat beberapa panduan teknis dan prosedural bagi keterlibatan masyarakat

4. Peluang pemanfaatan tradisional oleh masyarakat sekitar

Selain itu, menarik diperhatikan tentang beberapa substansi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya adalah:

1. terdapat kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dalam penetapan daerah penyangga, jika daerah penyangga tersebut bukan berupa hutan lindung atau hutan produksi
2. pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk bersama-sama pemerintah pusat untuk mengelola daerah penyangga dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan
3. pemerintah daerah dan pemerintah pusat didorong untuk melakukan sinergi dalam pengelolaan daerah penyangga.

d. Pengembangan Kebijakan yang mendukung kolaborasi antar pihak

Untuk dapat menjalankan berbagai peluang program dan kebijakan diatas perlu disusun ataupun diformulasikan sebuah scenario yang mendorong kolaborasi parapihak dengan strategi sebagai berikut:

1. Menguatkan dan mengembangkan forum multipihak (*public-private-people*) dan pengembangan visi bersama
2. Menyusun rencana pengelolaan lanskap kolaboratif berbasis tema-tema spesifik dengan lokus area yang spesifik pula dengan capaian dan indikator kinerja yang terukur dan disepakati parapihak
3. Membuat sistem monitoring lanskap kolaboratif (*public-private-people*) dengan basis *one map based monitoring system*.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan yang ada, maka perlu dipilih beberapa kebijakan sebagai kebijakan strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendekatan lanskap ini. Berikut ini adalah skema analisis kebijakan untuk memperoleh beberapa isu atau kebijakan prioritas untuk mewujudkan visi lanskap berkelanjutan.

- B. Perspektif Pengelolaan Kawasan Kelola Sendang dari Aspek Peran Strategi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah**
1. **Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kawasan Kelola Hutan Meranti, Sako Suban, Lubuk Bintialo dan Sekitarnya**
 - a. **Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, wilayah Kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti sekitarnya merupakan wilayah yang masuk kawasan yang strategis. Wilayah Kelola Sendang Hulu Wilayah Kelola Hutan Meranti merupakan kawasan untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan, kawasan berfungsi lindung/konservasi dan

rehabilitasi, pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah, peningkatan fungsi koridor ekosistem. Kawasan pengembangan pengelolaan dan mempertahankan fungsi suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut (taman wisata perairan) meliputi **Suaka Margasatwa Bentayan (Kabupaten Musi Banyuasin)**, **Suaka Margasatwa Dangku (Kabupaten Musi Banyuasin)**, dan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.

Kawasan Kelola Hutan Meranti juga masuk dalam kawasan untuk pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan **fungsi koridor ekosistem**. Koridor Jambi-Bengkulu-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Alam Bukit Kaba sebagai koridor satwa burung, gajah, dan harimau. Koridor Jambi-Sumatera Selatan yang menghubungkan Taman Nasional Berbak Sembilang sebagai koridor satwa burung dan harimau.

Adapun arahan penggunaan kawasan dalam Kawasan Kelola Hutan Meranti berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), sekitar 85,5% areal diarahkan untuk pengembangan usaha skala besar, untuk usaha kecil sekitar 8,2% dan sisanya diarahkan untuk rehabilitasi, hutan alam dan gambut serta dilepaskan menjadi areal penggunaan lain (APL) (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Arahan penggunaan kawasan Kelola Sendang Hulu Wilayah Meranti dan Sekitarnya berdasarkan RKTN

Arahan RKTN	Luasan (ha)	
	(ha)	(%)
HL_Pemanfaatan (Wilayah Tertentu)	16.325,20	6,69
Arahan untuk HA dan Gambut	674,88	0,28
Arahan untuk Rehabilitasi	11.542,47	4,73
Arahan untuk Usaha Skala Besar	3.068,66	1,26
Arahan untuk Usaha Skala Kecil	1.039,19	0,43
HP_Pemanfaatan IUPHHK-HA	50.153,73	20,54
Arahan untuk Usaha Skala Besar	50.153,73	20,54
HP_Pemanfaatan IUPHHK-HT	142.267,51	58,27
Arahan untuk Rehabilitasi	379,97	0,16
Arahan usaha skala Besar	137.834,74	56,45
Arahan usaha Skala Kecil	4.052,79	1,66
HP_Pemberdayaan (Wilayah Tertentu)	19.316,31	7,91
Arahan untuk Rehabilitasi	2.868,89	1,17
Arahan untuk Skala Besar	1.934,52	0,79
Arahan usaha Skala Kecil	14.512,90	5,94
HP_Perlindungan	16.099,58	6,59
Arahan untuk Rehabilitasi	453,44	0,19
Arahan usaha skala Besar	14.488,92	5,93
Arahan usaha Skala Kecil	1.157,21	0,47
Jumlah	244.162,33	100,00

Sumber: Hasil Analisis BPKH Wil II, 2015

b. Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah Provinsi

Posisi Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu dalam perspektif tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana digambarkan dalam Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Nopember 2013, secara umum kawasan hutan yang ada masih dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan. Sedikitnya perubahan penggunaan kawasan tersebut mengingat berbagai fungsi strategis kawasan kelola hutan produksi, baik untuk fungsi ekonomi dan produksi hasil hutan yang berkelanjutan, maupun fungsi perlindungan dan konservasi ekosistem.

Berdasarkan hasil analisis spasial, sebagian besar posisi areal Kawasan Kelola Sendang Hulu dalam RTRWP Sumatera Selatan sebagai Hutan Produksi (HP) Tetap sekitar 55,44% dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar 37,47%. Sisanya adalah Hutan Lindung (HL) dan Areal Tumpang Tindih seperti areal perkebunan, pemukiman, dan pertanian.

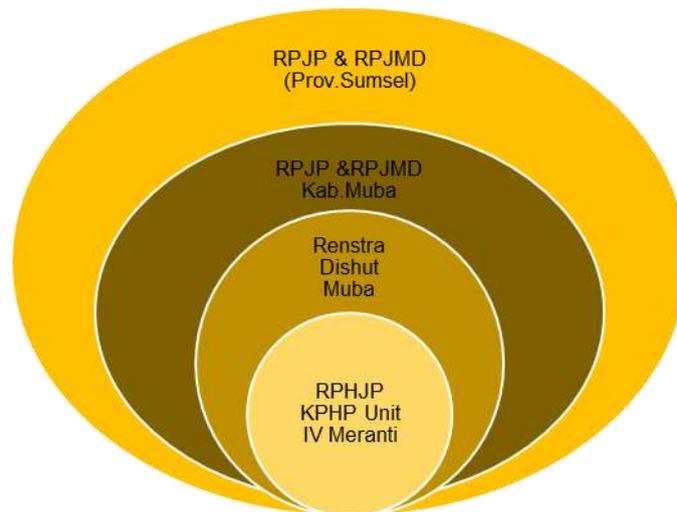
c. Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Hulu Dalam Perspektif Tata Ruang Kabupaten dan Pembangunan Daerah Kabupaten yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Analisis spasial yang dilakukan memperlihatkan bahwa sebagian besar posisi areal Kawasan Sendang Kelola bagian Hulu wilayah Kelola Hutan Meranti dan sekitarnya dalam RTRWK Musi Banyuasin juga sebagai Hutan Produksi (HP) sekitar 50% dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar 38%. Sisanya adalah Hutan Lindung (HL), Areal Penggunaan Lain (APL), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

Posisi areal Kawasan Kelola Sendang bagian Hulu wilayah kelola hutan Meranti dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan yang terkait dengan sektor kehutanan yang ada didalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan yang terkait adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin (Gambar 5.2).

Kawasan Kelola Sendang ini memiliki peran penting dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sumatera Selatan, subsektor kehutanan diharapkan dapat menunjang pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan (2008-2025) melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya alam guna penyediaan sumberdaya energi dan pangan yang berkelanjutan. Untuk menselaraskan visi dan misi ditingkat provinsi maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bervisi "Hutan sebagai penyangga Kehidupan dan Sumber Kemakmuran Rakyat". Dengan demikian keberadaan Kawasan Kelola Sendang Hulu ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan jangka menengah Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya (i) Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan

ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna dan (ii) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.



Gambar 5.1. Posisi Kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu Wilayah Hutan Meranti dan Sekitarnya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kawasan ini juga berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam RPJP jangka panjang (2005-2025) subsektor kehutanan ditujukan untuk perlindungan dan konservasi sumberdaya alam maka pengembangannya yang diarahkan untuk dapat bersinergi dengan sektor industri pengembangan hutan tanaman industri. Dalam jangka menengah (tahun 2012–2017) sektor kehutanan diharapkan dapat (i) memantapkan status, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, (ii) memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi hutan / lahan, (iii) menguatkan kelembagaan di bidang kehutanan.

Tujuan pembangunan kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012–2017 adalah:

- 1) Meningkatnya kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- 3) Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
- 4) Meningkatkan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Produktivitas Kawasan Hutan dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- 1) terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan, tukar Menukar kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan.

- 2) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal secara lestari dan revitalisasi industri kehutanan.
- 3) Meningkatnya kualitas pengamanan hutan.
- 4) Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran hutan.
- 5) Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan.

Sebagai bagian dari sub-sektor kehutanan, kawasan Kelola Sendang Bagian Hulu Wilayah kelola hutan Meranti dan sekitarnya diharapkan dapat menunjang pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Sub sektor kehutanan di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sektor basis. Selain itu sebagai sub sektor kehutanan berkontribusi terhadap perekonomian dengan menepati urutan ke-6 dari semua sub sektor dan urutan ke-3 pada sektor pertanian. Selain memberikan kontribusi bagi pencapaian pembangunan di daerah, keberadaan kawasan ini diharapkan juga berperan dalam mewujudkan Visi Kementerian Kehutanan RI, yaitu "Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat".

2. Kawasan Kelola Sendang Bagian Tengah Wilayah Kelola Hutan Lalan Mangsang Mendis dan Sekitarnya

a. Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah

Peran strategis Kelola Sendang dalam tata ruang Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada upaya untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis permudaan buatan dan tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati flora dan fauna (satwa). Sebagian besar kawasan di wilayah ini berstatus hutan produksi sehingga pola pemanfaatannya diarahkan sebagai kawasan budidaya. Sedangkan untuk tipe ekosistem sebagian area merupakan kawasan bergambut maka pola pemanfaatan diarahkan untuk pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan yang ada di bawahnya. Selain itu, sebagian kawasan merupakan areal perlindungan buaya Senyulong yang luasnya sekitar 13.872 ha (RTRW Sumsel, 2008).

b. Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Dalam Perspektif Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Kawasan Kelola Sendang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dalam sektor kehutanan diharapkan dapat menunjang pembangunan jangka panjang Sumatera Selatan (2008-2025) melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya alam guna penyediaan sumberdaya energi dan pangan yang berkelanjutan. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung pembangunan jangka menengah Sumatera Selatan (2008-2013) sebagai bagian dari upaya (i) Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna dan (ii) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar sebagai bagian dari sub-sektor kehutanan, Kelola Sendang diharapkan dapat menunjang

pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Sub sektor kehutanan di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sektor basis. Selain itu sebagai sub sektor kehutanan berkontribusi terhadap perekonomian dengan menepati urutan ke-6 dari semua sub sektor dan urutan ke-3 pada sektor pertanian. Dalam rangka perlindungan dan konservasi sumberdaya alam maka pengembangannya diarahkan untuk dapat bersinergi dengan sektor industri dalam rangka pengembangan hutan tanaman industri (RPJPD Musi Banyuasin 2005-2025). Untuk mendukung sub sektor kehutanan telah dilakukan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui pembinaan terhadap masyarakat di sekitar hutan agar membuka hutan dan membangun hutan secara lestari dan berkelanjutan. Lahan hutan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin telah menghasilkan berbagai jenis produksi kehutanan, seperti kayu dan rotan. Produksi kayu, antara lain kayu meranti mencapai 473,25 M3 dan rotan mencapai 97.166 batang atau 685,20 ton. Selain itu, terdapat pula produksi kayu indah dan kayu racuk, masing-masing produksinya adalah 7,15 M3 dan 23.150 batang (RPJMD Musi Banyuasin 2007-2012).

3. Kawasan Kelola Sendang Bagian Hilir Meliputi Kawasan Hutan Lalan Sembilang dan Sekitarnya

a. Posisi dan Peran Strategi Kawasan Kelola Sendang Hilir dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah (Nasional) dan Perspektif Rencana Kehutanan Nasional (RKTN)

Kesesuaian Wilayah Kawasan Kelola Hutan Lalan Sembilang dalam perspektif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) adalah sebagai arahan HA (hutan alami) dan KHG (Lahan Gambut), arahan untuk Rehabilitasi, arahan usaha skala besar, arahan usaha skala kecil dan sudah di lepas menjadi APL. Dari lima arahan tersebut untuk usaha skala besar mendominasi yaitu seluas 49.170,63 Ha atau 80,61 %, di ikuti oleh usaha skala kecil seluas 6.135,74 Ha atau 10,09 %, untuk rehabilitasi dan hutan alam dan gambut seluas 346,64 Ha atau 0,57 %. Luasan arahan peruntukan Lahan sesuai RKTN di sajikan dalam Table 58.

Tabel 5.2. Arahan peruntukan lahan sesuai RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang

No.	RKTN	Luas_Ha	Persentase (%)
1	Arahan HA dan Gambut	346,64	0,57
2	Arahan untuk Rehabilitasi	5.332,84	8,74
3	Arahan Usaha Skala Besar	49.170,63	80,61
4	Arahan Usaha Skala Kecil	6.153,74	10,09
5	Sudah Dilepas jadi APL	26,33	0,04
Jumlah		60.999,34	100,00

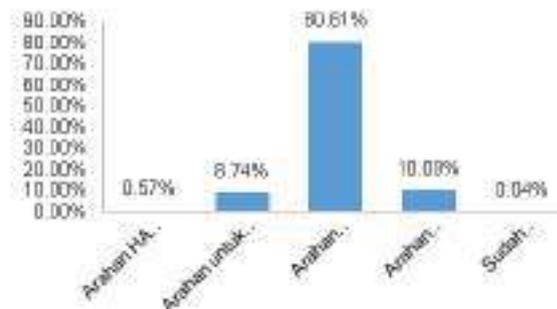
Sumber : Hasil Analisis Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2015.

RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) di Kawasan Kelola Sendang Hilir
Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang (dalam ha)



(a)

RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) di Kawasan Kelola Sendang Hilir
Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang (dalam ha)



Gambar 5.2. Alokasi Peruntukan Lahan Berdasarkan Luas (a) dan Persentase (b) di Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kesatuan Kelola Hutan Lalan Sembilang Sesuai Arahan dalam RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) Sumber : Hasil Analisis Tim BPKH Wilayah II Palembang, 2015.

b. Posisi dan Peran Strategi Kawasan Dalam Perspektif Pembangunan Daerah

Peran strategis kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang dalam Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada upaya untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik yang berupa hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Status fungsi kawasan di dalam kawasan kelola hutan Lalan Sembilang berstatus sebagai hutan produksi, sehingga pola pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel untuk arahan kawasan hutan lindung, perkebunan dan pertanian lahan kering. Hal serupa diarahkan juga dalam RTRW Kabupaten yang masih mengacu pada RTRW Kabupaten Banyuasin.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin tahun 2011 – 2031 adalah “Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan” Dalam hal pengembangan kegiatan pertambangan yaitu

pertambangan batubara, minyak dan gas bumi serta penggalian aspal alam, koalin, dan pasir silika, dengan bentuk kegiatan mulai dari penetapan kawasan, proses pengelolaan sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan peta geologi yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang, formasi batuan yang ada di wilayah Lalan Sembilang diantaranya adalah pembawa formasi batubara, breksi dan tufa sehingga pada wilayah tersebut memiliki potensi sumberdaya bumi berupa batubara dan mineral biji seperti biji besi, biji emas, dan biji-biji lainnya. Jadi wilayah Kawasan Kelola Sendang Hilir Wilayah Kelola Hutan Lalan Sembilang sekitarnya berdasarkan pola pemanfaatan ruang ada beberapa wilayah yang diarahkan untuk pengembangan kawasan pertambangan (RTRW, sumsel tahun 2005-2019, dan RTRW Kabupaten Banyuasin 2011-2031).

C. Dukungan Regulasi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan di Kawasan Kelola Sendang

Tabel 5.3. Beberapa Regulasi Merujuk pada Pengelolaan Kawasan Kelola Sendang yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Regulasi/ Kebijakan	Tentang
UU No. 12 Tahun 1992	Sistem Budaya Tanaman
UU No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok Agraria
UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
UU No. 39 Tahun 2014	Perkebunan
UU No. 32 Tahun 2009	Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
UU No. 5 Tahun 1999	Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem
UU No. 41 Tahun 1990	Kehutanan
UU No. 17 Tahun 2004	Pengesahan Kyoko Protokol to the united Nations Framwork Convention on Climate Changes
UU No. 29 Tahun 2000	Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 18 Tahun 2012	Pangan
UU No. 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen
Regulasi/ Kebijakan	Tentang
UU No. 36 Tahun 2009	Kesehatan
UU No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
UU No. 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas
UU No. 20 Tahun 2014	Standarisasi dan Penelitian Kesesuaian
UU No. 3 Tahun 2014	Perindustrian
UU No. 7 Tahun 2014	Perdagangan
UU No. 21 Tahun 2014	Pengesahan Cartagena Proticol on Bio Safety to the Convention on Biological Diversity
UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan United Nations on Biological Divesity
UU No. 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak
UU No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal
UU No. 18 Tahun 2013	Pencegahan dan pPemberantasan Perusahaan Hutan
UU No. 19 Tahun 2013	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No. 25 Tahun 1992	Koperasi

Regulasi/ Kebijakan	Tentang
PP 47/2012	Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas
PP 28/2004	Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
PP 69/1999	Label dan Iklan Pangan
PP 71/2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
PP 27/2012	Izin Lingkungan
PP 28/2011	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
PP 11/2010	Penertiban Tanah Terlantar
PP 10/2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 41/1999	Pengendalian Pencemaran Udara
PP 8/1999	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
PP 7/1999	Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa
PP 40/1996	HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas
PP 44/1995	Perbenihan Tanama
PP 14/1993	Penyelenggaraan Jamsostek
PP 31/2009	Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik
Regulasi/ Kebijakan	Tentang
PP 51/2007	Indikasi Geografis
PP 8/2001	Pupuk Budidaya Tanaman
PP 85/1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Racun
PP 6/1995	Perlindungan Tanaman
PP 7/1973	Pengawasan Atas Peredaran Penggunaan Pestisida
PP 33/Permentan/OT 140/7/2006	Revitalisasi Perkebunan
PP 98/Permentan/OT 140/9/2013	Pedoman Izin Usaha Perkebunan
No. 58/Permentan/OT.8/2007	Sistem Standarisasi Nasional Pertanian/ Perkebunan
No. 07/Permentan/OT.140/2/2009	Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
No. 14/Permentan/OT.110/2/2009	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
No. 11/Permentan/OT.140/3/2015	Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)
No. 1496.1/kpts/OT.100/10/2003	Klasifikasi Persahaan PPerkebunan
No.633/kpts/OT.140/10/2004	Pedoman Kriteria dan Standarisasi Klasifikasi Kimbun
No. 75/M-IND/PER/7/2010	Pedoman Cara Berproduksi Pangan Olahan yang Baik (GNP)
PP 57/2016	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Inpres 82008	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
Keputusan MK No. 138 Tahun 2015	

BAB VI. ANALISIS AWAL LANDSKAP KELOLA SENDANG

A. Analisis Baseline Kawasan Kelola Sendang

1. Aspek Pola Penghidupan (livelihood: *Sosial Ekonomi Budaya*)

a. Kondisi Umum SosekBud Kawasan Kelola Sendang

1) Gambaran Umum Lanskap Sembilang Dangku

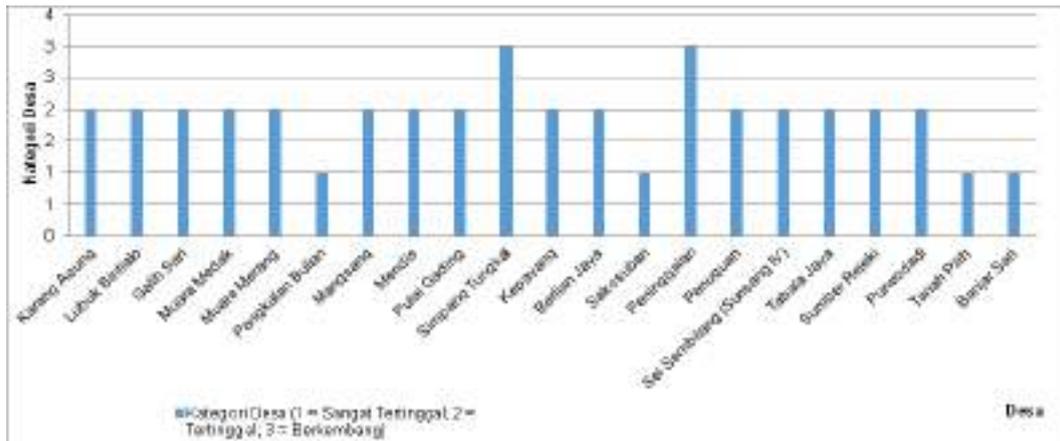
Lanskap Sembilang Dangku berada di bagian Timur laut Provinsi Sumatera Selatan dimana sisi Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Disebut dengan Lanskap Sembilang Dangku karena lanskap ini membentang dari Taman Nasional Sembilang sampai dengan Suaka Margasatwa Dangku. Lanskap Sembilang Dangku meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dengan cakupan luasan sekitar 1,6 juta ha. Secara administratif lanskap Sembilan Dangku terletak di 19 kecamatan, dimana 14 desa berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan 7 desa terletak di Kaupaten Banyuasin sehingga jumlah desa sebanyak 21 Desa. Data Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (2015) menunjukkan Desa yang berada dalam kawasan tersebut terkategori sangat tertinggal sebanyak 4 desa, tertinggal 16 desa, dan desa berkembang sebanyak 2 desa (Gambar 6.1).

Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. Dengan demikian kategori desa baik desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang mencerminkan aktivitas desa. Pada desa sangat tertinggal dan tertinggal aktivitas ekonomi masih sangat sederhana, sebagian besar masyarakat memiliki pola *subsisten* dalam pola penghidupan, namun kehidupan sosial (gotong royong) masih sangat baik. Sementara itu pada desa berkembang aktivitas ekonomi sudah relatif lebih baik. Hal ini akan berpengaruh pada pola intervensi yang akan dilakukan pada desa yang berada dalam lanskap Sembilang Dangku.

2) Demografi

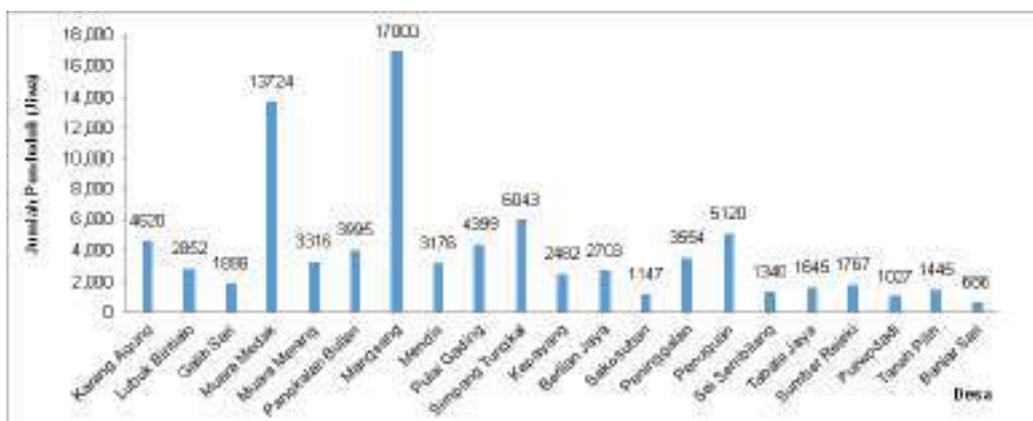
Dinamika kependudukan adalah telaah atas perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika kependudukan selain digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu yang lain, juga dapat untuk mempelajari dan mengantisipasi keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang berada pada lanskap Sembilang Dangku pada tahun 2015 sebanyak 83.939 jiwa yang tersebar di 21 Desa. Konsentrasi penduduk terbanyak berada di Desa Mansang yaitu sebesar 17.00 jiwa dan Desa Muara Medak sebesar 13.724 jiwa (Gambar 6.2). Tingkat kepadatan penduduk dikawasan Sex ratio pada kawasan Sembilang Dangku menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita cenderung lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki.



Gambar 6.1. Kategori Desa Menurut Indeks Desa Membangun di Lanskap Sembilang Danguk, 2015 (Sumber: Kementeian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016)

Pertumbuhan penduduk di areal Lanskap Sembilang Danguk menunjukkan tren positif, hal ini bermakna bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pada periode 2012-2016 jumlah penduduk dalam kawasan mengalami peningkatan sekitar 5%. Laju pertumbuhan per tahun berkisar antara 1,47–1,58% dengan nilai rerata 1,54% per tahun, angka tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka proyeksi pertumbuhan rata-rata provinsi Sumatera Selatan (1,46%) dan nasional (1,36%) pada periode yang sama. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akibat adanya mobiltas penduduk ke daerah-daerah di Kawasan Sembilan Danguk karena alasan ekonomi dan adanya program transmigrasi di masa lalu.



Gambar 6.2. Sebaran Penduduk Pada Kawasan Sembilang Danguk Menurut Desa tahun 2016 (Sumber: BPS, 2017)

3) Infrastruktur Fisik

a) Jalan

Infrastruktur adalah sebuah keharusan yang harus diperhatikan pemerintah dalam memenuhi salah satu tujuan pelayanan publik demi memenuhi salah satu tujuan bernegara yaitu kesejahteraan. Infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas produksi sebuah daerah adalah jalan. Semakin layak infrastruktur jalan pada daerah tersebut, maka semakin baik pula mobiltas penduduk sehingga menghasilkan produktivitas yang juga

semakin baik. Berikut ini gambaran jalan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin sepanjang 1.484,60 km.

Kabupaten Banyuasin mempunyai peran yang besar dalam mengelola jalan kabupaten dengan jumlah 1.341,60 km dengan panjang jalan yang terkategori baik sepanjang 710,13 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik 809,03 km atau sebesar 54% dari total seluruh jalan yang ada di kabupaten Banyuasin mulai dari jalan negara, provinsi hingga kabupaten. Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin terbilang cukup memprihatinkan, sebanyak 34,86% jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat.

Sementara itu, kondisi jalan di Kabupaten Banyuasin relatif sama dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Panjang jalan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 1.341,60 km, sebagian besar merupakan tanggung jawab kabupaten (1.198,60 km). Kondisi jalan dengan kategori baik sepanjang 557,50 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik mulai dari jalan negara, provinsi dan kabupaten sejumlah 652,50 km atau sebesar 49% dari total seluruh jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Infrastruktur di Kabupaten ini tergolong memprihatinkan karena 42,83% berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah, terbukanya akses akan berdampak pada menurunnya biaya produksi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dipahami karena pembangunan infrastruktur setidaknya memiliki dua fungsi utama yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur dasar. Infrastruktur ekonomi yaitu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi. Infrastruktur dasar merupakan fasilitas-fasilitas utama yang menopang penghidupan masyarakat seperti air bersih, jalan arteri desa, listrik, sanitasi lingkungan, hal-hal tersebut diprioritaskan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, data menunjukkan keberadaan kebutuhan infrastruktur dasar yang dianggap prioritas untuk dipenuhi berupa jaringan jalan, air bersih, dan listrik di Lanskap Sembilang Dangku masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari sebesar 34,86% jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat sedangkan pada Kabupaten Musi Banyuasin untuk jalan rusak dan rusak berat sejumlah 42,83%. Data tersebut belum secara detail memperhitungkan jalan-jalan arteri desa yang menghubungkan antar desa dan kota yang ada dalam kawasan.

Potret pelayanan dasar lainnya seperti layanan air bersih juga masih menjadi sebuah permasalahan di Lanskap dimana hampir sebagian besar desa yang ada didalamnya belum memiliki layanan air bersih yang memadai terutama bagi areal-areal yang merupakan kawasan gambut. Pengembangan teknologi dan kelembagaan layanan air bersih merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi mengingat air bersih merupakan prasyarat utama kehidupan. Hal serupa terjadi pada pemenuhan dasar listrik, tingkat elektrifikasi di sebagian besar desa dalam Lanskap belum terlayani fasilitas listrik secara memadai

b) Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya suatu wilayah. Data publikasi BPS 2017 menunjukkan tingkat partisipasi murni pada tingkat sekolah dasar relatif lebih baik dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Tingkat angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA dan sederajat di kedua kabupaten pada tahun 2017 berkisar pada angka 50%. Masih relatif rendahnya tingkat APM tersebut disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sarana pendidikan. Pada kawasan kajian hanya terdapat 3 sekolah menengah yang terletak di Desa Lubuk Bintialo, Desa Galih Sari dan Desa Peninggalan (Tabel 6.1). Sementara penduduk di desa lainnya harus “merantau” ke kecamatan guna dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjut sehingga memerlukan *opportunity cost* yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada sekitar 50% anak berusia sekolah SMA dan sederajat tidak bersekolah sehingga berisiko mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya.

Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan juga merupakan indikator dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), besar kecilnya indeks tersebut sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam capaian bidang pendidikan dan kesehatan. Angka capaian IPM diprosikan sebagai kondisi kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah.

Tabel 6.1. Sarana Pendidikan dan Kesehatan di Lanskap Sembilang Dangku

No	Nama Desa	Sarana Pendidikan					Kesehatan (Puskesmas/ Puskedes)
		TPA	TK/ PAUD	SD	SMP	SMA	
1	Karang Agung	1	1	1	1		1
2	Lubuk Bintialo	1	1	1	1	1	1
3	Galih Sari			2	1	1	1
4	Muara Medak		1	5			1
5	Muara Merang	1	1	1	1		1
6	Pangkalan Bulian		1	2			1
7	Mangsang			1			
8	Mendis	4	1/1	1			1
9	Pulai Gading	1	1/1	4	1		
10	Simpang Tungkal		1	4			1
11	Kepayang			1			1
12	Berlian Jaya		2	2	1		1
13	Sakosuban		1	1			
14	Peninggalan	1	1	4	1	1	1
15	Penuguan		1	2			1
16	Sei Sembilang		1	1			1/1
17	Tabala Jaya		1	1			1
18	Sumber Rejeki	1	1	1	1		1
19	Purwodadi			1			1
20	Tanah Pilih			1			
21	Banjar Sari		1	1			

Sumber: BPS, 2017

4) Mata Pencaharian

Data tahun 2014 ini memperlihatkan bahwa sumber penghasilan utama dari sebagian besar rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah dari usaha perkebunan (75,38%). Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan banyak menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan seperti karet, sawit dan juga sektor perikanan baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Hal tersebut juga tercermin dari kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 40,36% pada tahun yang sama.

Hal senada terjadi juga pada Lanskap Sembilang Dangku yang berbasis kawasan perdesaan dengan karakter agraris yang kuat. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan yaitu bidang pertanian seperti petani, nelayan, buruh perkebunan, dan sektor pertanian lainnya. Pola penghidupan (*livelihood*) masyarakat pada kawasan selain didorong oleh sektor pertanian juga menjalankan beberapa aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif seperti berburu, memanen madu di hutan, memanen rotan dan buah hutan. Di beberapa desa, masyarakat juga masih terlibat dalam pembalakan liar ataupun pertambangan minyak bumi illegal. Pertambangan illegal ini banyak terjadi terutama di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut gambaran komoditi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.

a) Karet

Komoditi karet di Lanskap Sendang merupakan salah satu komoditi andalan yang banyak diusahakan oleh masyarakat secara mandiri. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 69.586 petani karet di Kabupaten Musi Banyuasin dan 31.494 petani karet di Kabupaten Banyuasin. Pada areal lanskap, luas kebun karet rakyat adalah 232.373,50 Ha yang terdiri 66% berupa tanaman usia produktif (menghasilkan), 22% tanaman belum menghasilkan, dan 12% tanaman tua/rusak.

Dari data yang ada, semenjak tahun 2012-2015 terjadi kenaikan luasan tanaman produktif sebesar 88,47% atau rata-rata 30% dalam setahun. Produksi getah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012-2016, yaitu sebesar 132% dengan rata-rata kenaikan per tahun 26,44%. Kenaikan produksi getah terutama terjadi dari tahun 2015-2016 dimana pada tahun 2015 produksi getah sebesar 168.918 ton dan naik hampir dua kali lipat menjadi 332.719,30 ton pada 2016.

Sebaran areal karet rakyat terdapat diseluruh kecamatan yang ada di Lanskap Sendang dengan luasan terbesar di Kecamatan Bayung lencir dan Tanjung Lago. Areal karet di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh areal karet yang menghasilkan dengan luasan di Kecamatan Bayung Lencir lebih dari 30.000 Ha. Karet merupakan komoditi penting bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di lanskap Sembilang Dangku dan mempunyai fluktuasi harga yang tinggi. Berikut gambaran kecenderungan (*trend*) harga karet dunia.

b) Kelapa Sawit

Selain karet penduduk dalam kawasan menjadikan komoditas sawit sebagai mata pencaharian utama. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 54.502 petani kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dan 32.685 petani kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin. Total luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat yang diusahakan sebesar 43.711,50 Ha pada tahun 2016, naik sebesar 75,44% dari tahun 2012, dimana rata-rata terdapat penambahan luasan hampir 19% per tahun.

Pada sisi produksi terdapat fluktuasi jumlah produksi yang dihasilkan dari Lanskap Sendang, dimana penambahan areal panen secara konstan tidak selalu menghasilkan kenaikan produksi secara linear. Tren penurunan jumlah produksi sawit rakyat dimulai pada tahun 2015 sampai 2016, dimana produksi pada tahun 2016 turun sekitar 35% meskipun luas areal panennya hanya menurun sebesar 1,6%

Penurunan jumlah produksi merupakan konsekuensi dari rendahnya produktivitas sawit rakyat yang ada. Berdasarkan data yang ada produktivitas lahan sawit rakyat di lanskap berkisar 15,6 sampai 10,26 ton/ha atau kurang dari setengah target nasional yang mematok produktivitas TBS 35 ton/ha/th.

Harga normal Tandan Buah Segar (TBS) sawit berkisar pada angka Rp 1.600– Rp 1.700 pada tahun 2015 turun drastis hingga menyentuh angka Rp 400 sebagai akibat menurunnya permintaan pasar global dan juga rendahnya nilai tukar rupiah. Di tingkat global pun harga minyak sawit dan juga minyak nabati lainnya mengalami penurunan. Harga sawit sangat fluktuatif dan cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2008, harga sawit mengalami penurunan drastis hingga pada titik terendah. Setelah itu harga merangkak naik hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 2011. Dari titik tersebut hingga pertengahan tahun 2018 harga berfluktuasi dengan kecenderungan terus menurun. Dibandingkan dengan harga di titik puncak tahun 2011 (1.290 USD/metric ton), harga di pertengahan tahun 2018 hanya 51%nya saja (660 USD/metric ton).

Komoditi kopi juga banyak diusahakan masyarakat pada Lanskap Sembilang Dangku. Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin banyak dibudidayakan di Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir. Sedangkan di wilayah Kabupaten Banyuasin banyak diusahakan di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Pulau Rimau. Kelapa merupakan salah satu produk unggulan areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama pada wilayah yang masuk di Kabupaten Banyuasin. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 14.663 petani kelapa di Kabupaten Musi Banyuasin dan 33.713 petani kelapa di Kabupaten Banyuasin. Secara ekonomis, produk kelapa mampu bersaing dengan produk perkebunan lainnya.

Produk kelapa semuanya dikelola oleh masyarakat. Pada awalnya produk kelapa dijual dalam bentuk kopra, tetapi beberapa tahun terakhir kelapa banyak dijual dalam bentuk utuh bersama tempurung dan sabutnya. Kelapa utuh ini sekarang banyak diminati oleh

negara-negara seperti Tiongkok dan Thailand, sebagian juga dikirim ke Jakarta. Pada saat ini pengiriman kelapa mencapai 60-70 kontainer per hari, sehingga tidak mengherankan kelapa menempati posisi ke-12 sebagai komoditi unggulan ekspor Sumatera Selatan, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 1 trilyun per tahun.

c) Padi

Padi merupakan salah satu komoditi unggulan pada areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama untuk wilayah yang berada di Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut tercermin dari luasan panen yang mencapai sekitar 20% dari luas total panen provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut memiliki arti bahwa areal Lanskap Sembilang Dangku memiliki posisi dan peran yang penting bagi produksi pangan di level regional. Untuk produktivitas padi di Lanskap Sembilang Dangku mencapai 4,37 ton/ha/tahun dimana lebih rendah dari produktivitas provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 4,98 ton/ha/tahun.

Pada areal lanskap Sembilang Dangku, pertanian padi tersebar merata di seluruh kecamatan meskipun ada yang memiliki hanya padi ladang (Kecamatan Batanghari leko dan Tungkal jaya). Sentra pertanian padi terluas ada di kecamatan Lalan, Pulau rimau, Rantau bayur, Tanjung lago dan Banyuasin II. Produktivitas lahan pertanian padi, nilainya cukup merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Keluang yang produktivitas padi sawahnya pada tahun 2014 melebihi 6 ton/ Ha.

d) Perikanan Lebak Lebung

Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar wilayahnya secara geografis merupakan dataran rendah yang banyak dialiri sungai dan rawa-rawa. Rawa lebak lebung merupakan rawa-rawa yang terdapat disekitar aliran sungai dimana areal tersebut tergenang saat musim penghujan dan kering saat musim kemarau. Fluktuasi ketinggian air antara musim penghujan dan musim kemarau sangat tinggi, dimana pada saat tergenang disebut sebagai lebak dan pada saat surut, sisa-sisa genangan yang ada disebut sebagai lebung; sistem pasang surut inilah yang secara bersama-sama disebut sebagai sistem lebak lebung.

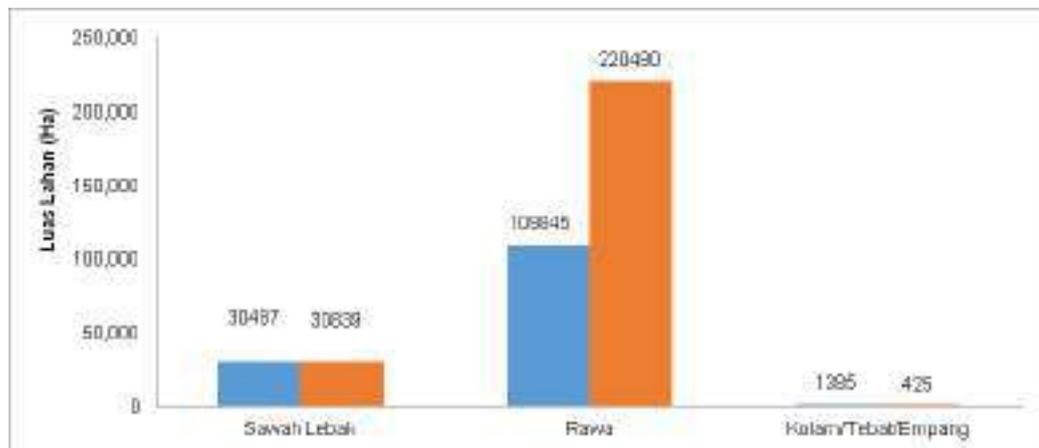
Areal lebak lebung melalui sistem pasang surutnya menciptakan sebuah mekanisme pompa nutrisi alami yang berasal dari dekomposisi seresah vegetasi sehingga mengandung unsur hara tinggi yang cocok untuk kegiatan pertanian maupun perikanan. Lebak biasanya berada di antara dua buah sungai besar di dataran rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang genangan airnya dipengaruhi pasang surut air laut harian,lebak tergenang selama musim hujan dan berangsurangsur kering pada musim kemarau.

Ada tiga jenis lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan. Lebak pematang atau dangkal, bila genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan;

lebak tengahan, dengan genangan air antara 50–100 cm selama 3-6 bulan; dan lebak dalam bila genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami dikenal dengan istilah Lebak Lebung.

Propinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar potensi tersebut meliputi perairan laut dengan luas 95.000 Km² dan perairan umum seluas 2,5 juta Ha yang terdiri 15% rawa, 43% lebak (total rawa lebak 58%), 31% sungai besar serta anaknya, dan 11% danau (DKp, 2002). Sekitar 146.279 hektar areal lebak lebung dikelola 220 ribu petani di Sumatera Selatan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Secara kewilayahan dari areal lebak lebung yang ada, sebanyak 58,96 persen tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir. Sisanya 41,04 persen ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Muaraenim, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, dan Kota Palembang.

Lebak lebung selain berfungsi sebagai kawasan ekologis memiliki peran dalam membentuk kebudayaan lokal. Khususnya lewat interaksi petani dengan alam yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan terhadap alam. Sistem usaha tani yang dibangun dalam kebudayaan lebak lebung adalah sistem terpadu antara tanaman semusim (padi sawah, palawija, dan sayuran), ternak (kerbau dan itik), serta usaha penangkapan ikan. Potensi lahan sawah lebak dan rawa yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan serta jumlah kolam/tebat/empang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Gambar 6.3



Gambar 6.3. Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin

Sumber: Data BPS, 2017

Di areal lebak lebung tanaman tanaman kelapa, mangga, durian dan duku, diusahakan masyarakat pada area “pematang” (tidak tergenang air). Palawija dan sayuran ditanam bersamaan dengan padi yang ditanam pada galangan-galangan sawah lebak sedangkan pada musim hujan, petani menangkap ikan, menggembala

ternak, atau mengusahakan kerajinan tangan, seperti tenun pakaian adat, anyaman tikar, dan alat rumah tangga.

Pada saat ini terdapat ancaman keberlanjutan sistem perikanan lebak lebung yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait. Namun, keberadaan lebak lebung terancam oleh aktivitas masyarakat yang berdampak pada pencemaran perairan, masifnya konversi areal lebak lebung, kerusakan sistem tata air alami akibat pembangunan kanal-kanal dan perubahan iklim. Pada konteks Lanskap Sendang, data yang ada menunjukkan penurunan hasil tangkapan perikanan air tawar, meskipun belum ada data yang spesifik menjelaskan koneksinya dengan perubahan pada sistem lebak lebung

e) Peternakan

Sumber protein yang didapatkan masyarakat area lanskap meliputi sumber protein hewani dari peternakan. Berikut ini gambaran jumlah ternak besar di area lanskap SENDANG tahun 2012 sampai dengan 2016. Jumlah ternak besar yang paling banyak dibudidayakan adalah ternak sapi. Pada tiap tahunnya populasi ternak sapi cenderung meningkat meskipun terlihat fluktuatif. Pada tahun 2012 populasi sapi hanya 29.357 ekor meningkat pada tahun 2016 menjadi 64.672 ekor. Kambing menjadi posisi kedua populasi terbanyak setelah sapi dengan jumlah 44.001 ekor pada tahun 2016. Kambing menjadi pilihan kedua masyarakat lanskap Sendang dalam mengkonsumsi sumber protein hewani setelah sapi.

5) Kemiskinan

Kedua kabupaten yang ada masih mempunyai beban terhadap tingkat kemiskinan warganya. Jumlah keluarga miskin di kedua kabupaten ini dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa di kedua kabupaten presentasi penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang nyata selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016). Sebagai perbandingan prosentase penduduk miskin pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 adalah 13,2% sedangkan angka nasional 10,86%. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu pada angka 17,27% pada tahun 2016 diatas angka provinsi (13,2%) dan nasional (10,86 %). Sementara di Kabupaten Banyuasin tingkat kemiskinannya lebih rendah yaitu pada angka 11,72% pada tahun yang sama.

Tingkat kemiskinan ini apabila dikaitkan dengan corak kehidupan agraris di Lanskap Sembilang Dangku, dapat tercermin dari Nilai Tukar Petani. Nilai tukar petani secara umum di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2017 adalah 96,41. Nilai Tukar Petani dibawah 100 ini menggambarkan bahwa kenaikan harga konsumsi lebih besar daripada kenaikan harga produksi petani.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 untuk Kabupaten Musi Banyuasin 66,45 dan Kabupaten Banyuasin 65,01. Angka tersebut di bawah angka nasional maupun

provinsi. Di tahun yang sama IPM Indonesia 70,18 sedangkan IPM Provinsi Sumatera Selatan 68,24. Secara khusus IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 variabel pokok. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita riil.

6) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2015). Penduduk usia kurang 15 tahun meski telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak semua angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan sehingga menghasilkan angka pengangguran. Berdasarkan data yang ada di dua kabupaten ini tingkat pengangguran cenderung naik dalam kurun waktu 2013-2015.

Gambar 6.4 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten cenderung fluktuatif, dilihat dari sisi ini kabupaten Banyuasin relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Pertumbuhan ekonomi kedua daerah berada pada interval 2,29%-6,28%. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada penurunan angka pengangguran, bila pada tahun 2013 angka pengangguran sebesar 22.684 menurun menjadi 21.215 orang pada tahun 2015.

Komparasi data pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menunjukkan kontra teori, pada tahun 2013-2014 peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh penurunan angka pengangguran (*trade-off*), terlihat bahwa pada periode yang sama angka pengangguran meningkat dari 7.883 orang menjadi 10.434 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Diketahui bahwa kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari sektor primer terutama migas dan gas, sektor ini bersifat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja relatif rendah (Gambar 6.4).



Gambar 6.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muba (Sumber: Kabupaten Dalam Angka, 2017 (diolah))

b. Kondisi Eksisting Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat di Kawasan Kelola Sendang berdasarkan Unit Analisis Daerah Aliran Das (DAS) Kawasan

1) Etnisitas

Di era 1980-an, pemerintah orde baru sedang gencar melakukan pemerataan penduduk dengan program transmigrasi sehingga banyak di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lokus program tersebut. Diketahui, sebelum era otonomi daerah tahun 1999, Kabupaten Banyuasin merupakan bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya sebelum adanya pemekaran lanskap Sembilang Dangku terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam survei ini keberadaannya diklasifikasikan menurut Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Hulu, DAS Tengah, DAS Hilir. Dilihat dari etnisitas, penduduk yang berdomisili di sepanjang DAS merupakan suku asli (suku sekayu) karena memang satu kesatuan dalam pemerintah daerah Musi Banyuasin. Namun, dalam perjalanannya etnisitas relatif bervariasi terdiri atas penduduk asli, Jawa, Bali, Sunda dan Bugis. Desa yang masyarakatnya relatif homogen yaitu Desa Bintlialo (DAS Hulu), Desa Muara Merang (DAS Tengah), Desa Karang Agung (DAS Hilir). Desa-desa tersebut sebagian besar didiami suku asli (Suku Sekayu). Sementara itu, Etnis Jawa berdomisili di sebagian besar desa yang tersebar di sepanjang DAS, hal ini didorong oleh adanya program transmigrasi pada masa lalu. Desa-desa yang “bernuansa” etnis Jawa yaitu Desa Berlian Jaya dan Desa Peninggalan (DAS Hulu), Galih Sari, Desa Banjar Sari, Desa Purwodadi, Desa Sumber Rejeki yang terdapat di DAS Hilir. Suku Bugis cenderung berdomisili di bagian hilir seperti di desa Tanah Pilih dan Sunsang IV.

Pada awalnya bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sekayu, namun akulturasi budaya melalui pergaulan sehari-hari dan adanya pernikahan antara suku asli dan pendatang lambat laun mengikis keberadaan bahasa Sekayu di daerah. Pendatang dari suku Jawa, Sunda dan Bugis dalam percakapan dalam keluarga menggunakan bahasa ke-ibu-anya. Saat ini variasi linguistik mulai dirasakan, misalnya pada DAS Hilir linguistik dominan bahasa Jawa (Desa Sumber Rezeki, Desa Purwodadi, Desa Banjar Sari), bahasa Bugis (Desa Tanah Pilih).

2) Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga yang tercatat dalam survey ini mencapai 312 orang. Mereka memiliki keragaman hubungan dengan kepala rumah tangganya. Hubungan terbanyak adalah anak atau pun menantu. Peran suami atau anak laki-laki sangat dominan dalam rumah tangga, hal ini terkait dengan sistem *patrilinial* dalam masyarakat. Kondisi rumah tangga yang disurvei tidak hanya terdiri atas keluarga inti (kedua orang tua anak) namun terdapat juga keluarga dalam arti luas kakek, nenek ataupun menantu. Bila dilihat dari rata-rata anggota keluarga di lanskap Sembilan Dangku yaitu rata-rata sebanyak 5 jiwa.

Tabel 6.2. Profil Lanskap Sembilang Dangku Berdasarkan DAS

Indikator	Klaster Menurut DAS		
	DAS Hulu	DAS Tengah	DAS Hilir
Etnisitas	<p>Dominan Penduduk Asli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bintialo 2. Sako Suban <p>Dominan Suku Jawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan Bulian 2. Berlian Jaya 3. Simpang Tungkal 4. Peninggalan 	<p>Dominan Penduduk Asli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Merang <p>Dominan Jawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendis 2. Mangsang 3. Pulai Gading <p>Campuran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Medak 2. Kepayang 	<p>Dominan Penduduk Asli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karang Agung 2. Penuguan <p>Dominan Jawa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gali Sari 2. Banjar Sari 3. Purwodadi 4. Sumber Rejeki 5. Tabala Jaya <p>Dominan Bugis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Pilih Campuran 2. Sungsang IV
Rata jumlah anggota keluarga (Jiwa)	5	5	5
Sektor dan komoditas utama	Petanian, perkebunan (karet dan sawit), pertambangan	Pertanian, perkebunan, dan pertambangan	Perikanan (nelayan, pertanian dan sawah)
Akses menuju kawasan	Jalan darat	Jalan darat dan air	Jalan air
Ketersediaan Pasar	<p>Terdapat Pasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bintialo 2. Pangkalan Bulian 3. Simpang Tungkal 4. Sako Suban 5. Peninggalan 	<p>Terdapat pasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Merang 2. Mangsang 3. Pulai Gading 4. Kepayang 	<p>Terdapat pasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karang Agung 2. Gali Sari 3. Penuguan

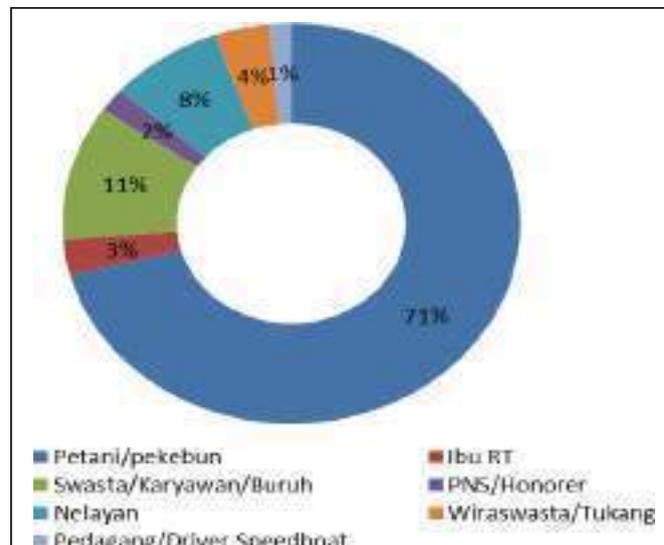
Sumber: hasil olah data survei Lapangan, 2016

3) Struktur Nafkah

Kondisi lanskap Sembilang Dangku terdiri dari DAS Hulu, Tengah dan Hilir dimana pada bagian DAS Hulu dan Tengah dominan sektor pertanian dan pertambangan, dan perikanan sehingga pekerjaan utama sebagai petani/pekebun (71%), swasta/buruh/karyawan (11%), Nelayan (8%). Para penduduk lokal umumnya bekerja sebagai petani karet sedangkan transmigran dari Suku Jawa, Sunda dan Bali umumnya bertani padi/sayur, walaupun ada juga yang berprofesi sebagai petani karet. Sementara itu masyarakat yang berdomisili di bagian hilir dengan etnis Bugis umumnya bekerja sebagai nelayan ikan di sungai, rawa dan laut (Gambar 6.5) Adanya asimilasi etnis berpengaruh pada budaya kemudian berdampak pola *livelihood* masyarakat. Penduduk lokal terbiasa dengan sistem ladang berpindah, sementara itu penduduk etnis Jawa dominan dalam pertanian sawah, sementara itu suku Bugis cenderung pada perikanan terutama nelayan.

Sistem penghidupan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) sistem pertanian subsisten (ladang), pada awalnya sistem penghidupan masyarakat bersifat ladang berpindah. Sistem ini dilakukan masyarakat guna "replanting" karet yang sudah tua, adapun lahan dibuka dengan cara membakar lahan. Setelah karet berumur 3 tahun kemudian ladang

ditinggalkan. 2) sistem sawah, pertanian dilakukan dengan intensifikasi sawah yang ada dengan tanama utama Padi dan Palawija.



Gambar 6.5 Pekerjaan Utama Responden (Sumber: data lapang (diolah), 2016)

4) Aset

Jika melihat proporsi antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada didapat rata-rata ketersediaan lahan yang masih mencukupi sebagai aset sumber penghidupan masyarakat Lanskap Sembilang Dangku. Namun yang harus diingat adalah fakta bahwa sebagian lahan besar lahan yang tersedia berupa kawasan hutan negara dimana wewenang pengelolaannya diatur melalui mekanisme prosedural yang tidak selalu mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kepemilikan aset dapat menunjang penghidupan rumah tangga sehingga keberadaan aset memiliki peran strategis bagi masyarakat perdesaan. Modal alam memiliki daya dukung terhadap pengembangan pertanian, peternakan maupun pertambangan. Jika melihat proporsi antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada didapat rata-rata ketersediaan lahan yang masih mencukupi sebagai aset sumber penghidupan masyarakat Lanskap Sembilang Dangku. Namun yang harus diingat adalah fakta bahwa sebagian lahan besar lahan yang tersedia berupa kawasan hutan negara dimana wewenang pengelolaannya diatur melalui mekanisme prosedural yang tidak selalu mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi sumber penghidupannya masyarakat berinisiatif untuk mengakses lahan hutan negara, baik secara sadar atau tidak bahwa lahan yang mereka garap merupakan kawasan hutan yang pemanfaatannya harus melalui prosedur perizinan. Hasil kajian yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga tersebut tidak memiliki izin resmi, hampir seluruh rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan lebih dari 1 Ha dan hanya sebagian kecil saja yang kurang dari 1 Ha (10%). Data menunjukkan dari total 29,651 rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 64,4 % tidak

memiliki izin. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat terhadap lahan hutan **secara legal** masih sangat terbatas.

Demikian pula dengan akses terhadap sumberdaya hutan non lahan, dari 34,118 rumah tangga yang memungut hasil hutan tanpa menguasai lahan di kawasan hutan, hampir seluruhnya (97,7%) tidak memiliki izin, hanya sebesar 2,3% yang berizin. Bila ditelusuri lebih dalam diperoleh informasi bahwa sebagian besar izin tidak tertulis. Berikut akan dijelaskan jenis aset yang dimiliki oleh masyarakat di Lanskap Sembilang Dangku.

a) Aset Fisik

Kepemilikan aset merupakan unsur penting dalam mengukur keberlanjutan kehidupan. Rata-rata masyarakat memiliki rumah yaitu sebesar 95,2% dengan status milik bersama (86,3%), dan properti yang diperoleh dengan membeli sebesar 55,3% sisanya merupakan warisan. Aset fisik sebagai penopang hidup yang dimiliki masyarakat di kawasan lanskap Sembilang Dangku berupa sawah, kebun karet, dan rumah tempat tinggal. Hasil survei menunjukkan rata-rata masyarakat memiliki aset sawah sebanyak 17,2%. Dilihat dari aspek kepemilikan, lahan sawah merupakan kepemilikannya secara bersama dalam satu keluarga (83,3%). Lahan sawah tersebut sebagian besar berasal dari warisan yaitu sebesar 64,4%. Perlu untuk dicermati bahwa lahan sawah yang dimiliki hanya 44,8% yang bersertifikat.

Selain itu, masyarakat juga memiliki ladang (2,9%) yang diperoleh membeli dan warisan keluarga (37,5%). Sebagai mata pencaharian utama, khususnya masyarakat yang berdomisili di DAS Hulu dan DAS Hilir sehingga hampir separuh masyarakat memiliki Kebun karet sebesar 49,5% dengan status kepemilikan bersama 72,6%. Kemudian, sebagian masyarakat juga memiliki aset kebun Sawit (34,2%). Kepemilikan kebun kelapa sawit sebagian besar bermitra dengan perusahaan (Inti-Plasma), beberapa desa yang menggantungkan kehidupan pada komoditi sawit yaitu Desa Galih Sari, Desa Mangsang dan Desa Muara Medak.

Disamping itu, masyarakat di lanskap Sembilang Dangku juga ada yang menggeluti usaha tambak (1,6%) dan sarang walet (4,8%). Pekerjaan tersebut sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang berada di DAS Hilir seperti penduduk di Desa Tanah Pilih dan Sei Sembilang. Kemudian, masyarakat di kawasan sebagian besar sudah memiliki *mobile phone* (85,2%). Keberadaan *mobile phone* tersebut telah mempermudah arus komunikasi baik dengan masyarakat dalam satu desa maupun antar desa. Survei juga menemukan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki motor (83%), mobil (4,5%), kapal (9,9%).

Namun demikian, kepemilikan aset ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan unggas masih relatif sedikit. Masyarakat yang memiliki aset sapi hanya sebesar 3,2%, kerbau (0,3%), kambing (5,9%), dan unggas (0,3%). Hal yang sama juga terjadi pada kepemilikan aset ternak ikan (3,2%) dan udang (0,3%).

Aset penting lainnya yang masih relatif kecil dimiliki oleh masyarakat adalah traktor. Masyarakat yang memiliki mesin traktor hanya 0,8% saja, hal ini disebabkan sebagian besar pertanian sawah masih bersifat tradisional dan mengandalkan musim sehingga penggunaan mesin traktor masih relatif sedikit. Padahal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dibutuhkan sentuhan teknologi sehingga diharapkan pendapatan petani dapat meningkat.

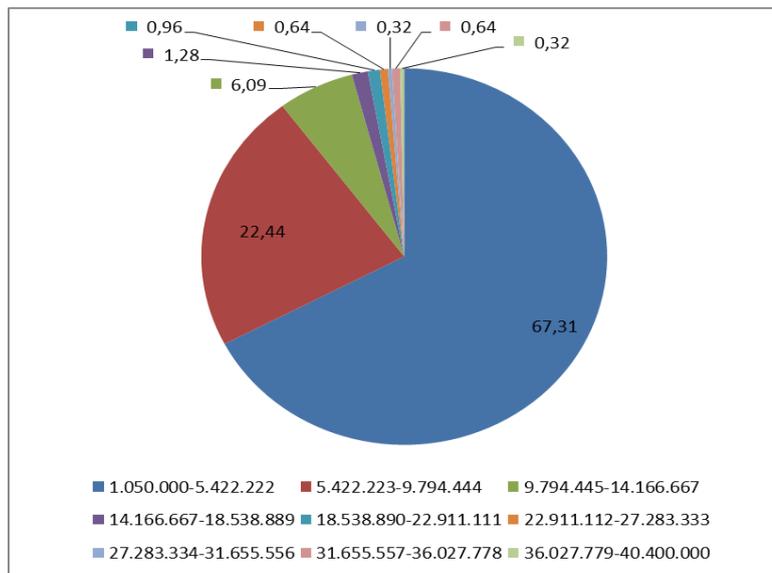
b) Aset Finansial

Kepemilikan aset finansial dapat mendorong pertumbuhan desa melalui investasi. Salah satu sumber untuk melakukan investasi adalah ketersediaan tabungan. Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa sebanyak 32,1% memiliki tabungan dan selebihnya belum memiliki tabungan. Hal ini menguatkan bahwa salah satu ciri dari masyarakat di desa sangat tertinggal dan tertinggal masih hidup dalam tahap *subsisten*. Artinya pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tabungan yang dimiliki masyarakat disimpan di rumah, bank, koperasi dan logam mulia. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan berpengaruh pada preferensi tempat menabung. Hal ini terlihat dari masih relatif rendahnya masyarakat yang menyimpan uang di Bank yaitu hanya 10,2% dengan jenis %, koperasi dan lainnya masing-masing 0,3% dan logam mulia 2,3% dan selebihnya disimpan sendiri.

Bila dilihat dari besaran tabungan yang dimiliki masyarakat, sebagian besar memiliki tabungan sebesar 1-5 juta (37,4%), dan 5-10 juta (13,2%), dan di atas 25 juta sebanyak 6,6%, sementara itu selebihnya keberatan menjawab.

5) Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan menjadi salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan maka tingkat kesejahteraan secara ekonomi akan semakin meningkat. Secara makro, gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin relatif tinggi dan diatas rata-rata provinsi. Rona awal pendapatan rumah tangga di lanskap Sembilang Dangku menunjukkan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp. 5.504.052. Bila diklasifikan 90% rumah tangga memiliki pendapatan di bawah 10 juta per tahun, dan kalau disandingkan dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang maka sebagian besar penduduk masih berada dalam kategori hampir kemiskinan dan miskin (Gambar 6.6). Pola penghidupan di masing-masing DAS berimplikasi pada tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Masyarakat dibagian Hulu DAS sebagian besar mengandalkan tambang tradisional seperti Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Bintialo, pekerja buruh pekerbunan dan pencari kayu (Desa Simpang Tungkal), dan petani sawit dan karet. Sementara itu, pada DAS Tengah didominasi oleh perkebunan karet dan sawit. Kemudian DAS Hilir merupakan daerah perairan yang sangat bergantung pada sawah dan hasil tangkapan ikan.



Gambar 6.6. Sebaran Pendapatan Masyarakat di Lanskap Sembilang Danguku, 2016 (persentase)

Bila dilihat menurut dekomposisi DAS menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili pada DAS Tengah relatif memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan DAS Hulu dan Hilir. Hal ini disebabkan mata pencaharian utama DAS Tengah ditopang oleh sektor perkebunan terutama Karet dan Sawit. Pendapatan masyarakat terendah di DAS Tengah sebesar Rp. 1.875.000 per bulan dan tertinggi Rp. 33.983.333 per bulan, sebanyak 26,96% masyarakatnya berpendapatan pada kisaran Rp6.461.906 sampai dengan Rp11.048.810. Sementara itu, pendapatan masyarakat di DAS Hulu, pendapatan terendah sebesar Rp. 1.050.000, sebagian besar masyarakat (85,87%) berpendapatan di bawah 7 juta per bulan, hal yang relatif sama juga dijumpai di DAS Hilir.

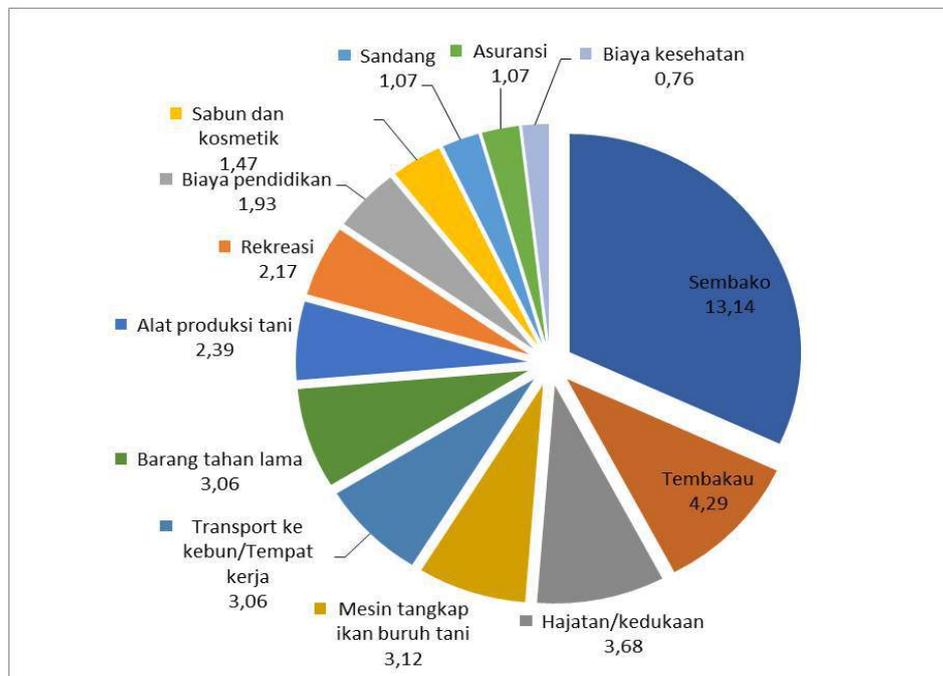
Pengeluaran rata-rata masyarakat sebesar Rp. 3.872.522 per bulan, namun dijumpai sebanyak 20,2% yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih besar dari pendapatan. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di lanskap Sembilang Danguku.

Pengeluaran rata-rata masyarakat sebesar Rp. 3.872.522 pr bulan, namun dijumpai sebanyak 20,2% yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih besar dari pendapatan. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di lanskap Sembilang Danguku. Dekomposisi pengeluaran yang dilakukan masyarakat yang dilihat dari indikator terpilih seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan alat produksi menunjukkan konsumsi bahan makan pokok sebesar 13,34%, sabun dan kosmetik (1,47%), sandang (1,07%). Sementara itu, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 1,93% dan 0,76%. Masih rendahnya alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menyebabkan peningkatan kualitas sumber daya manusia relatif lambat. Padahal peningkatan SDM diperlukan agar masyarakat diperdesaan mampu keluar dari perangkap

kemiskinan dan memiliki pemahaman yang tinggi terhadap kelestarian hutan yang ada disekitar desa sehingga keberlanjutan sumber daya dapat terjaga.

Selanjutnya, pengeluaran yang bersifat investasi seperti penambahan alat produksi tani sebesar 2,39%, mesin tangkap (3,12%). Alokasi pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran kebutuhan pokok masih dominan, ironisnya, pengeluaran untuk Tembakau (rokok) sebesar 4,29%, angka ini lebih besar dari pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan penambahan *capital stock*. Implikasinya sebagian masyarakat masih bersifat subsisten, hal tersebut ditunjukkan pula oleh masih minimnya pengeluaran untuk investasi jangka panjang seperti pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang masih relatif rendah.

Namun demikian, aspek sosial masyarakat di lanskap Sembilang Dangku masih relatif terjaga dengan baik misalnya budaya gotong royong dan bentuk kegiatan sosial lainnya. Hal ini tercermin dari alokasi dana pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang relatif tinggi. Sumbangan untuk acara hajatan/kenduri /kedukaan rata-rata sebesar 3,68% (Gambar 6.7).



Gambar 6.7 Persentase Alokasi Pengeluaran Masyarakat (terpilih) di Lanskap Sembilang Dangku, 2016

6) Akses ke Kredit

Data hasil lapang menunjukkan bahwa sebanyak 21,18% rumah tangga memiliki akses ke kredit, sementara selebihnya belum memiliki akses yaitu sebesar 79,82%. Masyarakat yang meminjam kredit di perbankan sebesar 49,2%, koperasi (27,7%), anggota keluarga/saudara/ kerabat (2,22%). Selain itu, masyarakat juga masih memanfaatkan jasa rentenir untuk memenuhi “kebutuhannya” yaitu: sebesar 0,3%. Prilaku sebagian masyarakat desa yang enggan berurusan dengan administrasi mendorong adanya rentenir. Masyarakat dapat

meminjam uang kapan saja ke rentenir dan tidak perlu melalui prosedur yang dirasa berbelit. Sementara itu, bila masyarakat meminjam uang dari bank, mereka membutuhkan *co/leteral* seperti surat tanah dan bangunan sedangkan aset yang dimiliki rata-rata tidak bersertifikat. 44,4%), surat kendaraan (7,9%) dan lainnya

Dana hasil pinjaman/kredit sebagian besar digunakan untuk usaha produktif seperti modal usaha (21,5%), membeli tanah (20,0%), membeli bibit dan pupuk (4,65%), pendidikan dan kesehatan masing-masing 4,6% dan 3,1%, dan 10,8% masyarakat yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pinjaman uang yang dilakukan masyarakat berada pada besaran pinjam rata-rata diatas 10 juta dengan total persentase sebesar hampir 50%.

Adapun agunan untuk mendapat pinjaman yaitu tanah/rumah dan surat kendaraan, sebanyak 44,5% meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah dan 7,9% agunan kendaraan sedangkan sisanya diperoleh dengan bentuk agunan lain. Pemanfaatan dana untuk usaha yang produktif akan berdampak jangka panjang terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Investasi untuk modal usaha digunakan untuk meningkatkan volume usaha misalnya menambah unit usaha sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Sementara itu, penggunaan dana untuk pendidikan dan kesehatan juga akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan secara *gradual* akan mendorong perbaikan kesejahteraan.

Namun, rona awal dari survei menunjukkan terdapat 10,8% masyarakat menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bermakna bahwa dana tersebut tidak akan menciptakan *multiplication income* bagi masyarakat. Kalau demikian dalam jangka panjang masyarakat akan sulit memperbaiki tingkat kesejahterannya.

7) Akses Informasi

Keterbukaan masyarakat dapat dilihat dari terhadap informasi, hasil survei menunjukkan rata-rata masyarakat telah mengakses TV secara rutin sebagai sumber informasi (87,7%). Sementara akses terhadap radio dan media cetak (majalah, koran, buku) relatif rendah dengan rata-rata dibawah 10%. Penduduk rata-rata telah rutin menggunakan *mobile phone* sebagai sarana komunikasi 49,8%. Namun demikian akses terhadap internet masih relatif rendah hanya 24,7%. Adapun jenis informasi yang diakses melalui media TV oleh masyarakat di Lanskap Sembilan Dangku yaitu berita politik dan ekonomi (31,7%), ilmu pertanian (17,4%) dan hiburan (40,2%).

Keterbukaan terhadap akses informasi, pada satu sisi diyakini mampu memberikan tambahan pengetahuan masyarakat, misalnya akses berita bidang ekonomi dan pertanian.

8) Kelembagaan, Kerjasama dan Konflik

a) Kelembagaan Pemerintah Desa

Kelembagaan formal yang ada di desa mutlak dibutuhkan sebagai pelaksana pemerintah ditingkat desa. Pemerintah desa sangat menentukan arah pembangunan desa terutama pasca lahirnya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan desa oleh pemerintah daerah seyogyanya melibatkan segenap *stakeholder* dalam penentuan program kerja, terutama program-program untuk pelestarian lingkungan.

b) Organisasi/kelompok

Institusi sangat berperan dalam mendorong kemajuan suatu daerah, baik institusi dalam pengertian formal atau non formal atau institusi dalam artian yang luas (aturan, adat istiadat). Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat di perdesaaan yang berada dalam lanskap Sembilang Dangku sebesar 72,4% telah bergabung dalam kelompok tani, dan bila dilihat dari partisipasi kepala keluarga dalam kelompok tani menunjukkan tingkat yang sangat baik (96,5%). Demikian pula bila ditelaah dari tingkat keaktifan dalam kelompok tani, sebanyak 73,3% masyarakat yang menjadi anggota tercatat sering hadir, jarang hadir 25,1%, dan tidak pernah hadir 1,6%. Sementara itu, masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan sebanyak 12%. Keikutsertaan anggota dalam keluarga dalam kelompok nelayan kepala keluarga (77,8%), dengan tingkat keaktifan dalam kelompok nelayan sebanyak 48% sering hadir dalam pertemuan, 16% jarang hadir dan sisanya tidak pernah hadir (36%). Kurangnya partisipasi nelayan dalam setiap rapat lebih dipengaruhi jam kerja nelayan tidak tentu tergantung dari cuaca.

Disamping itu, masyarakat di area pertanian sawah tergabung dalam kelompok pengguna air sebanyak 10,8%, dilihat dari keikutsertaan kepala keluarga sebanyak 53,8% dengan tingkat keaktifan sebesar 35% sering hadir, jarang hadir (15%) dan selebihnya tidak pernah hadir. Disamping itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga sangat tinggi, sebanyak 83,1% RT sering hadir dalam kegiatan gotong royong, jarang hadir 16,2% dan tidak pernah hadir sebanyak 0,7%.

c) Kerjasama dengan pihak lain

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat desa di kawasan Sembilang Dangku memiliki tingkat kenyamanan di lingkungan tetangga sekitar sebesar 92,9% dan memiliki rasa saling percaya (98,8%). Hal serupa juga terjadi di lingkungan tingkat desa, tingkat kenyamanan dengan warga satu desa sebesar 92,3% dan rasa percaya 94,1%. Hal yang sama juga berlaku untuk kenyamanan dengan kelompok (97,7%) dan rasa percaya (98,65%). Hubungan dengan aparat desa (98,2%) dan tingkat kepercayaan sebesar 98,8%, tingkat kenyamanan terhadap tenaga penyuluh (90,9%). Kepercayaan terhadap tenaga penyuluh (98,9%).

Namun hasil survei juga mengungkapkan bahwa masyarakat di Lanskap Sembilang Dangku relatif **resisten** terhadap pendatang. Tingkat kenyamanan bila bekerjasama dengan fasilitator desa sebesar 64,5% dan tingkat kepercayaan hanya sebesar 74,0% , ironinya tingkat kenyamanan terhadap orang asing di luar desa hanya 47% dengan tingkat kepercayaan 53%. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar masyarakat masih

relatif tertutup dengan “orang asing” di luar komunitasnya terutama terjadi pada masyarakat yang relatif homogen.

d) Konflik

Hasil studi menunjukkan bahwa sebesar 24,2% responden menyatakan terdapat konflik di kawasan lindung. Wujud konflik pemanfaatan lahan yang paling mengemuka pada lanskap Sembilang Dangku adalah antara masyarakat dengan kawasan konservasi. Saat ini kawasan-kawasan konservasi tersebut mengalami tekanan perambahan lahan yang cukup tinggi. Taman Nasional Berbak dan Sembilang SPTN Wilayah II terdapat perambahan kawasan oleh masyarakat. Suaka Margasatwa Bentayan mempunyai persoalan yang cukup pelik karena sebagian besar kawasannya telah dirambah oleh masyarakat. Data menunjukkan pada akhir 2016 terdapat telah ada 1.449 KK yang merambah kawasan Bentayan, selain itu Hutan Suaka Margasatwa Bentayan juga mempunyai persoalan tumpang tindih lahan dengan PT London Sumatera seluas 31,615 ha.

Konflik pemanfaatan lahan ini terjadi antara beberapa pemangku kepentingan. Secara umum, berdasarkan hasil survei terhadap pihak/pemangku kepentingan, konflik dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Konflik masyarakat dengan perusahaan
Konflik antara perusahaan dengan perusahaan terkait dengan batas konsesi antar perusahaan (konsesi perusahaan dengan kawasan hutan/kawasan konservasi). seperti yang terjadi di Desa Tabala Jaya, Desa Berlian Jaya da Desa Mangsang. Adanya pengakuan hak milik oleh masyarakat terhadap lahan yang telah diusahakan oleh korporasi.
- 2) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (terkait batas desa dengan batas kawasan hutan), misalnya terjadi di Desa Mangsang, Desa Simpang Tungkal, Desa Berlian Jaya dan Tabala Jaya. Hal ini disebabkan oleh adanya inkonsistensi implementasi perundangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah menetapkan batas kewenangan desa yang berbeda dengan batas yang ditetapkan oleh BKSDA seperti terjadi Desa Simpang Tungkal. Kurang tegasnya penegakan hukum berakibat pada masih maraknya perambahan hutan dan pencurian hasil hutan. Rata-rata respon mengakui penyebab konflik yaitu pengakuan hak milik oleh masyarakat (52,6%), pencurian hasil hutan (25,5%) dan perambahan hutan (30,6%).
- 3) Tumpang tindih kawasan terjadi antara kawasan SM Dangku dan PT. BSS, PT MBI, PT. PSM PT BTS. Gangguan kawasan hutan berupa pembalakan liar (*Illegal logging*) dan pertambangan tanpa izin (*illegal minning*) masih terus terjadi di Kabupaten Banyuasin maupun Musi Banyuasin. Dari pemantauan yang dilakukan kegiatan pembalakan liar ini berlangsung di kawasan konservasi maupun hutan produksi. Konflik diselesaikan oleh pemuka masyarakat (68,8%) dan sisanya di

mediasi dan diselesaikan oleh pihak berwajib. Kedepan, penyelesaian diperlukan pemetaan konflik agar masalah tersebut dapat dituntaskan.

9) Akses Sumberdaya Lahan Masyarakat

Kawasan hutan adalah areal yang ditetapkan oleh negara untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan baik sebagai fungsi konservasi, lindung, maupun produksi. Yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa di dalam hutan negara terdapat masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Sebagian besar desa-desa Lanskap Sembilang Dangku berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Seringkali masyarakat mengalami hambatan untuk mengakses lahan hutan karena terganjal peraturan legal dan formal perijinan pemanfaatannya. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat untuk mengakses lahan hutan meskipun tidak memiliki izin formal yang disyaratkan

Dari data survei rumah tangga disekitar kawasan hutan 2014, didapatkan data bahwa di Sumatera Selatan 64,4% masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan negara yang memanfaatkan lahan hutan tidak memiliki izin. Untuk itu dibutuhkan mekanisme untuk mendorong kebijakan dan program yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan hutan negara secara proporsional dengan tetap memperhatikan fungsi-fungsi ekologis kawasan.

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan Program Perhutanan Sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Hal ini meningkatkan peluang masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan secara legal. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS). Berikut PIAPS di dalam area Lanskap Sembilang Dangku.

Selain itu, pada Lanskap Sembilang Dangku juga tinggal komunitas Wong Kubu (**Suku Anak Dalam**). Wong Kubu adalah komunitas lokal di Sumatera Selatan dan Jambi yang hidup di dalam dan dari sumberdaya hutan tropis, beberapa pihak menyebut mereka sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kehidupannya sangat tergantung dari sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka. Perikehidupan mereka sangat sederhana, di mata Wong Kubu, hutan adalah segala-galanya; hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Di hutan mereka mencari madu, rotan, jernang dan hasil hutan lainnya. Di Sumatera Selatan **Suku Anak Dalam** tersebar mulai dari Sungai Lalan, Batanghari Leko dan Rawas dan terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu Kubu Lalan, Kubu Tungkal, Kubu Bayat dan Kubu Rawas.

Masyarakat adat seperti **Suku Anak Dalam** seringkali terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan termasuk hak untuk mengakses lahan hutan sebagai sumber penghidupan dan kultur mereka. Berkurangnya luasan lahan hutan alam akibat kegiatan logging dan konversi menjadi areal perkebunan mengasingkan mereka dari ruang hidup alamiahnya. Aktivitas pemenuhan penghidupan mereka dianggap illegal karena ruang hidup mereka

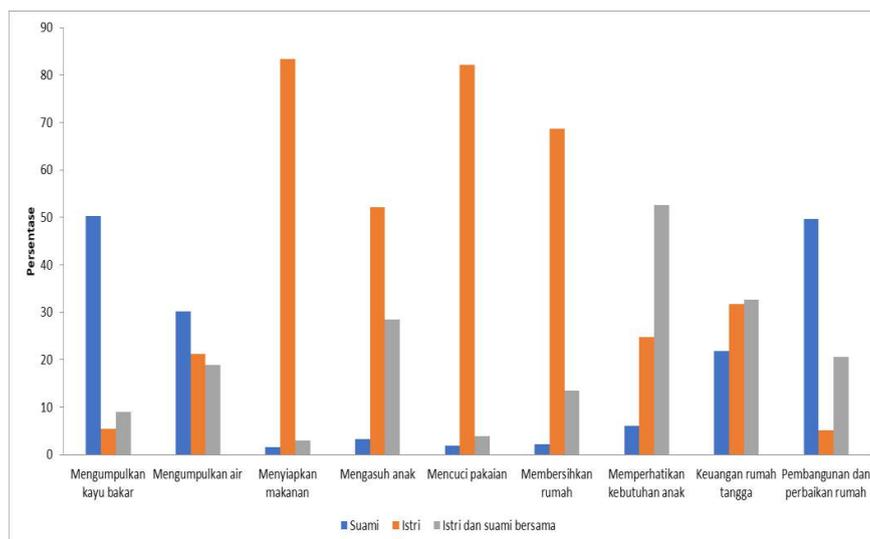
menjadi areal-areal konsesi perkebunan, tambang, dan hutan tanaman. Dibutuhkan dorongan kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan kultural yang dipadukan dengan perspektif hak hidup layak untuk menjamin keberadaan mereka dimasa datang.

10) Peran Gender

Peran perempuan dalam setiap pengambilan keputusan relatif sangat rendah, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan budaya, dimana kepala keluarga didominasi oleh kaum pria. Keadaan ini sangat mengakar dikalangan masyarakat di Lanskap Sembilang Dangku. Implikasinya perempuan “hanya” sebagai *secondary worker* dalam keluarga, kalau demikian pemberdayaan perempuan perlu dilakukan.

Peran perempuan dalam setiap pengambilan keputusan relatif sangat rendah, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan budaya, dimana kepala keluarga didominasi oleh kaum pria. Keadaan ini sangat mengakar di kalangan masyarakat di Lanskap Sembilang Dangku. Implikasinya perempuan “hanya” sebagai *secondary worker* dalam keluarga, kalau demikian dilihat dari aspek penghidupan pemberdayaan perempuan perlu dilakukan.

Disamping itu, keterlibatan Pria dan Wanita dalam aktivitas sehari-hari seperti mengumpulkan kayu bakar, mengambil air, dan perbaikan rumah sebagian besar dilakukan laki-laki dengan persentase masing-masing sebesar 50,3%; 30,1% dan 49,7% selebihnya dilakukan oleh secara bersama-sama. Namun, pada pekerjaan lainnya: menyiapkan makan, mengasuh anak, mencuci pakaian, membersihkan rumah lebih dari 60% dilakukan oleh kaum wanita. Pada aspek memenuhi kebutuhan anak dan keuangan rumah tangga cenderung dilakukan 197 bersama-sama (Gambar 6.8).



Gambar 6.8. Aktivitas yang dilakukan Suami/Istri di Lanskap Sembilang Dangku (sumber: Hasil Olah Data Survei Tim Base Line. ZSL, 2

